

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Juli 2024	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	12 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	10 Juli 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	15 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email : corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar, dan Medan

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2024 (“OBLIGASI SUBORDINASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Juli 2029. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB (*Triple B*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

PENAWARAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN DALAM HAL PERSEROAN DALAM KONDISI BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA ATAU *POINT OF NON-VIABILITY* SESUAI DENGAN PASAL 19 POJK NO.11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO.34/2016 DAN SESUAI DENGAN SEOJK NO.20/2016.

DENGAN ADANYA PENGATURAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF (E) POJK NO.34 MAKA PEMBAYARAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAS POKOK SUBORDINASI DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DITANGGUHKAN DAN DIAKUMULASIKAN ANTAR PERIODE (*CUMULATIVE*) APABILA PEMBAYARAN DIMAKSUD DAPAT MENYEBABKAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) SECARA INDIVIDU ATAU SECARA KONSOLIDASI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 7 POJK NO. 11 DAN POJK NO. 34.

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I tahun 2024 melalui surat No. 015/DIR-EKS/04/24 pada tanggal 5 April 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**") sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("**UUP2SK**"), dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-05591/BEI.PP2/06-2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penerbitan Obligasi Subordinasi ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan Departemen Pengawasan Bank – Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK No. S-58/PB.321/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 PT Bank Victoria International Tbk.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN "OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2024" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK INDONESIA YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	I
RINGKASAN	XIII
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	23
III. PERNYATAAN UTANG	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	50
VI. FAKTOR RISIKO	75
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	80
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	81
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	81
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	84
3. PERIZINAN PERSEROAN	88
4. PERJANJIAN PENTING	101
5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	124
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	151
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN	152
8. SUMBER DAYA MANUSIA	152
9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	159
10. TABEL HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	160
11. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM (DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%).....	161
12. PERKARA HUKUM	162
13. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	176
IX. PERPAJAKAN	203
X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI	205
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	207
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	210
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI	222
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI	227
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	228
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	256

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “ALCO” : Adalah singkatan dari “*Asset Liabilities Committee*”, komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”) yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Aset Tetap” : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
- “Agen Pembayaran” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Anak Perusahaan” atau “Entitas Anak”	:	Berarti perusahaan yang dimiliki Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
“BAE”	:	Berarti Biro Administrasi Efek.
“Bank Kustodian”	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
“BEI” atau “Bursa Efek”	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi Subordinasi”	:	Berarti bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAR”	:	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
“Daftar Pemegang Rekening”	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari Hari Kalender.
“DPS”	:	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.
“Dokumen Emisi”	:	Berarti Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“ <i>Force Majeure</i> ”	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“GWM”	: Berarti Giro Wajib Minimum.
“Hari Bank”	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Harga Pasar Yang Wajar”	: Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Jadwal Emisi”	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPOS (KTUR)”	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPOS atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPOS.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI.
“Kustodian”	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Kreditur Preferen”	: Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan.
“LDR”	: Berarti <i>Loan to Deposit ratio</i> .
“Likuidasi”	: Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Material”	: Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (<i>revenues</i>) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
“Masa Penawaran Umum”	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Subordinasi dalam hal ini PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi).
“Nasabah Penyimpanan”	: Berarti Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
“NPL”	: Berarti Non Performing Loan, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.

- “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan” : Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- “Obligasi Subordinasi” : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “PBI No. 17/11/PBI/2015” : Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional tanggal 25 Juni 2015.
- “Pemegang Obligasi Subordinasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- “Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi.

- “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III” : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk Obligasi Subordinasi sesuai dengan POJK No. 36/POJK.04/2014.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi” : Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
- “Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi” : Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi Subordinasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
- “Penutupan Usaha” : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan Nomor IX.A.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “POJK No. 7/POJK.04/2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/ Atau Sukuk.
- “POJK No. 9/POJK.04/2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.

- “POJK No. 11/POJK.03/2016” : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “POJK No. 15/POJK.04/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 19/POJK.04/2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/POJK.04/2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 27/2022” : Berarti Peraturan OJK Nomor 27/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “POJK No. 30/POJK.04/2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 49/POJK.04/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 55/POJK.04/2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/POJK.04/2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi” : Berarti pengakuan Perseroan atas hutang yang diperoleh sehubungan dengan emisi obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 32 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta.

- “Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti Perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 20 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi” : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 3 April 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 31 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta.
- “Persetujuan Prinsip” : Berarti persetujuan yang diberikan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-05591/BEI.PP2/06-2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang berdasarkan evaluasi dan penilaian BEI atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi BEI.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 April 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 25 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 30 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI” : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-038/OBL/KSEI/0324 tanggal 8 Mei 2024 untuk Obligasi Subordinasi, yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup.

- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 1 tanggal 3 April 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 24 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 No. 1 tanggal 14 Mei 2024 dan telah diubah dengan Addendum III Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 No. 29 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
- “Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Victoria International Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif” : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Persyaratan Obligasi Subordinasi” : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
- “Pokok Obligasi Subordinasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

- “Prospektus” : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, dokumen mana wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
- “Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi Subordinasi, penjaminan emisi Obligasi Subordinasi, tingkat suku bunga Obligasi Subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Prospektus Ringkas” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
- “RUPOS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian perwaliamanatan.
“Tanggal Emisi”	: Berarti tanggal distribusi Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi menetapkan penjatahan Obligasi Subordinasi. Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi”	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dikenal sebagai “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi”, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi kepada Perseroan oleh Penjamin Emisi (<i>in good funds</i>) yang juga merupakan Tanggal Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana didefinisikan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi”	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tanggal 31 Maret 2023.

- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.
- “Wali Amanat” : Berarti PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi Subordinasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. Drs. Richard R. Wiriahardja	5.000	5.000.000.000	50,00
2. Juanetta Hertati Tjandra	5.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0073634 tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 (“**Akta No. 48/2023**”).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 6 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0059070.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0162900.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“**Akta No. 6/2022**”). Berdasarkan Akta No. 6/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum konvensional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- q. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana; dan
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kegiatan Usaha Utama, untuk merealisasi maksud dan tujuan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- k. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan *instrument*/akun pembayaran; layanan remintasi/transfer dana.

C. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal Dasar	: Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp1.584.852.667.700,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.526.677 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	7.010.537.747	701.053.774.700	44,23
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Masyarakat ^{*)}	5.771.577.627	577.157.762.700	36,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.526.677	1.584.852.667.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.151.473.323	2.515.147.332.300	

^{*)} Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik PT Victoria Investama Tbk dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yakni sejumlah 158.482.348 saham.

3. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi	: Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan III	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi	: Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Tenor	: 5 (lima) Tahun
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
Tingkat Bunga	: 10,75%
Peringkat Efek	: <i>id</i> BBB (<i>Triple B</i>) dari PEFINDO

Penggunaan Dana	:	Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 (“ Obligasi Subordinasi ”) ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.
Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (<i>buy back</i>)	:	Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (<i>buy back</i>) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
Jaminan	:	Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (<i>covenants</i>)	:	Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab I Prospektus ini.
Hasil Pemeringkatan	:	Berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) No.RC-368/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 untuk periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 adalah:
		^{id}BBB (<i>Triple B</i>)
Sifat-sifat Khusus	:	Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) Perseroan oleh OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang modal pelengkap untuk bank umum yang pada saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 (“ POJK No. 11/2016 ”) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 (“ POJK No. 27/2022 ”) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Subordinasi**”) ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.

5. Faktor Risiko

1. Risiko Usaha Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kredit (*Credit Risk*)

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material (Yang Langsung Maupun Tidak Langsung Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan)

- Risiko Pasar (*Market Risk*)
- Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
- Risiko Operasional (*Operational Risk*)
- Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)
- Risiko Hukum (*Legal Risk*)
- Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)
- Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- Risiko Kebijakan
- Risiko Negara (*Country Risk*)
- Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
JUMLAH ASET	29.624.240.421	25.932.001.125
JUMLAH LIABILITAS	25.799.455.411	22.231.537.644
JUMLAH EKUITAS	3.824.785.010	3.700.463.481
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.624.240.421	25.932.001.125

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	1.836.391.130	1.635.522.726
Pendapatan syariah	-	69.495.685
	1.836.391.130	1.705.018.411

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
Beban bunga dan syariah	(1.257.661.775)	(971.637.742)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	578.729.355	733.380.669
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan dari investasi reksadana	13.292.046	5.133.142
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	35.431.712	19.273.193
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	15.679.319	7.143.802
Lain-lain – bersih	188.962.184	348.653.086
Jumlah pendapatan operasional lainnya	253.365.261	380.203.223
Beban operasional lainnya		
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(242.509.120)	(223.959.331)
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	54.964.162	(47.616.890)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(31.877.279)	(2.980.457)
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	3.930.662	(1.263.942)
Beban umum dan administrasi	(158.899.846)	(148.563.568)
Beban tenaga kerja	(157.155.510)	(163.030.989)
Lain-lain	(126.476.550)	(112.102.276)
Jumlah beban operasional lainnya	(658.023.481)	(699.517.453)
LABA OPERASIONAL	174.071.135	414.066.439
Beban Non-Operasional – Bersih	(44.534.907)	(57.135.612)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	129.536.228	356.930.827
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(27.719.887)	(130.757.374)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	101.816.341	226.173.453

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.894.092	(84.273.995)
Pajak tangguhan terkait	(6.136.700)	15.958.836
	<u>21.757.392</u>	<u>(68.315.159)</u>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.394.639	(2.230.737)
Pajak tangguhan terkait	(746.821)	307.249
	<u>2.647.818</u>	<u>(1.923.488)</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	24.405.210	(70.238.647)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	126.221.551	155.934.806
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	101.816.341	226.173.453
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>101.816.341</u>	<u>226.173.453</u>
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	126.221.551	155.934.806
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>126.221.551</u>	<u>155.934.806</u>
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Dasar (Rupiah penuh)	6,42	19,17
Dilusian (Rupiah penuh)	6,42	19,17

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
ARUS KAS DARI		
 AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	1.866.455.131	1.585.072.007
Pembayaran bunga dan syariah	(1.241.689.538)	(936.209.912)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	253.716.401	363.010.679
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	385.438.160	14.100.990
Pembayaran beban umum dan administrasi	(135.297.898)	(118.616.627)
Pembayaran beban tenaga kerja	(161.897.333)	(132.899.824)
Pembayaran beban operasional lainnya	(128.942.847)	(62.433.855)
Pendapatan (pembayaran) non-operasional lainnya	3.870.773	(28.897.837)
Pembayaran pajak penghasilan	(16.049.378)	-
	<u>825.603.471</u>	<u>683.125.621</u>
Kenaikan dalam aset operasi:		
Pinjaman yang diberikan	(3.012.792.297)	(1.435.674.433)
Beban dibayar dimuka	(5.750.347)	(12.026.402)
Aset hak guna	(21.754.778)	(26.880.935)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	(148.717.805)
Aset lain-lain	-	(20.283.799)
Penurunan dalam aset operasi:		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	202.699.821	-
Penyertaan saham	26.173.818	147.361.993
Aset lain-lain	9.055.375	-
Kenaikan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan nasabah	3.057.342.854	1.299.895.991
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	402.401.570	240.865.160
Utang akseptasi	11.959.811	-
Utang pajak lainnya	14.518.346	3.224.742
Simpanan dari bank lain	-	326.161.686
Penurunan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan dari bank lain	(230.149.261)	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>1.279.308.383</u>	<u>1.057.051.819</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
 INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	45.395.525	17.287.045
Pembelian aset tetap	(16.195.800)	(7.526.642)
Pembelian aset tak berwujud	(7.289.250)	(1.879.808)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Pembelian/(penjualan) efek-efek	(1.435.185.586)	(240.818.457)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.413.275.111)	(232.937.862)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan modal disetor	(1.900.021)	520.909.143
Penerbitan obligasi	500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	-	(50.000.000)
Pelunasan jatuh tempo obligasi	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(10.757.017)	(10.958.755)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	287.342.962	159.950.388
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	153.376.234	984.064.345
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.645.187.929	1.886.562.456
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(225.438.872)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.798.564.163	2.645.187.929
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	92.820.864	51.897.124
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.506.565.848
Giro pada bank lain	296.298.919	228.384.427
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dibawah 3 bulan	916.367.530	858.340.530
Jumlah kas dan setara kas	2.798.564.163	2.645.187.929

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	-21,09%	58,17%
Pendapatan operasional lainnya	-33,36%	-16,30%
Laba operasional	-57,96%	576,02%
Laba bersih tahun berjalan	-54,98%	289,96%
Jumlah aset	14,24%	3,95%
Jumlah liabilitas	16,05%	1,36%
Jumlah ekuitas	3,36%	22,76%
Permodalan (Perseroan)		
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ¹⁾	20,69%	22,59%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar ¹⁾	19,95%	21,97%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00%	8,00%
Aset Produktif		
Aset tetap terhadap modal ²⁾	11,08%	12,15%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif ³⁾	3,91%	5,89%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁴⁾	2,79%	3,19%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	2,19%	2,49%
Pemenuhan CKPN aset produktif ⁶⁾	165,67%	214,37%
Non Performing Loan (NPL) Gross ⁷⁾	3,99%	4,23%
NPL Net ⁸⁾	3,24%	3,42%
Solvabilitas		
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁹⁾	87,09%	85,73%
Debt to Equity Ratio (DER) ¹⁰⁾	674,53%	600,78%
Profitabilitas		
Return on Asset (ROA) ¹¹⁾	0,48%	1,47%
Return on Equity (ROE) ¹²⁾	3,12%	9,48%
Net Interest Margin (NIM) ¹³⁾	2,58%	3,52%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁴⁾	91,67%	79,44%
Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga ¹⁵⁾	17,59%	32,34%
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁶⁾	83,06%	81,69%
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁷⁾	81,93%	81,08%
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁸⁾		
- GWM primer - rupiah	7,32%	7,69%
- GWM Sekunder - rupiah	23,73%	22,82%
- GWM - Valuta	4,05%	4,05%
- Posisi devisa neto secara keseluruhan ¹⁹⁾	0,39%	0,12%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif
- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 11) Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total aset konsolidasian kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 15) Jumlah laba (rugi) bersih dibagi jumlah pendapatan bunga bersih
- 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

7. Strategi Usaha Perseroan

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah, meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah sekaligus meningkatkan kinerja Bank. Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang diuraikan sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Penghimpunan DPK

Dalam memperkuat proposisi produk DPK, Perseroan telah menetapkan beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. *Internet Banking dan Mobile Banking (IBMB)* baru dengan fitur yang menarik dan beberapa produk digital didalamnya;
- b. Digital deposito;
- c. Digital operations;
- d. Tema digitalisasi yang cepat menghadapi perubahan dan memberikan layanan/produk yang aman, cepat, mudah diraih, dan nyaman;
- e. Akan diperkenalkan produk bank persepsi, *cash management*, dan *transactional banking* guna memberikan daya tarik pada nasabah-nasabah korporasi untuk berbisnis dengan Bank;
- f. Beberapa produk dengan *fee based* (Bank Persepsi, RDN); dan
- g. Pembayaran menggunakan QR nasional.

Strategi Pembiayaan Kredit

Segmentasi bisnis kredit yang sebelumnya banyak terfokus pada korporasi akan bergeser pada sektor lainnya. Beberapa perubahan yang akan terjadi pada sektor usaha kredit diuraikan sebagai berikut :

- a. Segmentasi bisnis SME/komersial dan konsumen akan naik signifikan menjadi berkisar di angka 25% - 30% untuk SME/komersial dan 10-15% untuk bisnis konsumen;
- b. Sektor usaha tidak akan didominasi oleh sektor properti;
- c. *Monitoring pipeline* dan bisnis akan dilakukan secara rutin dan akan dibantu dikembangkan melalui *pipeline monitoring system*;
- d. Pengenalan produk dan layanan baru pada sektor usaha kredit;
- e. Penerapan *circle leader* model untuk *monitoring* dan mencari *leads* bisnis; serta
- f. Waktu proses kredit harus dipercepat, yang rata-rata sebelumnya 2 (dua) bulan untuk TTY proses (*Time to Yes*), akan menjadi kurang dari 1 (satu) bulan.

Aspek Operasional dan Teknologi

Secara umum, tema strategi terkait dengan aspek operasional dan teknologi yang akan diterapkan oleh Perseroan ke depan adalah menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang SQEW (*Safe, Quick, Easy, dan Warm*) yang berbasis kepada orientasi bisnis yang berkelanjutan. Adapun poin-poin yang akan diterapkan oleh Bank kedepan sebagai berikut :

- a. Jalur efektifitas proses operasional dari hulu ke hilir dievaluasi dan diperbaiki;
- b. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi per kreditan, operational, dan teknologi informasi;
- c. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat di kirim secara tepat waktu, *zero defect*, dan memberikan kepuasan kepada nasabah;

- d. Data corebanking dapat diolah dan didistribusikan kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif;
- e. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail banking sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing;
- f. Peningkatan layanan dan produk perbankan dengan bentuk *digital banking*; dan
- g. Peningkatan keamanan dilakukan dengan *monitoring tools* atas transaksi perbankan dengan aplikasi SPLUNK yang berbasis SIEM.

STRATEGI PEMASARAN

Perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-produk Bank melalui pengembangan produk dan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Perseroan di industri perbankan Indonesia. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan program integrated marketing yang mencakup *marketing collateral*, *merchandise*, jaringan cabang, situs perusahaan, media sosial, dan *marketing channel* lainnya serta *tactical campaign* melalui *event/exhibition/seminar*, *office to office*, promo eksternal, dan internal;
- b. Fokus kepada produk yang telah dimiliki, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menambah daya saing seperti menjalankan program launching untuk *internet banking* dan *mobile banking* serta *internet banking bussiness* untuk mendukung produk yang ada;
- c. Memfasilitasi program media untuk meningkatkan *news value* dan interaksi Bank Victoria di media massa maupun ranah publik melalui media *briefing*, media *luncheon*, *press conference*, media *sponsorship*, media *hampers*, *mascot* dan *merchandise (gimmicks)*;
- d. Menggelar acara *community banking* di wilayah operasional bank melalui program Ayo ke Bank sebagai bagian dari literasi keuangan dan memasuki market pelajar, terutama di tingkat Sekolah Dasar;
- e. Melakukan *competitive analysis* produk dan layanan peer group serta bank-bank acuan dengan tujuan memantau perkembangan produk dan layanan yang ada di pasaran; serta
- f. Meningkatkan portofolio kredit khususnya kepada nasabah UKM dan Komersial.

Pemasaran produk dilakukan melalui Kantor Cabang dan sekitarnya yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Bogor, Medan, Manado, Bali dan Surabaya.

8. Prospek Usaha Perseroan

Kondisi Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy).

Perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Perseroan cukup optimis dengan prospek ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat pertumbuhan kredit akan terus meningkat. Meski demikian, tantangan yang akan dihadapi oleh industri perbankan masih tetap tinggi.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Survei Perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 sebesar 96,1%, lebih tinggi dari 95,4% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi. Peningkatan terindikasi terjadi pada kredit modal kerja (SBT 93,5%) dan kredit investasi (SBT 85,0%). Sementara itu, kredit konsumsi (SBT 79,3%) terindikasi tumbuh positif didorong oleh Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang terindikasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kredit multiguna, kartu kredit, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) terindikasi tumbuh terbatas.

Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru tertinggi terutama terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT 85,9%), diikuti oleh sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (SBT 84,8%), serta sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (SBT 80,2%).

Dari gambaran di atas, pertumbuhan kredit yang positif itu tentu sangat menggembirakan. Namun, sektor perbankan tetap harus menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang *prudent*.

Faktor kondisi global, termasuk volatilitas harga komoditas dan bahan baku serta biaya transportasi yang masih tinggi berpotensi membuat ekspansi pelaku bisnis tersendat.

Strategi Pengembangan Bisnis ke Depan

Strategi pengembangan bisnis disusun dan mengacu pada arah kebijakan Perseroan serta sejalan dengan penetapan tema Rencana Bisnis Perseroan 2022-2024 untuk “*Innovation and Governance for Higher Level Convenience Banking*”, maka Perseroan menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1. Strategi Pendanaan dan Pengembangan

Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah serta menambah nasabah baru dengan target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan optimal. Beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi akan dilakukan sebagai berikut:

- i. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam revamping terhadap internet banking dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan fitur-fitur dan produk-produk digital yang unggul dan bersaing yang dilengkapi juga dengan pembukaan rekening secara digital melalui teknologi *biometric*, sehingga dapat meningkatkan minat dan ketertarikan nasabah baru serta nasabah existing untuk menempatkan dananya dan bertransaksi melalui Perseroan;
- ii. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam *revamping* terhadap internet banking business yang didukung dengan fitur-fitur finansial dan non finansial yang juga dilengkapi dengan cash management untuk memperlengkapi kebutuhan transaksi keuangan dari perusahaan;

- iii. Meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan pengembangan *digital operations*, yaitu melakukan aktivitas transaksi non tunai dengan menggunakan teknologi video *banking*, sehingga interaksi bertransaksi dapat dilakukan secara virtual namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keamanan dalam bertransaksi;
- iv. Melakukan kerjasama dengan kementerian, bank, lembaga keuangan non bank, *E-commerce*, *online travel agent*, *peer to peer lending* dan platform *business (omni channel)* untuk meningkatkan jumlah nasabah dan frekuensi transaksi;
- v. Membuat beberapa program seperti akuisisi nasabah baru melalui program *CASA plus gimmick* hadiah, program *CASA cashback* atau bunga yang menarik, *loyalty* program untuk meningkatkan dana *CASA*;
- vi. Memperkenalkan produk Bank untuk penetrasi ke institusi keuangan non bank untuk meningkatkan dana murah serta diharapkan bisa masuk ke dalam pangsa pasar ritel yang lebih luas lagi; dan
- vii. Melakukan promosi-promosi melalui media sosial ataupun membuat kegiatan atau promosi untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan produk-produk Bank Victoria kepada masyarakat.

2. Strategi Perkreditan

Strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*). Beberapa strategi bisnis yang akan dilakukan pada sektor usaha kredit sebagai berikut:

- i. Melakukan diversifikasi pada portfolio kredit pada segmen korporasi sebesar 30%, segmen SME sebesar 30%, segmen komersil sebesar 30% dan segmen konsumen sebesar 10%;
- ii. Melakukan kredit *channeling* dengan menjalin kerjasama BPR dan Koperasi guna meningkatkan portofolio kredit dan potensi *fee based income*;
- iii. Memperkenalkan ekosistem *digital lending* untuk memberikan informasi sumber dana debitur kepada Bank dan kecepatan proses kredit Bank kepada debitur;
- iv. Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit melalui monitoring debitur dan pelaksanaan *early warning*;
- v. Meningkatkan penyelesaian kredit yang dihapusbuku dan penjualan agunan yang diambilalih termasuk di antaranya melalui penjualan jaminan dan AYDA di situs jaringan (*website*); dan
- vi. Mengoptimalkan program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas keahlian tenaga penjualan.

Ketergantungan terhadap pelanggan dan kontrak pemerintah

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan tertentu.

Strategi Pengembangan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki strategi pengembangan usaha sebagai berikut:

- 1) Strategi Pendanaan dan Pengembangan
- 2) Strategi Perkreditan
- 3) Strategi bidang Operasional dan Teknologi Sistem Informasi
- 4) Strategi Pengembangan SDM

Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan senantiasa dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi produk dan layanan melalui pendekatan digital dengan proses yang lebih cepat guna memberikan kenyamanan, keamanan nasabah dan/atau calon nasabah. Disisi lain, Bank dapat meningkatkan fungsi monitoring dan upaya mitigasi risiko yang melekat pada layanan dan produk yang dipasarkan serta dapat meningkatkan *financial value* Bank.
2. Inovasi produk dan layanan yang diperkenalkan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang dapat memberikan value bagi stakeholder.

9. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Bunga Tetap Tahunan	Jumlah Pokok
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	9 Maret 2023	9 Maret 2026	9,25%	Rp300.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B	9 Maret 2023	9 Maret 2028	10,25%	Rp200.000.000.000,-
Total Obligasi Terutang				Rp500.000.000.000,-

Obligasi Subordinasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Bunga Tetap Tahunan	Jumlah Pokok
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2017	11 Juli 2024	11,00%	Rp50.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	5 Juni 2018	5 Juni 2025	11,00%	Rp350.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	28 Juni 2019	28 Juni 2026	11,75%	Rp250.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	8 November 2019	8 November 2026	11,25%	Rp150.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020	1 April 2020	1 April 2027	11,25%	Rp60.000.000.000,-
Total Obligasi Subordinasi Terutang				Rp860.000.000.000,-

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III")**

**Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Juli 2029. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:

**^{id}BBB
(Triple B)**

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 7278 1800
Fax: (021) 7278 1900
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN DALAM HAL PERSEROAN DALAM KONDISI BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA ATAU *POINT OF NON-VIABILITY* SESUAI DENGAN PASAL 19 POJK NO.11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO.34/2016 DAN SESUAI DENGAN SEOJK NO.20/2016.

DENGAN ADANYA PENGATURAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF (E) POJK NO.34 MAKA PEMBAYARAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAS POKOK SUBORDINASI DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DITANGGUHKAN DAN DIAKUMULASIKAN ANTAR PERIODE (*CUMULATIVE*) APABILA PEMBAYARAN DIMAKSUD DAPAT MENYEBABKAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) SECARA INDIVIDU ATAU SECARA KONSOLIDASI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 7 POJK NO. 11 DAN POJK NO. 34.

1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun; di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 4 Juni 1999;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 Juni 2024, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Laporan Praktisi Independen Atas Perikatan Asurans Terbatas No. 00243/2.1032/JL.0/07/0242-3/1/VI/2024 bertanggal 24 Juni 2024 yang diterbitkan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang menyatakan kesimpulan atas surat pernyataan manajemen tersebut. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor;
- iv. Memiliki peringkat termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkat idBBB (*Triple B*) untuk Obligasi Subordinasi dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

2. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Subordinasi**”).

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 12 Juli 2029.

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Mata Uang Obligasi Subordinasi

Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-1	: 12 Oktober 2024	Bunga ke-11	: 12 April 2027
Bunga ke-2	: 12 Januari 2025	Bunga ke-12	: 12 Juli 2027
Bunga ke-3	: 12 April 2025	Bunga ke-13	: 12 Oktober 2027
Bunga ke-4	: 12 Juli 2025	Bunga ke-14	: 12 Januari 2028
Bunga ke-5	: 12 Oktober 2025	Bunga ke-15	: 12 April 2028
Bunga ke-6	: 12 Januari 2026	Bunga ke-16	: 12 Juli 2028
Bunga ke-7	: 12 April 2026	Bunga ke-17	: 12 Oktober 2028
Bunga ke-8	: 12 Juli 2026	Bunga ke-18	: 12 Januari 2029
Bunga ke-9	: 12 Oktober 2026	Bunga ke-19	: 12 April 2029
Bunga ke-10	: 12 Januari 2027	Bunga ke-20	: 12 Juli 2029

Tata Cara Pembayaran Bunga

1. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
2. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
3. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
4. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Perseroan tidak melakukan pembelian kembali Obligasi Subordinasi ini.

Jaminan

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua jumlah terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama di luar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/ ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;

- d. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aset tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- e. Melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasinya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan ter Afiliasinya dalam transaksi yang lazim;
- f. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan audited terakhir Perseroan kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan, tanggapan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Emiten mengajukan permohonan persetujuan tersebut. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Emiten tidak menerima persetujuan, tanggapan lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- b. Menyetorkan dana yang sudah tersedia (*in good funds*) untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan sampai dengan efektif dilakukannya pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi; Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK/POJK.03/2016 juncto SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor: 11/POJK/POJK.03/2016 juncto SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Emiten selaku bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "cukup baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK dan/atau Bank Indonesia;
- d. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;

- e. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Wali Amanat memerlukan penjelasan yang didukung dengan data-data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut maka data-data tersebut diserahkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan penjelasan dari Wali Amanat;
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh hari) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membuat pinjaman baru (dengan bunga) yang dilakukan oleh Perseroan kecuali dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan ini;
 - ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi ini;
 - iii. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan akan disampaikan penyerahan akta-akta keputusan tersebut setelah diterbitkan oleh Notaris;
 - iv. Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- g. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan/tembusan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - iv. Untuk penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliananatan;
- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan kepada Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- i. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan;
- j. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- k. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal;

- i. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Subordinasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Subordinasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Subordinasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir q angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.
- n. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Subordinasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi Subordinasi, dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.

- o. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan dinyatakan bubar dan/atau berinisiatif membubarkan diri dan/atau bubar karena sebab lain (termasuk penggabungan atau konsolidasi yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum kecuali apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf c Perjanjian Perwalianamanatan).
- p. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- q. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau dilakukannya tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- r. Menjamin dan memastikan bahwa hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berakibat negatif/ mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- s. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-368/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III PT Bank Victoria International Tbk Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}BBB
(Triple B)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan hak para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum Dalam Pasal 5 ayat 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPOS dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPOS.

5. RUPOS dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (“RUPOS”)

Untuk menyelenggarakan RUPOS, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

- a). RUPOS dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- b). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir a) poin a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPOS. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta.
- c). Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPOS, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
- d). Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS.
- a. Pengumuman RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPOS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPOS, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPOS kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPOS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan RUPOS harus dengan tegas memuat rencana RUPOS dan mengungkapkan informasi antara lain:
 1. Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPOS;
 2. Agenda RUPOS;
 3. Pihak yang mengajukan usulan RUPOS;
 4. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPOS; dan
 5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPOS.
 - e. RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPOS sebelumnya.
- e). Tata cara RUPOS:
- a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPOS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPOS:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - d. RUPOS dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPOS dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPOS dan bahan-bahan RUPOS serta menunjuk Notaris yang harus untuk membuat berita acara RUPOS.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut harus mempersiapkan acara RUPOS dan materi RUPOS serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.

- h. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS yang diterbitkan oleh, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- i. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- j. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS.
- k. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- l. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- m. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPOS.
- n. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPOS menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- o. Penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- p. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS Keputusan RUPOS mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Utang" dengan menambahkan Pengakuan Utang yang baru.
- q. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPOS tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- r. Apabila RUPOS yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Emiten menolak untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPOS atau tanggal lain yang diputuskan RUPOS (jika RUPOS memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Emiten tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPOS. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan Write Down tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwalianan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPOS.

- s. Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-- Selain RUPOS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, Emiten dapat melaksanakan RUPOS secara elektronik apabila telah disediakan e-RUPO oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.
- t. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, serta Wali Amanat mewakili untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- a. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwalianan sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Kelalaian Perseroan poin 4 dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi poin 18, dengan tidak ada kecualinya.
- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau Disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi poin 18.C, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang hak memperoleh pembayaran kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

c. Dalam proses Likuidasi:

1. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
 - a) Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan Kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
2. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;
3. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:
 - a) Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
 - 1) penegasan tertulis dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus hartabenda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut yang menyatakan/menega akan bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, telah dibayar lunas; atau
 - 2) Perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat, dengan melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para kreditur Hutang Senior telah dibayar lunas.
 - b) Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam poin 3 huruf a angka 1) tersebut di atas atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam poin 3 huruf a angka 2) tersebut di atas dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi menolak atau tidak berkenan menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening Bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut ke dalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir poin 3 huruf a angka 1) tersebut di atas atau butir 3 huruf a angka 2) tersebut di atas.
4. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi poin.18.D Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan hutang atau dengan cara lain) pembayaran dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda, atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat, atau curator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi Status Dalam Proses Likuidasi bpoin 1 dan 2 tersebut di atas.

5. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan, dan Kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para Pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi, dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan jumlah terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
 1. Tanpa mengurangi sifat umum dari Ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
 2. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 (dua ribu empat) tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat-perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan Tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2016 sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi.
- f. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 2. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Emiten melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down* dengan memperhatikan SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perintah dari OJK tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah OJK tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan penjelasan Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
 3. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Emiten wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi dengan tembusan kepada Wali Amanat mengenai adanya perintah dari OJK dan rencana pelaksanaan perintah dari OJK tersebut.

4. Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
5. Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan *Write Down* dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi subordinasi) yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
6. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan.
7. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
- g. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan Untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down*, maka ketentuan dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi bagian Status Obligasi Subordinasi huruf b dan huruf c tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi bagian Status Obligasi Subordinasi huruf f.
- h. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam Kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Obligasi Subordinasi bagian Status Obligasi Subordinasi huruf f, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain manapun atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berupa Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggungkannya dan diakumulaskannya pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 *juncto* SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016; atau
- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a); atau

- c. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian-hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).

Dalam hal terjadi kondisi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 2) Huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - 3) Huruf b (selain pelanggaran pada Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*) pada keterangan "Perseroan Berkewajiban Untuk" huruf o, p, q, r, dan s tersebut di atas) dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPOS menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jika RUPOS memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan maka Obligasi Subordinasi menjadi jatuh waktu dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPOS itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan Emiten belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, Wali Amanat wajib segera melaksanakan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- 4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPOS bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) Perseroan oleh OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang modal pelengkap untuk bank umum yang pada saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 (“**POJK No. 11/2016**”) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 (“**POJK No. 27/2022**”) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, maka berlaku ketentuan atas Obligasi Subordinasi sebagai berikut:

Sesuai dengan POJK No. 11/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 27/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap (“**SE OJK No. 20/2016**”), dalam hal terjadi kondisi dimana OJK menetapkan Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) maka Perseroan akan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/2016.

- i. *Write Down* terhadap Modal Pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
- ii. Kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) Modal Pelengkap (Tier 2) harus dilakukan *Write Down* yaitu dalam hal:
 - (a) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan Entitas Anak; dan/atau
 - (b) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya, dan
 - (c) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan *Write Down*.

Dalam hal terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, OJK berhak dan berwenang untuk memerintahkan Perseroan melakukan *Write Down* dan Perseroan akan melakukan *Write Down* yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa menyelenggarakan dan tanpa memerlukan persetujuan RUPOS.

Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa untuk sesegera mungkin setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dan perusahaan pemeringkat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi Subordinasi.

Termasuk dalam mekanisme *Write Down* adalah pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

Dalam hal Perseroan melakukan *Write Down*, maka jumlah kewajiban yang dikurangi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi yang dikurangi sebagian atau seluruhnya tersebut akan hilang dan Pemegang Obligasi Subordinasi menjadi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran apapun atas Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi atau jumlah lainnya atas setiap Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan sejak tanggal dilakukannya *Write Down*, akan menghilangkan hak dari para Pemegang Obligasi Subordinasi dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down*, dan pembayaran rutin lainnya terkait dengan Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down*, dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang mungkin dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut.

Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwalianamanatan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang akan diberlakukan di kemudian hari, maka Perseroan dan Wali Amanat menyetujui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut akan langsung berlaku bagi penentuan kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dalam Perjanjian Perwalianamanatan, walaupun Perjanjian Perwalianamanatan belum diubah dan akan sesegera mungkin, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau persetujuan RUPOS, melakukan perubahan pada perjanjian Perwalianamanatan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit.

Analisa Dasar Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 ("**Obligasi Subordinasi**") ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.

Sesuai dengan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrument agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional tier-1) dan modal pelengkap (tier-2) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*Point of Non Viability*).

Fitur konversi saham berarti instrumen Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham Bank Perseroan. Adanya jaminan ini menyebabkan instrument Obligasi Subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur *Write Down* dengan kompensasi saham.

3. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

4. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwalianan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Emiten dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Perseroan:

PT Bank Victoria International Tbk

Gedung Graha BIP, Lantai 10

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 12930, Indonesia

Telepon: (021) 522-8888

Faksimili: (021) 522-8777

Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Wali Amanat:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16

Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790, Indonesia

Telepon : (021) 7917-5000

Faksimili : (021) 799-0720

Email : waliamanat@bankmega.com

Situs Internet: www.bankmega.com

5. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Bunga Tetap Tahunan	Jumlah Pokok
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	9 Maret 2023	9 Maret 2026	9,25%	Rp300.000.000.000,-
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B	9 Maret 2023	9 Maret 2028	10,25%	Rp200.000.000.000,-
Total Obligasi Terutang				Rp500.000.000.000,-

Obligasi Subordinasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Bunga Tetap Tahunan	Jumlah Pokok
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2017	11 Juli 2024	11,00%	Rp50.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	5 Juni 2018	5 Juni 2025	11,00%	Rp350.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	28 Juni 2019	28 Juni 2026	11,75%	Rp250.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	8 November 2019	8 November 2026	11,25%	Rp150.000.000.000,-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020	1 April 2020	1 April 2027	11,25%	Rp60.000.000.000,-
Total Obligasi Subordinasi Terutang				Rp860.000.000.000,-

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Subordinasi**”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif dari dana internal Perseroan.

Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/2016 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 27/2022.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan merupakan transaksi yang termasuk dalam transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi ini mengandung benturan kepentingan, dimana dalam hal transaksi ini akan memiliki perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan yang digunakan pada saat tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal nilai transaksi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Perseroan telah sama atau melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi Subordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 (“**POJK No.30/2015**”).

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPOS, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPOS, serta hasil RUPOS yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPOS sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 1,384% (satu koma tiga delapan empat persen) dari nilai emisi Obligasi Subordinasi yang meliputi:

- Biaya Pernyataan Pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan adalah 0,050% (nol koma nol lima nol persen);
- Biaya jasa Penjaminan Emisi adalah 1,000% (satu koma nol nol nol persen) dari total nilai emisi yang terdiri dari:
 - 0,800% (nol koma delapan nol nol persen) Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*)
 - 0,100% (nol koma satu nol nol persen) Jasa Penjualan (*Selling Fee*)
 - 0,100% (nol koma satu nol nol persen) Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*);

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah 0,198% (nol koma satu sembilan delapan persen) yang terdiri dari:
 - 0,070% (nol koma nol tujuh nol persen) Jasa Konsultan Hukum,
 - 0,114% (nol koma satu satu empat persen) Jasa Akuntan Publik,
 - 0,014% (nol koma nol satu empat persen) Notaris;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah 0,087% (nol koma nol delapan tujuh persen), yang terdiri dari:
 - 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) Wali Amanat,
 - 0,070% (nol koma nol tujuh nol persen) Jasa Pemeringkat Efek;
- Biaya Pencatatan adalah 0,030% (nol koma nol tiga nol persen), yang terdiri dari:
 - 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) di KSEI,
 - 0,027% (nol koma nol dua tujuh persen) di BEI;
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, dan audit penjatahan) adalah 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen).

Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan melalui surat No. 030/DIR-EKS/07/23 tanggal 17 Juli 2023 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B serta Laporan Pelaksanaan Waran Seri VII.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Desember 2023 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp25.799.455.411,- ribu dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah) 31 Desember 2023
LIABILITAS	
Simpanan nasabah	
- Pihak berelasi	1.397.970.027
- Pihak ketiga	21.031.210.465
	22.429.180.492
Simpanan dari bank lain	
- Pihak berelasi	478.732
- Pihak ketiga	1.104.324.627
	1.104.803.359
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	643.266.730
Efek-efek yang diterbitkan	1.347.639.528
Utang Akseptasi	11.959.811
Utang pajak	
- Pajak penghasilan badan	-
- Pajak lainnya	29.310.442
	29.310.442
Liabilitas imbalan kerja karyawan	39.837.511
Akrual dan liabilitas lain-lain	193.457.538
JUMLAH LIABILITAS	25.799.455.411

LIABILITAS

1. SIMPANAN NASABAH

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.429.180.492,- ribu terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	
Negotiable Certificate Deposits	440.000.000
Dikurangi:	
Diskonto	(42.800.790)
Beban emisi yang belum diamortisasi	(2.890.637)
Deposito berjangka	16.044.264.144
Tabungan	2.881.781.337
Giro	2.417.884.361
Sub jumlah	21.738.238.415
Mata uang asing	
Deposito berjangka	624.320.546
Giro	66.621.531
Sub jumlah	690.942.077
Jumlah	22.429.180.492

Simpanan nasabah dalam mata uang asing adalah Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Euro Eropa, dan Yen Jepang.

Giro

- Berdasarkan pihak lawan

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak berelasi	652.841.415
Pihak ketiga	1.831.664.477
Jumlah	2.484.505.892

- Berdasarkan mata uang

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	2.417.884.361
Dolar Amerika	60.590.713
Yen Jepang	2.576.994
Dolar Singapura	1.902.282
Euro Eropa	1.551.542
Jumlah	2.484.505.892

Giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp320.546.300,- ribu.

Tabungan

- Berdasarkan pihak lawan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	
Pihak ketiga	2.853.784.424
Pihak berelasi	27.996.913
Jumlah	2.881.781.337

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp149.150.000,- ribu.

Deposito berjangka

- Berdasarkan pihak lawan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	16.049.699.818
Pihak berelasi	618.884.872
Jumlah	16.668.584.690

- Berdasarkan mata uang

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	16.044.264.144
Dolar Amerika	624.320.546
Jumlah	16.668.584.690

- Berdasarkan periode

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
1 bulan	7.144.058.086
3 bulan	4.512.705.040
6 bulan	3.608.059.929
12 bulan	1.403.761.635
Jumlah	16.668.584.690

- Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari 1 bulan	8.757.247.243
1 sampai dengan 3 bulan	4.371.648.337
3 sampai dengan 6 bulan	2.680.083.163
6 sampai dengan 12 bulan	859.605.947
Jumlah	16.668.584.690

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.719.715.512,- ribu.

- *Negotiable Certificate Deposits*

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	329.600.000
Dikurangi:	
Diskonto	(31.372.904)
Beban emisi yang belum diamortisasi	(2.165.350)
Sub jumlah	296.061.746
Pihak berelasi	
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	110.400.000
Dikurangi:	
Diskonto	(11.427.886)
Beban emisi yang belum diamortisasi	(725.287)
Sub jumlah	98.246.827
Jumlah	394.308.573

Perseroan melakukan penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) pada tanggal 5 September 2023 sebesar Rp440.000.000,- ribu yang terbagi dua seri, yaitu seri A dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- ribu dengan suku bunga 6,5% dan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2024 dan seri B dengan nilai sebesar Rp390.000.000,- ribu dengan suku bunga 7% dan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2025.

Perseroan melakukan penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) pada tanggal 1 September 2022 sebesar Rp220.000.000,- ribu yang terbagi dua seri, yaitu seri A dengan nilai sebesar Rp60.000.000,- ribu dengan suku bunga 6% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2023 dan seri B dengan nilai sebesar Rp160.000.000,- ribu dengan suku bunga 6,5% dan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023.

Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp116.900.000,- ribu.

2. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Semua simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.104.803.359,- ribu terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2023
<i>Call money</i>	792.000.000
Giro	219.401.707
Deposito berjangka	49.531.350
Tabungan	41.963.642
<i>Deposit on call</i>	1.906.660
Jumlah	1.104.803.359

Call money

- Berdasarkan pihak lawan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	220.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	200.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	150.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	100.000.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	100.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	22.000.000
Jumlah	792.000.000

- Berdasarkan periode

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari 1 bulan	792.000.000
Jumlah	792.000.000

Deposito berjangka

- Berdasarkan pihak lawan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	49.531.350
Jumlah	49.531.350

- Berdasarkan periode

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
1 bulan	22.031.350
3 bulan	24.500.000
12 bulan	3.000.000
Jumlah	49.531.350

- Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari 1 bulan	22.031.350
1 sampai dengan 3 bulan	24.500.000
3 sampai dengan 6 bulan	2.000.000
6 sampai dengan 12 bulan	1.000.000
Jumlah	49.531.350

Giro

- Berdasarkan pihak lawan

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak berelasi	478.732
Pihak ketiga	218.922.975
Jumlah	219.401.707

Tabungan

- Berdasarkan pihak lawan

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	41.963.642
Jumlah	41.963.642

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat saldo tabungan dari pihak berelasi.

3. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp643.266.730,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Pihak Lawan	Jenis Efek	Nilai Nominal	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat
Bank Mega	FR0070	250.000.000	6,35%	20 Desember 2023	3 Januari 2024	251.618.623
Bank Mega	FR0077	250.000.000	6,35%	20 Desember 2023	3 Januari 2024	248.598.483
Ina Perdana	FR0081	100.000.000	6,25%	29 Desember 2023	3 Januari 2024	95.366.417
Ina Perdana	FR0081	50.000.000	6,25%	29 Desember 2023	3 Januari 2024	47.683.207
		650.000.000				643.266.730

4. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Efek-efek yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.347.639.528,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	350.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	300.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	250.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B	200.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	150.000.000

Keterangan	31 Desember 2023
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020	60.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	50.000.000
Jumlah	1.360.000.000
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi	(12.360.472)
Jumlah – bersih	1.347.639.528

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023

Pada tanggal 10 Maret 2023 Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,- ribu.

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp300.000.000,- ribu dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp200.000.000,- ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No.RC-1230/PEF-DIR/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahun 2023 periode 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2023, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 menurut Pefindo adalah idA-.

Obligasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi pada tanggal 31 Desember 2023.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 13 Maret 2020 Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.000.000,- ribu.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 1 April 2027.

Berdasarkan hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II dari PT Bank Victoria International Tbk sejak 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020, serta konfirmasi sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-020/PEF-DIR/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan PUB, hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 8 November 2019 Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp150.000.000,- ribu.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 November 2026.

Berdasarkan Surat Keterangan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) No. RTG-129/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 26 September 2019 berlaku peringkat sebagaimana tercantum pada Sertifikat Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yaitu peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 28 September 2019 Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp100.000.000,- ribu dan Rp250.000.000,- ribu.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi yaitu pada tanggal 28 September 2021.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 28 Juni 2026.

Berdasarkan Sertifikat Pemeringkatan Pefindo No. RC-328/PEF-DIR/IV/2019 dan No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019, memutuskan memberikan peringkat idA- terhadap Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 serta memberikan peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018

Pada tanggal 5 September 2018 Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp300.000.000,- ribu dan Rp350.000.000,- ribu.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000,- ribu dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,70% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp200.000.000,- ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 5 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 5 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 5 Juni 2025.

Berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh Pefindo No. 031/PEWF-DIR/IV/2018 pada 2 April 2018, keterangan terkait pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terdapat pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 369/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas penetapan kembali peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 (berdasarkan pemantauan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2017) yakni idA- dan pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 370/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 yakni idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 11 Juli 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp300.000.000,- ribu dan Rp50.000.000,- ribu.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,30% sebesar Rp300.000.000,- ribu per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus telah jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No. 369/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idA- dan Surat No. 370/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023.

5. UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.310.441,- ribu terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2023
Pajak lainnya	
Pasal 4 ayat 2	20.806.149
Pajak Pertambahan Nilai	5.842.973
Pasal 21	2.591.590
Pasal 23	18.381
Pasal 26	51.349
Jumlah utang pajak	29.310.442

(dalam ribuan Rupiah)

6. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Keterangan	31 Desember 2023
Liabilitas imbalan pasca kerja	39.837.511
Jumlah	39.837.511

(dalam ribuan Rupiah)

Imbalan kerja jangka panjang

Informasi di bawah ini mengikhtisarkan komponen beban imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, menggunakan metode "Projected Unit Credit".

a. Beban imbalan pasca kerja

Keterangan	31 Desember 2023
Biaya jasa kini	5.293.469
Biaya bunga	2.894.157
Jumlah	8.187.626

(dalam ribuan Rupiah)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	39.837.511
Jumlah	39.837.511

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pada awal tahun	40.196.622
Biaya jasa kini	5.293.469
Imbalan yang dibayar	(5.152.098)
Beban bunga	2.894.157
Keuntungan aktuarial	(3.394.639)
Pada akhir tahun	39.837.511

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Usia pensiun normal : 55 tahun
- Tingkat mortalita : TM IV
- Tingkat cacat : 5,00% dari tingkat mortalita
- Tingkat pengunduran diri : 5,00% per tahun
- Tingkat kenaikan gaji : 7,32% per tahun
- Tingkat suku bunga : 6,76% per tahun

Perseroan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti, dengan risiko paling signifikan pada tingkat diskonto obligasi dan kenaikan gaji.

Tabel di bawah menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan pasca kerja Perseroan (tidak diaudit):

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Peningkatan 100 bps	Penurunan 100 bps
Tingkat diskonto	(2.379.169)	2.666.818
Kenaikan gaji	2.627.178	(2.389.227)

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas asumsi tunggal dengan asumsi lainnya konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung menggunakan *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Pada 31 Desember 2023, durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasti adalah 14,5 tahun (tidak diaudit).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari 1 tahun	2.989.627
2 – 5 tahun	15.166.437
5 – 10 tahun	9.475.613
Lebih dari 10 tahun	12.205.834
Jumlah	39.837.511

7. AKRUAL DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Akrual dan liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp193.457.538,- ribu terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	74.152.843
Liabilitas sewa	47.309.526
Beban akrual	19.003.791
Kewajiban Transaksi ATM, <i>Internet Banking</i> dan <i>Mobile Banking</i>	14.463.254
Cadangan THR dan bonus	13.104.974
Hutang kepada <i>supplier</i>	10.521.933
Cadangan kerugian Bank Garansi	1.178.357
Cadangan personalia dan biaya pendidikan karyawan	1.119.075
Kewajiban derivatif	74.058
Pendapatan diterima di muka	362.721
Lainnya	12.167.006
Jumlah	193.457.538

Beban akrual lainnya meliputi biaya administrasi dan operasional.

Saldo lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 terutama terdiri dari hutang kepada pihak ketiga.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Perseroan yang dinyatakan dalam nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i> 31 Desember 2023
<u>Komitmen</u>	
Liabilitas komitmen:	
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan:	
Pihak ketiga	(5.280.610.008)
Pihak berelasi	(17.037.130)
Liabilitas komitmen – bersih	<u>(5.297.647.138)</u>
<u>Kontinjensi</u>	
Tagihan kontinjensi:	
Pendapatan bunga atas pinjaman bermasalah – pihak ketiga	311.523.645
Liabilitas kontinjensi:	
Garansi yang diterbitkan – pihak berelasi	(271.300)
Garansi yang diterbitkan – pihak ketiga	(982.531.650)
<i>Letter of Credit</i>	(60.563.964)
Kontinjensi – bersih	<u>(731.843.269)</u>
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih	<u>(6.029.490.407)</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat komitmen dan kontinjensi signifikan lainnya selain komitmen dan kontinjensi yang telah diungkapkan di atas.

PERJANJIAN PENTING**Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Sigma Cipta Caraka**

Pada tanggal 26 Agustus 2014, Perseroan dan PT Sigma Cipta Caraka telah menandatangani Perjanjian Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen, dimana PT Sigma Cipta Caraka setuju untuk memberikan layanan jasa untuk membuat sistem untuk operasi bisnis Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PT Sigma Cipta Caraka berhak mendapatkan pembayaran dari Perseroan;
2. PT Sigma Cipta Caraka wajib memberikan lisensi aplikasi kepada Perseroan;
3. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat aplikasi sesuai dengan keinginan Perseroan;
4. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat laporan kemajuan proses implementasi; dan
5. PT Sigma Cipta Caraka wajib memastikan program telah benar untuk mencegah kesalahan.

Berdasarkan Addendum VI No.461/SCC/BVIC/B/19 tanggal 24 Juli 2019, jangka waktu perjanjian diubah menjadi tanpa jangka waktu hingga salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian.

Biaya jasa yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	1.623.875
Jumlah	1.623.875

Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Panen Berkah Solusi

Pada tanggal 21 Juni 2022, Perseroan dan PT Panen Berkah Solusi telah menandatangani Perjanjian Pemeliharaan Server AS400, dimana PT Panen Berkah Solusi setuju untuk memberikan layanan jasa pemeliharaan server AS400 untuk operasi Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, PT Panen Berkah Solusi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PT Panen Berkah Solusi berhak mendapatkan pembayaran dari Perseroan;
2. PT Panen Berkah Solusi, wajib menyediakan jasa tenaga kerja sesuai kemampuan teknis;
3. PT Panen Berkah Solusi, wajib memberikan informasi tertulis kepada Perseroan yang diperlukan dalam penyelesaian tugas;
4. PT Panen Berkah Solusi, wajib mengirimkan suku cadang kepada Perseroan;
5. PT Panen Berkah Solusi, wajib melakukan kunjungan setiap dua bulan untuk melakukan pengecekan pada semua perangkat.
6. PT Panen Berkah Solusi, berhak melakukan penagihan atas jasa penyediaan suku cadang;
7. PT Panen Berkah Solusi, wajib menyediakan semua kebutuhan suku cadang yang diperlukan dalam rangka perbaikan mesin;
8. PT Panen Berkah Solusi bersedia di audit oleh auditor internal Perseroan atau Otoritas Jasa Keuangan atau pihak eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan; dan
9. PT Panen Berkah Solusi, wajib melaporkan kepada Perseroan setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian/mengganggu kelancaran operasional Perseroan.

Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2022 pada terhadap perjanjian kerja sama antara Perseroan dan PT Panen Berkah Solusi pada No.016/SPK/PBS/VI/2022 bahwa jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2023, sebagaimana telah diubah pada Adendum perjanjian No.027/SPK/PBS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2024.

Biaya jasa yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 yang termasuk dalam perjanjian ini adalah sebesar:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	226.440
Jumlah	226.440

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
ASET		
Kas	92.820.864	51.897.124
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.506.565.848
Giro pada bank lain	296.298.919	228.384.427
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.726)	-
	<u>296.297.193</u>	<u>228.384.427</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	916.367.530	858.340.530
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(998.782)	(13.015)
	<u>915.368.748</u>	<u>858.327.515</u>
Efek-efek	6.285.563.736	4.818.553.397
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.271.969)	(8.862.949)
	<u>6.277.291.767</u>	<u>4.809.690.448</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	636.732.554	839.432.375
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	386.167.151	416.231.152
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.759.228)	(24.551.373)
	<u>368.407.923</u>	<u>391.679.779</u>
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah		
Pihak berelasi	143.896.441	73.265.683
Pihak ketiga	18.484.846.736	15.751.345.408
	<u>18.628.743.177</u>	<u>15.824.611.091</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)
	<u>18.053.870.975</u>	<u>15.286.492.840</u>
Tagihan akseptasi	12.474.839	7.754.446
Penyertaan saham	215.930.505	242.104.323
Biaya dibayar dimuka	25.465.024	19.714.677

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
Aset tetap dan aset hak guna Dikurangi: Akumulasi penyusutan	505.086.595 (81.859.391) 423.227.204	544.733.377 (73.880.350) 470.853.027
Agunan yang diambil alih Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	802.486.682 (251.870.489) 550.616.193	1.237.844.890 (306.834.651) 931.010.239
Aset tak berwujud - bersih	8.192.813	2.531.184
Aset pajak tangguhan - bersih	163.003.926	197.607.333
Aset lain-lain	103.819.813	102.279.016
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.356.770) 91.463.043	(14.323.476) 87.955.540
JUMLAH ASET	29.624.240.421	25.932.001.125
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Simpanan nasabah		
- Pihak berelasi	1.397.970.027	387.327.309
- Pihak ketiga	21.031.210.465	18.984.510.328
	22.429.180.492	19.371.837.637
Simpanan dari bank lain		
- Pihak berelasi	478.732	167.870
- Pihak ketiga	1.104.324.627	1.334.784.750
	1.104.803.359	1.334.952.620
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	643.266.730	240.865.160
Efek-efek yang diterbitkan	1.347.639.528	1.051.903.552
Utang Akseptasi	11.959.811	-
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan	-	16.049.378
- Pajak lainnya	29.310.442	14.792.095
	29.310.442	30.841.473
Liabilitas imbalan kerja karyawan	39.837.511	40.196.622
Akrual dan liabilitas lain-lain	193.457.538	160.940.580
JUMLAH LIABILITAS	25.799.455.411	22.231.537.644
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar – 41.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 2022		

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.848.235.778 dan 15.848.234.714 masing-masing saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	1.584.823.578	1.584.823.471
Tambahan modal disetor	668.684.728	670.584.856
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(16.832.287)	(38.589.677)
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	382.456.152	382.456.152
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19.466.902	16.819.083
Saldo laba:		
- Telah ditentukan penggunaannya	202.200.000	177.200.000
- Belum ditentukan penggunaannya	983.985.937	907.169.596
JUMLAH EKUITAS	3.824.785.010	3.700.463.481
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.624.240.421	25.932.001.125

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	1.836.391.130	1.635.522.726
Pendapatan syariah	-	69.495.685
	<u>1.836.391.130</u>	<u>1.705.018.411</u>
Beban bunga dan syariah	<u>(1.257.661.775)</u>	<u>(971.637.742)</u>
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	<u>578.729.355</u>	<u>733.380.669</u>
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan dari investasi reksadana	13.292.046	5.133.142
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	35.431.712	19.273.193
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	15.679.319	7.143.802
Lain-lain – bersih	188.962.184	348.653.086
Jumlah pendapatan operasional lainnya	<u>253.365.261</u>	<u>380.203.223</u>

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
Beban operasional lainnya		
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(242.509.120)	(223.959.331)
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	54.964.162	(47.616.890)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(31.877.279)	(2.980.457)
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	3.930.662	(1.263.942)
Beban umum dan administrasi	(158.899.846)	(148.563.568)
Beban tenaga kerja	(157.155.510)	(163.030.989)
Lain-lain	(126.476.550)	(112.102.276)
Jumlah beban operasional lainnya	(658.023.481)	(699.517.453)
LABA OPERASIONAL	174.071.135	414.066.439
Beban Non-Operasional – Bersih	(44.534.907)	(57.135.612)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	129.536.228	356.930.827
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(27.719.887)	(130.757.374)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	101.816.341	226.173.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.894.092	(84.273.995)
Pajak tangguhan terkait	(6.136.700)	15.958.836
	21.757.392	(68.315.159)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.394.639	(2.230.737)
Pajak tangguhan terkait	(746.821)	307.249
	2.647.818	(1.923.488)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	24.405.210	(70.238.647)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	126.221.551	155.934.806
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	101.816.341	226.173.453
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>101.816.341</u>	<u>226.173.453</u>
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	126.221.551	155.934.806
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>126.221.551</u>	<u>155.934.806</u>
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Dasar (Rupiah penuh)	6,42	19,17
Dilusian (Rupiah penuh)	6,42	19,17

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	1.866.455.131	1.585.072.007
Pembayaran bunga dan syariah	(1.241.689.538)	(936.209.912)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	253.716.401	363.010.679
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	385.438.160	14.100.990
Pembayaran beban umum dan administrasi	(135.297.898)	(118.616.627)
Pembayaran beban tenaga kerja	(161.897.333)	(132.899.824)
Pembayaran beban operasional lainnya	(128.942.847)	(62.433.855)
Pendapatan (pembayaran) non-operasional lainnya	3.870.773	(28.897.837)
Pembayaran pajak penghasilan	(16.049.378)	-
	<u>825.603.471</u>	<u>683.125.621</u>
Kenaikan dalam aset operasi:		
Pinjaman yang diberikan	(3.012.792.297)	(1.435.674.433)
Beban dibayar dimuka	(5.750.347)	(12.026.402)
Aset hak guna	(21.754.778)	(26.880.935)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	(148.717.805)
Aset lain-lain	-	(20.283.799)
Penurunan dalam aset operasi:		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	202.699.821	-
Penyertaan saham	26.173.818	147.361.993
Aset lain-lain	9.055.375	-
Kenaikan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan nasabah	3.057.342.854	1.299.895.991
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	402.401.570	240.865.160
Utang akseptasi	11.959.811	-
Utang pajak lainnya	14.518.346	3.224.742
Simpanan dari bank lain	-	326.161.686
Penurunan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan dari bank lain	(230.149.261)	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>1.279.308.383</u>	<u>1.057.051.819</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	45.395.525	17.287.045
Pembelian aset tetap	(16.195.800)	(7.526.642)
Pembelian aset tak berwujud	(7.289.250)	(1.879.808)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Pembelian/(penjualan) efek-efek	(1.435.185.586)	(240.818.457)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.413.275.111)	(232.937.862)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan modal disetor	(1.900.021)	520.909.143
Penerbitan obligasi	500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	-	(50.000.000)
Pelunasan jatuh tempo obligasi	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(10.757.017)	(10.958.755)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	287.342.962	159.950.388
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	153.376.234	984.064.345
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.645.187.929	1.886.562.456
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(225.438.872)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.798.564.163	2.645.187.929
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	92.820.864	51.897.124
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.506.565.848
Giro pada bank lain	296.298.919	228.384.427
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dibawah 3 bulan	916.367.530	858.340.530
Jumlah kas dan setara kas	2.798.564.163	2.645.187.929

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	-21,09%	58,17%
Pendapatan operasional lainnya	-33,36%	-16,30%
Laba operasional	-57,96%	576,02%
Laba bersih tahun berjalan	-54,98%	289,96%
Jumlah aset	14,24%	3,95%
Jumlah liabilitas	16,05%	1,36%
Jumlah ekuitas	3,36%	22,76%
Permodalan (Perseroan)		
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ¹⁾	20,69%	22,59%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar ¹⁾	19,95%	21,97%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00%	8,00%
Aset Produktif		
Aset tetap terhadap modal ²⁾	11,08%	12,15%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif ³⁾	3,91%	5,89%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁴⁾	2,79%	3,19%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	2,19%	2,49%
Pemenuhan CKPN aset produktif ⁶⁾	165,67%	214,37%
Non Performing Loan (NPL) Gross ⁷⁾	3,99%	4,23%
NPL Net ⁸⁾	3,24%	3,42%
Solvabilitas		
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁹⁾	87,09%	85,73%
Debt to Equity Ratio (DER) ¹⁰⁾	674,53%	600,78%
Profitabilitas		
Return on Asset (ROA) ¹¹⁾	0,48%	1,47%
Return on Equity (ROE) ¹²⁾	3,12%	9,48%
Net Interest Margin (NIM) ¹³⁾	2,58%	3,52%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁴⁾	91,67%	79,44%
Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga ¹⁵⁾	17,59%	32,34%
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁶⁾	83,06%	81,69%
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁷⁾	81,93%	81,08%
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁸⁾		
- GWM primer - rupiah	7,32%	7,69%
- GWM Sekunder - rupiah	23,73%	22,82%
- GWM - Valuta	4,05%	4,05%
- Posisi devisa neto secara keseluruhan ¹⁹⁾	0,39%	0,12%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif
- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 11) Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total aset konsolidasian kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 15) Jumlah laba (rugi) bersih dibagi jumlah pendapatan bunga bersih
- 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0073634 tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 (“Akta No. 48/2023”).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (“FVOCI”) dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (“FVTPL”). Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Seluruh angka dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminan atau dibatasi penggunaannya.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2023 yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya.

c. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perseroan. Entitas Anak adalah entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Laporan keuangan dari Entitas Anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Dampak signifikan dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Kebijakan akuntansi penting yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan, kecuali dinyatakan secara khusus.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

3. ANALISA KEUANGAN

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	1.836.391.130	1.635.522.726
Pendapatan syariah	-	69.495.685
	<u>1.836.391.130</u>	<u>1.705.018.411</u>
Beban bunga dan syariah	<u>(1.257.661.775)</u>	<u>(971.637.742)</u>
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	<u>578.729.355</u>	<u>733.380.669</u>
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan dari investasi reksadana	13.292.046	5.133.142
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	35.431.712	19.273.193
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	15.679.319	7.143.802
Lain-lain – bersih	188.962.184	348.653.086
Jumlah pendapatan operasional lainnya	<u>253.365.261</u>	<u>380.203.223</u>
Beban operasional lainnya		
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(242.509.120)	(223.959.331)
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	54.964.162	(47.616.890)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(31.877.279)	(2.980.457)
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	3.930.662	(1.263.942)
Beban umum dan administrasi	(158.899.846)	(148.563.568)
Beban tenaga kerja	(157.155.510)	(163.030.989)
Lain-lain	(126.476.550)	(112.102.276)
Jumlah beban operasional lainnya	<u>(658.023.481)</u>	<u>(699.517.453)</u>
LABA OPERASIONAL	174.071.135	414.066.439
Beban Non-Operasional – Bersih	<u>(44.534.907)</u>	<u>(57.135.612)</u>

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	129.536.228	356.930.827
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(27.719.887)	(130.757.374)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	101.816.341	226.173.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.894.092	(84.273.995)
Pajak tangguhan terkait	(6.136.700)	15.958.836
	<u>21.757.392</u>	<u>(68.315.159)</u>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.394.639	(2.230.737)
Pajak tangguhan terkait	(746.821)	307.249
	<u>2.647.818</u>	<u>(1.923.488)</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	24.405.210	(70.238.647)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	126.221.551	155.934.806
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	101.816.341	226.173.453
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>101.816.341</u>	<u>226.173.453</u>
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	126.221.551	155.934.806
Kepentingan nonpengendali	-	-
	<u>126.221.551</u>	<u>155.934.806</u>
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Dasar (Rupiah penuh)	6,42	19,17
Dilusian (Rupiah penuh)	6,42	19,17

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

3.1.1. Pendapatan Bunga dan Syariah

Di bawah ini merupakan rincian pendapatan bunga dan syariah Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
Pendapatan bunga		
Pinjaman yang diberikan	1.477.526.055	1.328.667.150
Efek-efek	333.248.344	294.174.567
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	25.616.731	12.681.009
Sub jumlah	1.836.391.130	1.635.522.726
Pendapatan syariah		
Pendapatan bagi hasil	-	21.416.012
Pendapatan margin	-	10.943.114
Pendapatan <i>ijarah</i> – bersih	-	155.606
Pendapatan usaha utama lainnya	-	36.980.953
Sub jumlah	-	69.495.685
Jumlah	1.836.391.130	1.705.018.411

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan pendapatan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.836.391.130,- ribu naik sebesar Rp131.372.719,- ribu atau sebesar 7,71% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.705.018.411,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan. Pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan pada periode 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.477.526.055,- ribu, naik sebesar Rp148.858.905,- atau sebesar 11,20% dibandingkan dengan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.667.150,- ribu. Selain itu, pendapatan bunga atas efek-efek mengalami peningkatan menjadi Rp333.248.344,- ribu dibandingkan Rp294.174.567,- ribu pada 31 Desember 2022.

3.1.2. Beban Bunga dan Syariah

Di bawah ini merupakan rincian beban bunga dan syariah Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
Simpanan dana pihak ketiga		
Deposito	831.833.370	641.002.657
Tabungan	135.286.864	116.774.716
Giro	97.105.785	53.650.627
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	18.551.748	5.132.618
Simpanan dari bank lain		
<i>Call money</i>	24.553.240	16.525.592
Efek-efek yang diterbitkan	144.948.333	133.908.333
Amortisasi emisi obligasi	5.382.435	4.643.199
Jumlah	1.257.661.775	971.637.742

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.257.661.775,- ribu, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp286.024.033,- ribu atau sebesar 29,44% dibandingkan dengan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp971.637.742,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban bunga atas deposito sebesar Rp190.830.713,- ribu atau sebesar 29,77%.

3.1.3. Pendapatan Operasional Lainnya

Di bawah ini merupakan rincian pendapatan operasional lainnya Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Pendapatan dari investasi reksadana	13.292.046	5.133.142
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	35.431.712	19.273.193
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	15.679.319	7.143.802
Lain-lain – bersih	188.962.184	348.653.086
Jumlah	253.365.261	380.203.223

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp253.365.261,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp126.837.962,- ribu atau turun sebesar 33,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp380.203.223,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp159.690.902,- ribu atau sebesar 45,80% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

3.1.4. Beban Operasional Lainnya

Di bawah ini merupakan rincian beban operasional lainnya Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(242.509.120)	(223.959.331)
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	54.964.162	(47.616.890)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(31.877.279)	(2.980.457)
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas		

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	3.930.662	(1.263.942)
Beban umum dan administrasi	(158.899.846)	(148.563.568)
Beban tenaga kerja	(157.155.510)	(163.030.989)
Lain-lain	(126.476.550)	(112.102.276)
Jumlah	(658.023.481)	(699.517.453)

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp658.023.481,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp41.493.972,- ribu atau sebesar 5,93% dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp699.517.453,- ribu. Adanya penurunan ini terutama disebabkan karena beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan mengalami penurunan sebesar Rp102.581.052,- ribu atau sebesar 215,43% jika dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2022.

3.1.5. Laba Operasional

Perbandingan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp174.071.135,- ribu, menurun sebesar Rp239.995.304,- ribu atau sebesar 57,96% jika dibandingkan laba operasional pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp414.066.439,- ribu. Adanya penurunan ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga dan syariah dan disertai dengan penurunan pendapatan operasional lainnya pada 31 Desember 2023.

3.1.6. Beban Non-Operasional – Bersih

Di bawah ini merupakan rincian beban non-operasional – bersih Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
Pendapatan non-operasional:		
Laba revaluasi valuta asing	(17.561.150)	(20.023.007)
Laba penjualan AYDA	(14.338.270)	(4.851.065)
Hasil sewa	(156.735)	(85.320)
Pendapatan dari Ta'widh	-	(37.100)
Pendapatan lainnya	(2.527.327)	(846.453)
Beban non-operasional:		
Rugi penjualan AYDA	64.258.318	76.921.474
Laba/(rugi) penjualan aset tetap	3.636.801	(217.726)
Rugi penjualan properti terbengkalai	2.318.310	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	1.450.000	-
Beban non-operasional lainnya	7.454.960	6.274.809
Jumlah	44.534.907	57.135.612

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.534.907,- ribu, menurun sebesar Rp12.600.705,- ribu atau sebesar 22,05% dibandingkan beban non-operasional – bersih pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.135.612,- ribu. Terjadinya penurunan beban non-operasional – bersih paling banyak dikarenakan oleh meningkatnya laba penjualan AYDA pada 31 Desember 2022 sebesar Rp9.487.205,- ribu.

3.1.7. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.536.228,- ribu, turun sebesar Rp227.394.599,- ribu atau sebesar 63,71% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp356.930.827,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya laba operasional Perseroan pada 31 Desember 2023.

3.1.8. Beban Pajak Penghasilan – Bersih

Di bawah ini merupakan rincian beban pajak penghasilan – bersih Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Entitas Induk		
Pajak kini	-	16.049.378
Pajak tangguhan	27.719.887	113.573.037
Jumlah Entitas Induk	27.719.887	129.622.415
Entitas Anak		
Pajak kini	-	289.074
Pajak tangguhan	-	845.885
Jumlah Entitas Anak	-	1.134.959
Konsolidasi		
Pajak kini	-	16.338.452
Pajak tangguhan	27.719.887	114.418.922
Jumlah	27.719.887	130.757.374

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban pajak penghasilan – bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.719.887,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp103.037.487,- ribu atau sebesar 78,80% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp130.757.374,- ribu. Penurunan ini dikarenakan manfaat pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan pada tahun 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2022.

3.1.9. Laba Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.816.341,- ribu, menurun sebesar Rp124.357.112,- ribu atau sebesar 54,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp226.173.453,- ribu. Penurunan ini disebabkan karena laba sebelum beban pajak penghasilan mengalami penurunan pada 31 Desember 2023.

3.1.10. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Di bawah ini merupakan rincian penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.894.092	(84.273.995)
Pajak tangguhan terkait	(6.136.700)	15.958.836
	<u>21.757.392</u>	<u>(68.315.159)</u>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.394.639	(2.230.737)
Pajak tangguhan terkait	(746.821)	307.249
	<u>2.647.818</u>	<u>(1.923.488)</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>24.405.210</u>	<u>(70.238.647)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	<u>126.221.551</u>	<u>155.934.806</u>

¹⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.405.210,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp94.643.857,- ribu atau sebesar 134,75% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp70.238.647,- ribu. Terjadinya peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada 31 Desember 2023.

3.1.11. Penghasilan Komprehensif

Perbandingan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.221.551,- ribu, menurun sebesar Rp29.713.255,- ribu atau sebesar 19,05% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif di tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp155.934.806,- ribu. Terjadi penurunan ini dikarenakan laba bersih tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan pada 31 Desember 2023.

3.2. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
JUMLAH ASET	29.624.240.421	25.932.001.125
JUMLAH LIABILITAS	25.799.455.411	22.231.537.644
JUMLAH EKUITAS	3.824.785.010	3.700.463.481
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.624.240.421	25.932.001.125

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

3.2.1. Aset

Di bawah ini merupakan rincian aset Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
ASET		
Kas	92.820.864	51.897.124
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.506.565.848
Giro pada bank lain	296.298.919	228.384.427
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.726)	-
	<u>296.297.193</u>	<u>228.384.427</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	916.367.530	858.340.530
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(998.782)	(13.015)
	<u>915.368.748</u>	<u>858.327.515</u>
Efek-efek	6.285.563.736	4.818.553.397
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.271.969)	(8.862.949)
	<u>6.277.291.767</u>	<u>4.809.690.448</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	636.732.554	839.432.375
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	386.167.151	416.231.152

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ¹⁾
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.759.228)	(24.551.373)
	<u>368.407.923</u>	<u>391.679.779</u>
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah		
Pihak berelasi	143.896.441	73.265.683
Pihak ketiga	18.484.846.736	15.751.345.408
	<u>18.628.743.177</u>	<u>15.824.611.091</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)
	<u>18.053.870.975</u>	<u>15.286.492.840</u>
Tagihan akseptasi	12.474.839	7.754.446
Penyertaan saham	215.930.505	242.104.323
Biaya dibayar dimuka	25.465.024	19.714.677
Aset tetap dan aset hak guna	505.086.595	544.733.377
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(81.859.391)	(73.880.350)
	<u>423.227.204</u>	<u>470.853.027</u>
Agunan yang diambil alih	802.486.682	1.237.844.890
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(251.870.489)	(306.834.651)
	<u>550.616.193</u>	<u>931.010.239</u>
Aset tak berwujud - bersih	8.192.813	2.531.184
Aset pajak tangguhan - bersih	163.003.926	197.607.333
Aset lain-lain	103.819.813	102.279.016
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.356.770)	(14.323.476)
	<u>91.463.043</u>	<u>87.955.540</u>
JUMLAH ASET	29.624.240.421	25.932.001.125

¹⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.624.240.421,- ribu, meningkat sebesar Rp3.692.239.296,- ribu atau sebesar 14,24% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp25.932.001.125,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan efek-efek sebesar Rp1.467.601.319,- ribu atau sebesar 30,51% dan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp2.767.378.135,- atau sebesar 18,10% pada 31 Desember 2023.

3.2.2. Liabilitas

Berikut merupakan rincian liabilitas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
LIABILITAS		
Simpanan nasabah		
- Pihak berelasi	1.397.970.027	387.327.309
- Pihak ketiga	21.031.210.465	18.984.510.328
	<u>22.429.180.492</u>	<u>19.371.837.637</u>
Simpanan dari bank lain		
- Pihak berelasi	478.732	167.870
- Pihak ketiga	1.104.324.627	1.334.784.750
	<u>1.104.803.359</u>	<u>1.334.952.620</u>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	643.266.730	240.865.160
Efek-efek yang diterbitkan	1.347.639.528	1.051.903.552
Utang Akseptasi	11.959.811	-
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan	-	16.049.378
- Pajak lainnya	29.310.442	14.792.095
	<u>29.310.442</u>	<u>30.841.473</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	39.837.511	40.196.622
Akrual dan liabilitas lain-lain	193.457.538	160.940.580
JUMLAH LIABILITAS	25.799.455.411	22.231.537.644

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.799.455.411,- ribu, meningkat sebesar Rp3.567.917.767,- ribu atau sebesar 16,05% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp22.231.537.644,- ribu. Peningkatan liabilitas pada 31 Desember 2023 disebabkan oleh meningkatnya simpanan nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga masing-masing sebesar Rp1.010.642.718,- ribu atau 260,93% dan sebesar Rp2.046.700.137,- ribu atau 10,78%.

3.2.3. Ekuitas

Berikut merupakan rincian ekuitas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar – 41.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 2022		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.848.235.778 dan 15.848.234.714 masing-masing saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	1.584.823.578	1.584.823.471
Tambahan modal disetor	668.684.728	670.584.856
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(16.832.287)	(38.589.677)
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	382.456.152	382.456.152
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19.466.902	16.819.083
Saldo laba:		
- Telah ditentukan penggunaannya	202.200.000	177.200.000
- Belum ditentukan penggunaannya	983.985.937	907.169.596
JUMLAH EKUITAS	3.824.785.010	3.700.463.481

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.824.785.010,- ribu, meningkat sebesar Rp124.321.529,- ribu atau sebesar 3,36% dibandingkan dengan jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp3.700.463.481,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo laba baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp25.000.000,- ribu atau 14,11% dan Rp76.816.341,- ribu atau 8,47% pada 31 Desember 2023.

3.3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.279.308.383	1.057.051.819
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.413.275.111)	(232.937.862)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	287.342.962	159.950.388

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

3.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi, pembayaran bunga dan syariah, penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih, pembayaran beban umum administrasi, dan pembayaran beban tenaga kerja. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Berikut merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	1.866.455.131	1.585.072.007
Pembayaran bunga dan syariah	(1.241.689.538)	(936.209.912)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	253.716.401	363.010.679
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	385.438.160	14.100.990
Pembayaran beban umum dan administrasi	(135.297.898)	(118.616.627)
Pembayaran beban tenaga kerja	(161.897.333)	(132.899.824)
Pembayaran beban operasional lainnya	(128.942.847)	(62.433.855)
Pendapatan (pembayaran) non-operasional lainnya	3.870.773	(28.897.837)
Pembayaran pajak penghasilan	(16.049.378)	-
	825.603.471	683.125.621
Kenaikan dalam aset operasi:		
Pinjaman yang diberikan	(3.012.792.297)	(1.435.674.433)
Beban dibayar dimuka	(5.750.347)	(12.026.402)
Aset hak guna	(21.754.778)	(26.880.935)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	(148.717.805)
Aset lain-lain	-	(20.283.799)
Penurunan dalam aset operasi:		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	202.699.821	-
Penyertaan saham	26.173.818	147.361.993
Aset lain-lain	9.055.375	-

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
Kenaikan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan nasabah	3.057.342.854	1.299.895.991
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	402.401.570	240.865.160
Utang akseptasi	11.959.811	-
Utang pajak lainnya	14.518.346	3.224.742
Simpanan dari bank lain	-	326.161.686
Penurunan dalam kewajiban operasi:		
Simpanan dari bank lain	(230.149.261)	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.279.308.383	1.057.051.819

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.279.308.383,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp222.256.564,- ribu atau sebesar 21,03% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.057.051.819,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya simpanan nasabah pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.757.446.863,- ribu.

3.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk pembelian/(penjualan) efek-efek. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Berikut merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ⁾
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	45.395.525	17.287.045
Pembelian aset tetap	(16.195.800)	(7.526.642)
Pembelian aset tak berwujud	(7.289.250)	(1.879.808)
Pembelian/(penjualan) efek-efek	(1.435.185.586)	(240.818.457)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.413.275.111)	(232.937.862)

⁾ Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.413.275.111,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.180.337.249,- ribu atau sebesar 506,72% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 sebesar Rp232.937.862,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pembelian efek-efek pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.194.367.129,- ribu.

3.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan sebagian besar berasal dari penerbitan obligasi. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Berikut merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan modal disetor	(1.900.021)	520.909.143
Penerbitan obligasi	500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	-	(50.000.000)
Pelunasan jatuh tempo obligasi	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(10.757.017)	(10.958.755)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	287.342.962	159.950.388

^{*)} Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp287.342.962,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp127.392.574,- ribu atau sebesar 79,65% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp159.950.388,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penerbitan obligasi pada 31 Desember 2023 sebesar Rp500.000.000,- ribu.

4. LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 7,32% dan 7,69%, dan GWM dalam Valuta Asing Perseroan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 4,05% dan 4,05%, sedangkan Rasio GWM sekunder Perseroan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 23,73% dan 22,82%, dan rasio posisi devisa neto secara keseluruhan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 0,39% dan 0,12%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, alternative yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI,
- Melakukan repo surat berharga ke BI,
- Melakukan penjualan surat berharga.

Untuk pengukuran likuiditas dalam dunia perbankan, rasio yang lazim digunakan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LFR). Rasio LFR pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 81,93% dan 81,08%. Selain itu, berdasarkan rasio total liabilitas terhadap total aset pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 87,09% dan 85,73%. Sedangkan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 674,53% dan 600,78%.

Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini ada yang berasal dari internal dan eksternal. Sumber likuiditas Perseroan yang berasal dari internal diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank). Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelajaran barang modal.

Dalam hal tidak mencukupi likuiditas, Perseroan akan melakukan langkah berupa:

1. Melakukan penjualan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD);
2. Menerbitkan Surat Berharga Obligasi;
3. Melakukan Repo pada surat berharga yang dimiliki.

Tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. MANAJEMEN RISIKO

a). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban mereka. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah untuk mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam parameter yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *return on risk*.

Dalam mengelola risiko kredit, Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan eksternal lainnya dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian efek-efek, dan penyertaan, yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Perseroan melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas nasabah;
- ii. Riwayat hubungan kredit;
- iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
- iv. Sektor industri nasabah;
- v. Kualitas agunan debitur, baik berupa aset berwujud maupun agunan setara kas;
- vi. Posisi nasabah dalam persaingan industri sejenis; serta
- vii. Kondisi ekonomi secara umum.

Terhadap eksposur risiko kredit yang lebih khusus seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Perseroan melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang mungkin berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas dan eksposur risiko kredit harus diproses melalui komite kredit dan/atau komite lainnya.

Selain itu, pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio pinjaman yang bermasalah maupun eksposur risiko kredit lain. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah restrukturisasi fasilitas pinjaman yang bermasalah, pengambilalihan agunan dan pembentukan cadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Perseroan telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara komprehensif. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Perseroan terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit.

Manajemen risiko kredit diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan pinjaman yang berprinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari risiko penurunan kualitas kredit atau menjadi *Non Performing Loan* (NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

b). Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar.

Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana dan pinjaman, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Untuk itu, Perseroan harus dan selalu melakukan identifikasi dan pemantauan dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi adanya risiko pasar. LFR (*Loan to Funding Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 81,93% dan 81,08%.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengidentifikasi, mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Perseroan.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan Metode Standar untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko pasar.

c). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana dan transaksi antar Bank.

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan Perseroan tidak dapat memenuhinya terhadap deposan, investor atau kreditur yang diantaranya disebabkan dari keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan Perseroan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko likuiditas.

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Perseroan dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Perseroan, Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi.

Perseroan mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk dengan arus kas keluar pada waktu tertentu. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank market*, *wholesale* dan *professional market* lainnya, dalam upaya membantu aktivitas utama bisnis Perseroan seperti pengumpulan dana dan pemberian pinjaman.

d). Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi Perseroan hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal Perseroan. Tujuan Perseroan dalam mengelola risiko operasional adalah meminimalisasi dampak kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempunyai dampak kerugian.

Perseroan menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Perseroan telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengkajian, mitigasi risiko serta dilakukan pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan benefit dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi atas risiko operasional yang telah diperhitungkan.

Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Perseroan. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat aspek keamanan dan kehandalan operasi dari teknologi informasi sehingga kesalahan manusia, *fraud*, kesalahan proses dan potensi kegagalan sistem yang dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan bisnis dapat ditekan dan diantisipasi lebih dini.

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melaksanakan penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas profil risiko Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui rapat yang dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain kebijakan dan metode tersebut di atas, Perseroan juga telah menerapkan upaya yang terus menerus dikembangkan untuk membangun lingkungan budaya yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan pada tiga lini pertahanan (*three line of defense*) yaitu pemberdayaan unit bisnis sebagai lini pertahanan pertama, pembentukan fungsi manajemen risiko operasional sebagai lini pertahanan kedua dan koordinasi kerja dengan Internal Audit (SKAI) sebagai lini pertahanan ketiga.

e). **Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Perseroan melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan beberapa faktor-faktor yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Pengendalian risiko hukum dilakukan Perseroan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hubungan kerja dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan maupun persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum termasukantisipasi terhadap potensi tuntutan dari pihak eksternal.

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan dari aspek hukum, Perseroan memiliki Biro Hukum. Dengan adanya biro tersebut, maka kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Perseroan kepada masyarakat dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek hukum dari Perseroan.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian.

f). **Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Risiko reputasi dapat berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan nasabah sehingga jumlah nasabah ataupun pendapatan Perseroan menurun. Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan berupaya untuk menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan terbaik dalam menangani keluhan dan memberikan kepuasan kepada nasabah untuk menghindari munculnya keluhan tersebut di media.

Corporate Secretary setiap hari melakukan pengawasan atas pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Sedangkan pengawasan atas keluhan nasabah yang disampaikan langsung ke Perseroan dilakukan oleh *Group Quality Service* untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang akan ditempuh Perseroan. Upaya mitigasi risiko reputasi juga dilakukan saat Perseroan meluncurkan produk/layanan/program baru dengan menganalisis risiko reputasi yang mungkin timbul dan bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Demikian pula, untuk informasi yang material atau yang penting untuk diketahui oleh nasabah, *Corporate Secretary* juga menyiapkan panduan untuk para *frontliner* dan *spokespersons* agar mereka bisa menjelaskan informasi tersebut secara benar dan proporsional kepada nasabah.

g). Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau penerapan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Risiko ini juga mencakup kemampuan Perseroan dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif Perseroan di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu akan mengakibatkan kegagalan bagi Perseroan untuk mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan.

Perseroan mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara komprehensif dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

h). Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMN); Penilaian Kualitas Aset; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu termasuk peraturan OJK dan Bank Indonesia yang relevan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Wujud penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain dengan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan di setiap jenjang organisasi, menilai dan mengevaluasi kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, memantau atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian Perseroan.

Perseroan melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

6. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Perseroan menghadapi secara langsung fluktuasi kurs mata uang asing pada kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Ketika sebuah mata uang mengalami apresiasi ataupun depresiasi terhadap mata uang lainnya, maka terdapat potensi hal tersebut mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, kegiatan fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury, investasi dalam surat berharga, hasil usaha, kegiatan pendanaan dan keadaan keuangan Perseroan juga terpengaruh oleh suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Adanya penurunan suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, akan membuat Perseroan dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat kepada calon debitur dari Perseroan dan juga memberikan ruang bagi Perseroan untuk menurunkan biaya bunga pada simpanan yang ditawarkan Perseroan. Sebaliknya, ketika suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dinaikkan, maka Perseroan juga harus menaikkan bunga pinjaman pada calon debitur Perseroan dan juga menaikkan bunga yang diberikan pada simpanan yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu yang mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

7. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak sehingga tidak terdapat pembatasan pengalihan dana dari Perusahaan Anak kepada Perseroan.

8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan bergerak di bidang pemberian pembiayaan kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

10. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan.

11. KEJADIAN/TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

12. PINJAMAN TERUTANG

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mencatat pinjaman yang masih terutang.

13. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen Operasi

Berikut adalah informasi segmen Perseroan berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	31 Desember 2023		
	Konvensional	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	578.729.355	-	578.729.355
Pendapatan operasional lainnya	253.365.261	-	253.365.261
Beban operasional lainnya	(626.226.499)	-	(626.226.499)
Laba/(rugi) operasional	205.868.117	-	205.868.117
Jumlah aset	29.624.240.421	-	29.624.240.421
Jumlah liabilitas	25.799.455.411	-	25.799.455.411

Segmen Geografis

Berikut adalah informasi segmen Perseroan berdasarkan daerah geografis:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023				Jumlah
	Jadetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah & Jawa Timur	Luar Jawa	
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	605.904.033	7.712.804	(5.953.084)	(28.934.398)	578.729.355
Pendapatan operasional lainnya	244.424.786	2.810.354	3.731.919	2.398.202	253.365.261
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(153.988.492)	(1.238.620)	(25.868.360)	(6.449.486)	(187.544.958)
Beban umum dan administrasi, tenaga kerja, kerugian atas perubahan nilai wajar dan lain-lain	(410.010.772)	(6.792.939)	(11.014.661)	(10.863.169)	(438.681.541)
Laba (rugi) operasional	286.329.555	2.491.599	(39.104.186)	(43.848.851)	205.868.117
Beban non operasional – bersih	(76.444.394)	(910)	54.764	58.651	(76.331.889)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	209.885.161	2.490.689	(39.049.422)	(43.790.200)	129.536.228
Beban pajak penghasilan	(27.719.887)	-	-	-	(27.719.887)
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	182.165.274	2.490.689	(39.049.422)	(43.790.200)	101.816.341
Jumlah aset	28.781.506.754	245.131.599	398.882.726	198.719.342	29.624.240.421
Jumlah liabilitas	23.861.710.649	260.082.342	756.951.352	920.707.068	25.799.455.411

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Perseroan.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan Perseroan tidak lepas dari risiko, risiko yang dihadapi disebabkan dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam kegiatan usaha seperti keputusan penyaluran kredit, penerimaan dana, dan berbagai keputusan finansial maupun non-finansial lainnya. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perseroan harus diikuti dengan meningkatkan transparansi informasi tentang praktik manajemen risiko, jenis risiko, dan kinerja manajemen risiko, sehingga hal tersebut bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja perseroan yang menghasilkan keputusan-keputusan bisnis yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko usaha utama serta risiko usaha yang material yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

1. Risiko Usaha Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti diantaranya perkreditan, penempatan dana, investasi, serta *trade finance*. Risiko kredit yang utama adalah risiko kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk*, dan *country risk*.

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material (Yang Langsung maupun Tidak Langsung Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan)

Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan Perseroan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penebitan surat hutang yang berpotensi menurunkan pendapatan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan suku bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga. Aset dan liabilitas seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman yang diberikan, Dana Pihak Ketiga dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai suku bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada suku bunga akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Selain itu, Dampak kenaikan suku bunga yang signifikan berpengaruh pada bunga bersih yang dihasilkan juga terhadap permodalan Perseroan.

b. Risiko Nilai Tukar

Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko likuiditas dapat disebabkan karena Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif, atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid, atau dari penghimpunan dana masyarakat atau pinjaman yang diterima. Apabila Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif dan terjadi penarikan dana meliputi jumlah yang signifikan dan dalam waktu serentak, hal ini dapat mempengaruhi Perseroan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan dari sisi likuiditasnya yang dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan.

Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perseroan. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Cabang Pembantu. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, karyawan, dan reputasi Perseroan hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal Perseroan.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional melekat pada seluruh proses bisnis, produk, dan aktivitas Perseroan, berdampak finansial dan/atau non-finansial serta dapat memicu timbulnya risiko lainnya, contohnya antara lain adalah petugas kredit tidak teliti dalam melakukan analisa kredit sehingga menimbulkan kredit bermasalah (risiko kredit), kesalahan petugas dalam memasukkan data untuk laporan kepada regulator (risiko kepatuhan).

Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko stratejik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Risiko ini juga mencakup kemampuan Perseroan dalam mengembangkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat.

Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Otoritas. Selain itu, Perseroan juga tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan).

3. Risiko Umum

Risiko Perubahan Teknologi

Industri bank di Indonesia relatif memiliki kegiatan usaha utama yang serupa dan tumbuh secara kompetitif serta menghadapi kompetisi yang ketat dari bank – bank lain maupun dari lembaga keuangan non bank. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit kepada pihak lain harus memiliki daya saing yang baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu bank. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berdampak terhadap pelayanan kepada nasabah dan mempengaruhi daya saing serta kinerja Perseroan.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari Manajemen kunci dan tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum, dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan keputusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial, seperti memperluas jaringan pemasaran. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh dan Perseroan mungkin tidak dapat berhasil menerapkan strategi ekspansi maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh dan Perseroan mungkin tidak dapat berhasil menerapkan strategi yang telah direncanakan.

Perseroan berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan para pegawai dengan memberikan hak upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung perkembangan kemampuan karyawan dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, dan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga risiko kelangkaan sumber daya dapat dikendalikan dengan baik.

Risiko Kebijakan

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah, Bank Indonesia maupun Otoritas, karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakkampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

Risiko Negara (*Country Risk*)

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Ketentuan Negara lain secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian nasional, secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada Negara lain yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Salah satu ketentuan negara lain yang secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian adalah dalam hal kenaikan atau penurunan suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika). Kenaikan suku bunga The Fed selama tahun 2023 membuat Bank Indonesia ke depan juga akan cenderung ikut menaikkan suku bunga *7-day reverse repo rate* ("**BI7DRRR**") yang di mana saat ini suku bunga yaitu 6,00%. Kecenderungan akan kenaikan BI7DRRR ini bisa menyebabkan persaingan yang ketat untuk menyalurkan kredit di masyarakat sehingga Bank akan sulit mendapatkan pendapatan dari aktivitas mereka menyalurkan kredit.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Subordinasi:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi serta hutang pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan dalam hal Perseroan dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *point of non-viability* sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.
4. Dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.34 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11 dan POJK No. 34.

5. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yaitu pendapatan bunga bersih dimana suku bunga pasar mengalami peningkatan sehingga imbal hasil (suku bunga) yang diterima oleh investor menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 7 Juni 2024 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242) sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. Drs. Richard R. Wiriahardja	5.000	5.000.000.000	50,00
2. Juanetta Hertati Tjandra	5.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0073634 tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 (“**Akta No. 48/2023**”).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 6 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0059070.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0162900.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“**Akta No. 6/2022**”). Berdasarkan Akta No. 6/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum konvensional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- q. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana; dan
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kegiatan Usaha Utama, untuk merealisasi maksud dan tujuan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- k. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan *instrument*/akun pembayaran; layanan remintasi/transfer dana.

C. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 39 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dibawah ini disajikan struktur pemodal dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Pangajuan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 sebagai berikut:

Tahun 2022

- **Akta No. 7/2022**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103473.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Juni 2022 (“**Akta No. 7/2022**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah), terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp1.048.713.256.800 (satu triliun empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah), terbagi atas 10.487.132.568 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44
2. PT Victoria Investama Tbk	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37
3. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67
4. Masyarakat	4.039.715.987	403.971.598.700	38,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200	

• **Akta No. 48/2022**

Akta Pernyataan Keputusan Perseoran No. 48 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari 13.040.594.487 (tiga belas miliar empat puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham menjadi 15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan.

Penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per lembar saham, yang keseluruhan dananya telah disetor secara tunai ke Perseroan.

Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497387 tanggal 29 Desember 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263092.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 (“**Akta No. 48/2022**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 48/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah), terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp1.584.823.471.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	7.010.537.747	701.053.774.700	44,23
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Masyarakat ^{*)}	5.771.577.627	577.157.762.700	36,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.526.677	1.584.852.667.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.251.473.323	2.525.147.332.300	

*) Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dan PT Gratamulia Pratama dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 79.575.910 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh) saham milik PT Victoria Investama Tbk, dan sejumlah 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham milik PT Gratamulia Pratama.

Rincian pemegang saham yang mengambil bagian berdasarkan Surat Perseroan kepada OJK No. 034/DIR-EKS/01/23 tanggal 10 Januari 2023 tentang Laporan Perubagan Komposisi Kepemilikan Perseroan Bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- VICO sejumlah 1.093.260.982 (satu miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham; dan
- Suzanna Tanojo sejumlah 1.333.333.333 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham.

Tahun 2023

- **DPS 29 Februari 2023**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2023, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“DPS 29 Februari 2023”), susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.584.823.471.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	6.880.162.747	688.016.274.700	43,41
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Chemical Asia Corporation Pte. Ltd.	871.275.600	87.127.560.000	5,50
4. PT Nata Patindo	48.823.665	4.882.366.500	0,31
5. Masyarakat ^{*)}	4.981.561.399	498.156.139.900	31,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.234.714	1.584.823.471.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.151.765.286	2.515.176.528.600	

^{*)} Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dan PT Gratamulia Pratama dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 79.575.910 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh) saham milik PT Victoria Investama Tbk, dan sejumlah 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham milik PT Gratamulia Pratama.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“PP No. 29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Tahun 2024

- **DPS 31 Mei 2024**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“DPS 31 Mei 2024”), susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.584.852.667.700,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.526.677 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	7.010.537.747	701.053.774.700	44,23
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Masyarakat ^{*)}	5.771.577.627	577.157.762.700	36,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.526.677	1.584.852.667.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.151.473.323	2.515.147.332.300	

^{*)} Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yakni sejumlah 158.482.348 saham.

3. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Kantor Cabang (“**KC**”) dan Kantor Cabang Pembantu (“**KCP**”) sebagai berikut:

No.	Kantor	Alamat
Kantor Pusat		
1.	Graha BIP	Gedung Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. RT.2/RW.2, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12930
KC		
Jakarta		
1.	KC Senayan	Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270
2.	KC Cideng	Jl. Cideng Timur No. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta, 10130
3.	KC Fatmawati	Jl. Fatmawati No. 85, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
4.	KC Kelapa Gading	Jl. Taman Mandiri I No. 8 Kav. A1-81 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240
5.	KC BIP	Graha BIP Lantai Dasar, Jl. Gatoto Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930
Bogor		
6.	KC Bogor	Jl. Pakuan No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor
Surabaya		
7.	KC Surabaya	Jalan Raya Darmo No. 173, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur
Bandung		
8.	KC Bandung	Jl. Braga No. 16, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40111
Manado		
9.	KC Manado	Jl. Walter Monongsinsi Komplek Ruko Baju Mall Blok E No. 5, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 95115
Bali		
10.	KC Bali	Jl. Raya Imam Bojol No. 117, Dusun BR. Tenten, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Bali, 80113
Semarang		
11.	KC Semarang	Ruko Bangkong Plaza Blok B-7 Jl. MT. Haryono No.864-866 Kel. Peterongan , Kec. Semarang Selatan, Semarang - 50242
Makassar		
12.	KC Makassar	Ruko Poros Boulevard/Ruko Emerald, No. 16, Jl. Boulevard Masale, Kel. Masale, Kec. Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan
Solo		
13.	KC Solo	Jl. Slamet Riyadi No. 330, Kel. Penumping, Kecamatan Laweyan, Surakarta - 57141

No.	Kantor	Alamat
Medan		
14.	KC Medan	Jl. Zainal Arifin No. 53, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, 20151
KCP		
Jakarta		
1.	KCP Senayan City	Mall Senayan City Lt. LG Unit 06/A2, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Kec. Tanah abang, Kel. Gelora Senayan, Jakarta Pusat, 10270
2.	KCP Patal Senayan	Rukan Permata Senayan Blok B No. 6, Jl. Tentara Pelajar, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210
3.	KCP Duta Mas Jelambar	Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No. 12, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11460
4.	KCP Pantai Indah Kapuk	Bukit Golf Mediterania Blok B/18, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, 14460
5.	KCP Central Park	Garden Shopping Arcade B/08/BG, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9, Tanjung Duren, Jakarta Pusat, 11470
6.	KCP Duta Merlin	Komplek Pertokoan Duta Merlin, Blok A No. 10, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
7.	KCP Puri Indah	Komplek Puri Indah Blok A No. 3, Jl. Puri Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, 11610
8.	KCP Green Garden	Komplek Green Garden Blok A 14 No. 28, Jl. Panjang Kedoya Utara, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta, 11520
9.	KCP Kebon Jeruk	Kompleks Pertokoan Intercon Blok B No. 4-5, Jl. Meruya Ilir Raya, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, 11620
10.	KCP Citra 2	Rukan Citra Niaga 2 Blok A/5, Jl. Utan Jati, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, 11830
11.	KCP Taman Palem	Ruko Taman Palem Blok D1 No. 19, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, 11730
12.	KCP Kemang	Jl. Kemang Raya No. 82 C, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730
13.	KCP Pondok Indah	Plaza Pondok Indah Blok II Blok UPS No. 51, Jl. Metro Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310
14.	KCP Grand Wijaya	Komplek Grand Wijaya Blok C No. 10, Jl. Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160
15.	KCP Gading Serpong	Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Jl. Boulevard Gading Serpong, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, 15333
16.	KCP Bumi Serpong Damai	Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE No. 52, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Tangerang, 15332
17.	KCP Kelapa Gading Blvd	Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC-6, No. 14, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
18.	KCP Pecenongan	Jl. Pecenongan Raya No. 26, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10120

No.	Kantor	Alamat
19.	KCP Sunter	Kompleks Rukan Sunter Permai Blok A-9, Jl. Danau Sunter Utara, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350
20.	KCP Wisma Indocement	Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12970
21.	KCP WBI Slipi	Wisma Slipi Lantai Dasar, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 12, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, 12970
22.	KCP Tanah Abang Blok B	Jl. KH. Fachrudin Pertokoan Grosir Mall Tanah Abang Blok B Lantai 5 Loss Ktr No. 2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10240
23.	KCP Mandala Tomang	Lobby Gedung Mandala Airlines, Jl. Tomang Raya, No. 33-37, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440
24.	KCP Muara Karang	Jl. Pluit Karang Utara No. 46 Blok I1 Selatan Kav. 48, Penjaringan, Jakarta Utara, 14450

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya serta melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasarnya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan pokok yang diperlukan dari pihak yang berwenang, yaitu sebagai berikut:

a. Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120003412559 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS pada tanggal 25 April 2019 dengan perubahan ke-95 tanggal 21 Juli 2022, yang antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : Perseroan
- Alamat Perusahaan : Gedung Graha BIP Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930.
- Kode dan Judul KBLI : - 66411 (Penyedia Jasa Pembayaran);
- 64121 (Bank Umum Konvensional);
- 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial)
- Lokasi Usaha : 66411:
- Jl Gatot Subroto Kav 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
64121:
- Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Desa/Kelurahan Pakulon Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten;
- Jl. Braga No. 16, Desa/Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
- Kantor Pusat, Jl Gatot Subroto Kav 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Cideng Timur No. 33, Desa/Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Taman Duta Mas Blok D8 No. 12, Desa/Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta;

- Wisma Slipi Lantai Dasar Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 12, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Duta Merlin Blok A No.10 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Ruko Pasar Puri Blok A No.3 Jl. Puri Indah Raya, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. RS Fatmawati No. 85, Desa/Kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Gedung The Victoria JL. Tomang Raya No. 33-37, Desa/Kelurahan Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Kompleks Rukan Sunter Permai Blok A-9 Jl. Danau Sunter Utara, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Pakuan Raya No.8, Desa/Kelurahan Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE No. 52, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Tanah Abang Blok B Lantai 5 Los KTR No. 2 Jl. KH. Fachrudin, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Ruko Emerald No.16 Jl. Boulevard, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Jl. Taman Mandiri I No.8 Kav A1-B1, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Ruko Bahu Mall Blok E-5 Jl. Wolter Mongisidi, Desa/Kelurahan Batu Kota, Kec. Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Rukan Citra Niaga 2 Blok A/5, Desa/Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Grand Wijaya Center Blok C No. 10 Jl. Wijaya II, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Wisma Indocement Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav 70 - 71, Desa/Kelurahan Setia Budi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Kompleks Pertokoan Intercon Blok B No. 4-5 Jl. Meruya Ilir Raya, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. KH. Zainul Arifin No.53 C, Desa/Kelurahan Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Jl. Pluit Karang Utara No.46 Blok I-1 Selatan Kav. 48, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Ruko Garden Shopping Arcade B/08/BG Jl.Let.Jend.S.Parman, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

- Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC-6 No.14 Jl. Raya Boulevard Barat, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Plaza Pondok Indah I Blok II UA PS No.51 Jl. Metro Pondok Indah, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Kemang Raya No. 82 C, Desa/Kelurahan Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Pecenongan Raya No.26, Desa/Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Rukan Permata Senayan Blok B No. 6, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman No. 1, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Raya Darmo No. 173, Desa/Kelurahan Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Jl. Slamet Riyadi No. 424, Desa/Kelurahan Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Jl. Pemuda No. 108, Desa/Kelurahan Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Komplek Green Garden Blok A14 No. 28 Jl. Panjang, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Mall Senayan City Lantai LG Unit Toko L- 06A2 Jl. Asia Afrika Lot.19, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl. Imam Bonjol No.117, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Ruko Taman Palem Lestari Blok D1 No.19D, Desa/Kelurahan Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Jl Gatot Subroto Kav 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

63122:

- Jl. Gatot Subroto Kav 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930

Klasifikasi Risiko : Tinggi
 Lembaga Verifikasi : - 66411 (Bank Indonesia)
 - 64121 (Otoritas Jasa Keuangan)
 - 63122 (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
 Masa Berlaku : N/A

b. Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu

Berikut adalah keterangan terkait dengan perolehan izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu Perseroan:

No.	Kantor	Izin
Kantor Cabang		
Jakarta		
1.	KC Senayan	Surat Bank Indonesia No. 14/261/DPIP tanggal 10 Oktober 2012 perihal Rencana Pindahan Alamat Kantor Pusat dan Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
2.	KC Cideng	Surat Bank Indonesia No. 10/1196/DPIP/Prz tanggal 6 November 2008 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk dan Surat Bank Indonesia No. 10/184/DPB3/TPB 3-5 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
3.	KC Fatmawati	Surat Bank Indonesia No. 14/128/DPIP/Prz tanggal 5 April 2012 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
4.	KC Kelapa Gading	Surat OJK No. S-228/PB.12/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Rencana Perubahan Jaringan Kantor
5.	KC BIP	Surat OJK No. S-118/PB.12/2018 tanggal 9 April 2018 perihal Rencana Pindahan Alamat sekaligus Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang
Bogor		
6.	KC Bogor	Surat Bank Indonesia No. 15/45/DPIP tanggal 24 Juni 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
Surabaya		
7.	KC Surabaya	Surat OJK No. S-14/PB.12/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
Bandung		
8.	KC Bandung	Surat OJK No. S-117/PB.12/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Victoria International Tbk
Manado		
9.	KC Manado	Surat OJK No. S-115/PB.12/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Bali		
10.	KC Bali	Surat OJK No. S-341/PB.12/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Semarang		
11.	KC Semarang	Surat OJK No. S-40/PB.12/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Makassar		
12.	KC Makassar	Surat No. S-339/PB.12/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Solo		
13.	KC Solo	Surat No. S-34/PB.12/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang

No.	Kantor	Izin
Medan		
14.	KC Medan	Surat No. S-182/PB.12/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang
Kantor Cabang Pembantu		
Jakarta		
1.	KCP Senayan City	Surat Bank Indonesia No. 10/1292/DPIP/Prz tanggal 26 November 2008 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
2.	KCP Patal Senayan	Surat Bank Indonesia No. 7/53/DPwB1/PwB14 tanggal 24 Maret 2005 perihal Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Victoria International Tbk
3.	KCP Duta Mas Jelambar	Surat Bank Indonesia No. 8/697/DPIP/Prz tanggal 29 Agustus 2006 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
4.	KCP Pantai Indah Kapuk	Surat Bank Indonesia No. 10/863/DPIP/Prz tanggal 20 Agustus 2008 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk dan Surat Bank Indonesia No. 10/160/DPB3/TPB 3-5 tanggal 24 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
5.	KCP Central Park	Surat OJK No. S-23/PB.121/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
6.	KCP Duta Merlin	Surat OJK No. S-37/PB.121/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
7.	KCP Puri Indah	Surat Bank Indonesia No. 6/496/DPIP/Prz tanggal 3 Agustus 2004 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
8.	KCP Green Garden	Surat Bank Indonesia No. 11/607/DPIP/Prz tanggal 16 Oktober 2009 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk dan Surat No. 11/104/DPB3/TPB 3 – 2 tanggal 2 Desember 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
9.	KCP Kebon Jeruk	Surat Bank Indonesia No. 29/1546/UPB3/AdB3 tanggal 26 Desember 1996 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
10.	KCP Citra 2	Surat Bank Indonesia No. 11/607/DPIP/Prz tanggal 16 Oktober 2009 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk dan Surat No. 11/104/DPB3/TPB 3-2 tanggal 2 Desember 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
11.	KCP Taman Palem	Surat Bank Indonesia No. 4/684/DPIP/Prz tanggal 29 November 2002 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
12.	KCP Kemang	Surat Bank Indonesia No. 9/1158/DPIP/Prz tanggal 20 November 2007 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk

No.	Kantor	Izin
13.	KCP Pondok Indah	Surat Bank Indonesia No. 5/646/DPIP/Prz tanggal 17 Oktober 2004 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
14.	KCP Grand Wijaya	Surat OJK No. S-77/PB.121/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
15.	KCP Gading Serpong	Surat Bank Indonesia No. 10/83/DPB3/TPB 3-5 tanggal 3 Juni 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
16.	KCP Bumi Serpong Damai	Surat Bank Indonesia No. 10/83/DPB3/TPB 3-5 tanggal 3 Juni 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
17.	KCP Kelapa Gading Blvd	Surat OJK No. S-228/PB.12/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Rencana Perubahan Jaringan Kantor
18.	KCP Pecenongan	Surat Bank Indonesia No. 9/233/DPIP/Prz tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
19.	KCP Sunter	Surat No. 8/188/DPIP/Prz tanggal 20 Maret 2006 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
20.	KCP Wisma Indocement	Surat OJK No. S-3/PB.121/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
21.	KCP WBI Slipi	Surat Bank Indonesia No. 4/684/DPIP/Prz tanggal 29 November 2002 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Victoria International Tbk
22.	KCP Tanah Abang Blok B	Surat OJK No. S-23/PB.121/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
23.	KCP Mandala Tomang	Surat OJK No. S-77/PB.121/2020 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu
24.	KCP Muara Karang 2	Surat OJK No. S-260/PB.12/2019 tanggal 6 September 2019 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu

c. Izin Usaha Pedagang Valuta Asing

Perseroan telah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana ternyata dari Surat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang antara lain menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	Perseroan
Alamat Perusahaan	:	Gedung Bank Panin, Lantai Dasar Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta, 10270.
Kelembagaan	:	Bank Indonesia
Masa Berlaku	:	Mulai berlaku 25 Maret 1997 (tidak terdapat masa berlaku)
Status Izin	:	Berlaku

d. Izin Usaha Bank Umum

Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Victoria International Tbk. di Jakarta tanggal 10 Agustus 1994.

e. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

Perseroan telah terdaftar sebagai agen penjual efek reksa dana sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No. 2/PM.21/STTD/APERD/2018 tanggal 10 Juli 2018.

f. Izin Bank Devisa

Perseroan telah memperoleh izin sebagai bank devisa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing (Bank Devisa) tanggal 13 Desember 2016.

g. Persetujuan Penerbitan Sertifikat Deposito Tanpa Warkat/Negotiable Certificate of Deposit ("NCD")

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan sertifikat deposito tanpa warkat/NCD sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-93/PB.331/2018 tentang Permohonan Persetujuan Penerbitan Sertifikat Deposito Tanpa Warkat/Negotiable Certificate of Deposit tanggal 19 Desember 2018.

h. Izin Penerbit Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang

Perseroan telah memperoleh izin usaha untuk menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan No. 21/2/KEP.KADEP.DPPK/2019 tentang Pemberian Izin sebagai Penerbit Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang kepada PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 11 Januari 2019.

i. Persetujuan Aktivitas Baru Layanan Cash Management Service (via Internet Bank Bisnis dan Virtual Account)

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan aktivitas baru Layanan Cash Management Service (Via Internet Banking Bisnis dan Virtual Account) sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-30/PB.331/2019 tentang Persetujuan Aktivitas Baru Layanan Cash Management Service (via Internet Bank Bisnis dan Virtual Account) PT Bank Victoria International Tbk. Tanggal 15 Maret 2019.

- j. Izin Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money)**
 Perseroan telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan penerbitan kartu ATM dan kartu Debet sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 11/471/DASP tentang Penetapan Status dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money), tanggal 3 Juli 2009.
- k. Penunjukan sebagai Bank Persepsi**
 Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-284/PB/2021 tentang Penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, tanggal 16 November 2021.
- l. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)**
 Perseroan telah memperoleh TDPSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan No. Tanda Daftar 000859.02/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk sistem elektronik “Internet Banking Bisnis” dengan situs web <https://vib.victoriabank.co.id>.
- m. TDPSE**
 Perseroan telah memperoleh TDPSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan No. Tanda Daftar 000859.01/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk sistem elektronik “Internet Banking Program” dengan situs web <https://ib.victoriabank.co.id>.
- n. TDPSE**
 Perseroan telah memperoleh TDPSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan No. Tanda Daftar 000859.03/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk sistem elektronik “Victoria Mobile” dengan situs web <https://vib.victoriabank.co.id>.
- o. Mitra Distribusi Penjualan Surat Berharga Negara (“SBN”) Ritel**
 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melaksanakan aktivitas baru sebagai Mitra Distribusi Penjualan SBN sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-42/PB.331/2020 tentang Laporan Rencana Aktivitas Baru sebagai Mitra Distribusi Penjualan SBN Ritel Perseroan tanggal 22 April 2020.
- p. Agen Penjual Efek Reksa Dana Terproteksi (“RDT”) Setiabudi Dana Proteksi 7**
 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Setiabudi Dana Proteksi 7 berdasarkan Surat No. S-39/PB.331/2022 tentang Rencana Pemasaran RDT Setiabudi Dana Proteksi 7 – PT Bank Victoria International Tbk tanggal 28 Juli 2022.
- q. Pemasaran RDT Setiabudi Dana Proteksi 3**
 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek RDT Setiabudi Dana Proteksi 3 berdasarkan Surat No. S-S-78/PB.331/2019 tentang Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Pemasaran Reksa Dana Setiabudi Dana Proteksi 3 (RDT) PT Bank Victoria International Tbk tanggal 19 September 2019.
- r. Agen Penjual Efek RDT Setiabudi Dana Proteksi 6, Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius dan Reksa Dana TRIM Kas 2**
 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek RDT Setiabudi Dana Proteksi 6, Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius dan Reksa Dana TRIM Kas 2, berdasarkan Surat No. S-63/PB.331/2021 tentang Rencana Penjualan Efek RDT Setiabudi Dana Proteksi 6, Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius dan Reksa Dana TRIM Kas 2 PT Bank Victoria International Tbk tanggal 28 September 2021.

- s. **Pencatatan Produk Bancassurance VIP Platinum Safe Assurance**
Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru *Bancassurance VIP Platinum Safe Assurance* bekerjasama dengan PT Victoria Alife Indonesia, berdasarkan Surat No. S-61/PB.331/2018 tentang Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru *Bancassurance VIP Platinum Safe Assurance* tanggal 16 Juli 2018.
- t. **Mitra Distribusi Penjualan Surat Utang Negara (“SUN”) Ritel**
Perseroan telah ditetapkan oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Mitra Distribusi dalam rangka penjualan SUN Ritel di Pasar Perdana Domestik untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi, berdasarkan Surat No. S-126/PPK/SUN-RITEL/2020 tentang Penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam Rangka Penjualan Surat Utang Negara Ritel tanggal 4 Mei 2020.
- u. **Pencatatan Produk Bancassurance VIP Platinum Safe Assurance**
Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru *Bancassurance Allianz Wealthlink Preferred Life* bekerja sama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan model bisnis referensi tidak dalam rangka produk bank, berdasarkan Surat No. S-75/PB.331/2021 tentang Rencana Kerja Sama Pemasaran Produk Allianz Wealthlink Preferred Life (*Bancassurance*) PT Bank Victoria International Tbk dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia tanggal 17 November 2021.
- v. **Pencatatan Produk Bancassurance Allianz Life Secure PASTI**
Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru *Bancassurance Allianz Life Secure PASTI* bekerja sama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan model bisnis referensi tidak dalam rangka produk bank, berdasarkan Surat No. S-85/PB.331/2021 tentang Rencana Kerja Sama Pemasaran Produk Allianz Life Secure PASTI (*Bancassurance*) Bank Saudara dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia tanggal 22 Desember 2021.
- w. **Pemasaran Produk RDT Setiabudi Dana Proteksi 1**
Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK untuk melakukan aktivitas baru *pemasaran* produk RDT – Setiabudi Dana Proteksi 1 melalui kerjasama dengan PT Setiabudi Investment Management, berdasarkan Surat No. S-91/PB.331/2018 tentang Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Pemasaran Reksa Dana Terproteksi Setiabudi Dana Proteksi 1 PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 18 Desember 2018.
- x. **Tanda Terdaftar Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk**
Perseroan telah terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. 51/D.04/STTD/PPE-EBUS/2020 tanggal 26 Februari 2020.
- y. **Rencana Korporasi**
Perseroan telah menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 Perseroan tanggal 30 November 2021.
- z. **Kelompok Usaha Bank (“KUB”)**
Rencana Pembentukan KUB Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat No. S-73/PB.331/2022 perihal Perubahan Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB).

aa. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perseroan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

No.	Kantor Pusat/Cabang	Izin Mendirikan Bangunan Nomor/Tanggal
1.	Kelapa Gading 2 (Jakarta Timur)	10526/IMB/1991 tanggal 28 November 1991
2.	Jembatan Lima, Jakbar	01136/IMB/1989 tanggal 15 Februari 1989
3.	KCP Green Garden	04012/IMB/1986 tanggal 24 Juni 1986
4.	Kembangan, Jakarta Barat	10918/IMB/2007 tanggal 22 Januari 2007
5.	Karawaci	684.3/87/-DisBang/IMB/1996 tanggal 3 Mei 1996
6.	KC Bali	IMB No. 02/581/1472/DB/DISPER/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan No. 03/45/3338/DB/DPMPTSP/2019 tanggal 27 September 2019
7.	KC Bandung	503.644.4/3591/BPPT tanggal 8 Oktober 2014
8.	Bekasi	1451/PY/030/I-B/1981 tanggal 31 Desember 1990
9.	Bintaro	644/PMDN.68-DPU/1995 tanggal 14 Desember 1995
10.	KCP Bumi Serpong Damai	644.2/212-HUK/1992 tanggal 21 April 1992
11.	KC Cideng	3994/IMB/1990 tanggal 31 Mei 1990
12.	Cinere	29/I/P/87 tanggal 4 Januari 1987
13.	KCP Citra 2	05925/IMB/2004 tanggal 28 Juni 2004
14.	KCP Duta Mas Jelambar	5077/IMB/1990 tanggal 5 Juli 1990
15.	KCP Duta Merlin	14310/IMB/1981 tanggal 27 November 1981
16.	KC Fatmawati	5654/IMB/1984 tanggal 4 Juni 1984
17.	Grand Boutique	10082/IMB/1992 tanggal 23 Oktober 1992
18.	KCP Grand Wijaya	03299/IMB/1987 tanggal 16 Juni 1987
19.	ITC Mangga 2	7305/IMB/1990 tanggal 16 September 1990
20.	Hang Tuah	04485/IMB/1999 tanggal 2 Desember 1999
21.	Hybrida (Jakarta Timur)	20644/IMB/1994 tanggal 3 Juni 1994
22.	Jababeka Cikarang	503/12297/C/DPPB tanggal 15 Juni 2006

No.	Kantor Pusat/Cabang	Izin Mendirikan Bangunan Nomor/Tanggal
23.	Kalimalang	503/0718/RE/I-B/DTKP tanggal 22 April 2004
24.	KCP Kebon Jeruk	4244/IMB/1989 tanggal 21 Juni 1989
25.	Asemka	6494/IMB/1991 tanggal 2 Juli 1991
26.	KCP Kemang	000305/IMB/2304 tanggal 9 Agustus 2004
27.	Central Park	10815/IMB/2007 tanggal 20 November 2007

4. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Perjanjian dengan Kerja Sama				
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Gempa Bumi dalam Rangka Produk Bank No. 002/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Gempat Bumi dalam rangka Produk Bank No. 019/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (002-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> Perseroan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur bertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan. Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 15% (sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan)</p>		
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Harta Benda Dalam Rangka Produk Bank No. 003/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Harta Benda dalam rangka Produk Bank No. 020/ADM/PD/ADD-PKS-Victoria (003-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur bertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggung produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK.</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 15% (sesuai SEOJK No.6/SEOJK No.5/2017 SEOJK No. SEOJK05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan ASuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017)</p>		
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Kebakaran Dalam Rangka Produk Bank No. 001/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Kebakaran dalam rangka Produk Bank No. 018/ADM/PD/ADD-PKS-Victoria (001-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur bertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 15% (sesuai SEOJK No.6/SEOJK No.5/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017).</p>		<p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
4.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Produk Bank No. 004/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Kendaraan Bermotor dalam rangka Produk Bank No. 021/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (004-2018)/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”).</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur bertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggung</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<p>produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 25% (sesuai SEOJK No.6/SEOJK No.5/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017).</p>		<p>kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
5.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Mesin Dalam Rangka Produk Bank No. 006/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Mesin dalam rangka Produk Bank No. 023/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (006-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>calon Debitur/ Tertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 10%.</p>		<p>mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
6.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Konstruksi dan Pembangunan Mesin Dalam Rangka Produk Bank No. 008/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Konstruksi dan Pembangunan Mesin dalam rangka Produk Bank No.</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>025/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (008-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>Pihak Kedua kepada calon Debitur/ Tertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 15%.</p>		<p>signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
6.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Pengangkutan Dalam Rangka Produk Bank No. 009/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Pengangkutan dalam rangka Produk Bank No. 026/ADM/PD/ADD-PKS</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Victoria (009-2018)/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur/ Tertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 15%.</p>		<p>Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
7.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Peralatan Berat Dalam Rangka Produk Bank No. 005/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Peralatan Berat dalam rangka Produk Bank No.</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi atau rekomendasi dalam</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 September 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>022/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (005-2018)/VIII/2022 tanggal 29 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur/ Tertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 10%.</p>		<p>Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
8.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Peralatan Berat Dalam Rangka Produk Bank No. 007/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018</p> <p>Addendum I Perjanjian Kerjasama Model Bisnis Referensi Asuransi Rangka Kapal dalam rangka Produk</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran Produk Asuransi dengan menggunakan Model Bisnis Referensi dalam rangka produk Perseroan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama dimana Perseroan akan memberikan referensi</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal: Terdapat permintaan/ perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk mengakhiri perjanjian; Pihak Kedua tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Bank No. 024/ADM/PD/ADD-PKS Victoria (007-2018/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak Perseroan; dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Pihak Kedua”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>atau rekomendasi dalam rangka produk Perseroan atas produk asuransi milik Pihak Kedua kepada calon Debitur/ Tertanggung sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan dan Pihak kedua akan melakukan penutupan pertanggungan produk asuransi bagi Debitur Perseroan yang direferensikan atau direkomendasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Nilai Perjanjian Perseroan akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Kedua atas setiap penutupan Produk Asuransi yang dilakukan melalui Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK dan mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Besarnya dan tata cara pembayaran imbalan jasa untuk setiap penutupan Produk Asuransi disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian yakni komisi sebesar 5%.</p>		<p>sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; Pihak Kedua mengalami penurunan reputasi secara signifikan sehingga akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; Pihak Kedua melakukan pelanggaran material yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian yang menyebabkan kegagalan Perseroan untuk melaksanakan tujuan Perjanjian.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
9.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Pemeliharaan untuk AudioCodes Media Gateway System No. MA-039/MA/AudioCodes/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum VI Perjanjian Pemeliharaan untuk Audiocodes Media</p>	<p>Objek Perjanjian Obyek yang diperjanjikan untuk diperlihara/ dicegah kerusakannya melalui Jasa Pemeliharaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama adalah AudioCodes Media Gateway System (selanjutnya disebut “Peralatan”). Ruang Lingkup Peralatan tercantum dalam Lampiran I Perjanjian I.</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan 1 tahun sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak.</p> <p>Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua sebelum berakhirnya jangka</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
-----	--------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

Gateway System No. 005/ADD-Audicodes/IPT/III/2024 tanggal 1 Januari 2024. (“Perjanjian”).

Para Pihak

PT Inov Perdana Teknologi (“Pihak Pertama”); dan Perseroan (“Pihak Kedua”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).



Nilai Perjanjian

Pihak Kedua sepakat untuk membayar biaya pemeliharaan sebesar Rp. 9.775.500,- untuk masa 1 tahun dan belum termasuk PPN sebesar 11%.

waktu perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, dengan dibuktikan secara tertulis.

Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat diserahkan oleh Pihak Pertama baik secara keseluruhan atau sebagian kepada Pihak Ketiga di luar Perjanjian. Setiap upaya untuk menyerahkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari Pihak Kedua Perjanjian ini, akan membuat Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.

Hukum yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

10.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 013/0919/MC tanggal 20 September 2019.</p> <p>Addendum I Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 013/0919/MC-ADDI tanggal 3 November 2020.</p> <p>Addendum II Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 060/2021/XI/MC-Murni</p>	<p>Objek Perjanjian Bahwa Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melaksanakan pemeliharaan (selanjutnya disebut sebagai “Pemeliharaan”) Perangkat milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukan dari Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemeliharaan atas Perangkat milik Pihak Kedua dengan perincian sebagaimana tertera dalam lampiran (untuk</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan 3 November 2023 sampai dengan 2 November 2024</p> <p>Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak untuk jangka waktu yang akan ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis minimal 30 hari sebelum Perjanjian berakhir.</p>	<p>Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama minimal 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran. Pihak Pertama wajib menyelesaikan kewajiban yang belum</p>
-----	--	--	--	---

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian																	
	tanggal 11 November 2021. Addendum III Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 055/2022/XI/MC-Murni tanggal 3 November 2022. Addendum IV Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 046/2023/XI/MC-Murni tanggal 1 November 2023 (“Perjanjian”).	selanjutnya disebut sebagai “Lampiran”). <table border="1" data-bbox="537 317 810 527"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Perangkat</th> <th>Kunj. / Tahun</th> <th>Jumlah/ Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mesin Hitung Uang GNH-710</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">4x</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mesin Hitung Uang Laurel</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mesin Encorder MICR II</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mesin Encorder M712</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> Nilai Perjanjian Rp60.384.000	No	Perangkat	Kunj. / Tahun	Jumlah/ Unit	1	Mesin Hitung Uang GNH-710	4x	29	2	Mesin Hitung Uang Laurel	45	3	Mesin Encorder MICR II	4	4	Mesin Encorder M712	11		dilaksanakan kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini. Pengalihan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa Para Pihak tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
No	Perangkat	Kunj. / Tahun	Jumlah/ Unit																		
1	Mesin Hitung Uang GNH-710	4x	29																		
2	Mesin Hitung Uang Laurel		45																		
3	Mesin Encorder MICR II		4																		
4	Mesin Encorder M712		11																		
	Para Pihak PT Murni Solusindo Nusantara (“Pihak Pertama”); dan Perseroan (“Pihak Kedua”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).																				

Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Desember 2022 (“Perjanjian”). Para Pihak Perseroan (“Pihak Pertama”); dan PT Bank Victoria Syariah (“Pihak Kedua”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	Objek Perjanjian Pihak Pertama bersedia untuk menyewakan Obyek Sewa berupa Ruang di lantai 4 Gedung Bank Victoria Kantor Cabang Pembantu Grand Boutique Mangga dua yang terletak di Grand Boutique Center Blok D Kav. 1, jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan luas ruangan lebih kurang 168 m2. (untuk selanjutnya disebut “Ruang”). Nilai Perjanjian Rp. 40.000.000,- ditambah PPN 10% dan	Jangka Waktu dan Perpanjangan 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2024. Apabila Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa, maka hal itu harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.	Pembatasan Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi. Pengakhiran Dipercepat Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak akan berakhir dikarenakan salah satu pihak pailit/dipailitkan, dibubarkan/likuidasi sampai jangka waktu sewa menyewa tersebut berakhir dan sampai kewajiban Para Pihak terpenuhi. Pengalihan Selama Perjanjian Sewa Menyewa ini berjalan, Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ada persetujuan dari Pihak Pertama.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		dipotong PPH 4 (2) Final, dimana harga sewa tersebut akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap 3 bulan.		<p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Penyelesaian Sengketa Memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Agama Jakarta Barat dan atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Lainnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.</p>
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/LA/AGK-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 0433/AMD/AGK-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bahwa Penyewa adalah perusahaan yang menyewa ruangan di dalam bagian Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dari Pemilik dan Pemilik setuju untuk menyewakan kepada Penyewa ruangan dari Gedung dengan luas total kurang lebih 258 m2 (dua ratus lima puluh depan meter persegi) semi gross yang terletak di Lantai 1.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa per meter persegi semigross perbulan kepa Pemilik yaitu sebesar: Periode 01 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 sejumlah Rp.240.000 Periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 255.000,- Periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 270.000,-</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027</p> <p>Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Penyewa wajib memberitahukan kepada Pemilik setiap terjadi perubahan kepengurusan dalam Penyewa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dalam hal terjadi salah satu peristiwa tersebut dibawah ini, Pemilik memiliki hak opsi dan berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang pengakhiran Perjanjian, yaitu apabila: Penyewa lalai dan/ atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini. Usaha Penyewa yang dijalankan dalam Ruang Swa tidak dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan Penyewa tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan tersebut dalam waktu 30 hari setelah ada surat teguran atau perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang, atau</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 285.000,-</p> <p>Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 300.000,-</p> <p>Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, permeter persegi semigross perbulan kepada Pemilik sebesar:</p> <p>Periode 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 85.000,-</p>		<p>Penyewa dinyatakan pailit/ dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ berdasarkan ketetapan instansi yang berwenang.</p> <p>Apabila penyewa karena alasan apapun mengakhiri atau menghentikan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Penyewa wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis 60 hari kalender sebelumnya kepada Pemilik. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Penyewa hanya dapat disetujui oleh Pemilik. Jika Penyewa membayar ganti rugi. Apabila penyewa belum membayar ganti rugi kepada pemilik, maka Penyewa dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemilik untuk menahan dan/ atau menyita semua barang/ inventaris kantor milik Penyewa yang tersimpan didalam Ruang Sewa untuk sementara waktu sampai dengan diselesaikan dan dilunasinya kewajiban Penyewa.</p>
				<p><u>Pengalihan</u></p> <p>Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p>
				<p><u>Hukum yang Berlaku</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia.</p>
				<p><u>Penyelesaian Sengketa</u></p> <p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa 013/LA/AKG-</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bahwa Penyewa adalah perusahaan yang menyewa ruangan di</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027</p>	<p><u>Pembatasan</u> Penyewa wajib memberitahukan kepada Pemilik setiap terjadi perubahan kepengurusan dalam</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 044/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>dalam bagian Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dari Pemilik dan Pemilik setuju untuk menyewakan kepada Penyewa ruangan dari Gedung dengan luas total kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) semi gross yang terletak di Lantai 6.</p> <p>Nilai Perjanjian Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa per meter persegi semigross perbulan kepa Pemilik yaitu sebesar: Periode 1 November 2018 sampai 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 95.000,- Periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 sejumlah Rp 110.000,- Periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 Sejumlah Rp. 125.000,- Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 140.000,- Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 155.000,- Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, per meter persegi semigross perbulan kepada Pemilik sebesar: Periode 1 November 2018 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 85.000,-</p>	<p>Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p>	<p>Penyewa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Dalam hal terjadi salah satu peristiwa tersebut dibawah ini, Pemilik memiliki hak opsi dan berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang pengakhiran Perjanjian, yaitu apabila: Penyewa lalai dan/ atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini. Usaha Penyewa yang dijalankan dalam Ruang Swa tidak dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan Penyewa tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan tersebut dalam waktu 30 hari setelah ada surat teguran atau perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang, atau Penyewa dinyatakan pailit/ dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ berdasarkan ketetapan instansi yang berwenang. Apabila penyewa karena alasan apapun mengakhiri atau menghentikan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Penyewa wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis 60 hari kalender sebelumnya kepada Pemilik. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Penyewa hanya dapat disetujui oleh Pemilik Jika Penyewa membayar ganti rugi. Apabila penyewa belum membayar ganti rugi kepada</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>pemilik, maka Penyewa dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemilik untuk menahan dan/ atau menyita semua barang/ inventaris kantor milik Penyewa yang tersimpan didalam Ruang Sewa untuk sementara waktu sampai dengan diselesaikan dan dilunasinya kewajiban Penyewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 045/AMD/AKG-BVIC/IX/022 tanggal 19 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bahwa Penyewa adalah perusahaan yang menyewa ruangan di dalam bagian Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dari Pemilik dan Pemilik setuju untuk menyewakan kepada Penyewa ruangan dari Gedung dengan luas total kurang lebih 1.780 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) semi gross yang terletak di Lantai 10.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa permeter persegi semigross</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027</p> <p>Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Penyewa wajib memberitahukan kepada Pemilik setiap terjadi perubahan kepengurusan dalam Penyewa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dalam hal terjadi salah satu peristiwa tersebut dibawah ini, Pemilik memiliki hak opsi dan berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang pengakhiran Perjanjian, yaitu apabila: Penyewa lalai dan/ atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini. Usaha Penyewa yang dijalankan dalam Ruang Swa tidak dilakukan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").	<p>perbulan kepa Pemilik yaitu sebesar: Periode 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 95.000,- Periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 110.000,- Periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 125.000,- Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 140.000,- Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 155.000,- Penyewa sepakat dan setuju untk membayar Service Charge, permeter persegi semigross perbulan kepada Pemilik sebesar: Periode 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 85.000,-</p>		<p>sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan Penyewa tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan tersebut dalam waktu 30 hari setelah ada surat teguran atau perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang, atau Penyewa dinyatakan pailit/ dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ berdasarkan ketetapan instansi yang berwenang. Apabila penyewa karena alasan apapun mengakhiri atau menghentikan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Penyewa wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis 60 hari kalender sebelumnya kepada Pemilik. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Penyewa hanya dapat disetujui oleh Pemilik Jika Penyewa membayar ganti rugi. Apabila penyewa belum membayar ganti rugi kepada pemilik, maka Penyewa dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemilik untuk menahan dan/ atau menyita semua barang/ inventaris kantor milik Penyewa yang tersimpan didalam Ruang Sewa untuk sementara waktu sampai dengan diselesaikan dan dilunasinya kewajiban Penyewa.</p>
				<p><u>Pengalihan</u> Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.</p>
5.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 037/LA/AKG-BVIC/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 050/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bahwa Penyewa adalah perusahaan yang menyewa ruangan di dalam bagian Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dari Pemilik setuju untuk menyewakan kepada Penyewa ruangan dari Gedung dengan luas total kurang lebih 170 m2 (serratus tujuh puluh meter persegi) semi gross yang terletak di Lantai 9 Zone I dan J.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa permeter persegi semigross perbulan kepa Pemilik yaitu sebesar: Periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 110.000,- Periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 125.000,- Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 140.000,- Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 155.000,-</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027</p> <p>Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Penyewa wajib memberitahukan kepada Pemilik setiap terjadi perubahan kepengurusan dalam Penyewa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dalam hal terjadi salah satu peristiwa tersebut dibawah ini, Pemilik memiliki hak opsi dan berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang pengakhiran Perjanjian, yaitu apabila: Penyewa lalai dan/ atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini. Usaha Penyewa yang dijalankan dalam Ruang Swa tidak dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan Penyewa tidak dapat melaksanakan 118ersama118-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan tersebut dalam waktu 30 hari setelah ada surat teguran atau perintah atau 118ersama118 lainnya oleh pihak yang berwenang, atau Penyewa dinyatakan pailit/ dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>Harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai ,ketentuan berlaku.</p> <p>Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, per meter persegi semigross perbulan kepada Pemilik selama Jangka Waktu Sewa yaitu sebesar Rp. 85.000,- Harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		<p>berdasarkan ketetapan instansi yang berwenang.</p> <p>Apabila penyewa karena 119ersama apapun mengakhiri atau menghentikan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Penyewa wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis 60 hari kalender sebelumnya kepada Pemilik. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Penyewa hanya dapat disetujui oleh Pemilik Jika Penyewa membayar ganti rugi. Apabila penyewa belum membayar ganti rugi kepada pemilik, maka Penyewa dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemilik untuk menahan dan/ atau menyita semua barang/ inventaris kantor milik Penyewa yang tersimpan didalam Ruang Sewa untuk sementara waktu sampai dengan diselesaikan dan dilunasinya kewajiban Penyewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
6.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 026/LA/AKG-BVIC/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diubah berdasarkan</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Bahwa Penyewa adalah perusahaan yang menyewa ruangan di dalam bagian Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027 Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dalam hal terjadi salah satu peristiwa tersebut dibawah ini,</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 049/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>Selatan 12930 dari Pemilik dan Pemilik setuju untuk menyewakan kepada Penyewa ruangan dari Gedung dengan luas total kurang lebih 420 m2 (empat ratus dua puluh meter persegi) semi gross yang terletak di Lantai 9.</p> <p>Nilai Perjanjian Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa permeter persegi semigross perbulan kepa Pemilik yaitu sebesar: Periode 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 115.000,- Penyewa sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, permeter persegi semigross perbulan kepada Pemilik selama Jangka Waktu Sewa yaitu sebesar Rp. 85.000,-. Harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) atau sesuai dengan ketentuan berlaku.</p>	<p>Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p>	<p>Pemilik memiliki hak opsi dan berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang pengakhiran Perjanjian, yaitu apabila: Penyewa lalai dan/ atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini. Usaha Penyewa yang dijalankan dalam Ruang Swa tidak dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan Penyewa tidak dapat melaksanakan 120las an120-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan tersebut dalam waktu 30 hari setelah ada surat teguran atau perintah atau 120las an120 lainnya oleh pihak yang berwenang, atau Penyewa dinyatakan pailit/ dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ berdasarkan ketetapan instansi yang berwenang. Apabila penyewa karena 120las an apapun mengakhiri atau menghentikan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Penyewa wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis 60 hari kalender sebelumnya kepada Pemilik. Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Penyewa hanya dapat disetujui oleh Pemilik Jika Penyewa membayar ganti rugi. Apabila penyewa belum membayar ganti rugi kepada pemilik, maka Penyewa dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemilik untuk menahan dan/ atau menyita</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>semua barang/ inventaris kantor milik Penyewa yang tersimpan didalam Ruang Sewa untuk sementara waktu sampai dengan diselesaikan dan dilunasinya kewajiban Penyewa.</p> <p>Pengalihan Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Persewaan No. 2023/12/LA/062-BVI tanggal 15 Desember 2023 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> PT Serasi Tunggal Mandiri (“Yang Menyewakan”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Obyek Persewaan adalah ruangan perkantoran dengan luas sejumlah 34,50 meter persegi yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman Kav 70 – 71, Jakarta 12910 pada Persyaratan Persewaan berukuran semi bruto yang mana ukuran tersebut terdiri dari adanya pro-rata atas toilet-toilet, pantry, koridor dan lift lobby, lokasinya di Lantai dasar.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Tarif sewa: Rp604.400 Tarif layanan: Rp223.600</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.</p> <p><u>Perpanjangan</u> perjanjian tidak diatur.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Penyewa tidak dapat secara sepihak dan tidak ada persyaratan pada perjanjian ini untuk Pemutusan Perjanjian lebih awal.</p> <p><u>Pengalihan</u> Penyewa tidak akan mengalihkan, menyewakan lagi atau dengan cara lain menyerahkan penguasaan seluruh atau sebagian dari Obyek Persewaan baik dengan cara menyewakan lagi, meminjamkan, membagi atau dengan cara-cara lain, yang dengan itu seseorang atau orang-orang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Persewaan ini memperoleh penggunaan atau hak seluruh atau sebagian dari Obyek Persewaan, terlepas apakah untuk penggunaan atau untuk hak</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>itu dibayarnya Uang Sewa atau atas dasar pertimbangan lain, tanpa persetujuan tertulis dari Yang Menyewakan.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AGG-BVIC/X/2017 tanggal 30 Oktober 2020 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 063/AMD/AGG-BVIC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> PT Asri Kencana Gemilang (“Pemilik”); dan Perseroan (“Penyewa”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Gedung seluas kurang lebih 290m2 semi gross yang terletak di Lantai 1.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Periode 2021: Rp280.000 per bulan Periode 2022: Rp295.000 per bulan Periode 2023: Rp310.000 per bulan Periode 2024: Rp315.000 per bulan</p>	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024</p> <p>Penyewa diberi kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana transaksi.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir: Karena jangka waktu sewa berakhir; Pemilik memiliki hak opsi dan berakhir mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa apabila (i) Penyewa lalai dan/atau tidak mentaati atau tidak memenuhi salah satu dan/atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini; (ii) Usaha Penyewa yang dijalankan dalam ruang sewa tidak dilakukan sesuai Perjanjian; atau (iii) Penyewa dinyatakan pailit/dibubarkan berdasarkan ketetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/instansi yang berwenang.</p> <p><u>Pengalihan</u> Penyewa tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, bilamana perlu Pemilik akan membuat perjanjian pengalihan tersebut.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0070671 tanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 (“**Akta No. 44/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Zaenal Abidin
Komisaris Independen	:	Gunawan Tenggarahardja
Komisaris	:	Sia Leng Ho

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Friscantono
Wakil Direktur Utama	:	Rusli
Direktur	:	Debora Wahjutirto Tanoyo
Direktur	:	Lembing
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Tamunan

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Zaenal Abidin

Komisaris Utama Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1987, *Master* Manajemen dari ASIAN Institute of Management (AIM), Filipina pada tahun 1997 dan *Doctor of Philosophy* dari Santo Tomas University, Filipina pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir perbankan sebagai *Pro Manager Treasury* dan Analisa di Bidang Dana Perbankan pada tahun 1989-1992 di Bank Summa. Beliau juga aktif sebagai pengajar pada Perbanas Institute sejak tahun 1993 hingga saat ini, dan juga sebagai Asesor Manajemen Risiko Pasar Modal dari tahun 2016 sampai sekarang. Pada tahun 2013 sd 2019 beliau aktif sebagai Dosen di STIE IBS. Pada tahun 2011 sd 2012 beliau juga aktif sebagai Koordinator Staf Khusus Bidang Riset Asosiasi Perbanas dan sebagai peneliti senior GCG pada Indonesia Institute Corporate Governance periode 2008 sd 2018. Sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dari tahun 2012-2022. Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi Komisaris Independen di PT Sumberdaya Sewatama pada tahun 2021 sd 2022.

Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session* - Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya (Internal Perseroan), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Perseroan) *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (PT Efektifpro Knowledge Source).

Gunawan Tenggarahardja

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2003.

Memulai karir di Schlumberger OSA sebagai *International Field Engineer 1* pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1984. Pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1988, beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PT Bank Bali. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *General Manager* PT Sampoerna Transport Nusantara tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada PT Duta Pertiwi Tbk tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sigma Karya Sempurna (*Bali Camp*) pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dan mengawali karir di Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2003 dan pada tahun 2007 beliau merangkap sebagai Komisaris Independen sampai sekarang. Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi Komisaris Independen di PT Jakarta Setiabudi International Tbk sejak 2004.

Pada tahun 2003 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Beliau telah menjabat 7 (tujuh) periode sebagai Komisaris Independen dan telah menandatangani surat pernyataan independensi yang menyatakan dirinya tetap independen dalam rangka pemenuhan Pasal 25 POJK No. 33/POJK.04/2014.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session* - Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan

Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Managing Environmental, Social and Governance Risks and Opportunities* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya* (Internal Perseroan), *Peluang Metaverse di Industri Jasa Keuangan* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Philosophy That Flows In My Soul* (*Philosophy That Flows In My Soul*), *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (PT Efektifpro Knowledge Source).

Sia Leng Ho

Komisaris



Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Beliau menyelesaikan *Bachelor of Business Administration* dari *San Fransisco State University*, USA pada tahun 1981-1985.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir perbankan di PT Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai *Vice President-Corporate Banking Segment Head* pada tahun 1985-1991, kemudian beliau menjabat sebagai *Deputy President Director* di PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk pada tahun 1991-2012 dan sebagai komisaris pada tahun 2012, pada tahun 2012-2019 beliau menjabat sebagai *President Director* di PT Bank Agris Tbk dan pada tahun 2019-2021 beliau menjabat sebagai *Management Advisor* pada PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session - Keuangan Berkelanjutan* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Managing Environmental, Social and Governance Risks and Opportunities* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya* (Internal Perseroan), *Peluang Metaverse di Industri Jasa Keuangan* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Philosophy That Flows In My Soul* (*Philosophy That Flows In My Soul*), *Refreshment Credit SME Segmentation* (Internal Perseroan), *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (PT Efektifpro Knowledge Source).

Direksi**Achmad Friscantono***Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Beliau menyelesaikan *Bachelor of Science Degree in Agricultural Economics (Business & Industry)* University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA pada tahun 1987 dan *Master of Business Administration Degree (Marketing)* City University, Seattle, Washington, USA pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di perbankan pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk, menjabat sebagai *Senior Assistant Manager, Divisi Treasury* Bank Internasional Indonesia pada tahun 1990-1994. Pada tahun 1994-1996 di PT Bank Namura Internusa sebagai *Manager Divisi Treasury*. Pada tahun 1996-2000 di PT Bank Rama Tbk sebagai *Senior Manager Divisi Treasury & Divisi Internasional*. Pada tahun 2000-2006 di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai *Kepala Risiko Likuiditas (Senior Assistant Vice President) Market & Likuiditas Risiko Divisi*. Pada tahun 2006-2016 di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk *Treasury & Financial Institution Head (Executive Vice President)*. Pada tahun 2019-sekarang sebagai *Komisaris Utama PT Bank Victoria Syariah*.

Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai *Direktur Utama Perseroan*.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Expert Sharing Session - Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya* (Internal Perseroan), *Mini Town Hall* (Internal Bank), *Outbond : Working Together in Harmony* (Internal Perseroan), *Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Perseroan), *Refreshment Credit SME Segmentation* (Internal Perseroan), *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko* (PT Efektifpro Knowledge Source), *Refreshment Sertifikasi Treasury* (ACI FMA Indonesia).



Rusli

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau menyelesaikan Insinyur jurusan Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Mengawali karir di dunia perbankan pada tahun 1992, dengan menduduki jabatan sebagai Ka. Div *Treasury* di PT Bank Kesawan (sekarang PT Bank QNB Indonesia Tbk) tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, selain itu sebagai Direktur *Treasury* tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, Direktur Bisnis tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan sebagai Direktur Operasional tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Beliau kemudian bergabung di Perseroan sebagai Direktur Operasional dan Sistem pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Aspek Hukum dan Dokumen Pembukaan Rekening Perusahaan (Internal Perseroan), *DEG South East Asia Client Forum 2023 "Shaping Transformation"* (*DEG South East Asia Client Forum*), *Expert Sharing Session - Keuangan Berkelanjutan* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya* (Internal Bank), *Mini Town Hall* (Internal Perseroan), *Outbond : Together We Growth* (Internal Perseroan), *Outbond: Together We Can Do More Great Things* (Internal Perseroan), *Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Perseroan), *Refreshment Credit SME Segmentation* (Internal Perseroan), *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko* (PT Efektifpro Knowledge Source), *Undangan International Talks 2023* (Bank Indonesia).



Debora Wahjutirto Tanoyo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Beliau menyelesaikan *Bachelor of Science* dari University of San Francisco, California pada tahun 2006 dan *Master of Business Administration* dari University of San Francisco, California pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Pernah menjabat sebagai *Assurance Staff* Burr Pilger & Mayer LLP San Fransisco tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Sebagai *Senior Associate* 2 di Ernst & Young LLP, Singapore tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bergabung dengan Perseroan sebagai *Senior Staff Risk Management Div.* Sebagai *Finance Manager* di PT Victoria Investama Tbk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan menjabat sebagai Direktur PT Victoria Investama Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2018. Sebagai *President Commissioner* PT Sulfindo Adiusaha tahun 2017-2018. Beliau kemudian bergabung sebagai Komisaris di Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian sebagai Direktur di Perseroan.

Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session* - Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Managing Environmental, Social and Governance Risks and Opportunities* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya (Internal Perseroan), *Mini Town Hall* (Internal Perseroan), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Perseroan), *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (PT Efektifpro Knowledge Source).

Beliau memiliki hubungan keluarga dengan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan.



Lembing

Direktur

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Mengawali karir sebagai *Export Import Staff* di Golden Dragon tahun 1988 sampai dengan tahun 1989. Tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 beliau berkiprah di Bank Lippo dimana jabatan terakhir sebagai Kepala Wilayah Jakarta dan Kalimantan, pada tahun 2008-2009 menjabat *SME Regional Business Head* di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Sebagai *SME & Enterprise Banking Head* di PT Bank International Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Beliau menjabat sebagai *Direktur Marketing* di PT Elang Kurniasakti pada tahun 2012-2017. Kemudian sebagai *Retail SME Banking Head* di PT Maybank tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Beliau kemudian bergabung sebagai *Direktur* di Perseroan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai *Direktur Perseroan*.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session - Keuangan Berkelanjutan* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), *Managing Environmental, Social and Governance Risks and Opportunities* (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya* (Internal Perseroan), *Mini Town Hall* (Internal Bank), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Perseroan), *Refreshment Credit SME Segmentation* (Internal Perseroan), *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko* (PT Efektifpro Knowledge Source).

Tamunan

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko



Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 1990 dan Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Menjabat sebagai *Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko* sejak tahun 2008.

Beliau memulai kiprah dibidang perbankan di Bank Andromeda dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Akunting, tahun 1990 sampai dengan tahun 1996, diantaranya sebagai Kepala Bagian Kredit Korporasi tahun 1996 sampai dengan tahun 1997, dan Kepala Kantor tahun 1997.

Kemudian sebagai Kepala Kantor di Bank Alfa tahun 1997-1999, sebagai Staff Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bank Alfa – (BBKU) pada tahun 1999. Bergabung di PT Victoria Sekuritas sebagai Manager Operasional tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Sebagai Kepala Operasional dan *Compliance* di PT Mahastra Capital 2001 sampai dengan tahun 2003. Bergabung di Perseroan, diantaranya sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2004, sebagai Kepala Divisi *Compliance* 2004 sampai dengan tahun 2006, Direktur Muda Operasi dan Sistem tahun 2006-2007, sebagai Direktur Operasi dan Teknologi tahun 2007-2008, sebagai *Corporate Secretary* tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko tahun 2008 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Selama tahun 2023 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Outlook Banking Regulation : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan *Future Banking* (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), *Expert Sharing Session* - Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan Institut), *Governance, Risk & Compliance* (Internal Perseroan), Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya (Internal Perseroan), *Outbond : Change The Future* (Internal Perseroan), *Philosophy That Flows In My Soul* (Internal Bank), *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (PT Efektifpro Knowledge Source), Resertifikat “Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 7” (Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan), Sosialisasi Kebijakan *Risk Register* (Internal Perseroan), Webinar “*Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities*” (OJK Institute), Sosialisasi “Penguatan Kerangka Hukum Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Webinar dengan tema “Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional” (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan), Seminar OJK Carbon (Otoritas Jasa Keuangan), 4TH Legal Forum “*Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence* Dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan), FGD “Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan” (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan), Undanguan Kegiatan “*Risk and Governance Summit (RGS) 2023*” (Otoritas Jasa Keuangan), Diseminasi PPAK “*Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi Mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran* (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Achmad Friscantono, selaku Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Debora Wahjutirto Tanoyo memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari Ibu Suzana Tanojo selaku *Ultimate Beneficial Owner (UBO)* Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 42/2022 berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Perseroan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat (%)
Zaenal Abidin	8	8	100,00	-	-	-	13	13	100,00
Gunawan Tenggarahardja	8	8	100,00	-	-	-	13	13	100,00
Sia Leng Ho	8	8	100,00	-	-	-	13	13	100,00
Achmad Friscantono	-	-	-	52	51	98,08	13	13	100,00
Rusli	-	-	-	52	49	94,23	13	13	100,00
Debora Wahjutirto Tanoyo	-	-	-	52	49	94,23	13	13	100,00
Leming	-	-	-	52	45	86,54	13	12	92,31
Tamunan	-	-	-	52	49	94,23	13	13	100,00

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berpedoman pada Board of Commissioners Charter (BOC Charter) yang telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/12/23 tanggal 6 Desember 2023. Penyusunan BOC Charter Bank Victoria mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa No. 134 Tahun 2015, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan *BOC Charter* beserta realisasinya diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Memberikan pengesahan tentang arah kebijakan, strategi usaha dari Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) baik rencana jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada OJK.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan maupun pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
- e. Memberikan keputusan tertulis disertai dengan alasan-alasan atas transaksi-transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi.
- f. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- g. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.
- h. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
- i. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, dan
 - Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 5.1.9 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- k. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- l. Dewan Komisaris wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan asset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Perseroan dalam pengelolaan risiko kredit.
- m. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- n. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun :
- Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- p. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Perseroan yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Dalam rangka pengendalian internal, Dewan Komisaris wajib:
- Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (SKAI & Anti Fraud) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - Memberikan persetujuan terhadap Piagam Audit Intern setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien.
 - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI & Anti Fraud paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Mengkaji kinerja SKAI & Anti Fraud.
 - Menunjuk *quality assurance* independent dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
- r. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*.
- s. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- t. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada OJK pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja Perseroan termasuk pencapaian target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
- u. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite lainnya (jika dianggap perlu) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.
- v. Menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
- Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau,
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- w. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:
- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri,
 - Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan, dan
 - Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
- x. Menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris.
- y. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
- z. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.
- aa. Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi dan memberikan tanggapan kepada Direksi, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada RUPS.
- bb. Secara rinci, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris diatur dalam surat keputusan Dewan Komisaris secara terpisah.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berpedoman pada Board of Directors Charter (BOD Charter) PT Bank Victoria International Tbk yang telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 006A/SK-DIR/12/23 tanggal 6 Desember 2023. Penyusunan BOD Charter Bank Victoria mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Anggaran Dasar Bank.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi berdasarkan BOD Charter dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
- d. Menyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
- e. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Perseroan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- f. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan & Anti Fraud Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- g. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumber daya secara optimal.
- h. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan Perseroan dan lingkungan *peer group* serta menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward & punishment* (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).
- i. Menerapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Perseroan atas hal-hal yang dapat membahayakan Perseroan.
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- k. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), International Accounting Standard (IAS) dan ketentuan lain yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran SKAI & Anti Fraud.
- l. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- n. Mengungkapkan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

- o. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; serta melakukan revaluasi secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan melakukan revaluasi secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.955.125,- ribu dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.916.015,- ribu.

Sedangkan Remunerasi Dewan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp16.956.764,- ribu dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.660.313,- ribu.

Komite di bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 32, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko dengan memonitor proses perbaikan Perseroan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang baik.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mengacu pada Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/12/23 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 26 Oktober 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/03/24 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Ketua	:	Zaenal Abidin
Anggota	:	Gunawan Tenggarahardja
Anggota	:	Medi Sejati
Anggota	:	Yozef Abdulrachman

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko :

Zaenal Abidin — Ketua Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Gunawan Tenggarahardja — Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Medi Sejati — Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 58 tahun.

Meraih Diploma Manajemen Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKPI Bandung pada tahun 1990.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan sejak tahun 2021 beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan, Anggota Komite Audit PT Bank Victoria Syariah dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria Syariah.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai kolektor di PT Jasa Marga Persero pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1986, menjadi Teller Bank Swadesi pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991, di Bank Intan sebagai Sekretaris Kepala Biro Kredit; *Internal Control Officer*, Kepala Bagian Audit Kredit dan Marketing; dan Kepala Bagian Kredit *Support*, dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1999, menjadi Auditor Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim & Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Djuwono, tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, di Bank Harmoni menjabat sebagai Kepala Bagian Akunting pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai Kepala Bagian Akunting PT Bank Index Selindo pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai Kepala Divisi Akunting PT Bank Swaguna pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, menjabat sebagai Kepala Divisi Akunting PT Bank Victoria Syariah Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, menjadi Akunting *Officer* PT Bank Victoria International Tbk pada tahun 2014, menjabat sebagai Kepala Bagian Sentral Operasional PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2014, menjabat sebagai Kepala Bagian *Support* Pembiayaan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015, menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Yozef Abdurachman — Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tahun 2019. Beliau juga menjabat sebagai Konsultan dan *Trainer* bidang Manajemen Risiko sejak tahun 2010, *Trainer* dan Fasilitator Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Surveillance/Refreshment* Manajemen Risiko sejak tahun 2011, Konsultan Manajemen Risiko Operasional PT Bank Agro Tbk sejak tahun 2011, Konsultan Manajemen Risiko Operasional PT Bank Mutiara Tbk sejak tahun 2013), Konsultan *Mapping* dan Pengukuran *Eksposur Corporate Loans Portfolio* PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak tahun 2014) dan Konsultan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, Sidoarjo sejak tahun 2018.

Sebelumnya pernah menjabat di PT Bank Dagang Negara sebagai *Officer Development Program* pada tahun 1985 sampai dengan 1986; *System and Procedure Department Staff - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1986 sampai dengan 1987; *Technical Support Department Staff - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1989; *Setup MIDAS Application System*, Los Angeles Agency, Los Angeles, USA pada tahun 1989; *Programmer III - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990; Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994; Kepala Bagian Operasi Komputer – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996; dan Kepala Bagian Dukungan Pengguna – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Selanjutnya beliau menjabat di PT Bank Mandiri Tbk sebagai *Project Manager Y2K (Legacy PT Bank Dagang Negara)* pada tahun 1999; *Group Head, Branch IT Deployment – IT Retail Banking Services Delivery Division* pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000; *Integrasi Sistem Aplikasi Core Banking (implementasi 600 cabang)* pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000; *Senior Manager of Operational Risk Management Review – Operational Risk Department – Portfolio and Operational Risk Management Group* pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004; *Team Leader of Business Line II – Operational Risk Department – Portfolio and Operational Risk Management Group* pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006; *Trainer Implementation and Workshop Manajemen Risiko Operasional kepada ORM Coordinator Kantor Wilayah, Kantor Pusat, dan Kantor Cabang Timor Leste* pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010; *Team Leader of Policy – Operational Risk Department – Market and Operational Risk Group* pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008; dan *Team Leader of MIS – Operational Risk Department – Market and Operational Risk Group* pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilengkapi dengan Pedoman yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/01/24 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Victoria International Tbk.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (“**POJK No. 55/2016**”), Perseroan telah memiliki Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan periode 26 Juli 2018 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002C/SK-DIR/11/22 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Ketua	:	Gunawan Tenggarahardja
Anggota	:	Sia Leng Ho
Anggota	:	Syahda Candra

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi :

Gunawan Tenggarahardja — Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Sia Leng Ho — Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Syahda Chandra — Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun.

Meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Kepala Divisi *HCM & General Affair* di Perseroan, sebelumnya pernah menjabat sebagai: *Senior Staff Human Resource Department (Recruitment and Man Power)* di PT Bank Ekonomi Rahardja pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000; *Assistant Manager Human Resource Department* di PT Hawaii di Confectionery Factory pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002; *Supervisor Human Resource Department* di PT JS Multi Collection pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003; Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi *HCM & General Affair*, menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Resource and General Affair* pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 menjadi Kepala Divisi *Human Capital Management* sampai dengan tahun 2017.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu pada POJK No. 55/2016, Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga Perseroan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2016.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit berpedoman pada Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit. Piagam dan Pedoman tersebut disusun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dimutakhirkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/12/23 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk.

Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan komposisi anggota Komite Audit terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Keputusan Direksi No. 002A/SK-DIR/11/22 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit tanggal 9 November 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Zaenal Abidin
Anggota	:	Medi Sejati
Anggota	:	Yozef Abdulrachman

Zaenal Abidin — Ketua Komite Audit

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Medi Sejati — Anggota Komite Audit

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.2 pada pembahasan Komite Pemantau Risiko dalam Prospektus.

Yozef Abdulrachman — Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.2 pada pembahasan Komite Pemantau Risiko dalam Prospektus.

Komite di bawah Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif di bawah Direksi yang di antaranya berperan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai, sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/SK-DIR/01/24 diuraikan sebagai berikut :

Susunan:

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

Anggota

Undangan Tetap

Undangan Tidak Tetap

Diisi oleh:

Direktur Utama
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Risk Management/Integrated Division Head

Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Bisnis
SEVP of Change Management Office
SEVP of Operation & International Banking
SEVP of Business
SEVP of Finance, Accounting & MIS

SKAI & Anti Fraud Division Head
Information Technology Division Head
Treasury Division Head
Operations & Internal Control Division Head
Accounting Division Head
Change Management Office Divion Head
Compliance & System Procedure Divion Head

Pihak Internal dan Eksternal yang diundang

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019A/SK-DIR/10/23 diuraikan sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dengan sepengetahuan komisaris, yang meliputi :
 - Penyusunan dan persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko pasar risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
 - Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengembangan atas penerapan budaya risiko untuk setiap jenjang organisasi;
- c. Mengevaluasi dan menyesuaikan Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko dengan kebijakan otoritas yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank;
- d. Mengevaluasi arah, strategi, dan program manajemen risiko;
- e. Mengevaluasi penerapan manajemen risiko, yang meliputi:
 - Pemantauan terhadap implementasi Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko;
 - Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional Bank dan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko;
 - Pengkajian secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
 - Pengkajian terhadap usulan aktivitas/produk baru dan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas tertentu, termasuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan; dan
 - Pengungkapan manajemen risiko paling sedikit mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DALAM GRUP KEUANGAN

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan merupakan komite eksekutif yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai dan sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas usaha Grup Keuangan Victoria.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-66/PB.33/2021 tanggal 23 Juni 2021 hal Perubahan Status Konglomerasi Keuangan Grup Victoria menjadi Grup Keuangan Victoria, dimana Bank ditunjuk sebagai Entitas Koordinator.

Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Grup Keuangan Victoria serta tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/08/21 tertanggal 20 Agustus 2021 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan atas penerapan budaya risiko secara terintegrasi sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Grup Keuangan Victoria;
- b. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan rekomendasi serta perbaikan atau penyempurnaan dalam hal penyusunan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria;
- d. Mengarahkan, menyetujui, memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan dan/atau pedoman umum penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha anggota Grup Keuangan Victoria; dan
- e. Evaluasi atas arah, strategi, dan program manajemen risiko terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/08/21 tanggal 20 Agustus 2021. Informasi terkait komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan diungkapkan pada tabel berikut.

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua (Anggota)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama
Sekretaris (Anggota)	Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i> Entitas Utama
Anggota	PT Bank Victoria Syariah Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko Unit Manajemen Risiko PT Victoria Sekuritas Indonesia Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko Unit Manajemen Risiko PT Victoria Insurance Tbk Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko Pejabat Eksekutif yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Victoria Manajemen Investasi Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko Unit Manajemen Risiko PT Victoria Alife Indonesia Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi terhadap pengendalian risiko likuiditas dan rentabilitas serta pengambilan keputusan manajemen dalam rangka pengelolaan aset dan liabilitas.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/09/16 tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) Perseroan.

Kedudukan ALCO dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/03/2019 tentang Susunan Keanggotaan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Victoria International Tbk, komposisi keanggotaan ALCO, yaitu:

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Treasury</i>

Susunan

Anggota Tetap

Diisi oleh

Direksi
Seluruh SEVP
Seluruh Kepala Divisi pada Direktorat Bisnis
Kepala Divisi *Risk Management/Integrated*
Kepala Divisi *Finance and Accounting*

Anggota Tidak Tetap

Divisi atau Unit Kerja Lain dan Seluruh Kepala Area

KOMITE KREDIT

Komite Kredit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan memutuskan jumlah *Credit Exposure* Perseroan dalam bentuk aktiva produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kredit mengacu pada Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/02/21 tanggal 1 Februari 2021 tentang Prosedur Persetujuan dan Wewenang Komite Kredit Pusat Perseroan, serta peraturan terkait lainnya.

Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan fasilitas penyediaan dana dari masing-masing divisi/unit pengusul.

Kedudukan Komite Kredit dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan ketua komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait komposisi anggota Komite Kredit diungkapkan sebagai berikut :

Susunan:

Ketua (Anggota)

Diisi oleh:

Direktur Utama

Anggota

Wakil Direktur Utama
Direktur Bisnis
Direktur Keuangan
Kepala Divisi *Credit Risk Review*

SEVP atau *Division Head* pengusul yang mengelola jenis fasilitas penyediaan dana yang diproses, sebagai anggota dan sebagai sumber informasi

SEVP of Corporate & Commercial Banking
Kepala Divisi *SME Banking*
Kepala Divisi *Multifinance & Consumer Banking*
Kepala Divisi *International Banking*
Kepala Divisi *Special Asset Management*

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan berpedoman pada Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 016B/SK-DIR/08/23 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) Perseroan.

Kedudukan Komite Kebijakan Perkreditan dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Komposisi anggota Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari:

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap Anggota	Wakil Direktur Utama dan/atau Direktur Bisnis
Sekretaris merangkap Anggota	<i>Risk Management/ Integrated Division Head</i>
Anggota	Direktur Keuangan SEVP of Business SEVP of Operations & International Banking SME Banking Division Head Commercial Banking Division Head Credit Risk Review Division Head Loan & Trade Operations Division Head Special Asset Management Division Head Credit Legal Division Head SKAI & Anti Fraud Division Head International Banking Division Head Credit Monitoring & Collection Vice Division Head
Anggota (Non Voting)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & System Procedure Division Head Corporate Legal Division Head

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang berfungsi untuk menyusun rencana strategis teknologi informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan, serta merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi berpedoman pada Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 022A/SK-DIR/01/24 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan.

Kedudukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan ketua komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait susunan komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi diuraikan pada tabel berikut:

Susunan: Ketua	Diisi oleh: Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Information Technology</i>
Sekretariat	Divisi <i>Information Technology</i>
Anggota	Direktur Keuangan Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko SEVP of <i>Change Management Office</i> SEVP of <i>Business</i> SEVP of <i>Finance, Accounting & MIS</i> SEVP of <i>Operations & International Banking</i> <i>Risk Management/ Integrated Division Head</i> <i>Change Management Office Division Head</i> <i>HCM & General Affairs Division Head</i>
Undangan Tetap	SKAI & <i>Anti Fraud Division Head</i> <i>General Affairs Vice Division Head</i> <i>Accounting Division Head</i> <i>Branch Banking Network & Digital Sales Division Head</i>
Undangan Tidak Tetap	Pihak Internal & Eksternal Yang Diundang

KOMITE PEMANTAU DAN PELAKSANAAN GCG

Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG di Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi No. 016A/SK-DIR/08/23 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Komite Pemantau dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kedudukan Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait susunan keanggotaan Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG Perseroan diungkapkan sebagai berikut:

Susunan: Ketua	Diisi oleh: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Compliance & System Procedure</i>
Anggota Tetap	Direksi <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i> Kepala Divisi <i>SKAI & Anti Fraud</i> Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i>
Anggota Tidak Tetap	Seluruh Kepala Divisi

KOMITE PERSONALIA

Komite Personalialia merupakan Komite yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan, serta memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di perbankan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Kedudukan Komite Personalialia dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Saat ini, Komite Personalialia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 008/SK-DIR/03/19 tanggal 27 Maret 2019. Adapun keanggotaan Komite Personalialia Perseroan untuk periode 2021 diungkapkan sebagai berikut.

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Human Capital</i>
Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama
Anggota Tidak Tetap	Direktur Terkait Kepala Divisi

KOMITE PENGADAAN

Komite Pengadaan merupakan Komite yang berfungsi membantu Direksi dalam memberikan masukan untuk hal-hal yang penting dan relevan dalam perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, serta memberikan persetujuan untuk setiap pengadaan barang dan jasa.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengadaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 010A/SK-DIR/01/23 tanggal 10 Januari 2023 tentang Komite Pengadaan Perseroan.

Kedudukan Komite Pengadaan dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi. Susunan komposisi Komite Pengadaan diungkapkan sebagai berikut:

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	<i>HCM & General Affairs Division Head</i> <i>General Affairs Vice Division Head</i>
Anggota Tetap	Direktur
Anggota Tidak Tetap	<i>Senior EVP</i> <i>Division Head</i> <i>Vice Division Head</i>

KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan Komite yang bertugas membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan produk *liabilities* dan *wealth management* yang akan dan/atau telah diterbitkan agar produk tersebut mampu bersaing dengan bank lain dan menghasilkan keuntungan bagi Bank. Komite produk wajib memperhatikan kepentingan nasabah dan Bank, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Produk mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 002A/SK-DIR/10/22 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Komite Produk Perseroan.

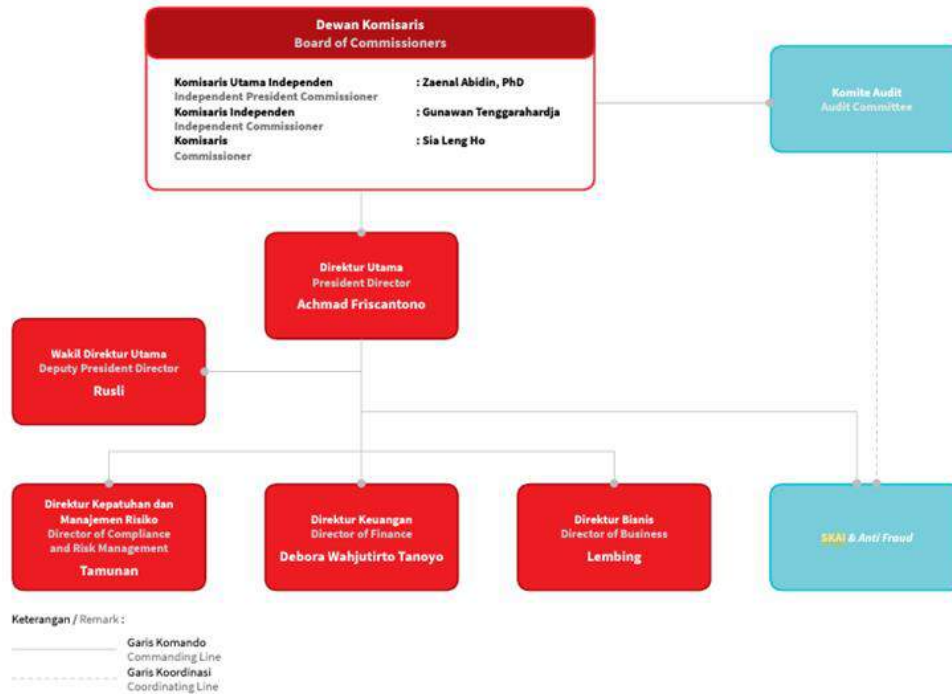
Kedudukan Komite Produk dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Struktur dan keanggotaan Komite Produk diungkapkan sebagai berikut:

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua <i>Steering Committee</i>	Direktur Utama
Anggota <i>Steering Committee</i>	Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua <i>Product Committee</i>	<i>SEVP of Change Management Office</i>
Sekretaris	<i>Change Management Office Division Head</i>
Anggota	<i>SEVP of Operations & International Banking</i> <i>SEVP of Finance, Accounting & MIS</i> <i>Information Technology Division Head</i> <i>Operations & Internal Control Division Head</i> <i>Compliance & System Procedure Division Head</i> <i>Accounting Division Head</i> <i>Treasury Division Head</i> <i>Risk Management/Intergrated Division Head</i> <i>Branch Banking Network & Performance Vice Division Head</i> <i>Product and Marketing Communication Vice Division Head</i> <i>E-channel and Digital Transformation Departement Head</i> <i>Commercial Banking Department Head</i>

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

SKAI adalah organ di bawah Direksi yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan. SKAI juga berperan dalam membantu Perseroan mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam proses *governance*.

Struktur Organisasi SKAI Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No. 008A/SK-DIR/09/23 tanggal 8 September 2023 tentang Struktur Organisasi Perseroan, yang diuraikan sebagai berikut:



- Kepala SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hal ini untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit Internal dalam menjalankan tugasnya;
- SKAI harus mendapat dukungan dari Manajemen dan Dewan Komisaris agar auditor dapat memperoleh kerja sama sepenuhnya dari *auditee* dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa hambatan;
- Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
- Komunikasi SKAI dengan Komite Audit adalah dalam bentuk koordinasi dalam hal terkait dengan pengembangan fungsi dan kinerja SKAI; serta
- SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama salinannya agar disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Kepatuhan serta Manajemen Risiko.

Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama. SKAI bertindak independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada regulator.

Pada tahun 2023, jumlah personel SKAI sebanyak 9 (sembilan) orang serta seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Sertifikasi profesi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keahlian SKAI serta menjadi parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian SKAI. Berikut adalah informasi mengenai SKAI dan sertifikasi profesi yang telah diperoleh personel SKAI:

Nama	Jabatan	Sertifikasi	Masa Berlaku	Penyelenggara
Sertifikasi Audit Internal				
Djoko Soendjojo	Kepala Divisi	Level Auditor Supervisor	05 Desember 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Ferry A Deuning	Kepala Unit	Level Auditor	24 Agustus 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Joel Eka M Krissata	Senior Officer	Level Supervisor	05 Desember 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Fadillah Syarif	Senior Officer	Level Supervisor	05 Desember 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Jantamen Simanjuntak	Officer	Level Auditor	05 Desember 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Diah Rucihto Januar	Senior Officer	-	-	-
Yohanes Reynaldi	Officer	-	-	-
Made Putera Kemara	Officer	-	-	-
Sertifikasi Manajemen Risiko				
Djoko Soendjojo	Kepala Divisi	Manajemen Risiko Level 4	07 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Ferry A Deuning	Kepala Unit	Manajemen Risiko Level 3	08 Desember 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Joel Eka M Krissata	Senior Officer	Manajemen Risiko Level 3	26 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Fadillah Syarif	Senior Officer	Manajemen Risiko Level 3	26 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Jantamen Simanjuntak	Officer	Manajemen Risiko Level 1	22 November 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Yohanes Reynaldi	Officer	Manajemen Risiko Level 1	29 November 2026	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Made Putera Kemara	Officer	Manajemen Risiko Level 1	15 Februari 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Diah Rucihto Januar	Senior Officer	-	-	-

Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK-DIR/HCM/01/21 tanggal 11 Januari 2021, Perseroan telah menunjuk Caprie Ardira Azhar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan :

Nama : Caprie Ardira Azhar
 No. Telp. : +62 21 522 8888
 No. Fax : +62 21 522 8777
 Email : corsec@victoriabank.co.id
 Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 10
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
 Jakarta Selatan 12930

Riwayat Caprie Ardira Azhar

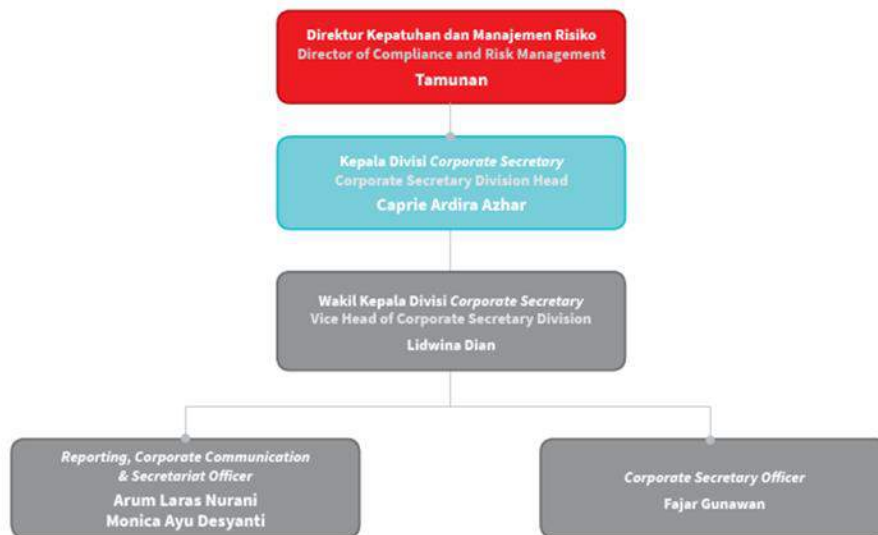
Warna Negara Indonesia, saat ini berusia 35 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

Mulai berkarir di Perseroan sejak tahun 2019 sebagai *Unit Head Corporate Secretary* Perseroan. Sebelum berkarir di Perseroan, Caprie Ardira Azhar menjabat sebagai *Associate Lawyer* Makes & Partners Lawfirm pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014; pernah menjabat sebagai *Legal & Corporate Secretary* di PT Victoria Investama Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; terakhir menjabat sebagai *Head Legal and Compliance* di PT Sucor Sekuritas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Kedudukan *Corporate Secretary* berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga setiap bentuk pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur *Corporate Secretary* sebagai berikut :



Tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Bank.
- c. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan serta masyarakat.

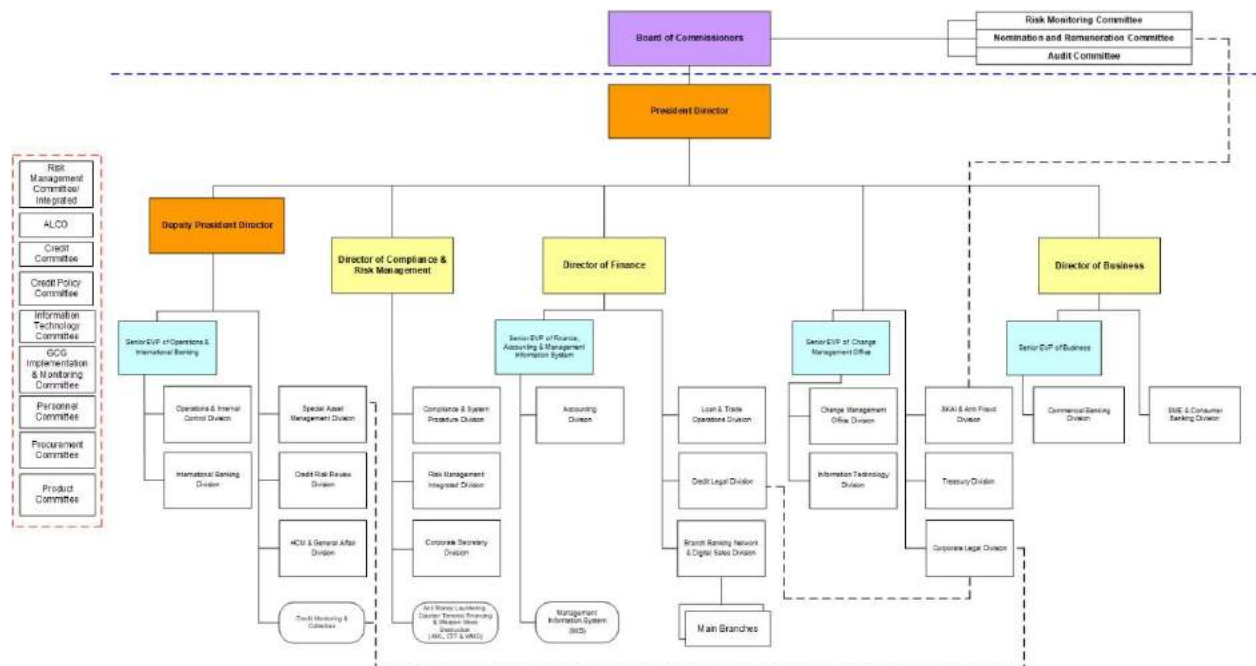
Uraian pelatihan yang pernah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	PENYELENGGARA	TOPIK / MATERI
1.	12 Agustus 2023	Kanatta Daya	<i>Anti Fraud Management For Leaders Batch 2</i>
2.	7 November 2023	Otoritas Jasa Keuangan Institute	<i>Expert Sharing Session - Keuangan Berkelanjutan</i>
3.	28 Januari 2023	Internal Bank	<i>Governance, Risk & Compliance</i>
4.	30 Mei 2023	Otoritas Jasa keuangan Institute	Membangun keyakinan Nasabah Aset Digital Dari Risiko Siber
5.	14 April 2023	Internal Bank	Membentuk Pribadi Yang Amanah Dan Terpercaya
6.	28 Juli 2023	Internal Bank	<i>Mini Town Hall</i>
7.	14-15 January 2023	Internal Bank	<i>Outbond : SQEW</i>

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	PENYELENGGARA	TOPIK / MATERI
8.	30 Mei 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	<i>Outlook Banking Regulation</i> : Tantangan Industri Perbankan, Arah Regulasi, dan Future Banking
9.	28 Januari 2023	Internal Bank	<i>Philosophy That Flows In My Soul</i>
10.	08 April 2023	Efektif Pro	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
11.	13 Juni 2023	PT Bursa Efek Indonesia	<i>The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia</i>
12.	22 Juni 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Seminar <i>Accelerating Sustainable Development</i> : “Experiences from the Frontlines in Promoting Sustainable Bond/Sukuk Issuances and Investment”
13.	13 Juli 2023	Indonesia Corporate Secretary Association	Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
14.	20 Juli 2023	Otoritas Jasa keuangan Institute	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UUP2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Pasar Modal
15.	22 Agustus 2023	PT Bursa Efek Indonesia	<i>Compliance Refreshment</i> Emiten dan Perusahaan Publik
16.	18 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Dengar Pendapat RPOJK Klustering SSK
17.	5 Oktober 2023	PT Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXC Carbon)
18.	6 Oktober 2023	Asosiasi Emiten Indonesia	Penjelasan atas Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 terkait Ketentuan <i>Free Float</i> dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE IDXnet
19.	7 November 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	<i>Sustainable Finance Making Our Sky Become Blue Forever</i>
20.	20 Desember 2023	Otoritas Jasa keuangan Institute	<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024</i>

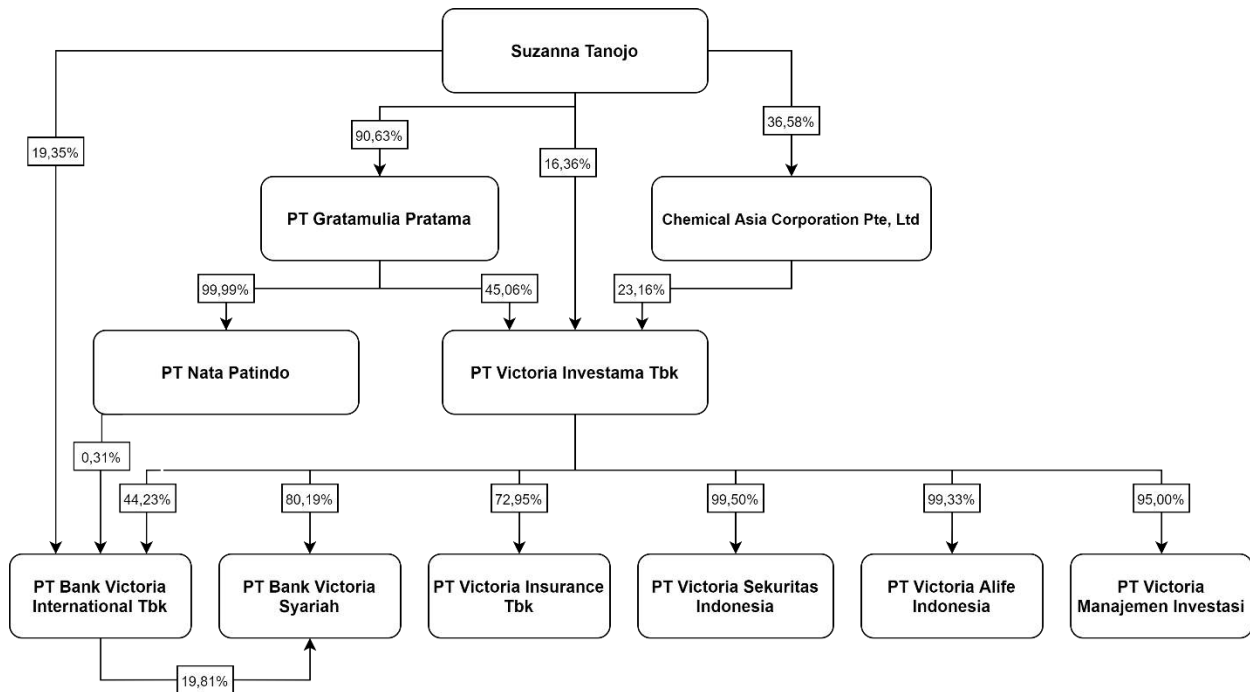
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur Organisasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008A/SK-DIR/09/23 tanggal 8 September 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Victoria Investama Tbk.

Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) adalah Suzanna Tanojo.

Suzanna Tanojo telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”). Pelaporan Suzanna Tanojo sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan ke Menkumham telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 713 karyawan dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember	
	2023	2022
Direksi	5	5
Manajemen	171	161
Staff	537	522
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember	
	2023	2022
> 60 tahun	13	15
51-60 tahun	77	70
41-50 tahun	155	148
31-40 tahun	246	263
21-30 tahun	218	186
≤ 20 tahun	4	6
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2023	2022
S3	2	-
Pasca Sarjana	36	36
Sarjana	408	378
Diploma	100	107
< SMA	167	167
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Status Karyawan

Jenjang Status Karyawan	31 Desember	
	2023	2022
Karyawan Tetap	410	399
Karyawan Tidak Tetap	169	153
<i>Outsourcing</i>	134	136
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Masa Kerja

Jenjang Masa Kerja	31 Desember	
	2023	2022
>20 tahun	22	22
16-20 tahun	37	47
11-15 tahun	101	97
6-10 tahun	153	192
0-5 tahun	400	330
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Jenjang Jenis Kelamin	31 Desember	
	2023	2022
Pria	374	364
Wanita	339	324
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2023	2022
KPO	312	285
KCU Bali	15	14
KCU Bandung	17	17
KCU Makassar	14	16
KCU Manado	12	12
KCU Medan	17	17
KCU Semarang	17	17
KCU Surabaya	22	22
KCU Bogor	14	15
KCU Solo	13	13
KCU BIP	18	18
KCU Cideng	18	20
KCU Fatmawati	18	20
KCU Kelapa Gading	15	15
KCU Senayan	19	19
KCP BSD	7	7
KCP Central Park	7	6
KCP Citra 2	7	7
KCP Duta Mas	7	7
KCP Duta Merlin	7	7
KCP Gading Serpong	8	8
KCP Grand Wijaya	6	7
KCP Green Garden	8	8
KCP Kebon Jeruk	8	8
KCP Kelapa Gading 2	7	7
KCP Kemang	8	7
KCP Muara Karang 2	9	7
KCP Patal Senayan	7	7
KCP Pecenongan	7	7
KCP PIK	8	8
KCP Pondok Indah	7	6
KCP Puri	7	8
KCP Senayan City	7	7
KCP Sunter	6	6
KCP Taman Palem	7	7
KCP Tanah Abang Blok B	7	7
KCP Tomang	6	5
KCP WBI Slipi	7	7
KCP Wisma Indocement	7	7
Total	713	688

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Aktivitas Utama	31 Desember	
	2023	2022
Komisaris	3	3
Direksi	5	5
Senior EVP	4	4
Advisor	0	1
Anggota Komite	2	2
Operations & Internal Control Division	225	223
Information Technology Division	41	34
Commercial Banking Division	22	0
Commercial & SME Banking Division	0	29
SME & Consumer Banking Division	29	0
Consumer Banking	0	4
Corporate Banking	0	7
Business Linkage	0	5
Loan & Trade Operations Division	18	17
Human Capital Management & General Affair	146	147
Accounting Division	12	8
Finance & Tax	0	3
Change Management Office Division	18	15
Treasury Division	10	10
Compliance & System Procedure Division	8	6
Special Asset Management Division	8	8
Credit Risk Review Division	10	9
Risk Management/Integrated Division	8	7
SKAI & Anti Fraud Division	8	8
International Banking Division	8	8
Credit Legal Division	10	8
Corporate Secretary Division	5	5
Corporate Legal Division	4	3
Credit Monitoring & Collection	4	4
Branch Banking Network & Digital Sales	83	84
Management Information System	4	4
AML, CTF & WMD	4	3
Officer Luar Kota	14	14
Total	713	688

Perseroan memiliki pejabat *Senior Executive Vice President* (SEVP) yang dianggap memiliki keahlian khusus dibidangnya. Ketiadaan SEVP tersebut dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 4 (empat) SEVP dengan informasi mengenai riwayat singkat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab Utama	Sertifikasi
Muhammad Rakhmadhani	SEVP Change Management Office	48 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Pricing Actuary Tugu Mandiri Insurance (Subsidiary of Pertamina) (2002–2003); b. Pricing Actuary AIA Indonesia (2003 – 2005); c. Pricing Actuary Manulife Financial(2005 – 2006); d. Pricing/Marketing Actuary AIA Indonesia (2006 – 2007); e. Head of Operations and Product of Insurance Business Group Citibank, N.A (2007 – 2008); f. Group Head of Process, Policy and Control, Business Planning Customer Analytics Bank ANZ Indonesia (2008 – 2013); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam penyusunan strategi berkaitan dengan IT perusahaan dan serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, b. Bertanggung jawab dalam seluruh project Change Management Office 	<p>Manajemen Risiko Level 5 (LSPP)</p> <p>Selain sertifikasi yang telah disebutkan diatas, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki perizinan lain</p>

Nama	Jabatan	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab Utama	Sertifikasi
			<p>g. Associate Director of Products, Ops, Tech, Marketing PT Bank Victoria International (2013 – 2018);</p> <p>h. Chief of Business Development PT Lippo Securities Tbk, Lippo Financial Service Group (2018 – 2020); dan</p> <p>i. Founder SimpanDuit Start Up Fintech Company (2019 – 2020).</p>	<p>Division dan serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
Yohanes	SEVP Operations & International Banking	48 tahun	<p>a. Account Officer Kantor Cabang Pluit PT Bank Lippo Tbk (1991 – 2000);</p> <p>b. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Gedung Tifa PT Bank Century Tbk (2000 – 2007);</p> <p>c. Kepala Divisi Operasi PT Bank Windu Kentjana International Tbk (2007 – 2016);</p> <p>d. Kepala Divisi Operasi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (2016 – 2017); dan</p> <p>e. Credit & Finance Director PT Bank Harda International Tbk (2017 – 2021).</p>	<p>Bertanggung jawab dalam penyusunan strategi berkaitan dengan Operations & Internal Control dan International Banking perusahaan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Manajemen Risikot Level 5 (BSMR)</p> <p>Selain sertifikasi yang telah disebutkan diatas, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki perizinan lain</p>
Mira Christiana	Senior EVP of Business	45 tahun	<p>a. Officer Development Program Batch XII PT Bank Mandiri Tbk (2004 – 2005);</p> <p>b. Relationship Manager Commercial Banking Center PT Bank Mandiri Tbk (2005 – 2013);</p> <p>c. Medium Loan Business Department Head PT Bank Mutiara Tbk (2013 – 2014);</p> <p>d. SME Business Division Head PT Bank Jtrust Indonesia (2014 – 2015);</p> <p>e. Commercial Business Deputy Division Head PT Bank Jtrust Indonesia (2015 – 2016);</p> <p>f. Corporate Business Division PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (2016 – 2017);</p> <p>g. Vice President Remedial Management & Credit Reposition PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (2016 – 2017);</p> <p>h. Head of Corporate Credit PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2017 – 2018);</p> <p>i. Credit Risk Review Deputy Division Head PT Bank Victoria International Tbk (2018 – 2018);</p> <p>j. Credit Risk Review Division Head PT Bank Victoria International Tbk (2019 – 2020);</p> <p>k. Corporate, Business Linkage & Consumer Banking PT Bank Victoria International Tbk (2021 – 2022); dan</p> <p>l. Senior EVP of Business PT Bank Victoria International Tbk (2022 – saat ini).</p>	<p>a. Membina, mengendalikan, mengawasi serta mengarahkan seluruh team dalam melaksanakan kegiatan perkreditan guna mengoptimalkan laba melalui pemberian kredit yang berkualitas dan pengendalian resiko yang tepat.</p> <p>b. Membantu Director of Business dalam merumuskan, mengevaluasi, merevisi prosedur perkreditan serta Strategi Commercial & Business Linkage.</p>	<p>Manajemen Risiko Level 4 (LSPP)</p> <p>Selain sertifikasi yang telah disebutkan diatas, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki perizinan lain)</p>
Suryadi	Senior EVP of Accounting, Finance & Management Information System (MIS)	46 tahun	<p>a. Group Head KAP Johan Malonda Astika dan Rekan (2000 – 2005);</p> <p>b. Kepala Bagian Accounting PT Unitama Sari Mas (2005 – 2006);</p> <p>c. FA Manager PT Triteguh Manunggal Sejati (2006 – 2008);</p> <p>d. Finance Deputy Manager PT Menamas Mitra Energi (2008 – 2011);</p> <p>e. Finance & Accounting Vice President PT Skybee Tbk (2011 – 2013);</p> <p>f. Direktur Keuangan PT Victoria Insurance Tbk (2013 – 2022); dan</p> <p>g. Direktur Keuangan PT Victoria Investama Tbk (2022 – 2023).</p>	<p>Bertanggung jawab dalam penyusunan strategi Finance, Accounting & Management Information System perusahaan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p>	-

Selain SEVP, Perseroan juga memiliki tenaga ahli yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab Utama	Sertifikasi
Yozef Abdulrachman	Anggota Komite Pemantau Risiko	66 tahun	<p>a. Kepala Bagian Help Desk & User Support PT Bank Dagang Negara (1985 – 1999);</p> <p>b. Senior Manager & Risk Management Group PT Bank Mandiri Tbk (1999 - 2010); dan</p> <p>c. Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk (2019 – saat ini).</p>	<p>a. Bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk.</p> <p>b. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, perkreditan serta operasional.</p> <p>c. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi.</p> <p>d. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut.</p> <p>e. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Victoria yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Victoria.</p> <p>f. Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko</p> <p>g. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank Victoria kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>h. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.</p> <p>i. Pemantauan pelaksanaan Good Corporate Governance telah berjalan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>j. Melakukan training kepada Divisi Manajemen Risiko terkait Manajemen Risiko.</p>	<p>LSPP Level 2</p> <p>Selain sertifikasi yang telah disebutkan diatas, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki perizinan lain</p>

Nama	Jabatan	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab Utama	Sertifikasi
				k. Menjadi bagian dari Anggota Komite Terintegrasi dan membantu entitas group Victoria.	
Medi Sejati	Anggota Komite Audit	57 thn	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Collector</i> PT Hasa Marga (1984 – 1986); b. <i>Teller</i> PT. Bank Swadesi (1990 – 1991); c. Kepala Bagian Kredit Support PT Bank Intan (1991 – 1999); d. Auditor KAP Edi Kaslim dan KAP Gatot Permadi Djuwono (GPJ) (1999 – 2002); e. Kepala Bagian Akunting PT Bank Harmoni (2002 – 2007); f. Kepala Bagian Akunting PT Bank Index Selindo (2007 – 2008); g. Kepala Divisi Akunting PT Bank Swaguna (2008 – 2010); h. Kepala Divisi Akunting Bank Victoria Syariah (2010 – 2014); i. Kepala Divisi Kepatuhan Bank Victoria Syariah (2014 – 2020); j. Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Victoria Alife Indonesia (2021 – Oktober 2021); dan k. Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Victoria Syariah (2021 – saat ini). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank. c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Bank dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi. e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank. f. Memberikan masukan atau saran terkait dengan temuan pemeriksaan SKAI. g. Melakukan penyempurnaan atas Sistem & Prosedur SKAI, Internal Kontrol, Manajemen Risiko, General Affair, Kredit, Administrasi Perkreditan, Operasional dan Sisdur Divisi / Cabang lainnya. h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. i. Pemantauan pelaksanaan Good Corporate Governance telah berjalan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. j. Melakukan training kepada team Audit Internal terkait Risk Based Audit. k. Menjadi bagian dari Anggota Komite Terintegrasi dan membantu entitas group Victoria. 	<p>LSPP Level 3</p> <p>Selain sertifikasi yang telah disebutkan diatas, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki perizinan lain</p>

Perseroan telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pembayaran upah minimum tenaga kerja untuk tahun 2023.

Program kegiatan Pelatihan Perseroan, baik berupa *in house training*, *public training/seminar/workshop* (dalam negeri maupun luar negeri). Program pendidikan dan pelatihan tersebut telah diupayakan untuk disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan bidang fokus pendidikan masing-masing unit kerja dan berikut adalah beberapa pelatihan yang diberikan:

- Mitigasi Kejadian Fraud melalui Penguatan Tata Kelola Bank.
- *To Grow CASA & Add New to Bank Client.*
- Penguatan Keuangan Hijau dalam Menjawab Tantangan dan Peluang Perubahan Iklim bagi Stabilitas Sistem Keuangan.
- Aspek Finansial dan Legal Merger, Akuisisi dan Valuasi Bisnis.
- APU PPT, Implementasi Pendekatan Berbasis Risiko TPPU/TPPT pada Perbankan.
- Pelatihan Gugatan Sederhana sebagai Langkah Jitu Penyelesaian Kredit Macet pada Bank.
- Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik dan Keamanan Data Nasabah dalam Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.
- *Conflict of Interest: Legal & Ethical Aspect.*
- *Corporate Restructuring Enhancing Economic and Social Value.*

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tenaga kerja asing.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

NAMA	PERSEROAN	VICO
Zaenal Abidin	Komisaris Utama Independen	-
Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen	-
Sia Leng Ho	Komisaris	-
Achmad Friscantono	Direktur Utama	-
Rusli	Wakil Direktur Utama	-
Debora Wahjutiarto Tanoyo	Direktur	-
Lembing	Direktur	-
Tamunan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-
Untung Woenardi	-	Komisaris Utama
Eko R. Gindo	-	Komisaris Independen
Aldo Jusuf Tjahaja	-	Direktur Utama
Jimmy Kurniawan Setio	-	Direktur

Keterangan:

VICO : Victoria Investama

10. TABEL HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris		Hubungan Kekeluargaan Direksi		Hubungan Kekeluargaan Pemegang Saham Pengendali		Hubungan Kepengurusan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Zaenal Abidin	Komisaris Utama Independen		x		x		x		x
Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen		x		x		x		x
Sia Leng Ho	Komisaris		x		x		x		x
Achmad Friscantono	Direktur Utama		x		x		x		X
Rusli	Wakil Direktur Utama		x		x		x		x
Debora Wahjutirto Tanoyo	Direktur		x		x	x			x
Lembing	Direktur		x		x		x		x
Tamunan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		x		x		x		x

11. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM (DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%)

PT VICTORIA INVESTAMA TBK (“VICO”)

Riwayat Singkat

VICO berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. VICO didirikan pertama kali dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 26 Oktober 1989, dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 2 November 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 November 1989 di bawah No. 1612/1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3537 tanggal 26 Oktober 1989, Tambahan No. 100.

Anggaran dasar VICO telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali anggaran dasar VICO berubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar VICO sehubungan dengan peningkatan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dari semula sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan ratus lima belas miliar sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 2022 (“**Akta No. 1/2022**”).

Bidang Usaha

VICO awalnya didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju pada tahun 1989, merupakan sebuah induk perusahaan dibidang investasi untuk kebutuhan jasa keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. VICO telah berdiri selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun hingga saat ini. Perseroan telah melayani berbagai jasa, baik secara langsung maupun Entitas Anak usaha. Berbagai jasa tersebut meliputi perdagangan efek, asuransi umum, asuransi jiwa, serta perbankan konvensional dan syariah.

VICO menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan terdaftar sebagai emiten ke-19 yang listing perdana pada tanggal 8 Juli 2013 dengan kode saham “VICO”. Saham VICO tercatat di papan utama dan masuk ke sektor jasa keuangan dan sub sektor lain-lain. Aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) tersebut bertujuan untuk mengakomodasi ekspansi usaha Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang.

Pada tahun 2000, VICO melakukan transformasi dengan berganti nama menjadi PT Victoria Sekuritas. Pergantian nama ini berimplikasi pada perluasan kegiatan usaha, yakni sebagai Penjamin Emisi Efek. Kemudian, pada tanggal 28 Mei 2012, VICO berganti nama menjadi PT Victoria Investama.

Setelah berganti nama, VICO fokus dan konsolidasi usaha menjadi Perusahaan Bidang Investasi dan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi. Bidang investasi berupa Penyertaan Saham baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal dan Non Pasar Modal.

VICO dan Entitas Anak tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group. VICO berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Graha BIP Lantai 3A, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Permodalan

Berdasarkan susunan pemegang saham VICO sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 21 Desember 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar VICO tentang sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor VICO dari semula sebesar Rp1.006.456.836.300,- (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp1.521.707.565.800,- (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0330921 tanggal 22 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258631.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022.

Susunan pemegang saham VICO dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 29 Februari 2024 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000.000.000	3.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Gratamulia Pratama	6.856.943.900	685.694.390.000	45,06
Suzanna Tanojo	2.489.307.407	248.930.740.700	16,36
Chemical Asia Corporation Pte. Ltd.	3.524.836.731	352.483.673.100	23,17
Masyarakat	2.345.987.620	234.598.762.000	15,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.217.075.658	1.521.707.564.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.782.924.342	2.078.292.435.200	-

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi VICO adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 8 September 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0163547 tanggal 15 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0182898.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 September 2023 ("**Akta No. 8/2023**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi
 Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
 Direktur : Suryadi

12. PERKARA HUKUM

Perkara Hukum Yang Dihadapi / Melibatkan Perseroan Serta Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Karyawan Kunci, Dan Karyawan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki perkara hukum dibidang pidana, perkara hukum dibidang perpajakan, perkara hukum dibidang persaingan usaha, perkara hukum dibidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui badan arbitrase, perkara hukum dibidang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, somasi dan tidak memiliki perkara perpajakan/perkara pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf Perseroan yang masih memiliki jabatan pada Perseroan ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan Perseroan yang terlibat atau tersangkut atau menghadapi perkara hukum di pengadilan atau badan arbitrase atau suatu lembaga penyelesaian sengketa ataupun yang sedang dalam pemeriksaan penyelidikan/penyidikan aparat penegak hukum karena diduga terlibat kasus hukum atau perkara hukum, dan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf Perseroan yang masih memiliki jabatan pada Perseroan ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan Perseroan yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana perbankan (*fraud*) dan/atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki perkara hukum perdata dan perkara hukum tata usaha negara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. Seluruh perkara yang dimiliki Perseroan tidak akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha.

1. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 434/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Yayasan Pendidikan Kader Keuangan dan Perbankan Bandung (selaku Penggugat 1), Riska Nurasyiah (selaku Penggugat 2) dan Rinalwan Buchari (selaku Penggugat 3) yang selanjutnya disebut “**Para Penggugat**”, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Perseroan (selaku Tergugat 1) dan PT Corex Intek Indonesia (selaku Tergugat 2) yang selanjutnya disebut “**Para Tergugat**”. Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Para Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika total Rp7.077.079.809,50 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan koma lima kosong Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian material sebesar Rp. 6.077.079.809,50 (enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan koma lima puluh rupiah)

Bahwa berdasarkan surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan:

- a. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I sepakat fasilitas kredit tersebut dituangkan dalam akta notaris yakni Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 28 tanggal 25 Juni 2018. Penggugat II dan Penggugat III merupakan penjamin dalam perjanjian kredit tersebut; dan

- b. Tergugat I dan Tergugat 2 melakukan pengalihan (*cessie*) secara diam-diam dan tidak melakukan pemberitahuan kepada Para Penggugat baik sesudah maupun setelah Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengalihan piutang (*cessie*), selain hal tersebut dipersidangkan juga terbukti bahwa Penggugat I juga telah melanggar kesepakatan bersama tertanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan apabila Para Penggugat tidak melakukan pembayaran maka upaya yang disepakati adalah melakukan lelang terhadap objek jaminan sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 28 tanggal 25 Juni 2018, namun faktanya Penggugat justru melakukan pengalihan piutang (*cessie*) secara diam-diam dan kesepakatan tertanggal 7 Agustus 2020 tersebut.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima relaas pemberitahuan kasasi No. 16/Srt.Pdt.Kas/2024/PN.Jkt.Pst jo. No. 434/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst pada tanggal 26 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1099/Pdt/2023/PT DKI tanggal 29 November 2023.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan menjadi pihak yang dikalahkan dalam upaya hukum kasasi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

2. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 PT Surya Eden Utama yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Selatan kepada Perseroan yang selanjutnya disebut “**Tergugat**”. Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Para Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan Hak Tanggungan berupa 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang semuanya dikenal sebagai HOTEL YASMIN (Resort & Conference Hotel) yang dilakukan dengan menggunakan klausul kuasa mutlak, dikategorikan sebagai tindakan PMH karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

atau

- Menyatakan perbuatan Tergugat, yang melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan Hak Tanggungan berupa 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang semuanya dikenal sebagai HOTEL YASMIN (Resort & Conference Hotel) yang dilakukan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu **tanpa pemberitahuan dan atau tanpa persetujuan dari Peggugat**, adalah merupakan tindakan PMH karena bertentangan dengan syarat yang digariskan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat atas penjualan objek Hak Tanggungan yaitu atas 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang kesemuanya terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, berturut-turut diuraikan dalam:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") Nomor 810/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1792/1993, seluas 386 M2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 1;
- b. SHGB Nomor 811/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1793/1993, seluas 321 M2 (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 2;
- c. SHGB Nomor 812/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1794/1993, seluas 418 M2 (empat ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 3;
- d. SHGB Nomor 813/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1795/1993, seluas 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 4;
- e. SHGB Nomor 814/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1796/1993, seluas 644 M2 (enam ratus empat puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 5;
- f. SHGB Nomor 815/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1797/1993, seluas 874 M2 (delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 6;
- g. SHGB Nomor 816/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1798/1993, seluas 445 M2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 7;
- h. SHGB Nomor 817/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1799/1993, seluas 492 M2 (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 8;
- i. SHGB Nomor 818/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1800/1993, seluas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 9;
- j. SHGB Nomor 828/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1810/1993, seluas 455 M2 (empat ratus lima puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 19;
- k. SHGB Nomor 830/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1812/1993, seluas 436 M2 (empat ratus tiga puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 21;
- l. SHGB Nomor 831/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1813/1993, seluas 435 M2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 22;
- m. SHGB Nomor 832/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1814/1993, seluas 682 M2 (enam ratus delapan puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 23;

- n. SHGB Nomor 852/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1835/1993, seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 43 A;
- o. SHGB Nomor 853/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1836/1993, seluas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 45;
- p. SHGB Nomor 854/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1837/1993, seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 46;
- q. SHGB Nomor 855/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1838/1993, seluas 478 M2 (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 47;
- r. SHGB Nomor 856/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1839/1993, seluas 574 M2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 48;
- s. SHGB Nomor 857/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1840/1993, seluas 546 M2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 49;
- t. SHGB Nomor 858/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1841/1993, seluas 462 M2 (empat ratus enam puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 50;
- u. SHGB Nomor 859/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1842/1993, seluas 478 M2 (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 51;
- v. SHGB Nomor 860/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1843/1993, seluas 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 52;
- w. SHGB Nomor 861/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1844/1993, seluas 410 M2 (empat ratus sepuluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 53;
- x. SHGB Nomor 864/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1847/1993, seluas 462 M2 (empat ratus enam puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 56;
- y. SHGB Nomor 865/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1848/1993, seluas 466 M2 (empat ratus enam puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 57;
- z. SHGB Nomor 866/Palasar, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1849/1993, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor;

- aa. SHGB Nomor 869/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1853/1993, seluas 791 M2 (tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 60;
- bb. SHGB Nomor 870/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1854/1993, seluas 578 M2 (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 61;
- cc. SHGB Nomor 874/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1858/1993, seluas 537 M2 (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 66;
- dd. SHGB Nomor 875/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-06-1993) Nomor 1859/1993, seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Villa Yasmin Kavling Nomor 67;
- ee. SHGB Nomor 1745/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei dua ribu enam (04-05-2006), dengan Nomor 218/2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 10.13.28.18.00621, seluas 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- ff. SHGB Nomor 1746/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei dua ribu enam (04-05-2006), dengan Nomor 219/2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 10.13.28.18.00622, seluas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi);
- gg. Yang kesemuanya terdaftar atas nama PT. Surya Eden Utama, berkedudukan di Jakarta;
 - i. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Desa Palasari, sebagaimana ternyata dari SHGB Nomor 1155/Palasari, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10-12-1994) Nomor 6120/1994, seluas 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), terdaftar atas nama PT Surya Eden Utama;
 - ii. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Desa Palasari, sebagaimana ternyata dari SHGB Nomor 1641/Palasari, seperti diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (24-09-1999) Nomor 00120/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.13.17.18.00234, seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama RUDY SIRAPANDJI;
 - iii. 1 (satu) bidang tanah hak milik yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Cimacan, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 289/Palasari, seperti diuraikan dalam Gambar Ikhtisar tanggal sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (09-04-1975) Nomor 225/1973 (225/1975), seluas 4.654 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama RUDY SIRAPANDJI, dahulu KWEE HOK SIN;

Kesemuanya bidang-bidang tanah ini dikenal sebagai HOTEL YASMIN (*Resort & Conference Hotel*) yang terletak di Jalan Jeprah Nomor 69 Palasari, Pacet, Cianjur, Jawa Barat;

- 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai penebusan/pembelian kembali aset Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan HOTEL dan VILLA yang terletak di Jl. Jeprah Nomor 69, RT.003/RW.002, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan total 35 (tiga puluh lima sertifikat) dan total luas tanah 28.166 M2;

5. Menghukum Tergugat untuk tetap melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai penebusan/pembelian kembali aset Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan HOTEL dan VILLA yang terletak di Jl. Jeprah Nomor 69, RT.003/RW.002, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan total 35 (tiga puluh lima sertifikat) dan total luas tanah 28.166 M2;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat melawan hukum, dan oleh karena Penggugat dinyatakan melakukan PMH maka beralasan secara hukum Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian materil dan immateril, yaitu:
 - **KERUGIAN MATERIL:**

Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dalam bentuk uang sebagaimana kerugian yang nyata dialami Penggugat yaitu senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) karena beralihnya kepemilikan 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang dikenal dengan HOTEL YASMIN (Resort & Conference Hotel) yang sebelumnya atas nama Penggugat menjadi kemudian beralih menjadi atas nama pihak lain.
 - **KERUGIAN IMMATERIL:**

Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasakan nama baik Perseroan dan atau HOTEL YASMIN (Resort & Conference Hotel) telah dicemarkan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mudahnya dalam gugatan ini, kerugian immateril tersebut ditentukan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini Penggugat meminta ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula yaitu dengan menyatakan terlebih dahulu bahwa penjualan di bawah tangan tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan penebusan/pembelian dengan Penggugat dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat yaitu Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
7. Memutuskan, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, Para Tergugat sengaja/lalai untuk tidak menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 8. Memutuskan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa objek Hak Tanggungan yaitu atas 35 (tiga puluh lima) bidang tanah yang semuanya dikenal sebagai HOTEL YASMIN (Resort & Conference Hotel), yang terletak di Jalan Jeprah Nomor 69, Palasari, Pacet, Cianjur, Propinsi Jawa Barat.
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Jumlah *outstanding* hutang Penggugat setelah di AYDA berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Kewajiban Hutang tertanggal 23 Desember 2019 dengan nilai buku AYDA Rp57.680.710.371,16 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu koma satu enam sen). Pengalihan atas aset jaminan AYDA tidak dilakukan melalui eksekusi lelang hak tanggungan melainkan melalui Jual Beli berdasarkan kuasa untuk menjual yang diberikan oleh debitur kepada Bank Victoria, dimana kuasa jual tersebut dibuat secara notariil.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan 169 tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 2 April 2024 dengan agenda Penyampaian Duplik dari Penggugat.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, perkara tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 24 Maret 2024.

3. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (Register Perkara No. 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Sucik Mardi yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Perseroan yang selanjutnya disebut “**Tergugat I**” dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III yang selanjutnya disebut “**Tergugat II**” (Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut “**Para Tergugat**”). Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Para Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum; dan keputusan Tergugat I yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan keputusan Tergugat II yang menyetujui permohonan penjualan agunan/jaminan dari Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Jumlah *outstanding* hutang Penggugat setelah di AYDA dengan nilai buku AYDA sebesar Rp22.729.695.470,66 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah koma enam enam sen).

Bahwa pada tanggal 15 November 2023 perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada tanggal 27 November 2024 Penggugat melakukan upaya hukum Banding. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam tahap proses Banding.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, perkara tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

4. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (Register Perkara No. 826/Pdt.G.2023/PN JKT.SEL)

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Firzia Resita yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Perseroan yang selanjutnya disebut “**Tergugat I**”, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II yang selanjutnya disebut “**Tergugat II**”, PT Matador Lelang Sukses yang selanjutnya disebut “**Tergugat III**” (Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut (“**Para Tergugat**”), dan Kementerian ATR/BPN C.q. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut “**Turut Tergugat**” . Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Penggugat adalah:

Dalam Provisi

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini untuk segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan rencana lelang atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di di Desa Kampung Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Luas Tanah 243 M2 dan Luas Bangunan 207 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.2812, atas nama Firzia Resita yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di yang terletak di di Desa Kampung Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Luas Tanah 243 M2 dan Luas Bangunan 207 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.2812, atas nama Firzia Resita;
4. Bahwa Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil total senilai Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana harga aset/pasaran sekarang ini;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat atau memblokir objek sengketa tersebut, sampai adanya putusan tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Vorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini.

Tunggakan kewajiban pokok dan bunga per tanggal 7 Mei 2024 (akhir hari) adalah:

- a. Pokok : Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- b. Bunga : Rp187.295.620,08 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah koma nol delapan sen).

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih berjalan. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan agenda pembacaan Putusan Sela.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, perkara tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

5. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (Register Perkara No. 222/Pdt.G/2024/PN.Sby.)

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, PT Mas Murni Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya kepada Perseroan yang selanjutnya disebut “**Tergugat**”, PT Tunas Unggul Lestari yang selanjutnya disebut “**Turut Tergugat I**”, Badan Pertanahan Nasional Surabaya II yang selanjutnya disebut “**Turut Tergugat II**”, KPKNL Surabaya yang selanjutnya disebut “**Turut Tergugat III**”. Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Penggugat adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan lelang tertanggal 27 Oktober 2023, pada hari Jumat pada KPKNL Surabaya, Gedung Keuangan Negara jalan Indrapura No.05, Surabaya adalah batal demi hukum;
4. Bahwa pemenang Lelang (Turut Tergugat I) batal demi Hukum;
5. Menetapkan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala perubahan atau pengalihan hak penguasaan, pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap objek lelang berdasarkan lelang tertanggal 27 Oktober 2023, pada hari Jumat pada KPKNL Surabaya, Gedung Keuangan Negara jalan Indrapura No.05, Surabaya;
6. Menetapkan sita jaminan atas sita jaminan atas di Jalan Yos Sudarso 11, Kelurahan Embong Kaliasin, Kec Genteng sebagaimana tercantum dalam SHGB No 161/K/Embong Kaliasin seluas 2,410 M-2, SHGB No.826/Embong Kaliasin seluas 1.625 M-2 dan SHGB No 827/Embong Kaliasin seluas 1.940 M-2 keseluruhannya tercatat atas nama Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat II tidak melakukan buka blokir atas sertifikat Penggugat hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu meskipun upaya hukum lain;
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih berjalan. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 26 Maret 2024 dengan agenda pembacaan Putusan Sela.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

6. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (Register Perkara No. 604/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel.)

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, PT Iswara Dewata yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”, mengajukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Perseroan yang selanjutnya disebut “**Tergugat**”. Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Penggugat adalah:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pencairan kredit milik Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 40 tanggal 11 November 2016;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 40 tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH Notaris di Jakarta adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 219.483.844.757,- (dua ratus sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan USD 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) secara tunai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penguat akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar USD 347.238.224,66 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat poin enam puluh enam Dollar Amerika Serikat) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar USD 201.448.631,91 (dua ratus satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu sembilan puluh satu sen Dollar Amerika Serikat) secara tunai.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo terhadap harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan Putusan Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 604/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel. *juncto* 226/PDT/2023/PT DKI tanggal 22 Mei 2023 adalah:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. Semula Tergugat, dan Pembanding II PT. Iswara Dewata semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 31 Agustus 2022 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan tentang Tuntutan Provisi, Status Perjanjian serta besarnya jumlah ganti rugi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

3. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

4. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pencairan kredit milik Penggugat dengan Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.40 tanggal 11 November 2016;
7. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.40 tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Suwami Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat atas tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2419/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2420/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2421/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2422/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2434/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1710/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2371/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2327/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Kedewatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Kedewatan dan sebidang tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Desa Kedewatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03443/Kedewatan dan sebaliknya Penggugat diwajibkan mengembalikan pinjaman yang sudah diterima dari Tergugat sejumlah Rp.54.204.496.250 (lima puluh empat milyar dua ratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.87.793.448.640 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pertama sejumlah Rp.629.000.- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan Perseroan tidak melakukan pencairan kredit disebabkan Ending balance dalam setiap tahunnya di nilai dalam posisi minus karena hotel masih belum terbangun. Proyek berhenti dikarenakan terjadi pergantian operator yang awalnya sudah disetujui oleh Bank Victoria yaitu Jumeirah diubah menjadi W Hotel (Marriot Group) yang menyebabkan meningkatnya harga RAB pembangunan dari 230 M menjadi 352 M, sehingga Bank Victoria mengambil keputusan untuk melakukan freeze sisa kelonggaran tarik plafon Debitur.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada tanggal 22 Mei 2023 perkara ini telah memperoleh putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Tergugat melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga saat ini perkara sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan menjadi pihak yang dikalahkan dalam upaya hukum kasasi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

7. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (Register Perkara No. 977/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel.)

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Podo Wibowo yang selanjutnya disebut "**Penggugat I**" dan Neneng Naldy selanjutnya disebut "**Penggugat II**" (Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama disebut "**Para Penggugat**"), mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Jakarta Selatan kepada Haryoni Eddyarto selanjutnya disebut "**Tergugat I**", H. Naldy Nazar Haroen selanjutnya disebut "**Tergugat II**", Eddy Rinaldy selanjutnya disebut "**Tergugat III**" (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**"), PT Bank Harda Internasional Tbk., selanjutnya disebut "**Turut Tergugat I**", Perseroan selanjutnya disebut "**Turut Tergugat II**", dan Kantor BPN Kota Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut "**Turut Tergugat III**". Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Penggugat adalah:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Penggugat pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang jujur;
4. Menyatakan Batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 131/PDT/2017/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3273 K/PDT/2017.;
5. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Anggrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah milik Penggugat I;
6. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah milik Penggugat II;
7. Menyatakan menurut hukum Objek Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Anggrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan milik Pelawan I sah sebagai Jaminan dan dalam penguasaan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I.
8. Menyatakan menurut hukum Objek Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan milik Pelawan II sah sebagai Jaminan dan dalam penguasaan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat II;
9. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Objek Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 131/PDT/2017/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3273 K/PDT/2017 Jo. Penetapan sita No. 428/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 8 Agustus 2016 sepanjang mengenai hak Para Pelawan sebagaimana petitum diatas.
10. Mengukuhkan Putusan Provisi dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan Putusan Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 977/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel. *juncto* 193/PDT/2023/PT DKI tanggal 22 Mei 2023 adalah:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Pemanding I semula Pelawan II, Pemanding II semula Turut Terlawan II dan Pemanding III semula Terlawan I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 977/Pdt.G.PLW/2018/PN JKT.SEL, tanggal 19 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding I semula Pelawan II dan Para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Latarbelakangi upaya hukum kasasi oleh Perseroan adanya putusan perkara No. 977/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel yang pada pokoknya menyatakan sertipikat yang merupakan jaminan Debitur Perseroan masih dalam Sita Jaminan, sehingga untuk melindungi hak dari Perseroan, Perseroan mengajukan upaya hukum Banding, namun putusan Banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Kemudian, Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi dan meminta untuk mengangkat sita jaminan yang ada pada jaminan Perseroan serta menyatakan sita jaminan tersebut tidak sah.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perkara sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung, yang dimana pada tanggal 19 September 2023 Perseroan mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tanggal 31 Mei 2023.

Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, perkara ini tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

Dalam hal Perseroan menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara-perkara di atas, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Subordinasi Tahap I.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ataupun di luar pengadilan, yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap penerbitan Obligasi Subordinasi ini.

13. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan telah berdiri selama lebih dari 29 tahun untuk menjalankan kegiatan operasional di bidang bank umum. Pada tahun 1997, Perseroan memperluas portofolio layanan dengan memperdagangkan valuta asing. Kemudian, seiring dengan berkembangnya kinerja produk dan layanan Perseroan di kelompok BUKU II, maka pada tahun 2017, Perseroan mulai menyediakan layanan bank devisa.

Dalam rangka memperkuat permodalan dan menjaga tingkat kesehatan keuangan, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan saham di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1999 dengan kode saham "BVIC". Langkah ini mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Sejak saat itu, Perseroan aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti Penambahan Modal Dengan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu dan penerbitan obligasi.

Dalam perjalanan usaha, Perseroan melakukan ekspansi dengan mengakuisisi 99,80% saham Bank Swaguna. Akuisisi ini menjadikan Bank Swaguna sebagai Entitas Anak Bank Victoria. Bank Swaguna kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah pada 19 Januari 2010 dan mulai melakukan kegiatan usaha bank umum dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun per 31 Desember 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, pada 7 Mei 2021 dan 10 Desember 2021, Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Penguatan struktur permodalan ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar serta meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi misi tersebut, Perseroan aktif mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah.

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
1.	Kantor Pusat Operasional: Graha BIP, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan: a. Lantai 1: Perjanjian Sewa Menyewa No. 12/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 0433/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. b. Lantai 6: Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 0433/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. c. Lantai 9: Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 044/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara	31-12-2027 31-12-2027 31-12-2027

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
		<p>PT Asri Kencana Gemilang, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.</p> <p>d. Lantai 9 (Zona I dan J): Perjanjian Sewa Menyewa No. 037/LA/AKG-BVIC/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang diubah sebagian dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 050/AMD/AKG-BVIC/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.</p> <p>e. Lantai 10: Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 045/AMD/AKG-BVIC/IX/022 tanggal 19 September 2022 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa</p>	<p>31-12-2027</p> <p>31-12-2027</p>
2.	Kantor Cabang Senayan : Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Gelora, Jakarta Selatan 12710	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/X/94 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali diubah, perubahan terakhir termasuk perpanjangan jangka waktu sewa dimuat dalam: Addendum #1 No. 01/ADD-PS/AJ/III/11 tanggal 17 Februari 2011, Addendum #2 No. 01/ADD-PS/AJ/III/12 tanggal 21 Februari 2012, Addendum #3 No. 01/ADD-PS/AJ/III/13 tanggal 19 Februari 2013, Addendum #4 No. 01/ADD-PS/AJ/III/14 tanggal 26 Maret 2014, Addendum #5 No. 01/ADD-PS/AJ/III/15 tanggal 6 Februari 2015, Addendum #6 No. 01/ADD-PS/AJ/III/16 tanggal 26 Februari 2016, Addendum #7 No. 01/ADD-PS/AJ/III/18 tanggal 14 Februari 2018, Addendum #8 No. 01/ADD-PS/AJ/III/19 tanggal 21 Februari 2019, Addendum #9 No. 01/ADD-PS/AJ/III/2020 tanggal 24 Februari 2020, Addendum #10 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Addendum #11 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Amana Jaya , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	30-11-2023
3.	Kantor Cabang Cideng : Jl. Cideng Timur No. 33, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3720/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria a.n. Bupati/Walikota madya KDH Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 1988, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 November 2003).	11-11-2033
4.	Kantor Cabang Fatmawati : Jl. RS. Fatmawati No. 85A, RT 006 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 924/Cipete Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 1986, terdaftar atas nama Perseroan (sejak 7 Juli 2009).	18-12-2038
5.	Kantor Cabang Kelapa Gading 1 : Jalan Taman Mandiri I No. 8 Kav. A1-B1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240	<p>Milik sendiri berdasarkan:</p> <p>a. Sertipikat HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010).</p> <p>b. Sertipikat HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010).</p>	<p>10-10-2040</p> <p>10-10-2040</p>
6.	Kantor Cabang BIP : Graha BIP Lantai Dasar, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930	<p>Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AKG-BVIC/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 55/ADD/AKG-BVIC/XI/2020 tanggal 24 November 2020 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.</p> <p>Catatan: Lokasi yang digunakan Perseroan untuk KC BIP terkait dengan perjanjian ini adalah di lantai dasar.</p>	31-12-2023
7.	Kantor Cabang Bogor : Jl. Pakuan No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 15 Mei 2012 yang diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 2 Mei 2017, dan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 9 Mei 2022 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Nona Hong Fang , beralamat di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	15-05-2027

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
8.	Kantor Cabang Surabaya: Jl. Raya Darmo No. 173, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 60241	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 605/Darmo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 01 Mei S1999, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 April 2003).	07-04-2039
9.	Kantor Cabang Bandung: Jl. Braga No. 16, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No.739/Braga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 14 Januari 2013, terdaftar atas nama PT Bank Victoria Internasional Tbk.	20-12-2042
10.	Kantor Cabang Manado: Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Bahu Mall Blok E No. 5, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Maret 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup juncto persetujuan Perseroan atas surat PT Emperor Finance Indonesia kepada Perseroan No. 118a/EFI-DIEV/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pembayaran Harga Sewa, perjanjian mana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Mei 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Emperor Finance Indonesia , berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan, selaku pihak penyewa.	31-05-2025
11.	Kantor Cabang Denpasar Bali: Jl. Raya Imam Bonjol No. 117 Dusun BR Tenten, Kelurahan Pemeceutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali	Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.57/Pemecutan Klod yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 September 2005, terdaftar atas nama PT Bank Victoria Internasional Tbk. (9 Februari 2017). (Jl. Raya Imam Bonjol No. 117, Dusun BR Tenten, Kelurahan Pemeceutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Bali 80114.)	22-03-2046
12.	Kantor Cabang Semarang: Jl. Raya Pemuda No. 108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah.	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2017 dibuat dihadapan Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semaang yang dibuat oleh dan antara Tuan Eddy Wibowo (d/h Liem See Hong) , bertempat tinggal di Surakarta, dengan peersetujuan istrinya, selaku pihak yang menyewakan, dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	02-01-2024
13.	Kantor Cabang Makassar: Ruko Poros Boulevard/ Ruko Emerald No. 16 Jl. Boulevard Masale, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar – Sulawesi Selatan	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 22117/Masale yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan a/n Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 7 November 2007, terdaftar atas nama PT Bank Victoria Internasional Tbk. tanggal 25 Juni 2018.	06-10-2037
14.	Kantor Cabang Solo: Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 424, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat dihadapan Augustine Esther, SH, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Tuan Agus Haryanto, dengan persetujuan istrinya, Nyonya Yoshy Astanty, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa.	15-12-2023
15.	Kantor Cabang Medan: Jalan Haji Zainal Arifin No. 53 C, Kelurahan Madras Hulu, Kelurahan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Dana Barus, SH, MKn., Notaris di Kecamatan Deli Serdang, oleh dan antara Tuan Chaidir Kesuma , dengan persetujuan istrinya, Nyonya Melinda Kesuma, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa.	29-02-2024
16.	KCP BSD: Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE No. 52, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 504/Lengkong Wetan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 1 Juli 1993, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Januari 2003).	16-07-2027
17.	KCP Duta Mas: Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No. 12, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol – Petamburan, Jakarta Barat 11460	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1157/Wijaya Kusuma yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Mei 1990, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 25 Juni 2008).	09-04- 2029
18.	KCP Green Garden: Komplek Green Garden Blok A14 No. 28, Jl. Panjang Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520	Milik sendiri berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> Sertipikat HGB No. 320/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 30 Juni 1992, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 7 Januari 2003). Sertipikat HGB No. 6923/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2004, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Juli 2004). 	30-03- 2029 28-07- 2024

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
19.	KCP Citra 2 Ext: Komp. Citra 2 Extension Blok BG 313 No. 27, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Oktober 2009 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Emperor Finance Indonesia , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	09-08-2030
20.	KCP Kebon Jeruk: Kompleks Pertokoan Intercon Blok B No. 4-5, Jl. Meruya Ilir Raya, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620	Milik sendiri berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> • Sertipikat HGB No. 06647/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 17 Februari 2006). • Sertipikat HGB No. 06648/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20 Februari 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2006). 	16-02-2026 19-02-2026
21.	KCP Kelapa Gading Boulevard: Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC-6 No. 14, Jl. Raya Boulevard Barat, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1961/Kelapa Gading Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 1996, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Februari 2006).	28-11-2032
22.	KCP Kemang: Jl. Kemang Raya No. 82C, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 557/Bangka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2005, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 8 April 2008).	07-06-2035
23.	KCP Paramount Serpong: Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Jl. Boulevard Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang 15333	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 08479/Pakulonan Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 03 Oktober 2007, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2009).	26-12-2034
24.	KCP Patal Senayan: Rukan Permata Senayan Blok B No. 6, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 2593/Grogol Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2004, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (sejak tanggal 29 November 2007).	29-06-2039
25.	KCP Pecenongan: Jl. Pecenongan Raya No. 26, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120	Sertipikat HGB No. 2479/Kebon Kelapa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2008, terdaftar atas nama Perseroan.	04-05-2028
26.	KCP Pantai Indah Kapuk: Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14460	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1002/Kamal Muara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Mei 2009).	28-09-2032
27.	KCP Pondok Indah: Plaza Pondok Indah Blok II Blok UPS No. 51, Jl. Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3086/Pondok Pinang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 April 1995, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 Januari 2003).	21-03-2025
28.	KCP Puri Indah: Komplek Puri Indah Blok A No. 3, Jl. Puri Indah Raya, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 2792/Kembangan Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 09 September 2002, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Juni 2004).	08-09-2042
29.	KCP Senayan City: Mall Senayan City lantai 6 Unit 06/11, Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan 10270	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. MGP/002//PSM-MAL/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Manggala Gelora Perkasa, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	30-01-2024

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
30.	KCP Sunter: Kompleks Rukan Sunter Permai Blok A-9, Jl. Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 8103/Sunter Agung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2006, terdaftar atas nama Perseroan.	04-08-2026
31.	KCP Taman Palem Lestari: Ruko Taman Palem Blok D1 No. 19D, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 5706/Cengkareng Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 1 Desember 1999, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 28 Oktober 2002).	24-11-2034
32.	KCP Wisma Slipi: Wisma Slipi Lantai Dasar, Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 12, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 011/DIR/WJAV/21 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Wisma Jaya Artek , berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.	30-04-2023
33.	KCP Central Park: Garden Shopping Arcade B/08/BG, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9, Tanjung Duren, Jakarta Barat 11470	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3268/Tanjung Duren Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 7 September 2011, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 11 Februari 2014. (Podomoro City Garden Shopping Arcade B/08/BG).	17-03-2026
34.	KCP Wisma Indocement: Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 jo. Perjanjian Persewaan No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 jo. Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Period 2020 No. 2019/12/LA/048/BVI tanggal 6 Desember 2019 (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa) yang diperpanjang dengan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level ground floor for the period 2021 No. 2020/12/LA/047/BVI tanggal 7 Desember 2020 berikut Term of Lease PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta dan diperpanjang kembali dengan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk Level – Ground Floor untuk Period 2023 No. 2022/12/LA/052-BVI tanggal 16 Desember 2022, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Serasi Tunggal Mandiri beralamat di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	31-12-2023
35.	KCP Duta Merlin: Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A No. 10, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 812/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2010, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk.	12-11-2038
36.	KCP Tomang: Lobby Gedung Mandala Airlines, Jl. Tomang Raya No. 33-37, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. BIPTP 003/LA/BIPTP-BV/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/TDI-BVIC/III/2018 tanggal 2 Februari 2018 tanggal 2 Februari 2018 dan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/AMD/TDI-BVIC/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT BIP Tridaya Propertindo, berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	31-01-2024
37.	KCP Grand Wijaya: Komplek Grand Wijaya Blok C No. 10, Jalan Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1991/ Pulo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2009, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Juni 2010).	22-06-2029
38.	KCP Muara Karang 2: Jl. Pluit Karang Utara no. 46 Blok 11 Selatan Kav. 48, Penjaringan, Jakarta Utara 14450	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 9622/Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2007, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Februari 2008).	04-01-2027
39.	KCP Abang Blok B: Jl. KH Fachrudin, Pertokoan Grosir Mall Tanah Abang Blok B Lantai 5 Loss Ktr. No. 2, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240	Hak Pemakaian berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Tanah Abang Blok B No.01.01.13090, tanggal 23 Juni 2015 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk.	09-08-2033

PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 6,5% untuk Rupiah dan 8,0% mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penghimpunan pendanaan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan.

Produk Dan Jasa

Kegiatan usaha Perseroan meliputi produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan lainnya. Uraian produk dan jasa Bank Victoria dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

Produk simpanan adalah dan pihak ketiga yang telah dihimpun oleh Perseroan melalui berbagai produk tabungan, giro, dan deposito.

a. Tabungan

Tabungan Victoria

Rekening tabungan yang menawarkan kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, dengan suku bunga yang kompetitif, serta dilengkapi fasilitas *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang dapat dipakai untuk transaksi transfer dana, pembelian, dan pembayaran di berbagai *merchant*.

Tabungan VIP Safe

Rekening tabungan yang digunakan untuk perorangan dengan tiering suku bunga yang sangat menarik, sekaligus memberikan manfaat gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri hingga maksimum Rp5 miliar. Selain itu, dengan fasilitas *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang diberikan membuat nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Tabungan Victoria Junior

Rekening tabungan bagi nasabah junior dengan hadiah langsung yang menarik, suku bunga yang kompetitif, dan tanpa batasan penarikan.

Tabungan Victoria Bisnis

Rekening tabungan khusus yang disediakan untuk para pelaku bisnis perorangan maupun badan hukum dengan suku bunga yang kompetitif.

Tabungan V-88

Penyatuan (*bundling*) produk antara deposito berjangka 3 (tiga) bulan dengan tabungan Victoria, yang dapat memberikan imbal hasil yang menarik untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan, dengan alokasi penempatan nominal yang telah ditentukan dari total penempatannya pada tabungan Victoria yang diblokir selama jangka waktu 3 bulan. Program ini juga memberikan manfaat gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri hingga maksimum Rp10 miliar.

TabunganKu

Rekening tabungan yang digunakan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, sebagai perwujudan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan Victoria Maxima

Tabungan dengan 2 (dua) keuntungan berupa *cashback* di awal penempatan dan bunga bulanan yang menarik.

Tabungan Victoria Edu Save

Tabungan untuk perencanaan pendidikan anak dengan tambahan keuntungan berupa asuransi jiwa dan cacat tetap total gratis. Asuransi ini memastikan sisa setoran bulanan tetap terbayarkan sampai dengan masa akhir tabungan, sehingga biaya pendidikan anak di masa depan tetap aman.

b. VIP Giro Rupiah dan VIP Giro Valas

Produk Giro yang diperuntukkan untuk perorangan dan perusahaan yang dapat memberikan imbal hasil yang sangat menarik. Selain itu, dapat digunakan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dengan memberikan fasilitas tambahan gratis biaya buku cek/bilyet giro. Dengan menggunakan VIP Giro, nasabah pada segmen bisnis/perusahaan juga dapat menjalankan fasilitas penggajian gratis untuk seluruh karyawan dengan rekening payroll di Perseroan. Produk ini juga tersedia dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar*.

c. Deposito**Deposito Rupiah**

Produk simpanan berjangka dengan mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk nasabah perorangan maupun badan hukum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan, serta dapat memberikan bunga deposito yang sangat menarik kepada nasabah.

Deposito *US Dollar*

Produk simpanan berjangka dalam bentuk mata uang asing bagi nasabah individu maupun perusahaan. Produk ini tersedia dalam mata uang *US Dollar*.

2. Produk Pinjaman

Produk pinjaman merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

a. Kredit Produktif

Corporate Lending

Kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang diberikan untuk *portfolio* kredit *high end corporate customers* (termasuk di dalamnya *public listed companies*, perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia, perusahaan nasional) dengan plafond diatas Rp50 miliar (SE No.003/SE-DIR/02/18, 23 Februari 2018), termasuk kredit sindikasi dengan bank-bank besar. Pada segmen kredit ini, sektor industri yang ditargetkan adalah industri manufaktur, trading, property, (*shopping mall, office building, real estate, kondominium, apartement*), transportasi, komunikasi, pertambangan, listrik dan gas.

Commercial Lending

- **Commercial Enterprise Lending**

Kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang diberikan kepada *high end commercial customers* akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki *supply chain/value chain* untuk mendukung *cross selling* kredit segmen lainnya dengan plafond diatas Rp15 miliar (Surat Edaran No. 003/SE-DIR/02/18 tanggal 23 Februari 2018) sampai dengan Rp50 miliar. Pola pembiayaan yang diterapkan antara lain *supplier financing, AR financing, dan inventory financing*.

- **Medium Enterprise Lending**

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada *mid-tier commercial customers* akan difokuskan untuk untuk penyebaran *portfolio by industry* yang masuk ke dalam kriteria *risk appetite* dari Bank dengan plafond di atas Rp1-15 miliar (Surat Edaran No. 003/SEDIR/02/18 tanggal 23 Februari 2018). Segmen industri yang difokuskan adalah trading, small manufacturing, dan transportation.

- **Small Medium Enterprise Lending**

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada debitur dengan plafond diatas Rp250 Juta s/d Rp1,5 Miliar, untuk segmentasi *industry trading, home industry, jasa, bengkel, rumah makan*, termasuk dalam hal ini fasilitas kredit non-organik yang diberikan kepada BPR atau LKBB yang memiliki *customer based* sesuai dengan kriteria UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

- **Multi Finance Lending**

Kredit yang diperuntukan bagi perusahaan pembiayaan (*multi finance*) dalam bentuk modal kerja cicilan yang dapat digunakan untuk pembiayaan kepada end user, seperti untuk pembiayaan mobil, motor, alat berat, elektronik, dan lain-lain.

- **Bank Garansi**

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan.

- **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)**

SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri atau yang sering disebut dengan LC Lokal adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diterbitkan oleh Bank pembuka (*Issuing Bank*) atas instruksi dari pemohon (*applicant*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (*beneficiary*) sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN terpenuhi.

b. Kredit Konsumtif

Kredit Pemilikan Rumah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk pembelian kembali (*refinancing*), pengambilalihan kredit dari kreditur lain (*take over*) rumah, toko, ruko, rukan, villa, kavling, rusun, kondominium, konstruksi atau renovasi.

Kredit Pemilikan Mobil

Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi debitur yang melakukan pembelian mobil dengan pengembalianya melalui sistem angsuran bulanan.

Kredit Multi Guna

Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi perorangan (wiraswasta, profesional, karyawan) yang berdomisili di wilayah operasional cabang, yang membutuhkan dana yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun pengembangan usaha terkait dengan bidang profesinya, serta dapat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan.

Kredit *Implant Banking*

Fasilitas kredit konsumen yang diperuntukan bagi karyawan suatu perusahaan yang dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan atau koperasi karyawan, maupun perjanjian kredit antara Bank dengan karyawan perusahaan yang bersangkutan.

3. Produk Investasi

Perseroan bekerja sama dengan salah satu mitra distribusi obligasi pemerintah bagi investor ritel di pasar perdana domestik untuk memberikan produk investasi yang dapat meningkatkan nilai portofolio nasabah di Perseroan.

- **SBN Ritel**

Produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. SBN ritel dibuat dengan tujuan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara.

- **Reksa Dana**

Wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

- **Bancassurance**

Bentuk kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang menghasilkan produk asuransi.

4. Layanan Bank Devisa

Selain giro dan deposito, Perseroan juga memberikan jasa layanan terkait transaksi dalam valuta asing, antara lain transaksi kiriman uang (*remittance*), perdagangan internasional (*trade finance*), *treasury*, dan layanan interbank lainnya

- **Transaksi Kiriman Uang**

Perseroan menyediakan jasa kiriman uang dalam valuta asing para nasabah yang ditujukan ke rekening yang berada di dalam negeri (*incoming transfer*) maupun luar negeri (*outgoing transfer*) hingga sampai tujuan secara tepat waktu dan aman serta didukung oleh sistem yang handal. Saat ini, Perseroan melayani jasa kiriman uang dengan valuta *US Dollar*, *Singapore Dollar*, *Yen*, *Yuan*, dan *Euro*.

- **Perdagangan Internasional**

Perseroan memberikan pelayanan kepada mitra usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dalam negeri dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam mata uang Rupiah dan *Letter of Credit (L/C)* dalam mata uang asing. Dengan didukung 39 Cabang Bank Victoria di seluruh Indonesia, Perseroan siap membantu nasabah untuk memperkokoh posisi bisnis nasabah secara nasional.

Transaksi nasabah akan ditangani dengan cepat oleh tenaga tenaga ahli yang telah berpengalaman menangani transaksi perdagangan dalam negeri. Dengan sistem aplikasi berbasis teknologi yang maju, nasabah cukup mengajukan permohonan transaksi dan mempresentasikan dokumen melalui cabangcabang Bank Victoria terdekat atau langsung ke Kantor Pusat Divisi *International Banking*.

Untuk jasa layanan dalam perdagangan dalam negeri meliputi:

- Penerbitan SKBDN dan L/C;
- Penerimaan SKBDN dan L/C; dan
- *Collection*.

Melalui Divisi *International Banking*, nasabah akan mendapatkan pelayanan konsultasi bisnis yang dapat membantu nasabah seputar permasalahan perdagangan dalam negeri dengan menggunakan SKBDN maupun perdagangan internasional menggunakan L/C. Selain itu, Perseroan juga memberikan pelayanan Bank Garansi kepada mitra usaha.

- **Treasury dan Layanan Interbank Lainnya**

Perseroan memberikan layanan jasa transaksi jual beli *bank notes* dengan 16 (enam belas) mata uang. Bank Victoria juga memberikan layanan terkait jual beli dan valuta asing dengan jenis transaksi *forward* dalam mata uang *US Dollar*.

5. Jasa Lainnya

Bentuk layanan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah diuraikan sebagai berikut :

- **Kliring**

Layanan kliring/inkaso yang digunakan untuk penagihan warkat bank lain peserta kliring lokal, di luar wilayah kliring, maupun di luar peserta kliring luar wilayah.

- **Transfer**

Layanan jasa yang digunakan untuk pengiriman dana kepada penerima dana di bank lain.

- **Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Layanan transfer dana melalui fasilitas RTGS dari Bank Indonesia yang dikenakan biaya transfer, namun dapat dipilih untuk dibebankan kepada pengirim atau kepada penerima.

- **Pembayaran Tagihan**

Layanan pembayaran tagihan, misalnya tagihan rekening listrik PLN, rekening telepon Telkom, dan internet Speedy.

- **Kartu ATM**

Fasilitas yang Perseroan berikan kepada nasabahnya berupa Kartu Victoria dengan menggunakan format *National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)* yang memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi, sehingga dapat meminimalkan risiko fraud, seperti yang terjadi pada kartu ATM dengan format *magnetic stripe*. Kartu ATM Victoria ini dapat digunakan oleh nasabah di lebih dari 120.000 ATM yang *merchant*-nya tergabung dengan ATM Prima, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk bertransaksi, seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer antar rekening di Bank Victoria maupun di bank lain yang merupakan anggota jaringan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

- **Auto Save**

Layanan fasilitas yang diperuntukan kepada nasabah giro perorangan Perseroan yang dapat mengoptimalkan pengendapan dana.

- **Auto Debet**

Layanan fasilitas *auto debet* yang diperuntukan kepada nasabah dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara periodik, seperti untuk pembayaran tagihan listrik (PLN), telepon, Perusahaan Air Minum (PAM), dan lain-lain.

- **Internet Banking dan Mobile Banking Victoria**

Fasilitas *electronic banking* yang diperuntukan kepada nasabah tabungan perorangan yang memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan via *smartphone* maupun komputer. Dengan menggunakan fasilitas ini, nasabah juga dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang Perseroan. Berbagai transaksi dapat dilakukan, antara lain pemindahbukuan, melihat mutasi dan riwayat transaksi, transfer *online* menggunakan jaringan Prima, transfer ke bank lain dengan menggunakan SKN, transaksi melalui pembelian listrik dan pulsa, serta transaksi pembayaran rutin bulanan, seperti kartu kredit, tagihan listrik, internet, TV kabel, asuransi, dan lain-lain.

2. STRATEGI USAHA

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah, meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah sekaligus meningkatkan kinerja Bank. Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang diuraikan sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Penghimpunan DPK

Dalam memperkuat proposisi produk DPK, Perseroan telah menetapkan beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. *Internet Banking dan Mobile Banking* (IBMB) baru dengan fitur yang menarik dan beberapa produk digital didalamnya;
- b. Digital deposito;
- c. Digital operations;
- d. Tema digitalisasi yang cepat menghadapi perubahan dan memberikan layanan/produk yang aman, cepat, mudah diraih, dan nyaman;
- e. Akan diperkenalkan produk bank persepsi, *cash management*, dan *transactional banking* guna memberikan daya tarik pada nasabah-nasabah korporasi untuk berbisnis dengan Bank;
- f. Beberapa produk dengan *fee based* (Bank Persepsi, RDN); dan
- g. Pembayaran menggunakan QR nasional.

Strategi Pembiayaan Kredit

Segmentasi bisnis kredit yang sebelumnya banyak terfokus pada korporasi akan bergeser pada sektor lainnya. Beberapa perubahan yang akan terjadi pada sektor usaha kredit diuraikan sebagai berikut :

- a. Segmentasi bisnis SME/komersial dan konsumen akan naik signifikan menjadi berkisar di angka 25%-30% untuk SME/komersial dan 10-15% untuk bisnis konsumen;
- b. Sektor usaha tidak akan didominasi oleh sektor properti;
- c. *Monitoring pipeline* dan bisnis akan dilakukan secara rutin dan akan dibantu dikembangkan melalui *pipeline monitoring system*;
- d. Pengenalan produk dan layanan baru pada sektor usaha kredit;
- e. Penerapan *circle leader* model untuk *monitoring* dan mencari *leads* bisnis; serta
- f. Waktu proses kredit harus dipercepat, yang rata-rata sebelumnya 2 (dua) bulan untuk TTY proses (*Time to Yes*), akan menjadi kurang dari 1 (satu) bulan.

Aspek Operasional dan Teknologi

Secara umum, tema strategi terkait dengan aspek operasional dan teknologi yang akan diterapkan oleh Perseroan ke depan adalah menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang SQEW (*Safe, Quick, Easy, dan Warm*) yang berbasis kepada orientasi bisnis yang berkelanjutan. Adapun poin-poin yang akan diterapkan oleh Bank kedepan sebagai berikut :

1. Jalur efektifitas proses operasional dari hulu ke hilir dievaluasi dan diperbaiki;
2. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi perkreditan, operational, dan teknologi informasi;
3. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat di kirim secara tepat waktu, *zero defect*, dan memberikan kepuasan kepada nasabah;
4. Data corebanking dapat diolah dan didistribusikan kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif;
5. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail banking sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing;
6. Peningkatan layanan dan produk perbankan dengan bentuk *digital banking*; dan
7. Peningkatan keamanan dilakukan dengan *monitoring tools* atas transaksi perbankan dengan aplikasi SPLUNK yang berbasis SIEM.

STRATEGI PEMASARAN

Perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-produk Bank melalui pengembangan produk dan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Perseroan di industri perbankan Indonesia. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan program integrated marketing yang mencakup *marketing collateral, merchandise*, jaringan cabang, situs perusahaan, media sosial, dan *marketing channel* lainnya serta *tactical campaign* melalui *event/exhibition/seminar, office to office*, promo eksternal, dan internal;
- b. Fokus kepada produk yang telah dimiliki, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menambah daya saing seperti menjalankan program launching untuk *internet banking dan mobile banking* serta *internet banking bussiness* untuk mendukung produk yang ada;
- c. Memfasilitasi program media untuk meningkatkan *news value* dan interaksi Bank Victoria di media massa maupun ranah publik melalui media *briefing, media luncheon, press conference, media sponsorship, media hampers, mascot dan merchandise (gimmicks)*;
- d. Menggelar acara *community banking* di wilayah operasional bank melalui program Ayo ke Bank sebagai bagian dari literasi keuangan dan memasuki market pelajar, terutama di tingkat Sekolah Dasar;
- e. Melakukan *competitive analysis* produk dan layanan peer group serta bank-bank acuan dengan tujuan memantau perkembangan produk dan layanan yang ada di pasaran; serta
- f. Meningkatkan portofolio kredit khususnya kepada nasabah UKM dan Komersial.

Pemasaran produk dilakukan melalui Kantor Cabang dan sekitarnya yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Bogor, Medan, Manado, Bali dan Surabaya.

3. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional untuk Perluasan Bisnis dan Jaringan

Sampai dengan saat ini, Perseroan telah melakukan ekspansi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Jabotabek, Bandung, Surabaya, Manado, Makassar, Bali, Semarang, dan Solo. Hal ini merupakan bentuk maksimalisasi perluasan bisnis dan jaringan Bank Victoria.

Memiliki Tingkat Kecukupan Modal yang Kuat

Perseroan memiliki tingkat kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) yang kuat, sehingga mampu menopang pertumbuhan portofolio kredit yang berkualitas. Perseroan juga meningkatkan CAR secara berkala untuk menjaga dan mengelola permodalan agar tetap sehat.

Memiliki Potensi Sinergi dan Saling Menguntungkan dengan Seluruh Grup Usaha

Perseroan terus melakukan inovasi produk dan layanan finansial bagi nasabah, melalui kerja sama dengan perusahaan saudara dalam Grup Victoria. Pada tahun 2021, Perseroan meluncurkan produk dan pengembangan aktivitas baru yang beragam untuk mendukung ekspansi bisnis khususnya *retail banking*.

Menerapkan *Good Personal Customer Relation Approach (Relationship Banking)*

Kepuasan nasabah menjadi faktor penting bagi Perseroan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama, sehingga mempunyai *customer base loyal*, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak yang positif dan berpengaruh signifikan bagi kelangsungan usaha Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Manajemen yang Kuat, Berpengalaman dan Berdedikasi dengan Visi dan Misi Baru, serta Memiliki Komitmen Tinggi pada Peningkatan Penerapan GCG.

Perseroan membangun manajemen yang kuat dalam mendukung Visi dan Misi Bank untuk menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat dan efisien. Perseroan juga mewujudkan komitmen penuh dalam menerapkan prinsip GCG.

Kehangatan Layanan Terhadap Nasabah

Bank senantiasa akan menghadirkan layanan keuangan kepada nasabah layaknya bagian dari keluarga sendiri dengan kenyamanan dan kehangatan dalam setiap interaksi.

Basis Nasabah yang Loyal

Bank memiliki basis nasabah loyal yang menopang pertumbuhan dana dengan menerapkan senantiasa menerapkan *Good Personal Customer Relation Approach (Relationship Banking)*.

Sinergi Usaha dengan Grup

Bank memiliki potensi melakukan sinergi yang saling menguntungkan dengan seluruh grup usaha.

4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat. Berikut adalah kegiatan CSR yang pernah dilakukan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2023

Perseroan memberikan bantuan CSR ke beberapa bidang sebagai berikut ; CSR bantuan sosial kemasyarakatan berupa Santunan Ramadhan 1444 H kepada Yayasan Yatim Piatu Khairul Amal, Cikasungka, Solear, Tangerang dan Panti Yatim Piatu Al Qamariah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan serta donasi kepada anak almarhum karyawan. Kemudian melaksanakan kegiatan CSR bantuan sosial kemasyarakatan Panti Tuna Netra Elsafan, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain itu Perseroan juga memberikan bantuan CSR bantuan kesehatan dan pendidikan kepada Sekolah Dasar Dewi Sartika, Cilincing, Jakarta Utara dan Sekolah Dasar Laksa Bhakti, Jembatan Lima, Jakarta Barat berupa pengadaan vitamin dan sarana pendukung kegiatan sekolah. Kemudian memberikan bantuan pendidikan kepada Asrama STT Iman, Jakarta Selatan berupa bantuan dana pendidikan dan operasional. Selain itu dalam rangka untuk terus menjaga tingkat kesehatan karyawan, Perusahaan juga memberikan bantuan CSR bidang kesehatan berupa pengadaan vitamin bagi karyawan.

Tahun 2022

Perseroan memberikan bantuan CSR ke beberapa bidang sebagai berikut ; CSR bantuan sosial kemasyarakatan berupa Santunan Ramadhan 1442 H kepada Yayasan Yatim Daarul Ma' Wa dan Panti Asuhan Ar Ridho Depok serta donasi kepada anak almarhum karyawan. Kemudian, Perseroan juga memberikan bantuan CSR bantuan pendidikan dan kesehatan kepada Sekolah Dasar Dewi Sartika, Cilincing, Jakarta Utara dan Sekolah Dasar Laksa Bhakti, Jembatan Lima, Jakarta Barat berupa pengadaan lampu penerangan hemat energy solarcell, pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* dan pemberian fasilitas Asuransi Jiwa Victoria Life untuk para tenaga guru sekolah. Kegiatan CSR lainnya di tahun 2022 diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan *Mini Medical Check Up* dan Donor Darah untuk karyawan. Selain itu dalam rangka untuk terus menjaga tingkat kesehatan karyawan terkait dengan masih adanya potensi pandemi COVID - 19, Perusahaan juga memberikan bantuan CSR bidang kesehatan berupa pengadaan vitamin dan *screening test* COVID - 19 bagi karyawan.

Tahun 2021

Perseroan memberikan Santunan Ramadhan 1442 H kepada Panti Sosial Disabilitas Ganda Wisma Tuna Ganda Palsigunung, Yayasan Yatim Daarul Ma' Wa, dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Mubarak. Selain santunan Ramadhan, Perseroan juga memberikan CSR kepada Sekolah Dasar Dewi Sartika dan Sekolah Dasar Laksa Bhakti.

5. TEKNOLOGI INFORMASI (“TI”)

Perseroan secara konsisten terus berupaya berinovasi dalam mengembangkan sistem TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis mengingat pentingnya peranan TI dalam kelancaran kegiatan operasional. Upaya tersebut diawali dengan penyusunan roadmap pengembangan TI yang disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang oleh Perseroan.

Re-engineering Proses Kerja

- Proses kerja operasional TI dilakukan secara otomatisasi untuk membuat proses semakin efektif dan efisien sekaligus menjaga kontrol risiko di dalam Proses. Tinjauan terhadap perbaikan proses selalu dilakukan secara berkelanjutan;
- Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi administrasi kredit, operasional, serta pada teknologi; dan
- Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu, zero defect, memberikan kepuasan kepada nasabah, serta menjaga kontrol risiko.

Memperluas peran aktif dari TI

- Data core banking dan non-core banking dapat diolah dan dikirim kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif; dan
- Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail, SME, commercial sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing.

6. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Kebijakan pengembangan Bank Victoria diatur dalam kebijakan No. 016A/SK-DIR/10/23 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Kebijakan *System Development Life Cycle* (SDLC) PT Bank Victoria International Tbk.

Sedangkan rencana pengembangan dan biaya pengembangan Bank Victoria untuk tahun 2024 tercantum dalam surat ke OJK No. 032/DIR-EKS/11/23 tanggal 28 November 2023 perihal Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2024 PT Bank Victoria International Tbk.

7. MANAJEMEN RISIKO

7.1 Risiko Usaha Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Perseroan memastikan strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan kredit, prosedur internal, peraturan dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku.

Perseroan didukung oleh analisa kelayakan debitur dalam pemberian fasilitas kredit. Hal tersebut bertujuan untuk menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan seluruh kewajibannya. Sebagai jaminan kredit, Perseroan menerima agunan yang memenuhi kriteria, seperti mempunyai nilai ekonomis, *marketable*, *transferable*, serta mempunyai nilai yuridis. Dalam praktiknya, diperlukan agunan sebagai *second way out*, dalam hal debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya.

Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor ekonomi. Untuk posisi 31 Desember 2023, sektor terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor aktivitas keuangan dan asuransi.

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pinjaman tetap	9.697.513.020	8.860.925.844
Pinjaman rekening koran	1.871.766.991	1.677.755.981
Pinjaman tetap dengan angsuran	6.864.293.334	5.078.176.745
Pinjaman serba guna	30.542.760	40.287.111
Pinjaman konsumen	164.627.072	167.465.410
Total Rupiah	18.628.743.177	15.824.611.091

Pembagian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<i>Real estate</i>	2.533.798.811	2.434.559.491
Perdagangan, restoran dan hotel	3.574.239.610	3.471.733.834
Lembaga pembiayaan	5.563.012.101	3.810.285.291
Industri	2.186.357.241	1.546.407.010
Konstruksi	737.806.956	782.271.513
Jasa-jasa sosial/masyarakat	349.351.099	423.151.537
Lain-lain	3.684.177.359	3.356.202.415
Total Rupiah	18.628.743.177	15.824.611.091

Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan oleh Perseroan diantaranya dengan:

- Penetapan batas wewenang risiko kredit.
- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah mematuhi ketentuan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan pedoman pelaksanaan kredit.
- Disesuaikan dengan Rencana Bisnis (*business plan*) Perseroan yang disusun secara realistis dan komprehensif.
- Dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan tetap menjaga kualitas portfolio, Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur.
- Menetapkan tingkat risiko yang bersedia diambil, dengan tujuan memitigasi risiko kredit yang mungkin timbul melalui penetapan limit yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Perseroan.

7.2 Risiko Usaha Yang Bersifat Material (Yang Langsung Maupun Tidak Langsung Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan)

Risiko Pasar (*Market Risk*)

Dalam pengelolaan risiko pasar, Perseroan memiliki tata kelola dengan menetapkan tugas, dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan unit-unit terkait serta membentuk komite-komite seperti *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) dan *Risk Management Committee* (RMC) yang membahas hal-hal terkait pengelolaan risiko pasar yang dilakukan secara berkala.

Pengelolaan Risiko Pasar diantaranya:

- Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk risiko pasar telah mencakup aktivitas *trading* baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko pasar, kecukupan sistem untuk mengukur risiko pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk posisi *banking book* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Manajemen aset dan kewajiban secara keseluruhan (*asset & liabilities management*) sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Perseroan.
- Pengelolaan risiko pasar dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar.
- Perseroan juga menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas *front office unit (Treasury)*, *middle office unit (Risk Management)* dan *back office unit (Settlement)*.
- Pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book* serta metodologi valuasi yang dilakukan dengan memantau limit-limit yang telah ditetapkan Perseroan.
- Perseroan terus mengembangkan dan mengkaji ulang limit-limit risiko pasar seiring dengan berkembangnya produk-produk serta aktivitas fungsional Perseroan yang berpotensi menimbulkan risiko pasar.

Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Pengelolaan Risiko Likuiditas diantaranya:

- Merencanakan dan mengendalikan sumber penggunaan dana Perseroan yang terkoordinasi serta dijalankan secara konsekuen dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi perbankan (*Assets & Liabilities Management-ALMA*).
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang diterapkan diantaranya melalui pengukuran yang digunakan oleh Perseroan dalam mengelola risiko likuiditas, seperti rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan *maturity profile*.
- Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*).
- Menetapkan indikator peringatan dini, di antaranya dengan menentukan *risk appetite* dan *risk tolerance/limit* melalui beberapa indikator keuangan seperti rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga dan rasio alat likuid terhadap *non-core deposit* yang adaptif terhadap perubahan.
- Melakukan *stress testing* yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik Bank dan skenario *stress* pasar.

Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Perseroan mengendalikan risiko operasional untuk memastikan bahwa kerugian operasional (keuangan atau reputasi), termasuk seluruh hal yang berhubungan dengan perilaku bisnis, tidak memberikan kerugian yang material kepada Perseroan.

Pengelolaan Risiko Operasional diantaranya:

- Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi, dan pengukuran risiko operasional.
- Dalam mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Perseroan memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
- Pengembangan terhadap sistem informasi yang memastikan penilaian berkala terhadap sistem informasi, adanya *back up* dan rencana darurat.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.
- Mengimplementasikan *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* sebagai sarana yang digunakan oleh unit kerja yang terkait secara mandiri untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional.
- Membuat *Key Risk Indicator (KRI)* yang merupakan serangkaian parameter pengukuran kuantitatif untuk mengindikasikan tingkat risiko pada suatu fungsi/proses/bisnis.
- Mengimplementasikan *Loss Event Database (LED)* sebagai sarana yang digunakan untuk mengadministrasikan kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional dan merupakan sumber utama yang digunakan untuk analisa data kerugian dan pelaporannya.

Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Pengelolaan risiko strategik adalah dengan mengevaluasi kinerja bisnis dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal guna memperkecil risiko strategik, seperti melakukan langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan beberapa aktivitas yang dilakukan secara manual atau konvensional ke dalam proses digitalisasi.

Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Pengelolaan risiko hukum diantaranya:

- Memastikan perjanjian-perjanjian dan dokumen dengan nasabah dan/atau pihak ketiga lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional Perseroan.
- Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah.
- Pengukuran risiko untuk risiko hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan.

- Melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen atau perjanjian-perjanjian guna mengamankan kepentingan hukum Perseroan.

Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Perseroan memiliki mekanisme pengendalian terhadap risiko reputasi yang dilakukan secara efektif dan cepat baik internal maupun eksternal, diantaranya seperti melaksanakan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan program edukasi, serta mitigasi risiko terhadap suatu kejadian dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Perseroan juga berupaya memperbaiki kelemahan dan prosedur yang dapat memicu risiko reputasi

Pengelolaan Risiko Reputasi diantaranya:

- Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya.
- Melakukan pemantauan terhadap setiap berita yang berkaitan dengan Perseroan di media massa.

Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan antara lain dengan:

- Perseroan bersama dengan Divisi *Compliance & System Procedure*. Dalam pelaksanaannya untuk mendukung efektifitas kepatuhan Perseroan didukung oleh komite eksekutif yaitu komite Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- Memastikan kebijakan, prosedur, dan proses selalu dikinikan secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator dan kompleksitas usaha Perseroan, serta memastikan bahwa semua lini bisnis mengetahui peraturan baru dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan atau aktivitas perusahaan.
- Melakukan sosialisasi secara berkala berkenaan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator.
- Melakukan pemisahan fungsi yang jelas dalam jenjang organisasi.
- Mendukung budaya kepatuhan, yaitu nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan Perseroan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki dan menggunakan merek sebagaimana yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan tulisan dan bentuk sebagai berikut:

bank victoria

Merek ini milik Perseroan ini sudah didaftar sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000217217 Tanggal Penerimaan 8 Februari 2008 Tanggal Pendaftaran Merek 7 September 2009 nama pemilik merek PT Bank Victoria International Tbk. yang diterbitkan oleh Direktur Merek u.b Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perseroan memiliki hak atas merek dengan nama "Bank Victoria". Kelas Jasa NCL9 36. Untuk jasa perbankan. Warna merah, hitam, putih. Nama merek "Bank Victoria" merupakan bagian dari nama Perseroan. Perlindungan hak atas merek in diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut diajukan pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 12:09:52 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan membayar biaya pendaftaran perpanjangan perlindungan Merek tersebut.

Sehubungan permohonan perpanjangan tersebut telah memperoleh sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000217217 kelas 36 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9), yang berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 8 Februari 2028 (Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

9. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta nasional yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan harus selalu siap bersaing dengan bank manapun.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga lain, seperti perusahaan fintech dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menawarkan produk dan jasa yang mirip dengan produk perbankan. Namun demikian, Perseroan sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan dukungan permodalan yang kuat.

Menyesuaikan dengan kondisi pasar, arah kebijakan Bank untuk periode 2022 – 2024 akan meningkatkan inovasi produk dan layanan berbasis digital dengan disertai peningkatan fungsi monitoring dan mitigasi risiko yang melekat pada produk dan layanan tersebut sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan *financial value* Perseroan dan pemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi ini akan ditempuh dengan prinsip kehati-hatian di tengah fleksibilitas dalam menghadapi dinamika bisnis yang tidak pasti.

Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 meraih penghargaan 4th Indonesia *Top Bank Award* 2023 dalam Kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1 yang diselenggarakan oleh *The Economics*.

Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2023 meraih penghargaan *Best Bank Performance of MSMEs Loan Awards* 2023 dengan predikat "Sangat Prima" kategori Modal Inti sampai dengan Rp 6 Triliun (KBMI 1) yang diselenggarakan oleh Majalah Peluang.

Perseroan pada tanggal 28 Juli 2023 meraih penghargaan Indonesia *Best Bank 2023 for The Development of Banking Business Segmentation* dalam kategori KBMI 1 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Perseroan pada tanggal 17 November 2023 meraih Penghargaan *The Best Indonesia Finance for Public Company 2023* pada kategori Asset Rp.20 T – Rp.30 T yang diselenggarakan oleh Majalah *Economic Review*.

Perseroan pada tanggal 8 Desember 2023 meraih Penghargaan *Gold Award-Excellent* dengan score 88,00 dalam kategori *The Best IT-for Bank Aset Rp.20 T- 30 T* yang diselenggarakan oleh Majalah *Economic Review*.

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

10. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy).

Perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook (WEO)* yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Perseroan cukup optimis dengan prospek ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat pertumbuhan kredit akan terus meningkat. Meski demikian, tantangan yang akan dihadapi oleh industri perbankan masih tetap tinggi.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Survei Perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 sebesar 96,1%, lebih tinggi dari 95,4% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi. Peningkatan terindikasi terjadi pada kredit modal kerja (SBT 93,5%) dan kredit investasi (SBT 85,0%). Sementara itu, kredit konsumsi (SBT 79,3%) terindikasi tumbuh positif didorong oleh Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang terindikasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kredit multiguna, kartu kredit, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) terindikasi tumbuh terbatas.

Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru tertinggi terutama terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT 85,9%), diikuti oleh sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (SBT 84,8%), serta sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (SBT 80,2%).

Dari gambaran di atas, pertumbuhan kredit yang positif itu tentu sangat menggembirakan. Namun, sektor perbankan tetap harus menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang *prudent*.

Faktor kondisi global, termasuk volatilitas harga komoditas dan bahan baku serta biaya transportasi yang masih tinggi berpotensi membuat ekspansi pelaku bisnis tersendat.

Strategi Pengembangan Bisnis ke Depan

Strategi pengembangan bisnis disusun dan mengacu pada arah kebijakan Perseroan serta sejalan dengan penetapan tema Rencana Bisnis Perseroan 2022-2024 untuk “*Innovation and Governance for Higher Level Convenience Banking*”, maka Perseroan menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1. Strategi Pendanaan dan Pengembangan

Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah serta menambah nasabah baru dengan target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan optimal. Beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi akan dilakukan sebagai berikut:

- i. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam revamping terhadap internet banking dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan fitur-fitur dan produk-produk digital yang unggul dan bersaing yang dilengkapi juga dengan pembukaan rekening secara digital melalui teknologi *biometric*, sehingga dapat meningkatkan minat dan ketertarikan nasabah baru serta nasabah existing untuk menempatkan dananya dan bertransaksi melalui Perseroan;
- ii. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam *revamping* terhadap internet banking business yang didukung dengan fitur-fitur finansial dan non finansial yang juga dilengkapi dengan cash management untuk memperlengkapi kebutuhan transaksi keuangan dari perusahaan;
- iii. Meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan pengembangan *digital operations*, yaitu melakukan aktivitas transaksi non tunai dengan menggunakan teknologi *video banking*, sehingga interaksi bertransaksi dapat dilakukan secara virtual namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keamanan dalam bertransaksi;
- iv. Melakukan kerjasama dengan kementerian, bank, lembaga keuangan non bank, *E-commerce*, *online travel agent*, *peer to peer lending* dan platform *business (omni channel)* untuk meningkatkan jumlah nasabah dan frekuensi transaksi;

- v. Membuat beberapa program seperti akuisisi nasabah baru melalui program *CASA plus gimmick* hadiah, program *CASA cashback* atau bunga yang menarik, *loyalty* program untuk meningkatkan dana *CASA*;
- vi. Memperkenalkan produk Bank untuk penetrasi ke institusi keuangan non bank untuk meningkatkan dana murah serta diharapkan bisa masuk ke dalam pangsa pasar ritel yang lebih luas lagi; dan
- vii. Melakukan promosi-promosi melalui media sosial ataupun membuat kegiatan atau promosi untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan produk-produk Bank Victoria kepada masyarakat.

2. Strategi Perkreditan

Strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*). Beberapa strategi bisnis yang akan dilakukan pada sektor usaha kredit sebagai berikut:

- i. Melakukan diversifikasi pada portfolio kredit pada segmen korporasi sebesar 30%, segmen SME sebesar 30%, segmen komersil sebesar 30% dan segmen konsumen sebesar 10%;
- ii. Melakukan kredit *channeling* dengan menjalin kerjasama BPR dan Koperasi guna meningkatkan portofolio kredit dan potensi *fee based income*;
- iii. Memperkenalkan ekosistem *digital lending* untuk memberikan informasi sumber dana debitur kepada Bank dan kecepatan proses kredit Bank kepada debitur;
- iv. Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit melalui monitoring debitur dan pelaksanaan *early warning*;
- v. Meningkatkan penyelesaian kredit yang dihapusbuku dan penjualan agunan yang diambilalih termasuk di antaranya melalui penjualan jaminan dan AYDA di situs jaringan (*website*); dan
- vi. Mengoptimalkan program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas keahlian tenaga penjualan.

Ketergantungan terhadap pelanggan dan kontrak pemerintah

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan tertentu.

Strategi Pengembangan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki strategi pengembangan usaha sebagai berikut:

1) Strategi Pendanaan dan Pengembangan

Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah serta menambah nasabah baru dengan target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan optimal.

Beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam *revamping* terhadap *internet banking* dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan fitur-fitur dan produk-produk digital yang unggul dan bersaing yang dilengkapi juga dengan pembukaan rekening secara digital melalui teknologi *biometric*, sehingga dapat meningkatkan minat dan ketertarikan nasabah baru serta nasabah *existing* untuk menempatkan dananya dan bertransaksi melalui Bank Victoria;
- b. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam *revamping* terhadap *internet banking business* yang didukung dengan fitur-fitur finansial dan non finansial yang juga dilengkapi dengan *cash management* untuk memperlengkapi kebutuhan transaksi keuangan dari perusahaan;

- c. Meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan pengembangan digital *operations*, yaitu melakukan aktivitas transaksi non tunai dengan menggunakan teknologi *video banking*, sehingga interaksi bertransaksi dapat dilakukan secara virtual namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keamanan dalam bertransaksi;
- d. Melakukan kerjasama dengan kementerian, bank, lembaga keuangan non bank, *E-commerce*, *online travel agent*, *peer to peer lending* dan *platform business* (*omni channel*) untuk meningkatkan jumlah nasabah dan frekuensi transaksi;
- e. Membuat beberapa program seperti akuisisi nasabah baru melalui program *CASA plus gimmick* hadiah, program *CASA cashback* atau bunga yang menarik, *loyalty program* untuk meningkatkan dana *CASA*;
- f. Memperkenalkan produk Bank untuk penetrasi ke institusi keuangan non bank untuk meningkatkan dana murah serta diharapkan bisa masuk ke dalam pangsa pasar ritel yang lebih luas lagi; dan
- g. Melakukan promosi-promosi melalui media sosial ataupun membuat kegiatan atau promosi untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan produk-produk Bank Victoria kepada masyarakat.

2) Strategi Perkreditan

Strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*).

Beberapa strategi bisnis yang akan dilakukan pada sektor usaha kredit sebagai berikut :

- a. Melakukan diversifikasi pada portfolio kredit pada segmen korporasi sebesar 30%, segmen SME sebesar 30%, segmen komersil sebesar 30% dan segmen konsumen sebesar 10%;
- b. Melakukan kredit *channeling* dengan menjalin kerjasama BPR dan Koperasi guna meningkatkan portfolio kredit dan potensi *fee based income*;
- c. Memperkenalkan ekosistem digital *lending* untuk memberikan informasi sumber dana debitur kepada Bank dan kecepatan proses kredit Bank kepada debitur;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit melalui *monitoring* debitur dan pelaksanaan *early warning*;
- e. Meningkatkan penyelesaian kredit yang dihapusbuku dan penjualan agunan yang diambilalih termasuk di antaranya melalui penjualan jaminan dan AYDA di situs jaringan (*website*); dan
- f. Mengoptimalkan program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas keahlian tenaga penjualan.

3) Strategi bidang Operasional dan Teknologi Sistem Informasi

Melanjutkan pengembangan dalam rangka mendukung aspek peningkatan layanan, operasional bisnis serta keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang akan diterapkan oleh Bank kedepan dan sejalan dengan arah kebijakan yakni menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang *SQEW* (*Safe, Quick, Easy, dan Warm*) yang berbasis kepada orientasi Bisnis yang Berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Bank secara khusus mengembangkan teknologi sistem informasi dan infrastruktur pendukung kegiatan usaha Bank Victoria yang meliputi:

- a. Pengembangan *Revamp Mobile Banking* untuk memberikan pelayanan nasabah yang lebih baik;
- b. Pengembangan *Middleware* untuk memudahkan koneksi antar sistem internal maupun eksternal;
- c. Penggantian aplikasi *Wealth Management* untuk dapat membantu nasabah dalam pengelolaan terkait reksadana dan investasi;
- d. Pengembangan Bank Persepsi untuk pembayaran pajak *online*;

- e. Adanya aplikasi *e-Document* yang membantu dalam *re-engineering* proses dan penghematan arsip;
- f. Sistem Aplikasi Antasena Bank sesuai dengan jadwal dari regulator Bank Indonesia;
- g. Sistem Smart AML untuk pelaporan ke goAML PPAATK; dan
- h. Sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71).

Adapun poin-poin yang akan diterapkan oleh Bank kedepan sebagai berikut.

- a. Jalur efektifitas proses operasional dari hulu ke hilir dievaluasi dan diperbaiki;
- b. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi perkreditan, operational, dan teknologi informasi;
- c. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat di kirim secara tepat waktu, *zero defect*, dan memberikan kepuasan kepada nasabah;
- d. Data *corebanking* dapat diolah dan didistribusikan kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif;
- e. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke *retail banking* sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing;
- f. Peningkatan layanan dan produk perbankan dengan bentuk *digital banking*; dan
- g. Peningkatan keamanan dilakukan dengan *monitoring tools* atas transaksi perbankan dengan aplikasi SPLUNK yang berbasis SIEM.

4) Strategi Pengembangan SDM

Beberapa *key element strategy* yang telah dan akan terus diterapkan Bank.

a. Membentuk *Performance Oriented Culture*

Menerapkan *performance management process* di semua organisasi yang didukung oleh *Key Performance Indicator (KPI)* yang jelas menggunakan *Balance Score Card* dan transparan, serta mekanisme penghargaan yang kuat;

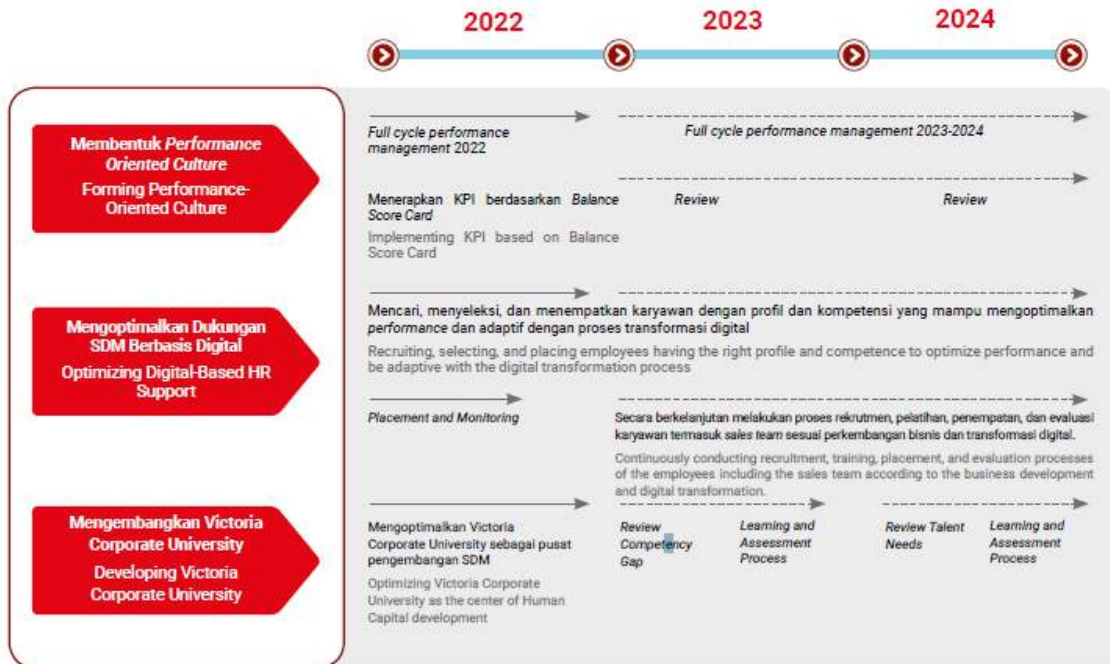
b. Mengoptimalkan Dukungan SDM Berbasis Digital

Menempatkan karyawan yang kompeten dan produktif terutama yang mampu beradaptasi dengan proses transformasi digital.

c. Mengembangkan Victoria Corporate University

Membentuk sumber daya manusia yang handal baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang melalui Victoria Corporate University dengan didukung oleh *learning management system, assessment center, dan talent pool*.

Adapun penjabaran *roadmap* 2022-2024 untuk strategi pengembangan SDM adalah sebagai berikut:



Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan senantiasa dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi produk dan layanan melalui pendekatan digital dengan proses yang lebih cepat guna memberikan kenyamanan, keamanan nasabah dan/atau calon nasabah. Disisi lain, Bank dapat meningkatkan fungsi monitoring dan upaya mitigasi risiko yang melekat pada layanan dan produk yang dipasarkan serta dapat meningkatkan financial value Bank.
2. Inovasi produk dan layanan yang diperkenalkan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang dapat memberikan value bagi stakeholder.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

IX. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari Obligasi dengan kupon;
- c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari Obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga Obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi Subordinasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi Subordinasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga Obligasi Subordinasi dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi Subordinasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi Subordinasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli Obligasi Subordinasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi Subordinasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“**PP No. 9/2021**”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga Obligasi termasuk bunga Obligasi dengan kupon, diskonto Obligasi dengan kupon dan diskonto Obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi No. 3 tanggal 3 April 2024 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 31 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Jumlah Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	500.000.000.000	500.000.000.000	100,00
TOTAL		500.000.000.000	500.000.000.000	100,00

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
- Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

-
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Pendekatan atau Metode Penentuan Harga Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu:

1. Kondisi pasar Obligasi Subordinasi yang berkembang saat pelaksanaan *bookbuilding*;
2. Hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
3. *Benchmark* kepada obligasi pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri obligasi);
4. *Risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi Subordinasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	<p>PT Bank Mega Tbk</p> <p>Menara Bank Mega Lantai 16 Jl. Kapten P. Tendean No.12-14 A Jakarta 12790 Tel : (021) 7917 5000 Fax : (021) 7990 720</p> <p>STTD Nomor : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000</p> <p>Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI Nomor No. AWAI/06/12/2008 tertanggal 17 Desember 2008</p> <p>Perseroan menunjuk Wali Amanat Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan No. 022/DIR-EKS/03/24 tanggal 15 Maret 2024</p>
Pedoman Kerja:	Standar operasi prosedur (SOP) Wali Amanat PT Bank Mega Tbk mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Tugas Pokok:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Kantor Akuntan Publik	<p>Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)</p> <p>Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia</p> <p>Tel : +62 21 5289 5000 Fax : +62 21 5289 4100</p> <p>STTD Nomor: STTD.AP-020/PM.223/2019 tanggal 15 Maret 2019</p> <p>Perseroan menunjuk Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Surat Penunjukan No. 0136/PSS/03/2024 tanggal 28 Maret 2024</p> <p>Keanggotaan Asosiasi No. Reg. IAPI 1634</p>
Akuntan Publik	Yovita

Register No.	Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242
No.STTD	STTD.AP-020/PM.223/2019 tanggal 15 Maret 2019
Pedoman Kerja	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas Pokok	Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajemen, serta penilaian terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan publik bertanggung jawab atas yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Konsultan Hukum	<p>Makes & Partners Law Firm</p> <p>Menara Batavia Lt. 7 Jl. KH. Mansyur Kav. 126 Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220</p> <p>Nama Konsultan Hukum Yang Ditunjuk: - Iwan Setiawan No. STTD : STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023</p> <p>Perseroan menunjuk Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/DIR-EKS/03/24 tanggal 27 Maret 2024</p> <p>Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal</p>
Pedoman Kerja	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Tugas Pokok	Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum (“ Uji Tuntas ”) yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Notaris	<p>Rini Yulianti, S.H.</p> <p>Komplek Bina Marga II Jl. Swakarsa V No. 57B Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur 13450 Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 21 Maret 2018</p> <p>Perseroan menunjuk Notaris Rini Yulianti, S.H. berdasarkan Surat Penunjukan No. 018/DIR-EKS/03/24 tanggal 14 Maret 2024</p>
Pedoman Kerja	Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang tentang jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Tugas pokok:	Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi serta akta-akta pengubahannya.
Perusahaan Pemeringkat Efek	<p>PT Pemeringkat Efek Indonesia</p> <p>Equity Tower Lt. 30 Unit A, E, F dan G SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Senayan, Kebayoran Baru</p> <p>Perseroan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan No. 029/DIR-EKS/03/24 tanggal 18 Maret 2024</p>
Pedoman Kerja	POJK No. 24/POJK.04/2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek.
Tugas pokok:	Melakukan analisa dan memberikan keputusan nilai pemeringkatan terhadap produk Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- b. mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang diwaliamanati;
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Subordinasi; dan/atau
- d. merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Subordinasi, dan/atau kewajiban Emiten.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 3 April 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 25 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 30 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk (“**Bank Mega**”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 0906/CAMS-WA/24 tanggal 1 April 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
 - (ii) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan.
- Surat Pernyataan No. 0905/CAMS-WA/24 tanggal 1 April 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat Pernyataan No. 0921/CAMS-WA/24 tanggal 3 April 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan *Due Dilligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, 210imana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat 210eputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat

keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 01 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta.

2. PERMODALAN

Susunan pemegang saham Bank Mega per 29 Februari 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2024-0849 tanggal 2 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
2. Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	: Lay Diza Larentie
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Ir. C. Guntur Triyudianto
Direktur	: YB Hariantono

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, di antaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, *Mega Transactional Banking*, *Mega Internet Banking*, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities*, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan Operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 30 September 2023, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 380 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan *customer experience* selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK SELAKU WALI AMANAT DI PASAR MODAL (5 TAHUN TERAKHIR)

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020

- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022

- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Th. 2024

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank Mega selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Sesuai Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.
- k. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian / cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 (*audited*) dan 2022. Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“KNMTR”) (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101
Pihak ketiga	645.772	758.672
	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain - neto	644.673	757.620
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	3.356.000	9.164.176
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.373)	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(915)
Efek-efek - neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
	66.304.719	70.311.303

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
	66.292.896	70.289.357
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan - neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi Pihak ketiga	-	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(66)
Tagihan akseptasi - neto	-	52.965
Aset tetap dan aset hak-guna	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
	3.627.795	3.656.166
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
	10.125.725	12.818.842
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
	15.662.241	14.731.561
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
	63.647.784	75.399.264
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.202.082	568.738
Pihak ketiga	2.670.514	977.958
	3.872.596	1.546.696
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Utang akseptasi	-	53.031

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Liabilitas pajak tangguhan - neto	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca-kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	12.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998
	<u>644.295</u>	<u>651.545</u>
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Penghasilan komprehensif lain - neto	3.314.078	3.141.926
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
TOTAL EKUITAS	21.755.443	20.633.680
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	141.750.449

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2.288.030	2.497.278
Beban operasional lainnya		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.487.697)	(3.364.842)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
Pendapatan non-operasional - neto	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
Beban pajak - neto	(832.059)	(975.392)
LABA BERSIH	3.510.670	4.052.678
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	496.444	(313.949)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	4.289.216
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

9. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
trusteebankmega@gmail.com
Website : www.bankmega.com
Up. : **Capital Market Services**

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi (“**FPPOS**”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi adalah tanggal 2 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Juli 2024.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPOS.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi. dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7. tanggal Penjatahan adalah 10 Juli 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan. dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia. akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi. pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang BIP. Jakarta
No. Rek. 081 000 6862
Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2024 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas, kecuali Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut. maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi. selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi. maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2; dan
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan Prospektus lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPOS.

Dalam hal pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal pengumuman batalnya Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi Subordinasi, sehingga terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam Waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 – 8 Juli 2024 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT Victoria Sekuritas Indonesia

Gedung Graha BIP. Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 3007 4888
Faksimili: (021) 5099 2981

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi yang telah disusun oleh Makes & Partners Law Firm.

No.Ref.: 0249/PSH/MP/IS/HU/YI/sp/06/2024

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada:

PT Bank Victoria International Tbk.

Gedung Graha BIP, Lantai 10,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

U.p. : **Yth. Direksi**

Perihal : **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Victoria International Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023, tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan, yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200924, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Bank Victoria International Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. Ref.062/DIR-EKS/03/24, tanggal 27 Maret 2024 perihal Surat Penunjukan sebagai Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum, serta memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**"), sesuai dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.7/2017**"), (ii) Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.36/2014**"), dan (iii) Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat melalui penawaran umum obligasi subordinasi dengan jumlah target dana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Negara Republik Indonesia ("**Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III, pada Tahap I ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024**" atau "**Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024**").

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024

diterbitkan dengan tingkat bunga yang baru akan ditentukan kemudian per tahun. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024. Bunga Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga, terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Prospektus sedangkan pembayaran bunga terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pokok Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal tanggal sebagaimana dimaksud dalam Prospektus. Pelunasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 Perseroan ("**Prospektus**") dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 25 Juni 2024 ("**Pernyataan Perseroan**"), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Obligasi Subordinasi akan dicatatkan dan oleh karenanya akan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 30, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I**").

Selanjutnya sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, antara Perseroan dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. 31, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I**").

Berdasarkan Prospektus, Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 ("Obligasi Subordinasi") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit. ("**Rencana Penggunaan Dana**").

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No.30/2015**") dan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi

("RUPO") dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No.30/2015 serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh Rencana Penggunaan Dana telah direalisasikan.

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 secara *pari passu* berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka penerbitan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum yang tercantum dalam surat Makes 0250/LHUTAH/MP/IS/HU/YI/sp/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) Makes & Partners Law Firm atas PT Bank Victoria International Tbk dalam rangka Rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III PT Bank Victoria International Tbk Tahap I Tahun 2024, yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dan ditembuskan kepada OJK (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai "LHUTAH").

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Victoria International Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 No. Ref: 0225/PSH/MP/IS/HU/YI/sp/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

A. Daftar Istilah

Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Segi Hukum ini atau konteks kalimat yang bersangkutan dalam Pendapat Segi Hukum ini menyatakan lain, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar sebagaimana disebutkan di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Makes : Makes & Partners Law Firm, kantor konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan UTAH, menyampaikan LHUTAH dan memberikan Pendapat Segi Hukum
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- OJK atau Otoritas Jasa Keuangan : Lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menerima pengalihan tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012
- Pendapat Segi Hukum atau PSH : Pendapat segi hukum yang Makes siapkan dalam kerangka rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan Standar Profesi HKHPM
- UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- UUPT : Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

B. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
3. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini;
4. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi HKHPM, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen ("**Laporan Keuangan 31 Desember 2023**"), serta memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a. Anggaran dasar Perseroan: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal selama jangka waktu tersebut, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
5. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I, Rencana Penggunaan Dana atau transaksi lainnya dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; (b) aspek komersial dan/atau finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan/atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, termasuk risiko usaha sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan/atau (d) harga penawaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024;

6. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang dapat mengubah, menambah, mengurangi, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa;
8. berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No.4/2023**"), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK; dan
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

C. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf B Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No. 342/Leg/1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan mengalami perubahan nama dari semula PT Bank Victoria menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni

1993, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602.

Perseroan telah melakukan penyesuaian seluruh anggaran dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 1 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas penawaran umum terbatas IV kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli saham biasa atas nama disertai dengan penerbitan Waran Seri V, peningkatan modal dasar, perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan penyesuaian pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, dan perubahan terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-96853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122147.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 2010, Tambahan No. 3658.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan, pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah sebagai badan hukum perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagaimana tercantum dalam akta-akta di bawah ini:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273182 tanggal 3 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105611.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 2021, Tambahan No. 37920 (**"Akta No. 42/2020"**);
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103473.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4

Juni 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 21 Oktober 2022, Tambahan No. 3615 (“**Akta No. 7/2022**”);

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0059070.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0162900.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 22 Agustus 2023, Tambahan No. 25373;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Perseroan No. 48 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari sebesar Rp1.304.059.448.700,- (satu triliun tiga ratus empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp1.584.823.471.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah) melalui peningkatan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari sebanyak 13.040.594.487 (tiga belas miliar empat puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham menjadi 15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan. Penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per lembar saham, yang keseluruhan dananya telah disetor secara tunai ke Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497387 tanggal 29 Desember 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263092.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 2023, Tambahan No. 1789 (“**Akta No. 48/2022**”); dan
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0073634 tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2023, Tambahan No. 26708 (“**Akta No. 48/2023**”),

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok

Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No.33/2014**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - (i) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (iii) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (iv) Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) Obligasi;
 - (vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
 - q. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana; dan
 - r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Kegiatan Usaha Utama, untuk merealisasi maksud dan tujuan Perseroan, adalah sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (iii) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) Obligasi;
 - (vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga;
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - k. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan *payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
- C. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
 - e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup

kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 7/2022 *juncto* Akta No. 48/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,00 (empat triliun seratus miliar Rupiah), terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp1.584.823.471.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) saham; dan

Modal Disetor : Rp1.584.823.471.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024 ("**Daftar Pemegang Saham**"), yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Victoria Investama Tbk	7.010.537.747	701.053.774.7000	44,23
Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
Masyarakat	5.771.577.627	577.157.762.700	36,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.526.677	1.584.852.667.700	100
Jumlah Saham dalam Portepel	25.251.473.323	2.525.147.332.300	-

**)Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yakni sejumlah 158.482.348 saham.*

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan,

Penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per lembar saham, yang keseluruhan dananya telah disetor secara tunai ke Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh secara tunai ke dalam Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Rekening Giro Dana Setoran Modal No. 0810004436 untuk periode Desember 2022, dengan rincian modal yang telah disetor dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Suzanna Tanojo, sebesar Rp199.999.999.950,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);
- b) PT Victoria Investama Tbk, sebesar Rp219.999.999.900,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); dan
- c) Masyarakat, sebesar Rp1.146.034.200,- (satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2023 dan Pernyataan Perseroan, saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, tidak terdapat sengketa atau gadai atas saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Daftar Pemegang Saham, tidak terdapat saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (ii) tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) saham Perseroan dalam porsi kepemilikan saham oleh masyarakat sebesar 36,42% (tiga puluh enam satu koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana dinyatakan dalam laporan untuk periode data Januari 2024.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan laporan self-assessment atas tingkat kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan kepada OJK No. 055/DIR-EKS/01/24 tanggal 26 Januari 2024 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) secara individual, Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Pasar Perseroan Semester II

Tahun 2023, Peringkat Komposit tingkat Kesehatan Bank berdasarkan laporan tersebut adalah 2 (sehat).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**"), Peraturan Menkumham No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No.15/2019**") dan Peraturan OJK No.3/2021 adalah Suzanna Tanojo, yang telah dilaporkan pada tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019, dan POJK No. 3/2021.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Pemegang Saham Pengendali Perseroan berdasarkan POJK No. 3/2021 adalah (i) Suzanna Tanojo sebagai pemilik 3.066.411.303 (tiga miliar enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga) saham, yang mewakili 19,35% (sembilan belas koma tiga lima persen), dan (ii) VICO sebagai pemilik 7.010.537.747 (tujuh miliar sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui masyarakat, yang mewakili 44,23% (empat puluh empat koma dua tiga persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Suzanna Tanojo sebagai Pemilik Manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria Pasal 4 huruf f Perpres No.13/2018.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Pengendali Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini Pasal 85 ayat (3) POJK Nomor 3/POJK.04/2021 jo. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018, adalah Suzanna Tanojo sebagai pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Terbuka secara langsung maupun tidak langsung

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan erubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibuat secara berkesinambungan.

5. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0070671 tanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("**Akta No. 44/2022**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : **Zaenal Abidin**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. HM. Alif III No. 3, RT 006, RW 005, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3276062001630001 tanggal 17 Juni 2012 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 48.289.338.5-412.000 sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Komisaris Independen : **Gunawan Tenggarahardja**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Cempaka Mas Blok C2 Lt. 27 No. 3, RT 004, RW 008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Utara, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171032608550001, tanggal 17 Januari 2020 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 09.5302.260855.7005 sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Komisaris : **Sia Leng Ho**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pluit Utara I No. 11, RT 001/RW 005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172010707590008, tanggal 12 November 2021 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 5807.324.103.6-047.000 sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direksi

Direktur Utama : **Achmad Friscantono**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Benda II No. 7, RT 002, RW 004, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174070711610002 tanggal 31 Desember 2011 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 09.646.788.1-019.000, sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Wakil Direktur Utama : **Rusli**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Karang Blok E.1 Sel No. 86, RT 020, RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172011702710009 tanggal 8 Februari 2012 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 07.325.068.0-047.000 sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktur : **Debora Wahjutirto Tanoyo**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok E/41, RT 011,

RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3578084905850003 tanggal 16 Januari 2016 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 25.779.812.4-606.900, sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktur : **Lembing**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kemang Raya 78/C-7, RT 013, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171030612640007 tanggal 29 Mei 2019 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 05.962.811.5-027.000, sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : **Tamunan**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam V/31, RT 001, RW 005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta, adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174011812650001 tanggal 5 Februari 2012 yang berlaku seumur hidup dan pemegang NPWP dengan No. 17.019.189.4-015.000, sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*), berdasarkan:

- (i) Rusli, berdasarkan Surat OJK No. SR-84/D.03/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Victoria International Tbk;
- (ii) Gunawan Tenggarahardja, berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 9/128/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 13 September 2007 perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen PT Bank Victoria International Tbk;
- (iii) Tamunan, berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 10/36/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 17 Maret 2008 perihal Keputusan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Victoria International Tbk;
- (iv) Zaenal Abidin, berdasarkan Surat OJK No. SR-212/PB.12/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan atas Pencalonan Komisaris Utama Independen PT Bank Victoria International Tbk;
- (v) Lembing, berdasarkan Surat OJK No. KEP-180/D.03/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Lembing selaku Direktur Bisnis PT Bank Victoria International Tbk;
- (vi) Debora Wahjutirto Tanoyo, berdasarkan Surat OJK No. KEP-201/D.03/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Persetujuan Pengangkatan Debora

- Wahjutirto Tanoyo sebagai Direktur *Finance & Loan Operation* PT Bank Victoria International Tbk;
- (vii) Achmad Friscantono MBA, berdasarkan Surat OJK No. SR-240/PB.12/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk; dan
 - (viii) Sia Leng Ho, berdasarkan Surat OJK No. SR-249/PB.12/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk.

Pengangkatan serta persyaratan selama menjabat atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/2014, dan masing-masing masa jabatan anggota Direksi dan Dewan dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK-DIR/HCM/01/21 tanggal 11 Januari 2021, telah mengangkat Caprie Ardira Azhar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan telah dimuat dalam Situs Web Perseroan (<https://victoriabank.co.id/page/tentang-kami/manajemen/-sekretaris-perusahaan>) sebagai pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.04/2014.

Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK No. 55/2016**"), berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002A/SK-DIR/11/22 tanggal 9 November 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Zaenal Abidin
Anggota : Medi Sejati
Anggota : Yosef Abdulrachman

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2016.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan, Perseroan telah mengangkat Djoko Soendjojo sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Divisi Anti *Fraud* Perseroan. Keputusan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang bersangkutan. Bahwa penyusunan piagam audit internal dan pengangkatan kepala unit audit internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan No. 001A/SK-DIR/11/22 tanggal 1 November 2022 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris

Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") dan POJK No. 55/2016, Perseroan telah memiliki komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002C/SK-DIR/11/22 tanggal 9 November 2022 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Gunawan Tenggarahardja
Anggota : Sia Leng Ho
Anggota : Syahda Candra

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, yaitu antara lain, Nomor Induk Berusaha, Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, Izin Usaha Pedagang Valuta Asing, Izin Usaha Bank Umum, Surat tanda terdaftar Sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana, Izin Bank Devisa, Persetujuan Penerbitan Sertifikat Deposito Tanpa Warkat, Izin Penerbitan Sertifikat Deposito yang Ditransferkan di Pasar Uang, Persetujuan Aktivitas Baru Layanan Cash Management Service (via Internet Bank Bisnis dan Virtual Account), Izin Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money), dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diterima termasuk atas Pernyataan Perseroan, Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.
7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, yaitu benda tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan), benda bergerak (kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor, serta mesin dan peralatan ("**Harta Kekayaan Material**")), yang seluruhnya dimiliki secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan bukti kepemilikan yang telah Makes terima.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang menjadi obyek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan; (b) upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir; (e) Perseroan telah melakukan pendirian atas Lembaga Kerja Sama Bipartit (“**LKS Bipartit**”), yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan (f) Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan.
9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan pemeriksaan Makes atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki perjanjian utang/fasilitas dengan pihak ketiga, dimana Perseroan bertindak sebagai Debitur, kecuali atas surat utang yang diterbitkan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 76 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 12 tanggal 4 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Pengubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 37 tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 No. 11 tanggal 18 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris di Jakarta;
 - e. Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 No. 17 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - f. Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 14 tanggal 13 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - g. Akta Pengakuan Utang Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria No. 18 tanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, seluruh surat utang yang diterbitkan Perseroan sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, termasuk Rencana Penggunaan Dana.

10. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam LHUTA. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen

yang Makes terima dari Perseroan termasuk pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan, (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian material (termasuk Perjanjian Kredit) yang diuraikan dalam LHUTAH serta pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan, pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, dan berpotensi untuk menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Maret 2024.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, pelaksanaan rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagaimana telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan berdasarkan Surat Direksi No. 0037/DIR-EKS/11/22 tentang Rencana Bisnis Tahun 2024-2026 PT Bank Victoria International Tbk.

12. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar Perseroan tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja No. 00076/2.1032/JL.0/07/0242-3/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024, termasuk pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf j (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) terhadap perjanjian kredit yang terkait dengannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, dan oleh karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No.36/2014; dan (b) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dan karenanya memenuhi kriteria efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK No.36/2014.

Sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No.RC-367/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, nilai keseluruhan target dana dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 memiliki peringkat **BBB** (Triple B), yang berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo, yang berlaku pada Tanggal Pendapat

Segi Hukum, termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dan, karenanya, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 memenuhi kriteria sebagai efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK No.36/2014.

13. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”) dan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan: (a) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024; atau (b) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali untuk perkara-perkara sebagai berikut:
- a. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 434/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst);
 - b. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel);
 - c. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst);
 - d. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (No. Register Perkara No. 826/Pdt.G.2023/PN JKT.SEL);
 - e. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (No. Register Perkara No. 222/Pdt.G/2024/PN. Sby.);
 - f. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (No. Register Perkara No. 604/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel.); dan
 - g. Perkara Perdata Umum - Perbuatan Melawan Hukum - (No. Register Perkara No. 977/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel.).

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, perkara-perkara tersebut bukan merupakan perkara yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, juga tidak akan berdampak negatif terhadap atau menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan oleh Makes atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 5 April 2024 (“**Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**”), masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan: (a) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan

III Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana; atau (b) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Subordinasi III Berkelanjutan Bank Victoria No. 1, tanggal 3 April 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Subordinasi III Berkelanjutan Bank Victoria No. 29, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur;

b. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I;

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat;

c. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I; dan

d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 20, tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur.

e. Akta Pengakuan Utang Penawaran Umum Berkelanjutan Subordinasi III Berkelanjutan Bank Victoria No. 32, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur.

f. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan No sp-308/OBL/KSEI/0324.

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan oleh Makes pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan OJK No. 36/2014 dan Peraturan OJK No. 7/2017. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/2020.

15. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Rencana Penggunaan Dana bukan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUPM) dari Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan:

i. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020; dan

- ii. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**").
16. Berdasarkan Surat No: S-58/PB.321/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I tahun 2024 PT Bank Victoria International Tbk., rencana Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan OJK, dan sehubungan dengan pencatatan obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap BVIC wajib menyampaikan kembali permohonan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerbitan produk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah produk diterbitkan.
17. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI berdasarkan Surat Keputusan No S-05591/BEI.PP2/06-2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
18. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum Makes, redaksional informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum secara substansial telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

D. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan antara lain disebutkan bahwa: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan kepada Makes dan Makes terima, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan, dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email

atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.

- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini.
- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dan/atau RUPS Independen (“**RUPSI**”) Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPO, RUPS, dan RUPSI Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPO, RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (“**Dokumen Pernyataan**”), dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada

Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan, merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- h. Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang Makes periksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha dan bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 11, 13 dan 14 Pendapat Segi Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi HKHPM. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 11, 13 dan 14 Pendapat Segi Hukum ini tersebut diberikan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Izin-Izin Material" dan "Harta Kekayaan Material" adalah merujuk pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- e. Perseroan telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan merupakan pihak, (ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan, (iii) Anggaran Dasar Perseroan,; dan (vi) peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- f. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- g. Bahwa proses pemeriksaan segi hukum atas Perseroan sesuai dengan Standar Profesi HKHPM dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 pada Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berjalan dan Makes akan terus memperbaharui informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini sesuai dengan dokumen-dokumen dan konfirmasi-konfirmasi tambahan yang Makes terima dari Perseroan setelah Tanggal Pendapat Segi Hukum ini.
- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") mengeluarkan Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja 2020**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("**DPR**") telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No.13/2022**") yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu Cipta Kerja**") yang mulai berlaku dihitung sejak tanggal diundangkannya Perppu Cipta

Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2023.

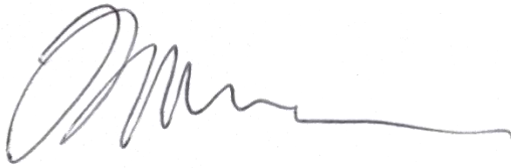
Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah merujuk kepada batasan dalam Peraturan OJK No.36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkatan efek adalah merujuk kepada ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 karena memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo untuk obligasi umum peringkat jangka panjang (perusahaan atau pemerintah domestik) adalah sebagaimana tercantum dalam dan dapat diakses

dari laman OJK (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>, khususnya Tabel 4 (Pemetaan Peringkat – Peringkat Jangka Panjang)) dan Pefindo (<https://pefindo.com/fileman/file?file=95>), yaitu golongan pemetaan peringkat sebagai berikut (i) *idAAA*, (ii) *idAA+* sampai dengan *idAA-*, (iii) *idA+* sampai dengan *idA-*, dan (iv) *idBBB+* sampai dengan *idBBB-*). Adapun berdasarkan surat Pefindo No.RC-368/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024, perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 Perseroan telah mendapatkan rating *idBBB* (Triple B).

- k. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- l. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik atau data industri.
- m. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.
- n. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 karena sebab apapun tidak terlaksana, batal atau dibatalkan.
- o. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- p. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

No.Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023

No.Anggota HKHPM: 200924

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan R.I

Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

PT Bank Victoria International Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of December 31, 2023 and 2022
for the years then ended with independent auditor's report*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement Letter of the Board of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Reports</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4-5	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6-7	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	8-9	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	10-176	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| 1. Nama | : | Achmad Friscantono MBA | : | Name |
| Alamat kantor | : | Graha BIP Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 | : | Office address |
| Alamat domisili atau sesuai KTP | : | Jl. Benda II No.7 RT 002/RW 004, Kel Pulo Kec.Kebayoran Baru Jakarta | : | Domicile address or address according to ID |
| Nomor telepon | : | 021-522 8888 | : | Telephone number |
| Jabatan | : | Direktur Utama | : | Title |
| 2. Nama | : | Debora Wahjutirto Tanoyo | : | Name |
| Alamat kantor | : | Graha BIP Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 | : | Office address |
| Alamat domisili atau sesuai KTP | : | Permata Hijau Blok E/41 RT 011/004, Grogol Utara Kebayoran Lama | : | Domicile address or address according to ID |
| Nomor telepon | : | 021-522-8888 | : | Telephone number |
| Jabatan | : | Direktur | : | Title |

menyatakan bahwa:


declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Victoria International Tbk; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Victoria International Tbk; |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Victoria International Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of PT Bank Victoria International Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Victoria International Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information in the financial statements of PT Bank Victoria International Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and |
| b. Laporan keuangan PT Bank Victoria International Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of PT Bank Victoria International Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Victoria International Tbk. | 4. We are responsible for the internal control system of PT Bank Victoria International Tbk. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 7 Juni 2024/Jakarta, June 7, 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors of 
PT Bank Victoria International Tbk



ACHMAD FRISCANTONO MBA
Direktur Utama/Vice President Director

DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO
Direktur Keuangan/Finance Director

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-
3/1/VI/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi
PT Bank Victoria International Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Victoria International Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-
3/1/VI/2024

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Bank Victoria International Tbk*

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Victoria International Tbk (the "Bank"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023 and 2022, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audits of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk setiap hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal-hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal-hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tercatat pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp18,6 triliun, sebelum cadangan penurunan nilai sebesar Rp574,9 miliar. Pengungkapan atas hal ini diuraikan pada Catatan 2, 3, 11, 32 dan 45 atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan adalah hal audit utama bagi kami karena nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilainya adalah signifikan terhadap laporan keuangan, dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai tersebut memerlukan penerapan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen, yaitu penentuan model untuk menghitung cadangan tersebut, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi utama yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor-faktor makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the Bank as of December 31, 2023. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For each of the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatements of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses of loans

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2023, the balance of loans was amounted to Rp18.6 trillion, before allowance for impairment amounted to Rp574.9 billion. Disclosures of these matters are described in Notes 2, 3, 11, 32, and 45 to the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses of loans is a key audit matter to us because the carrying amounts of loans and the allowance for impairment losses were significant to the financial statements, and the calculation of allowance for impairment losses of loans required application of significant judgment and estimation from the management, such as establishing model to calculate the allowance for impairment, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and establishing key assumptions used in the model to calculate allowance for impairment losses (for exposures assessed on an individual or collective basis), which incorporated forward-looking macroeconomic factors.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses pemberian pinjaman, penilaian kualitas pinjaman internal secara teratur, serta pencatatan dan pengawasan pinjaman yang diberikan. Kami memperoleh pemahaman tentang metodologi dan model keuangan untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, serta melakukan validasi atas data masukan (*input*), dasar dan asumsi utama yang digunakan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan membandingkan ke data historis Bank dan informasi pasar yang dapat diobservasi. Kami juga menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang ditetapkan oleh manajemen untuk pinjaman yang diberikan.

Kami juga menguji konsistensi antara pengalaman historis dan kondisi sekarang dengan kerugian terkini pada portofolio serta menilai kewajaran penyesuaian asumsi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang ditentukan secara individual, atas dasar sampel kami mengevaluasi bila identifikasi dilakukan secara tepat waktu terhadap eksposur dengan penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai. Untuk pinjaman yang diidentifikasi mengalami penurunan nilai, kami menilai asumsi utama atas arus kas masa depan yang akan diterima, termasuk nilai jaminan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh pakar manajemen atau manajemen sendiri.

Kami memeriksa akurasi matematis perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas dasar sampel dan menilai kecukupan pengungkapan atas hal-hal ini pada laporan keuangan terlampir. Kami melibatkan pakar auditor kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas sesuai dengan keahliannya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses of loans (continued)

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of key controls over the process of loan origination, regular internal credit quality assessments, and recording and monitoring of the loans. We gained understanding over methodologies and financial model of the calculation of the impairment losses, and validated inputs, bases, and key assumptions used in calculating the allowance for impairment losses by comparing to the Bank's historical data and observable market data. We also tested the classification into the three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria established by the management regarding loans.

We also evaluated consistency of historic experience and the current circumstances with recent losses in the portfolios and assessed the reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis and probability-weighted multiple scenarios.

With respect to individually assessed impairment losses, on sample basis we evaluated if timely identification was made for exposures with significant deterioration in credit quality or exposures which have been impaired. For loans identified to be impaired, we assessed key assumptions on the expected futures cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by the management's expert or the management.

We tested mathematical accuracy of the calculation of allowance for impairment losses on sample basis and we assessed the adequacy of disclosures for these matters in the notes to the accompanying financial statements. We involved our auditor's experts in the performance of these procedures in accordance with their specific expertise.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tercatat dari agunan yang diambil alih ("AYDA"), terutama dalam bentuk tanah dan bangunan, adalah sebesar Rp802,5 miliar. AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual (*fair value of less cost to sell* atau "FVLCS"). Jika FVLCS lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka cadangan kerugian penurunan nilai akan diakui.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA adalah hal audit utama bagi kami karena nilai tercatatnya yang signifikan terhadap laporan keuangan dan pengukuran FVLCS memerlukan penerapan pertimbangan dan estimasi yang signifikan dari manajemen, terutama dalam menentukan metode penilaian dan asumsi utama yang digunakan dalam estimasi arus kas masa depan yang diharapkan, seperti tingkat diskonto, biaya untuk menjual dan realisasi penerimaan arus kas.

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai AYDA. Kami juga memperoleh pemahaman atas proses pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan pengawasan atas AYDA.

Kami melakukan evaluasi terhadap metodologi, asumsi utama dan input data yang digunakan oleh pakar manajemen dalam menghitung FVLCS dari AYDA, dengan melakukan validasi atas FVLCS dari AYDA pada laporan penilaian dan estimasi realisasi penerimaan arus kas dan kewajaran tingkat diskonto yang digunakan dengan membandingkan dengan data internal Bank. Kami juga melakukan evaluasi atas kompetensi dan obyektivitas dari pakar manajemen dan kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses of foreclosed assets

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2023, the carrying amount of foreclosed assets, mainly in the form of land and building, was amounting to Rp802.5 billion. The foreclosed assets are reconized at the lower of carrying value and the fair value of less cost to sell ("FVLCS"). When the FVLCS is lower than the carrying amount, allowance for impairment losses is recognized.

Allowance for impairment losses of foreclosed assets is a key audit matter to us because the carrying amount of the assets is significant to the financial statements and the measurement of FVLCS required application of significant judgement and estimation from the management, especially in establishing the valuation method and key assumptions used to estimate the expected future cash flows, such as discount rate, cost to sell and timing of the cash flows receipt.

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the process to calculate allowance for impairment losses of foreclosed assets. We gained understanding over the process of initial recognition, subsequent measurement and monitoring of the foreclosed assets.

We evaluated the methodology, key assumptions and data inputs used by the management's experts in calculating FVLCS of the foreclosed assets by validating the FVLCS of the foreclosed assets stated in the valuation report and estimation of timing for the cash flow receipt and reasonableness of discount rate used by comparing to internal data of the Bank. We evaluated the competence and objectivity of the management experts and adequacy of the related disclosures in the notes to the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran efek utang Bank di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Umum”), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01332/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/V/2024 bertanggal 13 Mei 2024 atas laporan Keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 (“Laporan Tahunan”) selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam Laporan Tahunan tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Independent Auditor’s Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the debt securities of the Bank in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority (the “Public Offering”), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditor’s report No. 01332/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/V/2024 dated May 13, 2024 on the financial statements of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended, prior to the reissuance of such financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed Public Offering.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report (“The Annual Report”) other than the accompanying financial statements and our independent auditor’s report thereon.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the Annual Report, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-
3/1/VI/2024 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-
3/1/VI/2024 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)**

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Yovita

Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0242/Public Accountant Registration No.: AP.0242

7 Juni 2024/June 7, 2024



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022*)	
ASET				ASSETS
Kas	92.820.864	2d,2i,4	51.897.124	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	2d,2j,5	1.506.565.848	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	296.298.919	2d,2j, 2g,6	228.384.427	Current accounts with other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.726)		-	Less: Allowance for impairment losses
	296.297.193		228.384.427	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	916.367.530	2d,2g, 2k,7	858.340.530	Placements with Bank Indonesia and other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(998.782)		(13.015)	Less: Allowance for impairment losses
	915.368.748		858.327.515	
Efek-efek	6.285.563.736	2d,2g, 2l,8	4.818.553.397	Marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.271.969)		(8.862.949)	Less: Allowance for impairment losses
	6.277.291.767		4.809.690.448	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	636.732.554	2d,2n,9	839.432.375	Securities purchased under resale agreement
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	386.167.151	2d,2g,10	416.231.152	Interest and sharia income receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.759.228)		(24.551.373)	Less: Allowance for impairment losses
	368.407.923		391.679.779	
Pinjaman yang diberikan, pembayaan dan piutang syariah		2d,2g		Loans, sharia financing and receivables
Pihak berelasi	143.896.441	2m,11	73.265.683	Related parties
Pihak ketiga	18.484.846.736		15.751.345.408	Third parties
	18.628.743.177		15.824.611.091	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)		(538.118.251)	Less: Allowance for impairment losses
	18.053.870.975		15.286.492.840	
Tagihan akseptasi	12.474.839	2o	7.754.446	Acceptance receivables
Penyertaan saham	215.930.505	2p,12	242.104.323	Investments in shares
Biaya dibayar dimuka	25.465.024	2t,13	19.714.677	Prepaid expenses
Aset tetap dan aset hak guna	505.086.595	2q,14	544.733.377	Fixed assets and right-of-use assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(81.859.391)		(73.880.350)	Less: Accumulated depreciation
	423.227.204		470.853.027	
Agunan yang diambil alih	802.486.682	2g,2s,15	1.237.844.890	Foreclosed assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(251.870.489)		(306.834.651)	Less: Allowance for impairment losses
	550.616.193		931.010.239	

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on *)
December 22, 2022 (See Note 48)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022*)	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Aset tak berwujud - bersih	8.192.813	2r,16	2.531.184	<i>Intangible assets - net</i>
Aset pajak tangguhan - bersih	163.003.926	2ab,22c	197.607.333	<i>Deferred tax assets - net</i>
Aset lain-lain	103.819.813	2t,17	102.279.016	<i>Other assets</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.356.770)		(14.323.476)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u>91.463.043</u>		<u>87.955.540</u>	
JUMLAH ASET	<u>29.624.240.421</u>		<u>25.932.001.125</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan nasabah		2d,2u,18		<i>Deposit from customers</i>
- Pihak berelasi	1.397.970.027		387.327.309	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	21.031.210.465		18.984.510.328	<i>Third parties -</i>
	<u>22.429.180.492</u>		<u>19.371.837.637</u>	
Simpanan dari bank lain		2d,2u,19		<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak berelasi	478.732		167.870	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	1.104.324.627		1.334.784.750	<i>Third parties -</i>
	<u>1.104.803.359</u>		<u>1.334.952.620</u>	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	643.266.730	2d,2n,20	240.865.160	<i>Securities sold under repurchase agreement</i>
Efek-efek yang diterbitkan	1.347.639.528	2v,21	1.051.903.552	<i>Securities issued</i>
Utang akseptasi	11.959.811	2o	-	<i>Acceptance payables</i>
Utang pajak		2ab,22a		<i>Taxes payable</i>
- Pajak penghasilan badan	-		16.049.378	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lainnya	29.310.442		14.792.095	<i>Other taxes -</i>
	<u>29.310.442</u>		<u>30.841.473</u>	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	39.837.511	2ac,24b	40.196.622	<i>Employee benefits obligation</i>
Akrua dan liabilitas lain-lain	193.457.538	2d,23	160.940.580	<i>Accruals and other liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>25.799.455.411</u>		<u>22.231.537.644</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

*Consolidation until the date of divestment of subsidiary on *) December 22, 2022 (See Note 48)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value Rp100 (full amount) per share
Modal dasar - 41.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 2022				Authorised capital – 41,000,000,000 shares as of December 31, 2023, and 2022
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.848.235.778 dan 15.848.234.714 masing-masing saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	1.584.823.578	25	1.584.823.471	Issued and fully paid capital -15,848,235,778 and 15,848,234,714 shares as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Tambahan modal disetor	668.684.728	26	670.584.856	Additional paid-in capital
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(16.832.287)	2d,2l	(38.589.677)	Unrealised loss on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, net of tax
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	382.456.152	14	382.456.152	Gain on revaluation of fixed assets, net of tax
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19.466.902		16.819.083	Remeasurements on employee benefit liabilities, net of tax
Saldo laba:				Retained earnings:
- Telah ditentukan penggunaannya	202.200.000	27	177.200.000	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya	983.985.937		907.169.596	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS	3.824.785.010		3.700.463.481	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.624.240.421		25.932.001.125	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on *) December 22, 2022 (See Note 48)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2023	Catatan/ Notes	2022*)	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga dan syariah				<i>Interest and sharia income</i>
Pendapatan bunga	1.836.391.130	2y, 29	1.635.522.726	<i>Interest income</i>
Pendapatan syariah	-	2y, 29	69.495.685	<i>Sharia income</i>
	1.836.391.130		1.705.018.411	
Beban bunga dan syariah	(1.257.661.775)	2y, 30	(971.637.742)	<i>Interest and sharia expense</i>
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	578.729.355		733.380.669	<i>Interest and sharia income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Pendapatan dari investasi reksadana	13.292.046		5.133.142	<i>Income from investment in mutual funds</i>
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - bersih	35.431.712	2d	19.273.193	<i>Gains on sale of securities measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income - net</i>
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	15.679.319	2z	7.143.802	<i>Fees and commissions from transactions other than loans</i>
Lain-lain - bersih	188.962.184	31	348.653.086	<i>Others - net</i>
Jumlah pendapatan operasional lainnya	253.365.261		380.203.223	<i>Total other operating income</i>
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(242.509.120)	2g,32	(223.959.331)	<i>Provision for impairment losses on financial assets</i>
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	54.964.162	2h,32	(47.616.890)	<i>Reversal (provision) for impairment losses on non-financial assets</i>
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(31.877.279)	2d, 12	(2.980.457)	<i>Loss on changes in fair value of investment in shares measured at fair value through profit or loss</i>
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi - bersih	3.930.662	2d	(1.263.942)	<i>Unrealised profit/(loss) on changes in fair value of securities measured at fair value through profit or loss - net</i>
Beban umum dan administrasi	(158.899.846)	2aa,33	(148.563.568)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban tenaga kerja	(157.155.510)	2aa,34	(163.030.989)	<i>Personnel expenses</i>
Lain-lain	(126.476.550)	35	(112.102.276)	<i>Others</i>
Jumlah beban operasional lainnya	(658.023.481)		(699.517.453)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL	174.071.135		414.066.439	PROFIT FROM OPERATIONS
Beban Non-Operasional - Bersih	(44.534.907)	36	(57.135.612)	<i>Non-Operating Expenses - Net</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	129.536.228		356.930.827	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(27.719.887)	2ab,22b	(130.757.374)	INCOME TAX BENEFIT - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	101.816.341		226.173.453	NET PROFIT FOR THE YEAR

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on December 22, 2022 (See Note 48)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir
 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
 For the years ended
 December 31, 2023 and 2022
 (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
 unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
		2023	Catatan Notes	2022*)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that would be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		27.894.092	2d,2l	(84.273.995)	Changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak tangguhan terkait		(6.136.700)	22c	15.958.836	Related deferred income tax
		21.757.392		(68.315.159)	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that would never be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		3.394.639	24	(2.230.737)	Remeasurements on employee benefit liabilities
Pajak tangguhan terkait		(746.821)	22c	307.249	Related deferred income tax
		2.647.818		(1.923.488)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		24.405.210		(70.238.647)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS), NET OF INCOME TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		126.221.551		155.934.806	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:					Net income attributable to:
Pemilik entitas induk		101.816.341		226.173.453	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	2c,42	-	Non-controlling interest
		101.816.341		226.173.453	
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					Comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		126.221.551		155.934.806	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	2c,42	-	Non-controlling interest
		126.221.551		155.934.806	
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					INCOME PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ENTITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY
Dasar (Rupiah penuh)		6,42	2ad,37	19,17	Basic (full Rupiah)
Dilusian (Rupiah penuh)		6,42	2ad,37	19,17	Diluted (full Rupiah)

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on December 22, 2022 (See Note 48)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the years ended
 December 31, 2023 and 2022
 (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Setoran modal diterima dimuka/ Capital received in advance	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ Unrealised gains (loss) on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak/ Gain on revaluation of fixed assets - net of tax	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ Remeasurements on employee benefit liabilities - net of tax	Saldo laba/ Retained earnings		Kepentingan non pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
							Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				Jumlah/ Total
Saldo per 1 Januari 2023	1.584.823.471	670.584.856	-	(38.589.677)	382.456.152	16.819.083	177.200.000	907.169.596	3.700.463.481	-	3.700.463.481	Balance as of January 1, 2023
Dana setoran modal	25	107	-	-	-	-	-	-	107	-	107	Capital deposit fund
Biaya emisi efek		-	(1.900.128)	-	-	-	-	-	(1.900.128)	-	(1.900.128)	Issuance cost
Penghasilan komprehensif lain: Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	-	-	21.757.390	-	-	-	21.757.390	-	21.757.390	Other comprehensive income: Financial assets measured at fair value through other comprehensive income, net of tax
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	24	-	-	-	-	2.647.819	-	-	2.647.819	-	2.647.819	Remeasurements on employee benefit liabilities, net of tax
Pembentukan cadangan umum	28	-	-	-	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	101.816.341	101.816.341	-	101.816.341	Net income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	1.584.823.578	668.684.728	-	(16.832.287)	382.456.152	19.466.902	202.200.000	983.985.937	3.824.785.010	-	3.824.785.010	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the years ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Setoran modal diterima/ Capital received in advance	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ Unrealised gains (loss) on changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax	Surplus revaluasi aset tetap - setelah kerja - setelah pajak/ Gain on revaluation of fixed assets - net of tax	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ Remeasurements on employee benefit liabilities - net of tax	Saldo laba/ Retained earnings		Kepentingan non pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
							Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				Jumlah/ Total
Saldo per 1 Januari 2022	1.048.713.257	407.785.927	278.000.000	18.283.309	382.456.152	20.973.059	186.356.165	671.839.978	3.014.407.847	17.327	3.014.425.174	Balance as of January 1, 2022
Dana setoran modal	25,26	536.110.214	268.055.108	(278.000.000)	-	-	-	-	526.165.322	-	526.165.322	Capital deposit fund
Biaya emisi efek		-	(4.287.797)	-	-	-	-	-	(4.287.797)	-	(4.287.797)	Appropriation for general reserve
Penghasilan komprehensif lain: Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	-	(68.315.159)	-	-	-	-	(68.315.159)	-	(68.315.159)	Other comprehensive income: Financial assets measured at fair value through other comprehensive income, net of tax
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	24	-	-	-	-	(1.923.488)	-	-	(1.923.488)	-	(1.923.488)	Remeasurements on employee benefit liabilities, net of tax
Transaksi kombinasi bisnis entitas sependangali	48	-	(968.382)	-	-	-	-	-	(968.382)	-	(968.382)	Business combination transaction with under common control
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	226.173.453	226.173.453	-	226.173.453	Net income for the year
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	48	-	-	11.442.173	-	(2.230.488)	(9.156.165)	9.156.165	9.211.685	(17.327)	9.194.358	Loss of control on subsidiary
Saldo per 31 Desember 2022	1.584.823.471	670.584.856	-	(38.589.677)	382.456.152	16.819.083	177.200.000	907.169.596	3.700.463.481	-	3.700.463.481	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2023	Catatan Notes	2022*)	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	1.866.455.131		1.585.072.007	<i>Receipt from interest and sharia income and commissions</i>
Pembayaran bunga dan syariah	(1.241.689.538)		(936.209.912)	<i>Payment of interest and sharia expense</i>
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	253.716.401		363.010.679	<i>Receipt from other operating income</i>
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	385.438.160		14.100.990	<i>Receipt from sale of foreclosed assets</i>
Pembayaran beban umum dan administrasi	(135.297.898)		(118.616.627)	<i>Payment of general and administrative expenses</i>
Pembayaran beban tenaga kerja	(161.897.333)		(132.899.824)	<i>Payment of personnel expenses</i>
Pembayaran beban operasional lainnya	(128.942.847)		(62.433.855)	<i>Payments of other operating expenses</i>
Pendapatan (pembayaran) non-operasional lainnya	3.870.773		(28.897.837)	<i>Receipt (payment) of other non-operating income</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(16.049.378)		-	<i>Payment of income tax</i>
	825.603.471		683.125.621	
Kenaikan dalam aset operasi:				<i>Increase in operating assets:</i>
Pinjaman yang diberikan	(3.012.792.297)		(1.435.674.433)	<i>Loans</i>
Beban dibayar dimuka	(5.750.347)		(12.026.402)	<i>Prepaid expenses</i>
Aset hak guna	(21.754.778)		(26.880.935)	<i>Right-of-use assets</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	9	(148.717.805)	<i>Securities purchased under resale agreements</i>
Aset lain-lain	-		(20.283.799)	<i>Other assets</i>
Penurunan dalam aset operasi:				<i>Decrease in operating assets:</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	202.699.821	9	-	<i>Securities purchased under resale agreements</i>
Penyertaan saham	26.173.818		147.361.993	<i>Investments in shares</i>
Aset lain-lain	9.055.375		-	<i>Other assets</i>
Kenaikan dalam kewajiban operasi:				<i>Increase on operating liabilities:</i>
Simpanan nasabah	3.057.342.854		1.299.895.991	<i>Deposits from customers</i>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	402.401.570	20	240.865.160	<i>Securities sold under repurchase agreements</i>
Utang akseptasi	11.959.811		-	<i>Acceptance payables</i>
Utang pajak lainnya	14.518.346	22a	3.224.742	<i>Other tax payables</i>
Simpanan dari bank lain	-		326.161.686	<i>Deposits from other banks</i>
Penurunan dalam kewajiban operasi:				<i>Decrease on operating liabilities:</i>
Simpanan dari bank lain	(230.149.261)		-	<i>Deposits from other banks</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.279.308.383		1.057.051.819	Cash flow provided from operating activities

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on *) December 22, 2022 (See Note 48)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the years ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan Notes	2022*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	45.395.525	14	17.287.045	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian aset tetap	(16.195.800)	14	(7.526.642)	Purchase of fixed assets
Pembelian aset tak berwujud	(7.289.250)	16	(1.879.808)	Purchase of intangible assets
Pembelian/(penjualan) efek-efek	(1.435.185.586)		(240.818.457)	Purchase/(sale) of marketable securities
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.413.275.111)		(232.937.862)	Net cash flow used in from investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal disetor	(1.900.021)		520.909.143	Additional paid-in capital
Penerbitan obligasi	500.000.000	21	-	Bonds Issuance
Pinjaman yang diterima	-		(50.000.000)	Loans received
Pelunasan jatuh tempo obligasi	(200.000.000)	21	(300.000.000)	Bonds repayment
Pembayaran sewa	(10.757.017)		(10.958.755)	Payment for lease
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	287.342.962		159.950.388	Net cash flow provided from financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	153.376.234		984.064.345	NET INCREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.645.187.929		1.886.562.456	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-		(225.438.872)	Loss of control on subsidiary
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.798.564.163		2.645.187.929	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalent consist of:
Kas	92.820.864	4	51.897.124	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	5	1.506.565.848	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	296.298.919	6	228.384.427	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dibawah 3 bulan	916.367.530	7b	858.340.530	Placements with Bank Indonesia and other Banks less than 3 months
Jumlah kas dan setara kas	2.798.564.163		2.645.187.929	Total cash and cash equivalents

*) Konsolidasian sampai dengan divestasi entitas anak pada tanggal 22 Desember 2022 (Lihat Catatan 48)

Consolidation until the date of divestment of subsidiary on *) December 22, 2022 (See Note 48)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank Victoria International Tbk ("Bank") didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 71 yang selanjutnya diadakan pembetulan dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 2602 tanggal 15 Mei 1998. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 7 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103473.AH.01.11 tanggal 4 Juni 2022.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994.

Bank telah mendapatkan izin menjadi bank devisa pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 dan efektif beroperasi menjadi bank devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Bank memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Victoria International Tbk ("the Bank") was established on October 28, 1992 based on Notarial Deed No. 71 of A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., subsequently amended by Deed No. 30 dated June 8, 1993 from the same notary. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 dated June 19, 1993 and was registered at the State Court Secretary in North Jakarta No. 342/Leg/1993 dated June 29, 1993 also was published in Supplement No. 2602 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 15, 1998. The Bank's articles of association has been amended several times, and the latest was based on Notarial Deed No. 7 dated June 3, 2022 of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta which has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0037529.AH.01.02.TH 2022 dated June 4, 2022 and has been accepted and recorded in database of Legal Entities Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0103473.AH.01.11 dated June 4, 2022.

According to article 3 of the Bank's articles of association, the scope of Bank's activities is to engage in commercial banking activities in accordance with the existing regulations. The Bank commenced its commercial operations on October 5, 1994 based on the operating license from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 402/KMK.017/1994 dated August 10, 1994.

Bank was approved as a foreign exchange bank on December 13, 2016 in accordance with Head of Licensing and Banking Information Department Letter - Financial Services Authority ("OJK") No. S-423/PB.12/2016 and effectively commenced as a foreign exchange bank on February 20, 2017. The Bank obtained a license as money changer from Bank Indonesia based on Letter No. 029/126/UOPM dated March 25, 1997.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Kantor Pusat Bank berlokasi di Graha BIP Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta. Bank memiliki kantor pusat, dengan kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan kantor kas sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kantor Pusat	1	1	Head Office
Kantor Cabang	14	14	Branches
Kantor Cabang Pembantu	24	24	Sub-Branches

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank

Penawaran umum saham

Pada tanggal 4 September 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melalui Surat No. S-835/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sejumlah 250.000.000 saham dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham dan sejumlah 80.000.000 Waran Seri I. Pada tanggal 30 September 1999, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Pada tanggal 14 Agustus 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No.S-2044/PM/2000 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 614.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (nilai penuh) dan harga penawaran sebesar Rp115 (nilai penuh) per saham dan sejumlah 85.960.000 Waran Seri II. Pada tanggal 28 September 2000, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Dari PUT I ini, jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 100.000.000 saham.

Pada tanggal 21 Februari 2003, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-36/PM/2003 untuk melakukan PUT II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 705.243.360 saham dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham dan sejumlah 423.146.016 Waran Seri III.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Bank's Head Office is located at Graha BIP 10th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta. The Bank has operational head office and a number of branches, sub-branches, and cash offices as follows (unaudited):

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds

Public offering of shares

On September 4, 1999, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) through Letter No. S-835/PM/1999 to conduct an initial public offering of 250,000,000 shares with a par value and an offering price of Rp100 (full amount) per share and 80,000,000 Series I Warrants. On September 30, 1999, the Bank's shares have been listed in Jakarta Stock Exchange.

On August 14, 2000, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam through Letter No. S-2044/PM/2000 to conduct Limited Public Offering (LPO) I to issue Preemptive Rights of 614,000,000 shares with a par value of Rp100 (full amount) and an offering price of Rp115 (full amount) per share and 85,960,000 Series II Warrants. On September 28, 2000, these shares had been listed in Jakarta Stock Exchange. From LPO I, the shares that were undertaken by the entitled shareholders was 100,000,000 shares.

On February 21, 2003, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam through Letter No. S-36/PM/2003 to conduct LPO II to issue Pre-emptive Rights of 705,243,360 shares with a par value and an offering price of Rp100 (full amount) per share and 423,146,016 Series III Warrants.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 20 Maret 2003, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Dari PUT II ini, jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 400.000.000 saham.

Pada tanggal 12 September 2006, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui Surat No. S-452/BL/2006 untuk melakukan PUT III sejumlah 670.363.760 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (nilai penuh) dan harga penawaran sebesar Rp115 (nilai penuh) per saham dan sebanyak-banyaknya 469.277.676 Waran Seri IV. Pada tanggal 13 Juli 2006, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Dari PUT III ini, jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 670.363.760 saham.

Pada tanggal 26 Juni 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK melalui Surat No. S-4114/BL/2008 untuk melakukan PUT IV sejumlah 1.167.498.560 saham dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham dan sejumlah 630.449.220 Waran Seri V.

Pada tanggal 17 September 2011, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK melalui Surat No. S-6737/BL/2011 untuk melakukan PUT V sejumlah 1.954.919.259 saham dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham dan sejumlah 1.448.939.990 Waran Seri VI.

Berikut adalah kronologis jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia sejak Penawaran Umum Perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana pada tahun 1999	250.000.000	Shares from Initial Public Offering in 1999
Saham yang berasal dari pendiri	250.000.000	Founder's shares
Saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba	34.000.000	Shares from capitalisation of retained earnings

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds (continued)

Public offering of shares (continued)

On March 20, 2003, these shares had been listed in Jakarta Stock Exchange. From LPO II, the shares that were undertaken by the entitled shareholders was 400,000,000 shares.

On September 12, 2006, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) through Letter No. S-452/BL/2006 to conduct LPO III of 670,363,760 shares with a par value of Rp100 (full amount) and an offering price of Rp115 (full amount) per share and 469,277,676 Series IV Warrants. On July 13, 2006, these shares had been listed in Indonesia Stock Exchange. From LPO III, the shares that were undertaken by the entitled shareholders was 670,363,760 shares.

On June 26, 2008, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam and LK through Letter No. S-4114/BL/2008 to conduct LPO IV of 1,167,498,560 shares with a par value and an offering price of Rp100 (full amount) per share and 630,449,220 Series V Warrants.

On September 17, 2011, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam and LK through Letter No. S-6737/BL/2011 to conduct LPO V of 1,954,919,259 shares with a par value and an offering price of Rp100 (full amount) per share and 1,448,939,990 Series VI Warrants.

The chronological overview of total issued and fully paid capital and shares listed at stock exchange in Indonesia from Initial Public Offering up to December 31, 2023 is as follows:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Berikut adalah kronologis jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia sejak Penawaran Umum Perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

	Jumlah saham/ Number of shares	
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2000	100.000.000	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) I in 2000
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri I dan II pada tahun 2002	66.793.400	Shares from Exercise of Series I and II Warrants in 2002
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2003	400.000.000	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) II in 2003
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri III pada tahun 2004	193.799.960	Shares from Exercise of Series III Warrants in 2004
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri III pada tahun 2006	46.200.000	Shares from Exercise of Series III Warrants in 2006
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2006	670.363.760	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) III in 2006
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV pada tahun 2007	323.840.000	Shares from Exercise of Series IV Warrants in 2007
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2008	1.167.498.560	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) IV in 2008
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2009	344.244.500	Shares from Exercise of Series IV and V Warrants in 2009
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2010	249.707.135	Shares from Exercise of Series IV and V Warrants in 2010
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2011	1.954.919.259	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) V in 2011
Saham yang berasal dari Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2011	414.580.000	Shares from Issuance of Shares without Preemptive Rights in 2011
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2011	81.724.314	Shares from Exercise of Series IV and V Warrants in 2011
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri V dan VI pada tahun 2012	56.673.554	Shares from Exercise of Series V and VI Warrants in 2012
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri V dan VI pada tahun 2013	25.923.831	Shares from Exercise of Series V and VI Warrants in 2013
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri VI pada tahun 2014	508.898.707	Shares from Exercise of Series VI Warrants in 2014
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri VI pada tahun 2015	300	Shares from Exercise of Series VI Warrants in 2015
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri VI pada tahun 2016	751.486.547	Shares from Exercise of Series VI Warrants in 2016
Saham yang berasal dari Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2016	780.394.335	Shares from Exercise of Additional Shares Without Preemptive Rights in 2016
Saham yang berasal dari Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2019	280.898.877	Shares from Exercise of Additional Shares Without Preemptive Rights in 2019
Saham yang berasal dari Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2021	1.535.185.529	Shares from Exercise of Additional Shares Without Preemptive Rights in 2021

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds (continued)

Public offering of shares (continued)

The chronological overview of total issued and fully paid capital and shares listed at stock exchange in Indonesia from Initial Public Offering up to December 31, 2023 is as follows: (continued)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Berikut adalah kronologis jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejak Penawaran Umum Perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2022	2.553.461.919	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) VI in 2022
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2022	2.807.640.227	Shares from Limited Public Offering with Preemptive Rights (Rights Issue) VII in 2022
Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri VII pada tahun 2023	<u>1.064</u>	Shares from Exercise of Series VII Warrants in 2023
Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh	<u>15.848.235.778¹⁾</u>	Total issued and fully paid capital

¹⁾ Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh termasuk 1% saham yang tidak diperdagangkan pada PT Bursa Efek Indonesia (*delisted*) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1999.

¹⁾ Number of shares issued and fully paid includes 1% of delisted shares in the Indonesia Stock Exchange accordance with Government Regulation No. 29 Year 1999.

Penawaran umum obligasi

Pada tanggal 28 Desember 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-2683/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 sejumlah Rp100.000.000. Pada tanggal 14 Maret 2000, Obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 9 Maret 2007, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK melalui Surat No. S-1080/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007 masing-masing sejumlah Rp200.000.000. Pada tanggal 22 Maret 2007, Obligasi-obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 19 September 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK melalui Surat No. S-7574/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 masing-masing sejumlah Rp200.000.000 dan Rp300.000.000. Pada tanggal 28 September 2012, Obligasi-obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds (continued)

Public offering of shares (continued)

The chronological overview of total issued and fully paid capital and shares listed at Indonesia Stock Exchange from Initial Public Offering up to December 31, 2023 is as follows: (continued)

Public offering of bonds

On December 28, 1999, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam through Letter No. S-2683/PM/1999 for the public offering of Bank Victoria Bonds I Year 2000 amounting to Rp100,000,000. On March 14, 2000, the Bonds had been listed in Surabaya Stock Exchange.

On March 9, 2007, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam and LK through Letter No. S-1080/BL/2007 for the public offering of Bank Victoria Bonds II Year 2007 and Bank Victoria Subordinated Bonds I Year 2007, each amounting to Rp200,000,000. On March 22, 2007, the Bonds had been listed in Indonesia Stock Exchange.

On September 19, 2012, the Bank obtained an effective notification from the Chairman of Bapepam and LK through Letter No. S-7574/BL/2012 for the public offering of Bank Victoria Bonds III Year 2012 and Bank Victoria Subordinated Bonds II Year 2012, amounting to Rp200,000,000 and Rp300,000,000, respectively. On September 28, 2012, the Bonds had been listed in Indonesia Stock Exchange.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank (lanjutan)

Pada tanggal 21 September 2017, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-340/D.04/2017 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 masing-masing sejumlah Rp300.000.000 dan Rp50.000.000. Pada tanggal 12 Juli 2017, Obligasi-obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 5 September 2018, Bank melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018. Obligasi Berkelanjutan yang ditawarkan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu Seri A sejumlah Rp100.000.000 dan Seri B sejumlah Rp200.000.000, sedangkan Obligasi Subordinasi sebesar Rp350.000.000 (lihat Catatan 21).

Pada tanggal 24 September 2019, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-85/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 serta telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia 1 Juli 2019 masing-masing sejumlah Rp100.000.000 dan Rp250.000.000.

Pada tanggal 8 November 2019, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp150.000.000.

Pada tanggal 1 April 2020, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp60.000.000.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds (continued)

On September 21, 2017, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority Board of Commissioner through Letter No. S-340/D.04/2017 for the public offering of Continuing Bonds I Bank Victoria Phase I year 2017 and Subordinated Bonds I Bank Victoria Phase I Year 2017 in amount of Rp300,000,000 and Rp50,000,000, respectively. On July 12, 2017, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On September 5, 2018, Bank continues the Public Offering of Continuing Bonds I Bank Victoria Phase II Year 2018 and Subordinated Bonds I Bank Victoria Phase II Year 2018. The Continuing Bonds offered comprise of 2 (two) series, Series A amounted to Rp100,000,000 and Series B amounted to Rp200,000,000, while the Subordinated Bonds offered amounted to Rp350,000,000 (refer to Note 21).

On September 24, 2019, Bank obtained an effective notification from the Chairman of FSA through Letter No. S-85/D.04/2019 for continuous offering of Continuing Bonds II Phase I Year 2019 and Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase I Year 2019, which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on July 1, 2019, amounting to Rp100,000,000 and Rp250,000,000, respectively.

On November 8, 2019, the Bank issued Bank Victoria Continuing Subordinated Bonds II Phase II Year 2019 amounting to Rp150,000,000.

On April 1, 2020, the Bank issued Bank Victoria Continuing Subordinated Bonds II Phase III Year 2020 amounting to Rp60,000,000.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan penerbitan obligasi Bank (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2023, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-64/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B serta telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2023 masing-masing sejumlah Rp300.000.000 dan Rp200.000.000.

c. Entitas Anak

Bank merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki pengaruh signifikan atas Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset/ Total Assets	
				31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Reksadana / Mutual Funds:					
Batavia Proteksi Andalan 7	Reksadana Terproteksi	100%	-	154.465.120	154.801.103
Mega Dana Terproteksi VIII	Reksadana Terproteksi	100%	-	42.485.675	42.491.687
Maybank Dana Terproteksi 1	Reksadana Terproteksi	99,77%	-	44.746.823	44.711.361
BNI AM Proteksi XL VIII	Reksadana Terproteksi	-	-	-	104.207.228
Reksadana terproteksi Sucorinvest Proteksi 8	Reksadana Terproteksi	-	-	-	100.740.694
Entitas Asosiasi / Associate Entity:					
PT Bank Victoria Syariah	Sharia banking	19,81%	1966	-	-

Berdasarkan Akta Notaris Veronika Lily Dharma, S.H. No. 15 tanggal 7 September 2007, Notaris di Jakarta, Bank mengakuisisi 99,80% saham PT Bank Swaguna ("Entitas Anak"). Pada tanggal 13 Desember 2007, Bank melakukan penambahan modal di Entitas Anak sehingga kepemilikan Bank menjadi 99,98% sesuai dengan Akta Notaris Veronika Lily Dharma, S.H. No. 26 tanggal 13 Desember 2007.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public offering of the Bank's shares and issuance of bonds (continued)

On February 28, 2023, the Bank received an effective statement from the Financial Services Authority's ("OJK") Board of Commissioners through Letter No. S-64/D.04/2023 to conduct a Continuing Public Offering of Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 Series A and Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 Series B, which were listed on the Indonesian Stock Exchange on March 10, 2023, each amounting to Rp300,000,000 and Rp200,000,000 respectively.

c. Subsidiaries

The Bank is the controlling stockholder and has a significant control over the Subsidiaries as follows:

Based on Notarial Deed No. 15 dated September 7, 2007 of Veronika Lily Dharma, S.H., a Notary in Jakarta, the Bank acquired 99.80% shareholding of PT Bank Swaguna ("Subsidiary"). On December 13, 2007, the Bank had an additional capital in the Subsidiary which increased the Bank's ownership to 99.98% based on Notarial Deed No. 26 of Veronika Lily Dharma, S.H. dated December 13, 2007.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2017 dan 18 Desember 2017, setelah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-33/PB.33/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan No. S-170/PB.33/2017 tanggal 18 Desember 2017, Bank melakukan penambahan modal pada Entitas Anak sebesar Rp60.000.000.000 dan Rp40.000.000.000 (nilai penuh) sehingga kepemilikan Bank menjadi 99,99%.

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Bank melakukan penambahan modal pada Entitas Anak sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh) sehingga kepemilikan Bank menjadi 99,99% dan telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-53/PB.33/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Entitas Anak telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dan Akta No. 24 tanggal 27 November 2009 dari Notaris Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010. Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DPG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Selanjutnya, Entitas Anak beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Pada tanggal 22 Desember 2022, Bank melakukan divestasi 80% kepemilikan di entitas anak, PT Bank Victoria Syariah, oleh karena itu sejak 23 Desember 2022, Bank tidak lagi mengendalikan PT Bank Victoria Syariah. Lihat Catatan 48 atas laporan keuangan untuk penjelasan lebih lanjut atas divestasi.

Reksadana BNI AM Proteksi XL VIII dan Reksadana terproteksi Sucorinvest Proteksi 8 telah dilikuidasi pada bulan Januari 2023.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiaries (continued)

On March 30, 2017 and December 18, 2017, after obtaining approval from OJK based on Letter No. S-33/PB.33/2017 dated March 30, 2017 and No. S-170/PB.33/2017 dated December 18, 2017, the Bank put additional capital of Rp60,000,000,000 and Rp40,000,000,000 (full amount) into Subsidiary, which increase the Bank's ownership to 99.99%.

On October 24, 2019, the Bank put additional capital of Rp50,000,000,000 (full amount) into Subsidiary, which increase the Bank's ownership to 99.99% and obtained the approval from OJK based on Letter No. S-53/PB.33/2019 dated October 22, 2019.

The Subsidiary changed its name to PT Bank Victoria Syariah based on Deed No. 5 dated August 6, 2009 and No. 24 dated November 27, 2009 of Erni Rohaini, S.H., M.B.A., a Notary in Jakarta. The notarial deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-02731.AH.01.02 Year 2010 dated January 19, 2010. The changes of subsidiary's business from conventional banking to sharia banking was approved by Bank Indonesia based on the Decision of the Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DPG/2010 dated February 10, 2010. The Subsidiary started its operations as a Sharia Bank on April 1, 2010.

On December 22, 2022, Bank divested 80% ownership in subsidiary, PT Bank Victoria Syariah, therefore since December 23, 2022, Bank is no longer controlled PT Bank Victoria Syariah. Refer to Note 48 to the financial statements for further explanation on divestment.

BNI AM Proteksi XL VIII mutual funds and Sucorinvest Proteksi 8 protected mutual funds have been liquidated in January 2023.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Dewan Komisaris			
Komisaris Utama Independen	Zaenal Abidin	Zaenal Abidin	Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Commissioner
Komisaris Independen	Gunawan	Gunawan	
Komisaris	Tenggarahardja Sia Leng Ho	Tenggarahardja Sia Leng Ho	
Direksi			
Direktur Utama	Achmad Friscantono	Achmad Friscantono	Board of Directors President Director Vice President Director Finance Director
Wakil Direktur Utama	Rusli	Rusli	
Direktur Keuangan	Debora Wahjutirto	Debora Wahjutirto	Director
Direktur	Tanoyo Lembing	Tanoyo Lembing	
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Tamunan	Tamunan	Risk Management and Compliance Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut di atas telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0067031 tanggal 19 Oktober 2022.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Ketua	Zaenal Abidin	Zaenal Abidin	Chairman Member
Anggota	Yozef	Yozef	
Anggota	Abdulrachman Medi Sejati	Abdulrachman Medi Sejati	Member

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Boards of Commissioners and Directors, Committee and Employees

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The composition of the Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022 had been accepted and recorded in the database of Legal Entities Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.09-0067031 dated October 19, 2022.

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with Financial Service Authority regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding Establishment and Guideline for Implementation Duty of Audit Committee and Financial Service Authority regulation No. 17 Year 2023 dated September 14, 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Ketua	Gunawan Tenggarahardja	Gunawan Tenggarahardja	Chairman
Anggota Anggota	Zaenal Abidin Yozeif	Zaenal Abidin Yozeif	Member Member
Anggota	Abdulrachman Medi Sejati	Abdulrachman Medi Sejati	Member

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Ketua	Gunawan Tenggarahardja	Gunawan Tenggarahardja	Chairman
Anggota Anggota	Sia Leng Ho Syahda Chandra	Sia Leng Ho Syahda Chandra	Member Member

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Sekretaris Perusahaan	Caprie Ardira Azhar	Caprie Ardira Azhar	Corporate Secretary
Kepala Internal Audit	Djoko Soenjojo	Djoko Soenjojo	Internal Audit Head

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki karyawan masing-masing sejumlah 713 dan 688 karyawan (tidak diaudit).

e. Pemegang saham akhir

Pemegang saham pengendali langsung dan pemegang saham akhir Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing PT Victoria Investama Tbk dan Suzanna Tanojo.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Boards of Commissioners and Directors, Committee and Employees (continued)

The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The Corporate Secretary and Internal Audit Head as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank had 713 dan 688 employees, respectively (unaudited).

e. Ultimate shareholders

The direct controlling shareholder and ultimate shareholder of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 are PT Victoria Investama Tbk and Suzanna Tanojo, respectively.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Manajemen Bank bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 27 Maret 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain ("FVOCI") dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL"). Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan keuangan untuk Entitas Anak yang bergerak di bidang Syariah, disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 104 (Revisi 2016), "Akuntansi *Istishna*", PSAK 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 106, "Akuntansi *Musarakah*", PSAK 107 (Revisi 2016), "Akuntansi *Ijarah*", PSAK 110 (Revisi 2015) "Akuntansi *Sukuk*", PSAK 111, "Akuntansi *Wa'd*", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI"), dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh OJK.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The Bank's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements, which were completed and authorised for issuance by the Board of Directors of the Bank on March 27, 2024.

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of Indonesian Institute of Accountants and the Board of Syariah Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulation of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (currently the Indonesian Financial Service Authority ("OJK")) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines".

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for financial assets measure as fair value through other comprehensive income ("FVOCI") and financial assets held at fair value through profit or loss ("FVTPL"). The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The financial statements of a Subsidiary company engaged in sharia banking are prepared under the Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 101 (Revised 2016) "Presentation of Sharia Financial Statement", SFAS 102 (Revised 2019), "Murabahah Accounting", SFAS 104 (Revised 2016), "Istishna Accounting", SFAS 105, "Mudharabah Accounting", SFAS 106, "Musarakah Accounting", SFAS 107 (Revised 2016), "Ijarah Accounting", SFAS 110 (Revised 2015) "Sukuk Accounting", SFAS 111, "Wa'd Accounting", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking ("PAPSI"), and Indonesian Financial Accounting Standards, including accounting and reporting guidance issued by OJK.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan

Bank menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

All figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated.

The statement of cash flows were prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the date of acquisition and are not pledged or restricted.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgements in the process of implementing the Bank's accounting policies. The area that is complex or requires a higher level of consideration or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Change in significant accounting policies

The Bank made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the financial statement:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Bank, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Bank.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Change in significant accounting policies (continued)

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Bank's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Bank's financial statements.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the financial statement.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the financial statement.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

c. Prinsip konsolidasi

c. Basis of consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Bank. Entitas Anak adalah entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Bank memiliki pengendalian. Bank mengendalikan entitas lain ketika Bank terekspos atas, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

The consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and its Subsidiaries that are controlled by the Bank. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Bank has control. The Bank controls an entity when the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the Subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the Subsidiary.

Laporan keuangan dari Entitas Anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

The financial statements of Subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the date when control ceases.

Dampak signifikan dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

The significant effects of all transactions and balances between the consolidated companies have been eliminated in preparing the consolidated financial statements, accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Kebijakan akuntansi penting yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Bank, kecuali dinyatakan secara khusus.

The significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Bank, unless otherwise stated.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholder's proportionate share in the net income for the year and equity of the Subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the Subsidiary.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Where Subsidiary either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan

d. Financial assets and liabilities

(i) Aset keuangan

(i) Financial assets

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

In accordance with SFAS 71, there are three measurement classifications for financial assets:

- (A) Biaya perolehan diamortisasi;
- (B) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"); dan
- (C) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

- (A) *Amortised cost;*
- (B) *Fair value through profit or loss ("FVTPL"); and*
- (C) *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI").*

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

Suatu aset keuangan diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *held to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Assets may be sold out of held to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Unrealised gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*

- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Penilaian model bisnis

Business model assessment

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

The Bank can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Pengakuan

Recognition

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk *item* yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

A financial asset is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Liabilitas keuangan

(ii) Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e., those designed as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk *item* yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi liabilitas keuangan tersebut.

A financial liability is initially measured at fair value plus (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to financial liabilities issuance. The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued.

Liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

Financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss and other comprehensive income.

(iii) Kontrak modifikasi

(iii) Contract modification

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit whose authorized to modify or restructure financial assets, when the business unit performs modification or restructure of a financial asset.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will cease to recognize the original financial assets when:

- (a) aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditor pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau
- (b) terdapat konversi mata uang.

- (a) the financial asset (or portion thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or any portion thereof), either by legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or
- (b) there is a currency conversion.

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

The Bank will measure the substantially and not substantially modified financial assets as follows:

(a) Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial

(a) Substantial Modification of Financial Assets

- 1) Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/ modifikasian pada tanggal modifikasi/ negosiasi.

- 1) When the contractual cashflow on a financial asset is renegotiated or modified (including when a credit is restructured) and the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, therefore the Bank will record the financial asset as a new / modified financial asset on the modification/ negotiation date.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Kontrak Modifikasi (lanjutan)

(iii) Contract Modification (continued)

- | | |
|--|---|
| <p>(a) Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial (lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none">2) Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.3) Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.4) Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.5) Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (<i>risk-adjusted effective interest rate</i>) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi. <p>(b) Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saat Bank melakukan renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (<i>net present value</i>) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. | <p>(a) <i>Substantial Modification of Financial Assets (continued)</i></p> <ol style="list-style-type: none">2) <i>The difference between the gross amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets recorded as profit or loss.</i>3) <i>Transaction income or costs incurred in connection with a modification event recognized as part of gain or loss on the modification.</i>4) <i>Next, Bank assess whether new/modified financial assets are assets originating from impaired financial assets.</i>5) <i>Recognition of interest income on assets originating from financial assets is calculated based on an effective interest rate adjusted for credit risk (risk-adjusted effective interest rate) to discount the cash flows of modified financial assets.</i> <p>(b) <i>Non-Substantial Modification of Financial Assets</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows of financial assets (including when loans are restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of the financial assets.</i>2. <i>The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows, discounted at the original effective interest rate.</i> |
|--|---|

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Kontrak Modifikasi (lanjutan)

(iii) Contract Modification (continued)

(b) Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substantial (lanjutan)

(b) Non-Substantial Modification of Financial Assets (continued)

3. Kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

3. Bank then recognizes the gain or loss from the modification (i.e the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortised over the remaining term of the modified financial asset.

(iv) Penentuan nilai wajar

(iv) Determination of fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penentuan nilai wajar (lanjutan)

(iv) Determination of fair value (continued)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. Untuk penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia, estimasi atas nilai wajar dinyatakan sebesar biaya perolehan.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities. For the investment in shares do not have readily determinable fair values, the estimated fair value recognised as at acquisition cost.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Penentuan biaya perolehan
diamortisasi

(v) Determination of amortised cost

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Kerugian penurunan nilai aset keuangan".

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as "Impairment losses on financial assets".

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Penghentian pengakuan

(vi) Derecognition

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur pinjaman yang diberikan.

The Bank write off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of debtor/financial asset's issuer such that the debtor/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

e. Saling hapus

e. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position if only the Bank has a legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum di dalam situasi bisnis yang normal, dan dalam peristiwa gagal bayar atau kebangkrutan dari Bank atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
 (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Klasifikasi dan Reklasifikasi instrumen keuangan

f. Classification and reclassification of financial instruments

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Classification of financial assets and liabilities

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Classes (as determined by the Bank)
Aset keuangan/ Financial assets	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Kas/Cash
		Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia
		Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with Bank Indonesia and other banks
		Efek-efek/ Marketable securities
		Tagihan akseptasi/ Acceptance receivables
		Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah/ Loans, sharia financing and receivables
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Securities purchased under resale agreements
		Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima/ Interest and sharia income receivables
		Aset lain-lain/ Other assets
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets measured at fair value through other comprehensive income	Efek-efek/ Marketable securities
		Penyertaan saham/ Investments in shares
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Simpanan nasabah/ Deposits from customers
		Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ Securities sold under repurchase agreement
		Efek-efek yang diterbitkan/ Securities issued
		Utang akseptasi/ Acceptance payables
		Akrual dan liabilitas lain-lain/ Accruals and other liabilities
Komitmen dan kontinjensi/ Commitment and contingency	Fasilitas pinjaman yang belum digunakan/ Unused loan facilities	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

f. Klasifikasi dan Reklasifikasi instrumen
keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan

Bank diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Bank mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Bank seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Bank perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Bank akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Bank harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- a. perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- b. hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- c. pengalihan aset keuangan antara bagian dari Bank dengan model bisnis berbeda.

Dampak Reklasifikasi Aset Keuangan

Dampak reklasifikasi aset keuangan pada laba rugi atau ekuitas dan pengukuran awalnya adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Classification and reclassification of
financial instruments (continued)

Reclassification of financial assets

The Bank can reclassify its all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

The characteristic of business model changes must significantly impact to the Bank operational activities such as collecting, disposing or terminating a business line. In addition, the Bank has to prove the changes to external parties.

The Bank will reclassify all financial assets impacted by business model changes. Changes of the objective of the Bank's business model must be impacted before reclassification date.

The following lists are not changes in business model:

- a. *changes in intention in relation with certain financial asset (even in situations of significant changes in market conditions);*
- b. *temporary loss of certain markets for financial assets; and*
- c. *transfer of financial asset between Bank with different business model.*

Impact of Reclassification of Financial Assets

The impact of reclassification of financial asset on profit or loss or equity and its initial measurement is as follows:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
 tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2023 and 2022 and
 for the years then ended
 (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Klasifikasi dan Reklasifikasi Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Classification and Reclassification of Financial Instruments (continued)

Reklasifikasi/ Reclassification		Dampak Terhadap Laba Rugi/ Impact on profit or loss	Dampak Terhadap Ekuitas/ Impact on equity	Nilai Tercatat Awal Setelah Reklasifikasi/ Initial Carrying Value After Reclassification
Dari/ From	Kel/ To			
FVTPL	Amortised Cost	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru/ <i>Fair value at the reclassification date becomes its new gross carrying amount.</i> 2. Suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi/ <i>Effective interest rate is determined at the fair value of the asset at reclassification date.</i>
	FVOCI	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya/ <i>Financial assets is measured at fair value.</i> 2. Suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi/ <i>Effective interest rate is determined at the fair value of the asset at reclassification date.</i>
Amortised Cost	FVTPL	Selisih antara nilai tercatat sebelum reklasifikasi dan nilai wajar setelah reklasifikasi/ <i>Difference in carrying amount before reclassification and fair value after reclassification</i>	-	Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi/ <i>Fair value is measured at reclassification date.</i>
	FVOCI	-	Selisih antara nilai tercatat sebelum reklasifikasi dan nilai wajar setelah reklasifikasi/ <i>Difference in carrying amount before reclassification and fair value after reclassification</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi/ <i>Fair value is measured at reclassification date.</i> 2. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak perlu disesuaikan/ <i>Effective interest rate and expected credit loss is not adjusted.</i>
FVOCI	Amortised Cost	-	Keuntungan atau kerugian kumulatif dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar/ <i>Cumulative gain or loss on OCI is adjusted against the fair value of the financial asset</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya/ <i>Fair value at the reclassification date becomes its new gross carrying amount by added or deducted the previous cumulative gain or loss.</i> 2. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak perlu disesuaikan/ <i>Effective interest rate and expected credit loss is not adjusted.</i>
	FVOCI	Keuntungan atau kerugian kumulatif direklasifikasi dari ekuitas menjadi laba rugi/ <i>Cumulative gain or loss on OCI is reclassified to profit or loss</i>		Aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya/ <i>Financial assets is measured at fair value</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan

g. Impairment of financial assets

Bank menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss*/"ECL") terkait dengan instrumen aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang ditampilkan tergantung kepada apakah tidak terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Bank akan mengukur penyisihan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Jika risiko kredit atas aset keuangan telah meningkat secara signifikan dari pengakuan awal, maka Bank akan menyajikan penyisihan kerugian sejumlah ECL *lifetime*.

The Bank assesses on a forward-looking basis the expected credit loss associated with its financial assets instruments carried at amortised cost and fair value at other comprehensive income. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk to financial asset measured at amortised cost and at fair value through other comprehensive income (FVOCI). If at the reporting date, credit risk on financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Bank shall measure the allowance for losses for that financial asset at the amount of 12 (twelve) months expected losses. If the credit risk on that financial asset has increased significantly since initial recognition, the Bank shall measure the allowance for losses at the amount of expected credit losses over its lifetime.

ECL 12 bulan dan ECL *lifetime*

12-month ECL and Lifetime ECL

ECL 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar aset keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot oleh probabilitas terjadinya *default* dimaksud.

12-month ECL is the portion of ECL that result from default events that are possible within the 12-months after reporting date (or the shorter period if expected life of financial asset is less than 12 months). 12-month ECL is weighted by probability of default.

ECL *lifetime* adalah kerugian yang diakibatkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan waktu umur hidup aset keuangan.

Lifetime ECL is the ECL that result from all possible default events over the expected life of financial asset.

Staging Criteria

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (*stage 1, stage 2, stage 3*) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Financial asset must be allocated to one of three stages of impairment (*stage 1, stage 2, stage 3*) by determining whether there is a significant increase in credit risk on the financial asset since initial recognition or whether the facility has defaulted on each reporting date.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

g. Impairment of financial assets (continued)

Stage 1: ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Stage 1: ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a 12-month basis.

Stage 2: mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang objektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian pinjaman yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari aset keuangan.

Stage 2: includes financial assets that experience a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition (unless having low credit risk at the reporting date), but do not have objective evidence of impairment. For these assets, Lifetime ECL will be calculated. Lifetime ECL are the ECL that results from all possible default events over the expected life of financial asset.

Bank menggunakan berbagai pengukuran kualitatif dan kuantitatif dalam menilai SICR seperti berikut:

The Bank uses a number of qualitative and quantitative measures in assessing SICR as follows:

Pinjaman yang diberikan

Loans

- a. Kriteria kuantitatif
Akun-akun dengan 30 hari tunggakan ("DPD") dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.
- b. Kriteria kualitatif
Debitur dengan DPD kurang dari 30 hari yang telah direstrukturisasi (kecuali debitur restrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19) dianggap memiliki kenaikan signifikan atas risiko kredit.

- a. Quantitative criteria
Accounts that are 30 days past due ("DPD") are considered to have experienced a significant increase in credit risk.
- b. Qualitative criteria
Debtors with DPD less than 30 days which have been restructured (except for restructured debtors as a result of the COVID-19 pandemic) which is considered to have a significant increase in credit risk.

Stage 3: Aset hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi. Faktor-faktor yang diobservasi ini serupa dengan indikator bukti

Stage 3: An asset is only considered credit impaired and lifetime expected credit losses recognised, if there is observed objective evidence of impairment. These factors are similar to the indicators of objective evidence of impairment under SFAS 71, this includes,

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

g. Impairment of financial assets (continued)

objektif penurunan nilai pada PSAK 71, termasuk antara lain aset gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan atau mengalami *forbearance* atas kredit yang mengalami penurunan nilai (disebut sebagai 'aset Stage 3'). Pengukuran kerugian kredit ekspektasian di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan dapat didukung dengan peristiwa di masa lampau, kondisi saat ini dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomis di masa depan.

amongst other factors, assets in default or experiencing significant financial difficulty, or experiencing forbearance on impaired credit (mentioned as 'Stage 3 asset'). The measurement of expected credit losses across all stages is required to reflect an unbiased and probability weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga atau memiliki peringkat kredit tertentu (*default*). Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest or has certain credit grades (default). Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik).

The period considered when measuring expected credit loss is the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen dikurangi dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian pinjaman yang diharapkan harus mencerminkan dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward-looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD).

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Bank menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

a. Probability of Default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2* dan *3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value less the expected credit losses.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

SFAS 71 requires supportable information about past events, current condition and forecasts of future economic conditions. Estimated movement on expected credit losses have to be reflected and directly consistent with changes in observed related data over the period. This ECL calculation needs forward-looking estimation from *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) and *Exposure At Default* (EAD).

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date when the Bank become a party in a irrevocable commitment is the date of initial recognition for implementation of impairment purposes.

a. Probability of Default ("PD")

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (*Stage 1*) or over the lifetime of the product (*Stage 2* and *3*) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

g. Impairment of financial assets (continued)

b. Loss Given Default ("LGD")

b. Loss Given Default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

c. Exposure at Default ("EAD")

c. Exposure at Default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang committed pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

h. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

h. Impairment of non-financial assets

Nilai tercatat aset non-keuangan Bank, selain aset pajak tangguhan, dikaji pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual dapat digabungkan ke dalam kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset lainnya (Unit Penghasil Kas atau "CGU"). Jika terdapat indikasi adanya penurunan nilai tersebut, maka nilai terpulihkan aset diestimasi.

The carrying amount of the Bank's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets (Cash Generating Units or "CGU"). If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat suatu aset atau CGU melebihi estimasi nilai terpulihkannya. Nilai terpulihkan suatu aset adalah nilai yang terbesar antara nilai pakai aset atau CGU dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Dalam penentuan nilai pakai aset, estimasi arus kas masa depan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan aset yang bersangkutan.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

h. Penurunan nilai dari aset non-keuangan
(lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan yang diakui pada tahun sebelumnya dikaji pada setiap tanggal pelaporan keuangan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai, kecuali untuk *goodwill*, dipulihkan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Jumlah kerugian penurunan nilai yang dibalik tidak boleh menyebabkan nilai aset melebihi nilai tercatat bersih setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui.

i. Kas dan setara kas

Kas meliputi kas dan kas dalam *kas*. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijamin atau dibatasi penggunaannya.

j. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk *interbank call money*, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

h. Impairment of non-financial assets
(continued)

Impairment losses in respect of non-financial assets recognised in prior year are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss, except for goodwill, is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

i. Cash and cash equivalents

Cash includes cash on hand and cash in vault. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the date of acquisition and are not pledged or restricted.

j. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as financial assets measured at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy of financial assets.

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at the outstanding balance less allowance for impairment losses.

k. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of interbank call money, Time deposit, Certificate of deposits, and Bank Indonesia Deposit Facility ("FASBI").

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

I. Efek-efek

I. Marketable securities

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ("SRBI"), Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, obligasi korporasi, wesel jangka menengah, unit penyertaan reksadana, dan efek-efek pasar uang dan pasar modal lainnya.

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia ("SBI"), Bank Indonesia Rupiah Securities ("SRBI"), Government Promissory Notes, Government Sharia Bonds, corporate bonds, medium term notes, mutual fund investment units and other money market and capital market securities.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain ("FVOCI") atau diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL").

Subsequently accounted for, marketable securities depending on their respective classifications, as either measured at amortised cost or measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

1. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Measured at amortised cost

Setelah pengakuan awal, investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Accounted for, investment measured at amortised cost using effective interest rate method.

2. Diukur pada FVOCI

2. Measured at FVOCI

Setelah pengakuan awal, diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Perubahan pada kerugian kredit ekspektasian diakui laba rugi dan diakumulasi pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar bersih, setelah akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai, ditransfer ke laba rugi.

Accounted for, investment carried at fair value with all unrealised gains and losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income. Changing in expected credit losses recognised in the profit or loss and are accumulated in equity. On derecognition, the cumulative fair value gains or losses, net of cumulative allowance for impairment losses, are transferred to the profit or loss.

3. Diukur pada FVTPL

3. Measured at FVTPL

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL. Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi.

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL. Financial instruments grouped into this category are recognised at their fair value at initial recognition; transaction costs are recognised directly in the statement of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are recognised in the statement of profit or loss.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

m. Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan
piutang syariah

m. Loans, sharia financing and receivables

Restrukturisasi pinjaman bisa meliputi modifikasi persyaratan pinjaman, konversi pinjaman menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

Pinjaman yang direstrukturisasi dan tidak dihentikan pengakuannya disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat pinjaman pada tanggal restrukturisasi atau proyeksi nilai kini dari penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat pinjaman pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui sebagai laba/rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructured loans which are not derecognised, are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the estimate of total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognised as profit/loss. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, in accordance with the restructuring scheme.

Termasuk di dalam pinjaman yang adalah termasuk pembiayaan oleh PT Bank Victoria Syariah, Entitas Anak, berupa pembiayaan dan piutang syariah.

Included in loans are financing by PT Bank Victoria Syariah, a Subsidiary, in the form of sharia financing and receivables.

Penjelasan secara ringkas dari masing-masing jenis pembiayaan dan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Brief explanation for each type of sharia financing and receivables are as follows:

Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Entitas Anak mengenakan bagi hasil berdasarkan metode margin laba kotor.

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Subsidiary uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Entitas Anak. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error by the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Subsidiary. If part of mudharabah financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

m. Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan
piutang syariah (lanjutan)

Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Piutang *Ijarah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri kepada penyewa. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni sebesar saldo piutang.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK 55.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

m. Loans, sharia financing and receivables
(continued)

Loss on *mudharabah* financing due to negligence or error by the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the balance of *mudharabah* financing.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia. *Musyarakah* financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Ijarah receivables are the financing on the availability of fund in relation to transferring the right to use and benefit of a goods and service based on rental transaction which was not followed by transfer of the goods ownership to the lessee. *Ijarah muntahiyah bittamlik* is an agreement on the availability of fund in relation to transferring the use right and benefit of a goods or service based on rental transaction with an option to transfer the ownership title of goods to the lessee. *Ijarah* receivables are recognised at due date at the amount of its lease income not yet received and presented at its net realisable value, which is the outstanding balance of the receivables.

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loan and receivables in accordance with SFAS 55.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

n. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi dimana Bank membeli aset keuangan dan secara simultan masuk ke dalam perjanjian untuk menjual kembali aset (atau aset yang serupa secara substansial) dengan harga tetap di masa depan. Aset yang mendasari tidak diakui dalam laporan keuangan. Setelah pengakuan awal, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali merupakan transaksi dimana Bank menjual aset keuangan dan secara simultan masuk ke dalam perjanjian untuk membeli kembali aset (atau aset yang serupa secara substansial) dengan harga tetap di masa depan.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati tersebut diamortisasi sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek dijual hingga dibeli kembali.

o. Tagihan dan utang akseptasi

Setelah pengakuan awal, tagihan dan utang akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Penyertaan saham

(A) Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

n. Securities purchased under resale agreements and securities sold under repurchase agreements

Securities purchased under resale agreements are transactions in which the Bank purchases a financial asset and simultaneously enters into an agreement to resell the asset (or substantially similar asset) at a fixed price on a future date. The underlying asset is not recognised in the financial statements. Subsequent to initial recognition, securities purchased under resale agreements are measured at amortised cost. The difference between purchase and resale price is recognised as interest income using the effective interest method.

Securities sold under repurchase agreements are transactions in which the Bank sold a financial asset and simultaneously enters into an agreement to repurchase the asset (or substantially similar asset) at a fixed price on a future date.

Securities sold under repurchase agreements are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

o. Acceptance receivables and payables

Subsequent to initial recognition, acceptance receivables and payables are measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Investment in shares

(A) Investment in shares

Investment in shares of stock are long-term investments in non-public companies.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

p. Penyertaan saham (lanjutan)

p. Investment in shares (continued)

(A) Penyertaan saham (lanjutan)

(A) Investment in shares (continued)

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

Investment in shares of stock are long-term investments in non-public companies.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar estimasi terbaik atas nilai wajarnya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Investments in shares of stock where the ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long-term investments are stated at their best estimate of fair value. The carrying amount of the investments is written-down to recognise a permanent decline in the value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to current year statement of profit or loss.

(B) Penyertaan saham sementara

(B) Temporary investment in shares

Penyertaan saham sementara merupakan penyertaan modal oleh Bank, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temporary investment in shares is investment in shares by Bank to debtor's company to overcome the credit defaults, in accordance with the prevailing laws.

Bank wajib melakukan divestasi penyertaan saham sementara apabila penyertaan saham sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan tersebut telah memperoleh saldo laba positif pada ekuitasnya.

Bank is obliged to divest temporary investment in shares if the temporary investment in shares have exceeded if maximum period of 5 (five) years or the company have obtained positive retained earnings in equity.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan lebih dari 20%, tanpa ada pengaruh signifikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Investments in shares where the ownership above 20%, without any significant influence is classified as financial assets at fair value through profit or loss. Refer to Note 2d for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Aset tetap dan penyusutan

q. Fixed assets and depreciation

Pada tanggal 30 November 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari model biaya menjadi model revaluasi.

On November 30, 2015, the Bank changed their accounting policies of fixed assets from cost model to revaluation model.

Aset tetap Bank disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap (jika ada). Penilaian terhadap aset tetap dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Berdasarkan kebijakan internal Bank, penilaian terhadap aset tetap yang dilakukan oleh penilai independen eksternal dilakukan 5 tahun sekali. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai bersihnya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

The Bank's fixed assets are shown at fair value, less subsequent depreciation for fixed assets less accumulated impairment losses (if any). Valuation of fixed assets are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Based on Bank's internal policy, valuation of fixed assets performed by external independent valuers for every 5 years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "Surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of fixed assets recorded in "Assets revaluation reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "Asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the consolidated statement of profit or loss.

Surplus revaluasi aset tetap dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Gain on revaluation of fixed assets are transferred to retained earnings when fixed assets are derecognised.

Tanah tidak disusutkan.

Land is not depreciated.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan nilai setelah revaluasi terhadap nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets other than land are calculated based on the straight-line method to allocate their revalued amount to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	Masa manfaat/ Useful lives Tahun/ Years	Penyusutan (persentase)/ Depreciation (percentage)	
Gedung kantor	20	5%	Office buildings
Kendaraan bermotor	4	25%	Vehicles
Mesin dan peralatan	4	25%	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	4	25%	Office furniture and equipment

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan akan ditinjau dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penyesuaian atas masa manfaat dan metode penyusutan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai wajar dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi, diakui sebagai laba/rugi periode terjadinya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Aset tetap dalam proses pembangunan merupakan aset yang masih dalam proses renovasi atau pemasangan dan belum siap digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

r. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa perangkat lunak.

Perangkat lunak, yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait, dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

q. Fixed assets and depreciation (continued)

The assets residual values, useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate at the end of each reporting period.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no adjustment on useful life and depreciation method.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

When assets are retired or disposed, their fair value and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements. The resulting gains or losses are recognised as related period's profit/loss.

Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred. Expenditure that extends the useful life of assets is capitalised and depreciated.

Assets under construction consist of assets that are still in progress of renovation or installments and not yet ready for use and intended to be used in business activity. This accounts recorded based on amounts paid.

r. Intangible assets

Intangible assets held by the Bank is software.

The software, that is not an integral part of the related hardware, is recorded as an intangible asset and is stated at carrying value, which is at cost less accumulated amortisation.

Software acquisition costs consist of all expenditures attributed directly in the preparation of the software so ready to use in accordance with the intent of management.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tak berwujud (lanjutan)

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak dengan umur manfaat terbatas, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun.

s. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan yang diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian pinjaman yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah. Bank memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realisable value*), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

r. Intangible assets (continued)

Expenditures after acquisition software can be added to the cost of software or capitalised as software only if the expenses add future economic benefits of the software so as to be larger than originally expected performance standards. Expenditure that does not add to future economic benefits of the software are recognised as an expense when incurred.

Software with certain useful life, are amortised using straight-line method over the estimated useful life of the assets, which is 4 (four) years.

s. Foreclosed assets

Foreclosed assets represent assets acquired by Bank, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to Bank. Foreclosed assets represent collateral acquired in settlement of loans, sharia financing and receivables. The Bank has policy to sell foreclosed assets to settle debtor's liabilities.

Foreclosed assets are recognised at lower amount between carrying value and their net realisable value, which is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets. If there is a permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals in written down to recognise such permanent decline in value. Any such write-down is recognised statement of profit or loss.

Holding costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current year profit/loss as incurred.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

t. Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran kepada pihak lain yang telah dilakukan namun belum merupakan beban pada saat pembayaran dilakukan. Biaya dibayar dimuka akan digunakan untuk aktivitas Bank di masa mendatang. Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Termasuk dalam biaya dibayar dimuka adalah pembiayaan, pengembangan teknologi, promosi dan beban renovasi gedung.

Termasuk di dalam aset lain-lain antara lain adalah uang muka jaminan, uang muka pembelian aset, dan uang muka pengembangan teknologi.

u. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (selain bank) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, tabungan, dan *deposito on call*.

Simpanan dari nasabah dan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

t. Prepaid expenses and other assets

Prepaid expenses are payments made to other parties but have not been recognised as expense at the time of payment. Prepaid expenses will be used for Bank's activities in the future. Prepaid expenses are recognised as expenses during the amortisation in accordance with the expected period of benefit.

Included in prepaid expenses are financing, technology development, promotion and office building renovation expense.

Included in other assets are amongst others membership deposits, advance for fixed assets purchase, advance for technology development.

u. Deposits from customers and deposits from other banks

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are demand deposits, saving deposits, time deposits, certificates of deposits, and other forms which are similar.

Deposits from other banks represent liabilities to banks in the form of demand deposits, inter-bank call money, time deposits, saving accounts, and deposits on call.

Deposits from customers and other banks are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy for financial liabilities measured at amortised cost.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

v. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan adalah obligasi yang diterbitkan dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atau liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya transaksi yang timbul sehubungan dengan penerbitan efek-efek dikurangkan dari hasil penerbitan efek-efek bersangkutan. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal obligasi diakui sebagai diskonto yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama umur obligasi.

w. Pinjaman yang diterima

Pada pengukuran awal pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi disajikan sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan pinjaman dan obligasi subordinasi.

Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

x. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

v. Marketable Securities issued

Marketable securities issued is the issuance of bond which is classified as financial liabilities measured at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

Transaction cost in relation with the marketable securities issued is deducted from the related marketable securities issued. Any difference between net proceed of bond issuance and nominal of bond is recognised as discount and will be amortised using effective interest rate during bond's period.

w. Borrowings

Borrowings and subordinated loans are initially presented at fair value less directly attributable transaction costs to the acquisition or issuance of subordinated loans and bonds.

Borrowings and subordinated loans are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy for financial liabilities measured at amortised cost.

x. Leases Transaction

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short-term lease; and*
- *Low value asset.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

x. Transaksi Sewa (lanjutan)

x. Leases Transaction (continued)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah: (lanjutan)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether: (continued)

- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

- *The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

x. Transaksi Sewa (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Bank menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Bank, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Bank menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa", kecuali jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Bank menerapkan PSAK 16, "Aset tetap".

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

y. Pendapatan dan beban bunga dan syariah
Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* dicatat dalam pendapatan bunga dan beban bunga menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

x. Leases Transaction (continued)

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

The Bank analyses the facts and circumstances for each type of landrights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Bank, but gives the rights to use the underlying assets, the Bank applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Lease", except if landrights substantially similar to land purchases, the Bank applies SFAS 16, "Property, plant and equipment".

Leases modification

The Bank account for a leases modification as a separate leases if both:

- the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;
- the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

y. Interest income and expense and sharia
Conventional

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments are recorded within interest income and interest expense using the effective interest rate method.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga dan syariah
(lanjutan)

Konvensional (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau bilamana tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset keuangan diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

y. Interest income and expense and sharia
(continued)

Conventional (continued)

The effective interest rate method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and method of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, Bank estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees, commissions, and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Once a financial asset or a bank of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised on the unimpaired portion using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Interest income on loans or other earning assets classified as non-performing is recognised at the time the interest is received. When a financial asset is classified as non-performing, any interest income previously recognised but not yet collected is reversed against interest income. The reversed interest income is recognised as a contingent receivable.

Sharia income and expense

Revenue from fund management by Subsidiary as *mudharib* consists of income from sales and purchases of *murabahah* transactions, profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing, income from lease (*ijarah*) and other main operating income.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga dan syariah
(lanjutan)

Pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

Entitas Anak menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Entitas Anak melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Entitas Anak dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad menggunakan metode *flat* (proporsional).

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Pengakuan pendapatan atas piutang *murabahah* diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang *murabahah* untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang *murabahah* tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

y. Interest income and expense and sharia
(continued)

Sharia income and expense (continued)

The Subsidiary prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Subsidiary leases the amortisation of deferred income at the time its financing is classified as *non-performing*. The Subsidiary's income from business transactions that are classified as *non-performing* is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Income from *ijarah* is recognised over the period of the contract with *flat* (proportional) method.

Profit sharing income for passive partner in *musyarakah* is recognised in the period when the right arises in accordance with *nisbah* (the agreed sharing ratio).

Profit sharing income from *mudharabah* is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

The revenue recognition of *murabahah* receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the *murabahah* receivable to obtain the carrying amount of a *murabahah* receivable. When calculating the effective rate of return, the Subsidiary estimates future cash flows by considering all contractual terms of the *murabahah* receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga dan syariah
(lanjutan)

Pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima (*cash basis*) dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Entitas Anak (*gross profit margin*).

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Entitas Anak sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Entitas Anak sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

z. Pendapatan provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian pinjaman diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan pinjaman dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian pinjaman atas suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

y. Interest income and expense and sharia
(continued)

Sharia income and expense (continued)

Third parties's share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Subsidiary's income derived from the management of their funds by the Subsidiary under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Subsidiary's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Subsidiary based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

z. Fees and commissions income

Fees and commissions income directly related to lending activities, are recognised as a part/(deduction) of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan with effective interest rate method.

Fees and commissions income which are not related to lending activities on a specific period are recognised as income incurred at the transaction date as other operating income.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Pendapatan dan beban operasional lainnya

aa. Other operating income and expenses

Beban tenaga kerja

Personnel expenses

Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur dan tunjangan.

Personnel expenses include expenses related with salaries for employees, bonuses, overtime and allowances.

Beban umum dan administrasi

General and administrative expenses

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank.

General and administrative expenses represent expenses related to office activities and Bank operational activities.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya.

All of these income and expenses are recorded as profit/loss when incurred.

ab. Perpajakan

ab. Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in other comprehensive income or in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or in equity, respectively.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berbeda membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Management periodically evaluates positions taken in tax return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas. Pajak penghasilan tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara aset dan liabilitas menurut ketentuan-ketentuan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan tangguhan.

Deferred income tax is provided using the liability method. Deferred income tax on temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Currently enacted or substantially enacted tax rates are used in the determination of deferred income tax.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Perpajakan (lanjutan)

ab. Taxation (continued)

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut. Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo secara bersih.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred Income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority where tax is an intention to settle the balance on a net basis.

Taksiran pajak penghasilan Bank dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan.

The estimated corporate income tax of Bank is calculated for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal entities cannot be net-off in the financial statements.

ac. Imbalan kerja

ac. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Employee benefits obligation

Bank memiliki program pensiun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Bank. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun yang besarnya ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala.

The Bank have pension scheme in accordance with prevailing labor-related laws and regulations of Bank's policies. The scheme is generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan jumlah minimal tertentu sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 11/2020 (2020: Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003). Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, maka pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau jumlah kompensasi.

The Bank are required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Job Creation Law Art No.11/2020 (2020: Labor Law No. 13/2003). Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or total compensation.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pesangon pemutusan kontrak terhutang ketika karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal.

Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Bank menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Employee benefits (continued)

Employee benefits obligation (continued)

The liability recognised in the statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in the statements of profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the statement of profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement age.

The Bank recognise termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan which has small probability to withdraw. Benefits, due more than 12 (twelve) months after statement of financial position's date are discounted to present value.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Kelompok Usaha telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Bank mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Bank telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

ad. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Employee benefits (continued)

Changes in Accounting Policy

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountant's Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with FSAS 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The Company has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

In prior years, the Bank attribute benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. The Bank change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

ad. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing net income with the weighted average number of common shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Penjabaran mata uang asing

ae. Foreign currency translation

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Bank. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat yang berlaku pada tanggal pelaporan.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Bank. Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. As at each reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia closing exchange rate at 16:00 Western Indonesian Time prevailing at reporting date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui dalam laporan laba rugi.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currencies and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statement of profit or loss.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang menggunakan kurs tengah Reuters pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (nilai penuh):

Below are the major exchange rates used as of December 31, 2023 and 2022 using the Reuter's middle rates at 16:00 Western Indonesian Time (full amount):

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Poundsterling Inggris	19.627	18.786	Great Britain Poundsterling
Franc Swiss	18.299	16.827	Swiss Franc
Euro Eropa	17.038	16.582	European Euro
Dolar Amerika Serikat	15.397	15.568	United States Dollar
Dolar Singapura	11.676	11.593	Singapore Dollar
Dolar Kanada	11.630	11.486	Canadian Dollar
Dolar Australia	10.521	10.558	Australian Dollar
Dolar New Zealand	9.766	9.851	New Zealand Dollar
Riyal Arab	4.106	4.139	Saudi Riyal
Ringgit Malaysia	3.355	3.534	Malaysian Ringgit
Yuan China	2.170	2.239	Chinese Yuan
Dolar Hongkong	1.971	1.997	Hongkong Dollar
Dolar Taiwan	504	506	New Taiwan Dollar
Baht Thailand	450	451	Thailand Baht
Yen Jepang	109	118	Japanese Yen
Won Korea	12	12	Korean Won

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

af. Transaksi dengan pihak berelasi

af. Transactions with related parties

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS 7 regarding "Related Party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); atau
 - vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the reporting entity are member of the same the company (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
 - vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
 - vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Pelaporan segmen

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh kepala operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Berdasarkan PSAK 5, sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya.

Segmen operasi Bank disajikan berdasarkan bank umum - konvensional dan bank syariah.

Segmen geografis adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jadedabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Luar Jawa.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ag. Segment reporting

An operating segment is a component of entity which:

- a. involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- b. operations result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and
- c. separated financial information is available.

Bank presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. Under SFAS 5, a business segment is a bank of assets and operations engaged in providing products or services that are subject to risks and returns that are difference from those of other business segments.

The Bank's operating segments are presented by commercial banks - conventional and sharia bank.

A geographical segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments. The Bank report geographical segment information based on Jadedabek, West Java, Central and East Java and Non Java.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the presentation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain membutuhkan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan terkait *future economic conditions* dan *credit behavior*.

Estimasi signifikan dibutuhkan dalam menerapkan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 71, antara lain:

- Penentuan kriteria *significant increase in Credit Risk*;
- Menentukan model yang tepat dan asumsi untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai;
- Menentukan jumlah dan pembebanan relatif atas skenario *forward-looking* untuk masing-masing segmen/produk;
- Menentukan segmentasi aset keuangan yang sejenis untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai;
- Estimasi arus kas debitor dalam perhitungan individual *impairment*.

Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

Allowance for impairment losses of financial assets

According to SFAS 71, the measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortised cost and at fair value through other comprehensive income is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behavior.

Significant estimates are required in applying the SFAS 71 requirements for measuring allowance for impairment losses, such as:

- Determining criteria for *significant increase in Credit Risk*;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of allowance for impairment losses;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of segment/product;
- Establishing groups of similar financial assets for the purposes of measuring allowance for impairment losses;
- Estimate debtor's cash flow in the calculation of individual impairment.

Refer to Note 2g for accounting policy on impairment of financial assets.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif (untuk Entitas Anak berbasis syariah)

Aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek-efek, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ("PBI"), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset nonproduktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan.

Kondisi agunan yang diambil alih dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi nilai bersih yang dapat direalisasi tersebut, manajemen membuat pertimbangan berdasarkan nilai realisasi bersih dari setiap agunan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen dan estimasi waktu dan arus kas yang diterima dari penjualan aset tersebut. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan kondisi, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Allowance for impairment losses on earning assets (for Subsidiary with Sharia principle)

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts with other banks, placements with other banks, marketable securities, mudharabah and musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk.

In accordance with Bank Indonesia Regulations ("PBI"), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets categorised as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorised into three categories: "Substandard", "Doubtful", and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful", and "Loss".

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations ("POJK") No.19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

Foreclosed assets

Foreclosed assets are stated at lower amount of carrying amount and net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realisable value of the foreclosed assets is charged to allowance for impairment losses on non financial assets.

The specific condition of foreclosed assets is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the net realisable value of each foreclosed asset based the result of independent appraisal and estimated time and cash received from selling the foreclosed assets. Each impaired assets will be measured based on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini (lihat Catatan 24).

Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Bank harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2d.

Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 46.

Dalam mengukur nilai wajar atas aset dan liabilitas non-keuangan, Bank menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas pajak penghasilan badan dan pajak lainnya berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions (refer to Note 24).

Determining fair values

The determining of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price requires the Bank must use of valuation techniques as described in Note 2d.

Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 46.

When measuring the fair value for non-financial assets and liabilities, the Bank uses observable market data to extent possible.

Taxation

Significant consideration is made in determining the provision of corporate income tax and other taxes. There are certain transactions and calculations that the final tax determination is uncertain in the normal course of business. The Bank recognised liability for corporate income tax and other taxes based on an estimate whether there would be an additional corporate income tax and other taxes.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai lessee

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

4. KAS

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, as long as it is likely that taxable income will be available so that the temporary differences can be utilised. Significant estimates by management are required in determining the amount of deferred tax assets that can be recognised, based on utilisation and the level of taxable income and future tax planning strategies.

Determine the contract term with options for extension and termination of the contract - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as the term of the lease that cannot be cancelled, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably reasonable not to do so.

The Bank has several lease contracts that include options for extension and termination of the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

4. CASH

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kas dalam khsanah			Cash in vault
Rupiah	87.502.996	40.512.092	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currency
Dolar Amerika Serikat	4.394.381	10.922.546	United States Dollar
Dolar Singapura	554.825	107.907	Singapore Dollar
Dolar Australia	171.699	110.013	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	26.300	-	Great Britain Poundsterling
Euro Eropa	25.302	52.232	European Euro
Dolar Selandia Baru	22.851	8.176	New Zealand Dollar
Franc Swiss	7.869	10.601	Swiss Franc
Dolar Taiwan	7.704	34.569	New Taiwan Dollar
Dolar Hongkong	5.892	29.689	Hongkong Dollar

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS (lanjutan)

4. CASH (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kas dalam khasanah (lanjutan)			Cash in vault (continued)
Mata uang asing (lanjutan)			Foreign currency (continued)
Yen Jepang	4.682	8.247	Japanese Yen
Yuan Cina	2.341	2.931	Chinese Yuan
Won Korea	1.497	988	Korean Won
Real Saudi	1.437	-	Saudi Riyal
Dolar Kanada	581	6.892	Canadian Dollar
Baht Thailand	571	370	Thailand Baht
Ringgit Malaysia	436	371	Malaysian Ringgit
Kas	89.500	89.500	Cash on hand
Jumlah	92.820.864	51.897.124	Total

Kas dalam khasanah diasuransikan terhadap seluruh risiko kepada PT Victoria Insurance (pihak berelasi) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp125.921.618 dan Rp126.781.903. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas kas dalam khasanah yang dipertanggungkan. Kas terutama berasal dari dana pihak ketiga dan penerbitan efek-efek.

Cash in vault, are insured against losses by all risks to PT Victoria Insurance (related party) with total insurance coverage as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp125,921,618 and Rp126,781,903, respectively. The Bank's management believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on insured cash in vault. Cash mainly sourced from third party funds and securities issuance.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah	1.469.773.490	1.490.535.993	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	23.303.360	16.029.855	United States Dollar
Jumlah	1.493.076.850	1.506.565.848	Total

Rasio GWM Bank yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the audited GWM ratios of the Bank are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Bank Umum - Konvensional			Commercial Bank - Conventional
Rupiah			Rupiah
Giro Wajib Minimum ^{*)}	7,32%	7,69%	Minimum Statutory Reserve ^{*)}
Penyangga Likuiditas Makroprudensial ^{**)}	23,73%	22,82%	Macroprudential Liquidity Buffer ^{**)}
GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial ^{***)}	(1,01%)	(2,49%)	GWM Macroprudential Intermediation Ratio ^{***)}
Valuta Asing	4,05%	4,05%	Foreign Currencies

^{*)} Sebelumnya Giro Wajib Minimum Primer
^{**)} Sebelumnya Giro Wajib Minimum Sekunder
^{***)} Sebelumnya Giro Wajib Minimum LFR

^{*)} Previously Primary Minimum Statutory Reserve
^{**)} Previously Secondary Minimum Statutory Reserve
^{***)} Previously Loan to Funding Ratio Minimum Statutory Reserve

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia adalah untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Bank wajib memenuhi rasio Giro Wajib Minimum (GWM) seperti yang disyaratkan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing secara harian dan rata-rata dari rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing selama periode laporan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio GWM rata-rata dalam Rupiah yang wajib dipenuhi adalah sebesar 9%, dan rasio GWM rata-rata dalam valuta asing yang wajib dipenuhi sebesar 4%.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia (BI) No. 25/321/DKMP/Srt/B tanggal 5 Desember 2023, Bank memperoleh Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar 1,8% berlaku dari 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024 sehingga GWM rata-rata dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank adalah 7,2%.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Current accounts with Bank Indonesia are provided to fulfill Bank Indonesia's requirements on Minimum Reserve Requirements (GWM).

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 as amended several times, most recently with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated March 1, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/3/PBI/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; and Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018, as amended several times, most recently with PADG No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022 concerning the Eighth Amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors of the Governor No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated July 1, 2022, as amended several times, most recently with PADG No. 12 year 2023 dated October 1, 2023 concerning the Second Amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors PADG No. 24/8/PADG/2022 concerning the Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. Banks are required to meet the Statutory Reserves (GWM) ratio as required by Bank Indonesia in Rupiah and foreign currencies on a daily basis and the average of the average Third Party Funds (DPK) in Rupiah and foreign currencies during a specific reporting period.

As of December 31, 2023 and 2022, the average GWM ratio in Rupiah that must be fulfilled is at 9%, and the average GWM ratio in foreign currencies that must be fulfilled is at 4%.

Based on letter from Bank Indonesia (BI) No. 25/321/DKMP/Srt/B dated December 5, 2023, the Bank received a Macroprudential Liquidity Policy Incentive of 1.8% valid from December 1, 2023 until February 29, 2024 therefore GWM ratio in Rupiah that must be fulfilled by the Bank is at 7.2%.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Disamping itu, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dan PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib memenuhi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dari rata-rata DPK dalam Rupiah selama periode laporan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio PLM yang wajib dipenuhi minimal masing-masing sebesar 5% dan 6%.

Giro RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Parameter yang digunakan dalam pemenuhan giro RIM adalah sebagai berikut:

1. Batas bawah target RIM sebesar 84%
2. Batas atas target RIM sebesar 94%
3. KPMM Insentif sebesar 14%

Bank memiliki RIM dibawah batas bawah target RIM, NPL kurang dari 5 (Catatan 11), dan KPMM diatas 19% sehingga Bank wajib memelihara Giro RIM menggunakan parameter disinsentif yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Giro RIM yang dimiliki Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum bank umum konvensional pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Furthermore, based on PBI No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 as amended several times, most recently with PBI No.24/16/PBI/2022 dated November 1, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 concerning Ratio Macroprudential Intermediation and Macroprudential Liquidity Support for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units; and PADG No.21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 as amended several times, most recently with PADG No. 18 year 2023 dated November 29, 2023 concerning the Seventh Amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors No. 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, Banks must meet the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) of the average TPF in Rupiah during specific reporting periods.

As of December 31, 2023 and 2022, the minimum of PLM ratio that must be fulfilled is set at 5% and 6%, respectively.

RIM demand deposits is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of current accounts with Bank Indonesia. The parameters used in the fulfillment of MIR are as follow:

1. Minimum target of RIM is 84%
2. Maximum target of RIM is 94%
3. Incentive of CAR is 14%

Bank have RIM below the lower RIM target limit, NPL of less than 5 (Note 11), and have CAR above 19% therefore the Bank is required to maintain RIM demand deposits using the applicable disincentive parameters. As of December 31, 2023 and 2022, the RIM Current Account owned by the Bank complied with the applicable Bank Indonesia regulations.

The Bank has fulfilled the prevailing Bank Indonesia's regulation regarding Minimum Reserve Requirements for conventional banks as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan bank

a. By bank

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	57.345.205	31.369.908	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.963.477	18.116.185	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.101.400	10.100.200	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	174.099	230.617	PT Bank Permata Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	57.491	-	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	31.338	1.860.483	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	8.318	9.763	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.769	248.783	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	622.877	PT Bank Mega Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	455.792	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Victoria Syariah	-	915	PT Bank Victoria Syariah
Sub jumlah	88.685.097	63.015.523	Sub total
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currency</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	164.890.420	106.390.516	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.106.642	28.621.665	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	4.651.092	22.602.699	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.059.270	2.599.773	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ICBC	577.714	-	PT Bank ICBC
OCBC Bank, Singapura	328.684	5.154.251	OCBC Bank, Singapore
Sub jumlah	207.613.822	165.368.904	Sub total
Jumlah	296.298.919	228.384.427	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.726)	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	296.297.193	228.384.427	Total - net

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak terdapat giro pada bank lain yang dijaminkan.

All current accounts with other banks as of December 31, 2023 and 2022 were placed with third parties and are not pledged as collateral.

b. Berdasarkan mata uang

b. By currency

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah	88.685.097	63.015.523	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	202.908.447	154.903.119	United States Dollar
Yen Jepang	2.673.710	2.672.405	Japanese Yen
Euro Eropa	1.059.270	2.599.773	European Euro
China Yuan	643.711	39.356	Chinese Yuan
Dolar Singapura	328.684	5.154.251	Singapore Dollar
Jumlah	296.298.919	228.384.427	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.726)	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	296.297.193	228.384.427	Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua giro pada bank lain diklasifikasikan lancar.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh giro pada bank lain berada di *stage* 1. Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.726 dan RpNihil.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis, pihak dan bank

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Fasilitas Simpanan		
Bank Indonesia (FASBI)	359.947.530	829.890.530
Deposito Berjangka		
PT Bank Mega Tbk	2.600.000	-
PT Bank Victoria Syariah	1.800.000	-
PT Bank Nationalnoba Tbk	1.320.000	-
PT Bank BJB Tbk	700.000	3.450.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3.000.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	1.000.000
PT Bank BJB Syariah	-	1.000.000
	366.367.530	838.340.530
<i>Interbank Call Money</i>		
Rupiah		
PT Bank Capital Indonesia Tbk	250.000.000	-
PT Bank Victoria Syariah	150.000.000	20.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	100.000.000	-
PT Bank Nationalnoba Tbk	50.000.000	-
	550.000.000	20.000.000
Jumlah	916.367.530	858.340.530
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(998.782)	(13.015)
Jumlah - bersih	915.368.748	858.327.515

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. By collectibility according to Bank Indonesia Regulation

All current accounts with other banks are classified as current as of December 31, 2023 and 2022.

d. Allowance for impairment losses

As of December 31, 2023 and 2022, all current accounts with other banks are classified in *stage* 1. Bank has set aside allowance for impairment losses amounted to Rp1,726 and RpNil, respectively.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type, counterparties and bank

Third party
Fasilitas Simpanan
Bank Indonesia (FASBI)
<i>Time Deposit</i>
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Nationalnoba Tbk
PT Bank BJB Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank BJB Syariah
<i>Interbank Call Money</i>
Rupiah
PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Nationalnoba Tbk

Total

Less: Allowance for impairment losses

Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, pihak dan bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan Bank Indonesia dan pada bank lain yang dijaminkan.

b. Berdasarkan tenor jatuh tempo

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Kurang dari 1 bulan	916.367.530	858.340.530
1 sampai 3 bulan	-	-
3 sampai 6 bulan	-	-
Lebih dari 6 bulan	-	-
Jumlah	916.367.530	858.340.530
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(998.782)	(13.015)
Jumlah - bersih	915.368.748	858.327.515

c. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Rupiah	916.367.530	858.340.530
Dolar Amerika Serikat	-	-
Jumlah	916.367.530	858.340.530
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(998.782)	(13.015)
Jumlah - bersih	915.368.748	858.327.515

d. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain digolongkan sebagai lancar.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type, counterparties and bank (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, there are no placements Bank Indonesia and with other banks pledged as collateral.

b. By period maturity

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Kurang dari 1 bulan	916.367.530	858.340.530
1 up to 3 months	-	-
3 up to 6 months	-	-
More than 6 months	-	-
Total	916.367.530	858.340.530
Less: Allowance for impairment losses	(998.782)	(13.015)
Total - net	915.368.748	858.327.515

c. By currency

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Rupiah	916.367.530	858.340.530
United States Dollar	-	-
Total	916.367.530	858.340.530
Less: Allowance for impairment losses	(998.782)	(13.015)
Total - net	915.368.748	858.327.515

d. By collectability according to Bank Indonesia Regulation

As of December 31, 2023 and 2022, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berada di *stage* 1. Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp998.782 dan Rp13.015.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

e. Allowance for impairment losses

As of December 31, 2023 and 2022, all placements in Bank Indonesia and other banks are classified in stage 1. Bank has set aside allowance for impairment losses amounted to Rp998,782 and Rp13,015, respectively.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan jenis

8. MARKETABLE SECURITIES

a. By type

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Reksadana	790.570.315	400.037.154	Mutual funds
Wesel jangka menengah	221.960.000	172.625.000	Medium-term notes
Sub jumlah	1.012.530.315	572.662.154	Sub total
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	757.213.466	1.095.239.462	Government Promissory Notes
Surat Berharga Syariah Negara	308.245.034	387.126.664	Government Sharia Bonds
Reksadana	306.932.232	-	Mutual funds
Surat Berharga Syariah Korporasi	20.283.400	-	Corporate Sharia Bonds
Obligasi korporasi	12.081.667	83.372.315	Corporate bonds
Efek Beragun Aset	8.508.012	-	Asset-backed security
Wesel jangka menengah	-	20.547.800	Medium-term notes
Sub jumlah	1.413.263.811	1.586.286.241	Sub total
Biaya perolehan diamortisasi			Amortised cost
Surat Utang Negara	3.547.973.017	2.476.659.061	Government Promissory Notes
Obligasi korporasi	196.439.029	12.500.000	Corporate bonds
Reksadana	73.000.000	-	Mutual funds
Surat Berharga Syariah Korporasi	16.955.601	-	Corporate Sharia Bonds
Wesel Jangka Menengah	15.000.000	15.000.000	Medium-term notes
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	9.389.041	-	Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)
Surat Berharga Syariah Negara	1.012.922	155.445.941	Government Sharia Bonds
Sub jumlah	3.859.769.610	2.659.605.002	Sub total
Jumlah	6.285.563.736	4.818.553.397	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.271.969)	(8.862.949)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	6.277.291.767	4.809.690.448	Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat efek-efek yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat surat utang negara dalam transaksi efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dengan nilai nominal sebesar Rp643.266.730 dan Rp240.865.160 (Catatan 20).

b. Obligasi korporasi

i. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. By type (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, there are no marketable securities pledged as collateral.

As of December 31, 2023 and 2022 government bonds under transaction securities sold under repurchase agreement with nominal amount of Rp643,266,730 and Rp240,865,160 (Notes 20).

b. Corporate bonds

i. Fair value through other comprehensive income

31 Desember/December 31, 2023

Pihak penerbit/ Issuers	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating
PT Astra Sedaya Finance	Obligasi Berkelanjutan IV/III 2019 C	10.080.856	7,95	23-Oct-24	idAAA
PT Aneka Gas Industri Tbk	Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV 2021 A	2.000.811	8,10	22-Dec-24	A(idn)
Jumlah/ Total		12.081.667			

31 Desember/December 31, 2022

Pihak penerbit/ Issuers	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating
PT Aneka Gas Industri Tbk	Obligasi Berkelanjutan II/III 2021 C	1.992.434	8,10	22-Dec-24	A(idn)
PT Astra Sedaya Finance	ASDF Berkel IV/IV 2020 B	10.043.076	7,00	27-Mar-23	idAAA
PT Astra Sedaya Finance	ASDF Berkl IV/III 2019 C	10.286.281	7,95	23-Oct-24	idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BTN Berkl I/II Th 2013	19.095.135	7,90	27-Mar-23	AA(idn)
PT Mayora Indah Tbk	Mayora Indah I/III 2018	15.107.999	8,15	24-Apr-23	idAA
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2	5.105.630	8,40	07-Jul-29	idAAA(sf)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1	16.005.956	8,50	07-May-32	idAAA(sf)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	697.998	8,75	07-May-32	idAAA(sf)
PT Serasi Autoraya	OBL Berkelanjutan I Serasi Autoraya THP I 2019 C	5.037.806	8,35	27-Apr-23	AA-(idn)
Jumlah/Total		83.372.315			

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Obligasi korporasi (lanjutan)

b. Corporate bonds (continued)

ii. Biaya perolehan diamortisasi

ii. Amortised cost

31 Desember/December 31, 2023

Pihak penerbit/ Issuers	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating
PT Sinar Mas Multifinance	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2023 Seri B III Tahap I	50.000.000	10,25	07-Feb-26	irA+
PT Sinar Mas Multifinance	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2023 Seri C III TAHAP I	50.000.000	10,75	07-Feb-28	irA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2017 Seri C III Tahap V	20.251.743	8,25	15-Agu-24	idAAA
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2019 Seri B III Tahap II	20.395.649	8,75	28-Nov-24	idAA+
PT Sarana Multigriya Financial Tbk (Persero)	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2020 Seri B V Tahap IV	10.208.721	8,10	14-Jul-25	idAAA
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2019 Seri C IV Tahap IV	10.082.916	8,90	23-Apr-24	idAAA
PT Barito Pacific Tbk	Obligasi Berkelanjutan Tahun 2023 Seri B III Tahap I	15.000.000	9,25	08-Feb-28	idA+
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	Obligasi I Tahun 2022 Seri A	12.500.000	9,75	07-Okt-25	idA
PT TBS Energi Utama Tbk	Obligasi I Tahun 2023 Seri B	8.000.000	10,00	03-Mar-28	idA
Jumlah/Total		196.439.029			

31 Desember/December 31, 2022

Pihak penerbit/ Issuers	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	OBLIGASI I SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SERI A	12.500.000	9,75	7-Oct-25	idA
Jumlah/Total		12.500.000			

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. By remaining period to maturity

31 Desember/December 31,

	2023	2022	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortised cost
Kurang dari 1 tahun	731.735.232	428.488.131	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	472.679.239	246.992.450	1 up to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	305.304.379	187.323.870	2 up to 5 years
Lebih dari 5 tahun	2.350.050.760	1.796.800.551	More than 5 years
Jumlah	3.859.769.610	2.659.605.002	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

d. By collectability as per Bank Indonesia

	31 Desember/December 31,				
	2023		2022		
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Cadangan/ Allowance	Nilai tercatat/ Carrying Value	Cadangan/ Allowance	
Lancar	6.285.563.736	(8.271.969)	4.818.553.397	(8.862.949)	Current
Kurang lancar	-	-	-	-	Substandard
Macet	-	-	-	-	Loss
Jumlah	6.285.563.736	(8.271.969)	4.818.553.397	(8.862.949)	Total

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

e. The changes in allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on marketable securities for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	8.862.949	-	-	8.862.949	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	-	-	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	-	-	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	-	-	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Perubahan bersih pada eksposur	(590.980)	-	-	(590.980)	Net change in exposure
Penghapusbukuan	-	-	-	-	Write off
Saldo akhir tahun	8.271.969	-	-	8.271.969	Balance end of year

	31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah/ Sharia		Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	11.108.843	-	-	-	11.108.843	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	-	-	-	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	-	-	-	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	-	-	-	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Perubahan bersih pada eksposur	(2.245.894)	-	-	-	(2.245.894)	Net change in exposure
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Saldo akhir tahun	8.862.949	-	-	-	8.862.949	Balance end of year

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

e. The changes in allowance for impairment losses (continued)

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

The securities purchased under resale agreements as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2023

Pihak lawan/ Counterparty	Jenis efek/ Type of Securities	Nilai wajar/ Fair value amount	Tingkat suku bungsa/ Interest rate	Tanggal dimulai/ Commencement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai tercatat/ Carrying amount
Bank Mega	FR0080	123.206.041	6,35%	22 Desember/ December 2023	5 Januari/ January 2024	123.385.291
Bank Mega	FR0080	123.206.041	6,35%	22 Desember / December 2023	5 Januari / January 2024	123.385.291
Bank Mega	FR0080	123.206.041	6,35%	22 Desember / December 2023	5 Januari/ January 2024	123.385.291
Bank Mega	FR0080	123.206.041	6,35%	22 Desember / December 2023	5 Januari/ January 2024	123.385.291
Ina Perdana	FR0101	47.035.463	6,25%	28 Desember / December 2023	4 Januari / January 2024	47.730.463
Ina Perdana	FR0101	<u>94.070.927</u>	6,25%	28 Desember/ December 2023	4 Januari/ January 2024	<u>95.460.927</u>
Jumlah/ Total		<u>633.930.554</u>				<u>636.732.554</u>

31 Desember/December 31, 2022

Pihak lawan/ Counterparty	Jenis efek/ Type of Securities	Nilai wajar/ Fair value amount	Tingkat suku bungsa/ Interest rate	Tanggal dimulai/ Commencement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai tercatat/ Carrying amount
Bank Indonesia	VR0046	119.045.000	5,50%	29 Desember/ December 2022	5 Januari/ January 2023	120.051.750
Bank Indonesia	VR0046	119.045.000	5,50%	29 Desember / December 2022	5 Januari / January 2023	120.051.750
Bank Indonesia	VR0035	118.276.625	5,50%	30 Desember / December 2022	6 Januari/ January 2023	119.567.375
Bank Indonesia	VR0035	118.276.625	5,50%	30 Desember / December 2022	6 Januari / January 2023	119.567.375
Bank Indonesia	VR0035	118.276.625	5,50%	30 Desember / December 2022	6 Januari / January 2023	119.567.375
Ina Perdana	FR0075	119.251.625	5,80%	26 Desember / December 2022	2 Januari/ January 2023	120.313.375
Ina Perdana	FR0075	<u>119.251.625</u>	5,80%	26 Desember/ December 2022	2 Januari/ January 2023	<u>120.313.375</u>
Jumlah/ Total		<u>831.423.125</u>				<u>839.432.375</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali digolongkan sebagai lancar dan berada di stage 1.

As of December 31, 2023 and 2022, all securities purchased under resale agreements were classified as current and are in stage 1.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

10. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH YANG MASIH AKAN DITERIMA

10. INTEREST AND SHARIA INCOME RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah	314.474.550	352.458.256	Loans, sharia financing and receivables
Efek-efek	70.597.055	63.314.972	Marketable securities
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	969.990	452.257	Securities purchased under resale agreements
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	325.556	5.667	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah	386.167.151	416.231.152	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.759.228)	(24.551.373)	Less: Allowance for impairment loss
Jumlah - bersih	368.407.923	391.679.779	Total - net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of interest and sharia income receivables are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Saldo awal	24.551.373	21.829.912	Beginning balance
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 32)	(3.814.474)	-	Reversal during the year (Note 32)
Penambahan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-	45.266.724	Addition during the year (Note 32)
Penghapusbukuan	(2.977.671)	(42.545.263)	Write-off
Saldo akhir	17.759.228	24.551.373	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from interest and sharia income receivables.

Semua pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah kepada debitur menggunakan mata uang Rupiah.

All loans, sharia financing and receivables granted by the Bank to the debtors denominated in Rupiah.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES

a. Berdasarkan pihak dan jenis kredit

a. By counterparties and loan type

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan	18.628.743.177	15.824.611.091	Loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)	Less: Allowance for impairment of loan losses
Jumlah	18.053.870.975	15.286.492.840	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN
DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES
(continued)

a. Berdasarkan pihak dan jenis kredit (lanjutan)

a. By counterparties and loan type (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak Berelasi			Related Parties
Pinjaman tetap	14.093.005	15.767.732	Fixed loans
Pinjaman rekening koran	33.612.870	50.298.491	Overdraft loans
Pinjaman tetap dengan angsuran	93.067.628	2.590.000	Fixed loans with installments
Pinjaman serba guna	1.904.420	2.785.543	Other loans
Pinjaman konsumen	1.218.518	1.823.917	Consumer loans
	143.896.441	73.265.683	
Pihak Ketiga			Third Parties
Pinjaman tetap	9.683.420.015	8.845.158.112	Fixed loans
Pinjaman tetap dengan angsuran	6.771.225.706	5.075.586.745	Fixed loans with installments
Pinjaman rekening koran	1.838.154.121	1.627.457.490	Overdraft loans
Pinjaman konsumen	163.408.554	165.641.493	Consumer loans
Pinjaman serba guna	28.638.340	37.501.568	Other loans
	18.484.846.736	15.751.345.408	
Jumlah	18.628.743.177	15.824.611.091	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)	Less: Allowance for impairment of loan losses
Jumlah - bersih	18.053.870.975	15.286.492.840	Total - net

b. Berdasarkan pihak dan sektor ekonomi

b. By counterparties and economic sector

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak Berelasi			Related Parties
Industri	91.679.382	449.566	Industry
Lembaga pembiayaan	28.697.953	47.840.259	Financing
Perdagangan, restoran dan hotel	20.052.215	16.439.766	Trading, restaurant, and hotel
Jasa-jasa sosial/masyarakat	12.568	2.596.228	Social community service
Lain-lain	3.454.323	5.939.864	Others
	143.896.441	73.265.683	
Pihak Ketiga			Third Parties
Lembaga pembiayaan	5.534.314.148	3.762.445.032	Financing
Perdagangan, restoran dan hotel	3.554.187.395	3.455.294.068	Trading, restaurant, and hotel
Real estate	2.533.798.811	2.434.559.491	Real estate
Industri	2.094.677.859	1.545.957.444	Industry
Konstruksi	737.806.956	782.271.513	Construction
Jasa-jasa sosial/masyarakat	349.338.531	420.555.309	Social community service
Lain-lain	3.680.723.036	3.350.262.551	Others
	18.484.846.736	15.751.345.408	
Jumlah	18.628.743.177	15.824.611.091	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	18.053.870.975	15.286.492.840	Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan pihak dan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By counterparties and economic sector (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio pinjaman kepada Usaha Mikro kecil terhadap pinjaman yang diberikan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 masing-masing sebesar 16,39% dan 15,45% (tidak diaudit).

As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of Micro Business loans to the total loans in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No.13/30/DPNP dated December 16, 2011, was 16.39% and 15.45%, respectively (unaudited).

c. Berdasarkan jangka waktu periode perjanjian pinjaman

c. By period of the loan agreement

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	1.102.254.095	1.074.669.054	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	8.989.930.116	7.064.604.782	1 up to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	2.288.156.059	1.792.845.362	2 up to 5 years
Lebih dari 5 tahun	6.248.402.907	5.892.491.893	More than 5 years
	18.628.743.177	15.824.611.091	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	18.053.870.975	15.286.492.840	Total

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	10.230.458.965	8.317.221.072	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	850.744.939	526.684.728	1 up to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	4.715.574.187	4.466.449.041	2 up to 5 years
Lebih dari 5 tahun	2.831.965.086	2.514.256.250	More than 5 years
	18.628.743.177	15.824.611.091	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(574.872.202)	(538.118.251)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	18.053.870.975	15.286.492.840	Total

e. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

e. By Bank Indonesia collectibility

	31 Desember/December 31,				
	2023		2022		
	Pokok/ Principal	Cadangan/ Allowance	Pokok/ Principal	Cadangan/ Allowance	
Lancar	16.853.533.089	(188.687.597)	13.891.816.244	(127.059.296)	Current
Dalam perhatian khusus	1.031.746.709	(246.323.248)	1.264.168.321	(283.615.360)	Special Mention
Kurang lancar	92.773.486	(44.667.572)	75.569.484	(31.722.417)	Substandard
Diragukan	17.419.566	(4.528.633)	77.449.429	(25.271.075)	Doubtful
Macet	633.270.327	(90.665.152)	515.607.613	(70.450.103)	Loss
Jumlah	18.628.743.177	(574.872.202)	15.824.611.091	(538.118.251)	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN
DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES
(continued)

f. Menurut Stage

f. By Stage

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan stage selama tahun berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

Below is movement of loans based on stages during the year ended December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ December 31, 2023				Jumlah/ Total	
	Stage 1	Stage 2	Stage 3			
Saldo awal tahun	13.749.721.837	1.406.262.727	668.626.527		15.824.611.091	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	524.560.294	(521.995.580)	(2.564.714)		-	Transfer to expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(498.885.200)	498.885.200	-		-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(117.427.616)	(261.018.850)	378.446.466		-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	13.657.969.315	1.122.133.497	1.044.508.279		15.824.611.091	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.338.336.571)	(73.638.752)	(159.342.477)		(1.571.317.800)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	8.698.335.237	201.653.500	134.001.472		9.033.990.209	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.183.072.609)	(199.763.819)	(67.043.684)		(4.449.880.112)	Derecognition of financial asset
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	(208.660.211)		(208.660.211)	Written-off financial assets
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	3.176.926.057	(71.749.071)	(301.044.900)		2.804.132.086	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	16.834.895.372	1.050.384.426	743.463.379		18.628.743.177	Balance end of year

	31 Desember/ December 31, 2022				Jumlah/ Total	
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah/ Sharia		
Saldo awal tahun	12.174.588.727	1.441.372.589	1.067.143.793	805.969.302	15.489.074.411	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	376.488.123	(364.589.511)	(11.898.612)	-	-	Transfer to expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(523.152.234)	523.866.745	(714.511)	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(131.787.056)	(8.368.253)	140.155.309	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	11.896.137.560	1.592.281.570	1.194.685.979	805.969.302	15.489.074.411	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(992.385.522)	(92.077.870)	(144.857.114)	-	(1.229.320.506)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	5.628.818.812	87.888.637	35.213.454	-	5.751.920.903	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.782.849.013)	(181.829.610)	(122.247.341)	-	(3.086.925.964)	Derecognition of financial asset
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	(294.168.451)	-	(294.168.451)	Written-off financial assets
Total penambahan/(pengurangan) tahun berjalan	1.853.584.277	(186.018.843)	(526.059.452)	-	1.141.505.982	Total additional/(reversal) during the year
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	-	-	(805.969.302)	(805.969.302)	Loss of control on subsidiary
Saldo akhir tahun	13.749.721.837	1.406.262.727	668.626.527	-	15.824.611.091	Balance end of year

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES (continued)

g. Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah yang mengalami penurunan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilainya berdasarkan sektor ekonomi

g. Impaired loans, sharia financing and receivables and allowances for impairment losses by economic sector

Pinjaman yang mengalami penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi dan cadangan yang dibentuk:

Impaired loan based on economic sector and allowance:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
<i>Real estate</i>	664.731.842	347.855.539	<i>Real estate</i>
Perdagangan, restoran, dan hotel	240.812.559	328.804.972	<i>Trading, restaurant and hotel</i>
Industri	121.490.813	58.799.412	<i>Industry</i>
Konstruksi	117.355.295	57.310.883	<i>Construction</i>
Jasa-jasa sosial/masyarakat	35.037.672	39.186.518	<i>Social/community services</i>
Lembaga Pembiayaan	3.079.485	8.991.000	<i>Financing</i>
Lain-lain	419.454.946	78.751.491	<i>Others</i>
	1.601.962.612	919.699.815	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(362.634.000)	(165.192.941)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1.239.328.612	754.506.874	Total

Rasio pinjaman bermasalah (*Non-Performing Loan - NPL*) kotor Bank terhadap total pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 3,99% dan 4,23%. Rasio NPL neto Bank terhadap total pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 3,24% dan 3,42%.

The ratio of non-performing loan (*NPL*)-gross of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 was 3.99% and 4.23% to total loans, respectively. Ratio *NPL*-net to total loans of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 was 3.24% and 3.42%, respectively.

h. Pinjaman yang direstrukturisasi

h. Restructured loans

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Penjadwalan kembali angsuran dan perpanjangan jangka waktu pinjaman	2.868.304.020	3.102.181.766	<i>Rescheduling of installments and the extension of credit period</i>
Perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga pinjaman, penggabungan fasilitas penambahan plafon	-	1.378.110.809	<i>Extension of credit period, reduction of interest rate, combined facility, additions of plafond</i>
Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi	2.868.304.020	4.480.292.575	<i>Total restructured loans</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(447.527.201)	(428.127.277)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	2.420.776.819	4.052.165.298	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES (continued)

h. Pinjaman yang direstrukturisasi (lanjutan)

h. Restructured loans (continued)

Berikut adalah jumlah pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Below are the balance of restructured loans based on collectability as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Lancar	1.276.007.551	2.651.901.635	Current
Dalam Perhatian Khusus	930.550.887	1.221.471.066	Special Mention
Kurang Lancar	33.788.024	73.415.364	Substandard
Diragukan	13.919.566	77.449.429	Doubtful
Macet	614.037.992	456.055.081	Loss
Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi	2.868.304.020	4.480.292.575	Total restructured loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(447.527.201)	(428.127.277)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	2.420.776.819	4.052.165.298	Total

Berikut adalah jumlah pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan jenis pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Below are the balance of restructured loans based on type as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pinjaman tetap	1.820.536.969	2.790.047.805	Fixed loans
Pinjaman tetap dengan angsuran	849.748.361	1.383.190.366	Fixed loans with installments
Pinjaman rekening koran	146.129.251	232.214.253	Overdraft loans
Pinjaman konsumen	32.995.695	52.794.277	Consumer loans
Pinjaman serba guna	18.893.744	22.045.874	Other loans
Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi	2.868.304.020	4.480.292.575	Total restructured loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(447.527.201)	(428.127.277)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah	2.420.776.819	4.052.165.298	Total

Sehubungan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit sebagai dampak dari COVID-19, regulator mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang kemudian diperbaharui dengan POJK No.48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan diperbaharui dengan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021. Jumlah pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.416.009.064 dan Rp3.763.830.225.

In relation to loan restructuring and relaxation due to COVID-19 impact, the regulator issued POJK No.11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 regarding National Economy Stimulus as the COVID-19 Outbreak Impact Countercyclical Policy that amended to POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 1, 2020 and reamend under POJK No.17/POJK.03/2021 dated on September 10, 2021. The amount of loan that have been restructured as a result of the COVID-19 pandemic as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp1,416,009,064 and Rp3,763,830,225, respectively.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES (continued)

h. Pinjaman yang direstrukturisasi (lanjutan)

h. Restructured loans (continued)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, penurunan suku bunga, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, reduction of interest rates, novation and others.

i. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

i. The changes in allowance for impairment losses

	31 Desember/ December 31, 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	113.248.446	297.426.209	127.443.596	538.118.251	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	101.250.110	(100.340.521)	(909.589)	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(5.550.699)	5.550.699	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(1.669.222)	(34.430.698)	36.099.920	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	207.278.635	168.205.689	162.633.927	538.118.251	Beginning balance after stage transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(107.119.134)	139.909.436	185.691.182	218.481.484	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	41.176.937	61.568.430	9.266.982	112.012.349	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(28.530.381)	(47.478.767)	(9.070.523)	(85.079.671)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	(208.660.211)	(208.660.211)	Written-off financial assets
Total pembentukan/(pembalikan) tahun	(94.472.578)	153.999.099	(22.772.570)	36.753.951	Net change in exposure
Saldo akhir tahun	112.806.057	322.204.788	139.861.357	574.872.202	Balance end of year

	31 Desember/ December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah/ Sharia		Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	103.598.821	79.800.317	468.103.610	50.771.005	702.273.753	Balance beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	20.994.941	(17.783.674)	(3.211.267)	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(19.788.628)	20.001.621	(212.993)	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(3.580.076)	(714.839)	4.294.915	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	101.225.058	81.303.425	468.974.265	50.771.005	702.273.753	Beginning balance after stage transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(22.860.111)	210.052.392	(9.783.183)	-	177.409.098	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	43.465.945	14.442.163	12.597.767	-	70.505.875	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(8.582.446)	(8.371.771)	(50.176.802)	-	(67.131.019)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	(294.168.451)	-	(294.168.451)	Written-off financial assets
Total pembentukan/(pembalikan) tahun	12.023.388	216.122.783	(341.530.669)	-	(113.384.497)	Net change in exposure
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	-	-	(50.771.005)	(50.771.005)	Loss of control on subsidiary
Saldo akhir tahun	113.248.446	297.426.209	127.443.596	-	538.118.251	Balance end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman.

The management believe that allowance for impairment losses of loans, sharia financing and receivables is adequate to cover impairment losses that might arise from uncollectible loans.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PEMBIAYAAN DAN PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

Pada tanggal 26 Desember 2018, OJK mengeluarkan ketentuan baru yaitu No. 32/POJK.03/2018 tentang "Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum" yang berlaku efektif sejak 1 September 2019 yang sebagian pasalnya diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019. Peraturan tersebut menetapkan batas maksimum penyediaan dana kepada satu debitur dan/atau kelompok debitur yang bukan merupakan pihak berelasi tidak melebihi 25% dari modal inti Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran atas BMPK baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Jaminan atas pinjaman yang diberikan berupa tanah, bangunan, saham, giro, deposito berjangka, mesin, persediaan, dan piutang. Deposito berjangka yang dijadikan jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.719.715.512 dan Rp707.564.744 (Catatan 18) dengan *outstanding* pinjaman masing-masing sebesar Rp6.228.669.396 dan Rp636.277.117. Giro yang dijadikan jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp320.546.300 dan Rp118.115.313 (Catatan 18) dengan *outstanding* pinjaman masing-masing sebesar Rp730.857.049 dan Rp138.038.686. Tabungan yang dijadikan jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp149.150.000 (Catatan 18) dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp409.964.166. *Negotiable Certificate Deposits* (NCD) yang dijadikan jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp116.900.000 (Catatan 18) dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp82.181.253.

12. PENYERTAAN SAHAM

	Kepemilikan/ Ownership	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Diukur pada FVTPL				Measured at FVTPL
PT Bima Multi Finance	34,91%	0 ^{*)}	31.877.279	PT Bima Multi Finance
Entitas asosiasi:				Associate Entity:
PT Bank Victoria Syariah (Lihat Catatan 48)	19,81%	215.930.505	210.227.044	PT Bank Victoria Syariah (See Note 48)
Jumlah		215.930.505	242.104.323	Total

^{*)} nilai wajar saham PT Bima Multi Finance adalah sebesar Rp1 (dalam nilai penuh)

^{*)} fair value of shares in PT Bima Multi Finance are Rp1 (in full amount)

11. LOANS, SHARIA FINANCING AND RECEIVABLES (continued)

On December 26, 2018, OJK issued new regulation No. 32/POJK.03/2018 regarding "Legal Lending Limit and Large Exposure for Commercial Bank" which effective since September 1, 2019, which amended partially by POJK No. 38/POJK.03/2019 dated December 19, 2019. This regulation requires the maximum lending limit to one and/or group of nonrelated party debtor which not exceed to 25% of the Bank's core capital. As of December 31, 2023 and 2022, there were no breach and no violation of the LLL requirements both to related parties and third parties.

Collaterals for loans are in form of as land, building, shares, demand deposits, time deposits, machinery, inventories, and receivables. Time deposits that are pledged as cash collateral for loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,719,715,512 and Rp707,564,744 (Note 18) with loan outstanding of Rp6,228,669,396 and Rp636,277,117, respectively. Demand deposits that are pledged as cash collateral for loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp320,546,300 and Rp118,115,313 (Note 18) with loan outstanding of Rp730,857,049 and Rp138,038,686, respectively. Saving deposits that are pledged as cash collateral for loans as of December 31, 2023 amounted to Rp149,150,000 (Note 18) with loan outstanding of Rp409,964,166. *Negotiable Certificate Deposits* (NCD) that are pledged as cash collateral for loans as of December 31, 2023 amounted to Rp116,900,000 (Note 18) with loan outstanding of Rp82,181,253.

12. INVESTMENTS IN SHARES

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 15 Desember 2023, Bank melakukan transaksi penjualan atas saham yang dimiliki pada PT Bima Multi Finance kepada PT Sumber Daya Sakti dengan harga jual sebesar Rp80.297. Nilai jual ditentukan diatas hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Tri, Santi & Rekan tertanggal 8 Desember 2023. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, transaksi pengalihan saham masih dalam proses pelaporan dan pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh PT Bima Multi Finance. Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah mencatat kerugian penurunan nilai wajar atas penyertaan saham PT Bima Multi Finance sebesar Rp31.877.279, sehingga nilai tercatat penyertaan saham di PT Bima Multi Finance adalah Rp1 (dalam nilai penuh) per 31 Desember 2023.

Dalam rangka memenuhi modal inti sebesar Rp1.000.000.000 (satu triliun rupiah) di PT Bank Victoria Syariah, Bank melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Victoria Syariah sebesar Rp138.000.000 yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-137/PB.33/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT Bima Multi Finance tertanggal 12 November 2018 dan Akta Notaris No. 19 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, SH., Notaris di Jakarta, Bank dan beberapa kreditur lainnya telah menyetujui konversi pinjaman jangka panjang dan MTN PT Bima Multi Finance menjadi saham dengan nilai konversi Rp500 per lembar saham (nilai Rupiah penuh). Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0151322 tanggal 15 Maret 2019. Melalui proses konversi ini, Bank memiliki persentase kepemilikan sebesar 34,91% di PT Bima Multi Finance dan mencatatnya sebagai penyertaan saham sementara sebesar Rp168.907.325 (bruto). Setelah mencatat penyertaan saham sementara, Bank tidak lagi mengakui pinjaman yang diberikan dan MTN pada PT Bima Multi Finance.

12. INVESTMENTS IN SHARES (continued)

On December 15, 2023, the Bank sold its shares ownership in PT Bima Multi Finance to PT Sumber Daya Sakti with selling price of Rp80.297. The selling value is above the result of valuation performed by KJPP Tri, Santi & Partners dated December 8, 2023. As of the date of this financial statements, the share transfer transaction is still in the process of registering and recording in Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. As of December 31, 2023, the Bank has recorded a loss from decrease in fair value on shares ownership in PT Bima Multi Finance amounting to Rp31,877,279, therefore the balance of investment in shares in PT Bima Multi Finance is Rp1 (in full amount) as of December 31, 2023.

In order to fulfill the minimum core capital requirement amounting to Rp1,000,000,000 (one trillion Rupiah) for PT Bank Victoria Syariah, Bank has injected an additional investment in PT Bank Victoria Syariah shares amounting to Rp138,000,000 which has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-137/PB.33/2022 dated December 27, 2022.

Based on the Minutes of Extraordinary Shareholders Meeting of PT Bima Multi Finance dated November 12, 2018 and Notarial Deed No. 19 dated March 12, 2019 of Drs. Wijanto Suwongso, S.H., a Notary in Jakarta, Bank and the other creditors have agreed on the conversion from long term loan and MTN of PT Bima Multi Finance into shares with conversion rate of Rp500 per shares (Rupiah full amount). This changes has been accepted and recorded in database of Legal Entities Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0151322 dated March 15, 2019. From this conversion process, Bank has 34.91% percentage of ownership in PT Bima Multi Finance and recorded as temporary investment in shares amounted to Rp168,907,325 (gross). After recording a temporary investment in shares, the Bank no longer recognise the loans and MTN in PT Bima Multi Finance.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Bank wajib untuk melakukan divestasi penyertaan saham sementara apabila penyertaan saham sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau PT Bima Multi Finance telah mencatatkan saldo laba positif pada ekuitasnya. Hal ini sesuai dengan intensi dari Bank untuk menjual penyertaan saham sementara pada PT Bima Multi Finance apabila telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Bank juga tidak memiliki pengaruh signifikan pada PT Bima Multi Finance dibuktikan dengan:

- Tidak terdapat wakil dari Bank yang menjabat sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di PT Bima Multi Finance;
- Bank tidak berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain pada PT Bima Multi Finance;
- Tidak adanya transaksi material antara Bank dengan PT Bima Multi Finance;
- Tidak terdapat pertukaran personalia manajerial antara Bank dengan PT Bima Multi Finance; dan
- Bank tidak terlibat dalam penyediaan teknis informasi pokok untuk PT Bima Multi Finance.

Lihat Catatan 46 untuk pengukuran nilai wajar penyertaan saham sementara pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Promosi	17.034.405	13.650.866
Pengembangan teknologi	3.152.376	3.225.434
Sewa dibayar dimuka	877.362	61.337
Lain-lain	4.400.881	2.777.040
Jumlah	25.465.024	19.714.677

Lain-lain sebagian besar terdiri dari premi asuransi dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka personalia dan biaya jasa hukum.

12. INVESTMENTS IN SHARES (continued)

Banks are obliged to divest temporary investment in shares if the temporary investment in shares have exceeded a maximum period of 5 (five) years or PT Bima Multi Finance has recorded positive retained earnings in their equity. This is in accordance with the Bank's intention to sell the temporary investment in PT Bima Multi Finance if it has meets the specified criteria.

Bank also does not have a significant influence on PT Bima Multi Finance as evidenced by:

- There is no representative from the Bank who serves as the Board of Directors and the Board of the Commissioners or equivalent organs in PT Bima Multi Finance;
- The Bank does not participate in the policy-making process, including participation in decision-making about dividends or other distributions in PT Bima Multi Finance;
- There is no material transaction between the Bank and PT Bima Multi Finance;
- There is no managerial personnel exchange between the Bank and PT Bima Multi Finance; and
- The Bank is not involved in providing principal technical information for PT Bima Multi Finance.

Refer to Note 46 for fair value measurement of temporary investment in shares as of December 31, 2023 and 2022.

13. PREPAID EXPENSES

Promosi	Promotion
Technology development	Technology development
Prepaid rent	Prepaid rent
Others	Others
Total	Total

Others mainly consists of prepaid insurances, prepaid salaries expenses and legal fees.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA

Aset tetap terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Kepemilikan langsung	376.477.361	435.038.435
Aset hak-guna	46.749.843	35.814.592
Jumlah	423.227.204	470.853.027

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS

Fixed assets consist of the following:

Direct ownership
Right-of-use assets

Total

Aset tetap kepemilikan langsung

Direct ownership fixed assets

	31 Desember/December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Kapitalisasi/ Capitalisation	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
Tanah	371.644.982	-	(44.913.045)	350.580	(10.944.771)	316.137.746	Land
Bangunan	59.090.423	1.613.152	(6.366.089)	149.000	(3.484.833)	51.001.653	Buildings
Kendaraan bermotor	6.030.655	2.099.300	(4.800)	-	-	8.125.155	Vehicles
Mesin-mesin dan peralatan	30.603.912	12.079.980	(274.690)	-	-	42.409.202	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	6.317.231	398.594	(68.075)	-	-	6.647.750	Office furniture and equipment
Aset tetap dalam proses pembangunan	21.086.752	4.774	(1.450.000)	-	(350.580)	19.290.946	Assets under constructions
Jumlah biaya perolehan	494.773.955	16.195.800	(53.076.699)	499.580	(14.780.184)	443.612.452	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
Bangunan	24.792.291	6.296.274	(2.246.808)	-	(1.161.033)	27.680.724	Buildings
Kendaraan bermotor	5.642.107	290.984	(4.800)	-	-	5.928.291	Vehicles
Mesin-mesin dan peralatan	23.339.109	4.351.117	(274.514)	-	-	27.415.712	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	5.962.013	216.426	(68.075)	-	-	6.110.364	Office furniture and equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	59.735.520	11.154.801	(2.594.197)	-	(1.161.033)	67.135.091	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	435.038.435					376.477.361	Net book value
	31 Desember/December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions*)	Kapitalisasi/ Capitalisation	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
Tanah	412.385.631	-	(14.574.092)	-	(26.166.557)	371.644.982	Land
Bangunan	73.103.906	-	(3.455.173)	-	(10.558.310)	59.090.423	Buildings
Kendaraan bermotor	8.426.186	-	(2.395.531)	-	-	6.030.655	Vehicles
Mesin-mesin dan peralatan	28.408.466	7.236.404	(5.040.958)	-	-	30.603.912	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	7.576.000	285.464	(1.544.233)	-	-	6.317.231	Office furniture and equipment
Aset tetap dalam proses pembangunan	21.081.980	4.774	(2)	-	-	21.086.752	Assets under constructions
Jumlah biaya perolehan	550.982.169	7.526.642	(27.009.989)	-	(36.724.867)	494.773.955	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
Bangunan	19.280.356	9.609.703	(670.046)	-	(3.427.722)	24.792.291	Buildings
Kendaraan bermotor	7.051.855	970.946	(2.380.694)	-	-	5.642.107	Vehicles
Mesin-mesin dan peralatan	25.777.066	2.498.941	(4.936.898)	-	-	23.339.109	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	7.191.454	250.144	(1.479.585)	-	-	5.962.013	Office furniture and equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	59.300.731	13.329.734	(9.467.223)	-	(3.427.722)	59.735.520	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	491.681.438					435.038.435	Net book value

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Aset tetap kepemilikan langsung (lanjutan)

Direct ownership fixed assets (continued)

Rincian laba/(rugi) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of gain/(loss) on sale of fixed assets are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Hasil penjualan aset tetap	45.395.525	17.394.945	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku	(49.032.326)	(17.177.219)	Book value
Laba/(rugi) penjualan aset tetap (Catatan 36)	(3.636.801)	217.726	Gain/(loss) on sale of fixed assets (Note 36)

Laba/(rugi) penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari akun "Beban non-operasional - bersih" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif (Catatan 36).

Gain/(loss) on sale of fixed assets is presented as part of "Non-operating expense - net" in the statement profit or loss and other comprehensive income (Note 36).

Aset tetap dalam proses pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.290.946 dan Rp21.081.980 merupakan tanah dan bangunan yang dibeli dan masih dalam tahap perizinan dan perpanjangan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset tetap dalam proses pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 90%. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

Assets under construction as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp19,290,946 and Rp21,081,980, respectively, related to land and buildings that were bought but still under licensing phase and extension of Rights to Build (SHGB). The estimated percentage of completion of Construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 is 90%. Those constructions are estimated to be completed in 2024.

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo dalam berbagai tahun sampai tahun 2046. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Bank own several fields of land in Jakarta, Surabaya, and Denpasar with Building Usage Rights ("HGB") for 20 (twenty) up to 30 (thirty) years which will expire in various years up to 2046. The management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all of the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Victoria Insurance (pihak berelasi), PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dan PT Asuransi Takaful Umum dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp160.234.700 dan Rp177.223.197. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Fixed assets, except land, are insured against losses by fire and theft risks to PT Victoria Insurance (related party), PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dan PT Asuransi Takaful Umum with total insurance coverage as of December 31, 2023 and 2022 amounting Rp160,234,700 and Rp177,223,197, respectively. The Bank's management believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets insured.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Aset tetap kepemilikan langsung (lanjutan)

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan 31 Desember 2023 dan 2022 digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp50.576.817 dan Rp44.227.241.

Manajemen Bank telah melakukan pengkajian kembali atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berikut adalah perkiraan jumlah nilai tercatat aset tetap jika dicatat dengan metode biaya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Tanah	275.568.597	331.075.833	Land
Bangunan	7.761.128	18.738.330	Building
Kendaraan Bermotor	2.196.864	388.548	Vehicle
Mesin dan Peralatan	14.993.490	7.264.803	Machinery and equipment
Perlengkapan dan perabotan kantor	537.386	355.218	Office furniture and equipment
Aset dalam penyelesaian	19.636.752	21.086.752	Assets under constructions
	320.694.217	378.909.484	

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Direct ownership fixed assets (continued)

All of the fixed assets as of the reporting date December 31, 2023 and 2022 are used to support the Bank's operation activities. As of December 31, 2023 and 2022, the total acquisition cost of fixed assets that have been fully depreciated but still in use amounted Rp50,576,817 and Rp44,227,241, respectively.

The Bank's Management has re-assessed the estimation of useful lives, depreciation method and residual value of fixed assets on December 31, 2023 and 2022.

There are no fixed assets discontinued from active use or classified as assets held for sale.

Below is the estimated net book value of fixed asset if recorded using cost method as of December 31, 2023 and 2022:

Aset hak-guna

Aset hak-guna pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Right-of-use assets

Rights-of-use assets as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan	49.959.422	21.754.777	(10.240.056)	-	61.474.143	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	14.144.830	10.819.526	(10.240.056)	-	14.724.300	Buildings
Nilai buku bersih	35.814.592				46.749.843	Net book value

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Aset hak-guna (lanjutan)

Right-of-use assets (continued)

Aset hak-guna pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Rights-of-use assets as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	31 Desember/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals*)	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset hak-guna						
Bangunan	48.499.676	32.946.006	(31.486.260)	-	49.959.422	Right-of-use assets Buildings
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	32.061.766	9.379.512	(27.296.448)	-	14.144.830	Accumulated Depreciation Buildings
Nilai buku bersih	16.437.910				35.814.592	Net book value

*) Termasuk dalam pengurangan adalah dampak kehilangan pengendalian atas entitas anak

Include in deductions is the impact of loss of control (* on subsidiary

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penyusutan yang tercatat pada Bank adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, depreciation expense recorded by the Bank as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Penyusutan aset tetap	11.154.801	13.329.734	Depreciation of fixed asset
Penyusutan sewa guna usaha	10.819.526	9.379.512	Depreciation of right-of-use assets
Jumlah	21.974.327	22.709.246	Total

Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah terkait sewa adalah sebagai berikut:

The balance sheet shows the following amounts relating to leases:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Aset hak-guna:			Right-of-use assets:
- Bangunan	46.749.843	35.814.592	Buildings -
	46.749.843	35.814.592	
Liabilitas sewa (Catatan 23)	47.309.526	33.100.288	Lease liabilities (Note 23)
	47.309.526	33.100.288	

Laporan laba rugi menunjukkan jumlah terkait sewa adalah sebagai berikut:

The statement of profit or loss shows the following amounts relating to leases:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Beban penyusutan	10.819.526	9.379.512	Depreciation expense
Beban bunga (Catatan 33)	2.854.679	1.002.883	Interest expense (Note 33)
Jumlah	13.674.205	10.382.395	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Revaluasi aset tetap

Penilaian pada nilai wajar aset tetap yang dimiliki Bank pada 31 Desember 2020 telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Antonius Setiady dan Rekan dengan laporan penilaian tertanggal 26 Februari 2021, yang kemudian diterbitkan kembali dengan laporan penilaian tertanggal 27 Juli 2022 untuk menggantikan penilaian tertanggal 26 Februari 2021 tersebut. Laporan penilaian ditandatangani oleh Andrius Hermawan, MAPPI (Cert), penilai independen yang telah terdaftar pada OJK.

Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar dan Metode Biaya. Data perbandingan untuk menentukan nilai wajar aset diperoleh dari data transaksi jual beli dari aset sebanding dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara aset yang dinilai dengan data perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut berbagai faktor seperti lokasi, luas, bentuk, karakteristik dan kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukannya.

Surplus revaluasi tahun 2020 sebesar Rp56.128.951 telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset tetap" di ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat penambahan atas saldo revaluasi aset tetap sebesar Rp7.083.877 disebabkan oleh pembalikan cadangan pajak yang dibentuk oleh Bank atas surplus revaluasi aset tetap tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo surplus revaluasi aset tetap masing-masing adalah sebesar Rp382.456.152 dan Rp382.456.152.

15. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Agunan yang diambil alih untuk penyelesaian pinjaman yang diberikan dicatat dalam akun Agunan yang Diambil Alih ("AYDA"). Rincian dalam akun ini adalah:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Tanah dan bangunan	802.486.682	1.237.844.890
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(251.870.489)	(306.834.651)
	550.616.193	931.010.239

*Land and building
Less:
Allowance for
impairment losses*

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Fixed asset revaluation

Valuation to determine the fair value of the Bank's fixed assets as of December 31, 2020 was performed by Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Antonius Setiady dan Rekan with valuation report dated February 26, 2021, which was subsequently reissued with valuation report dated July 27, 2022 to replace the valuation report dated February 26, 2021. The valuation report was signed by Andrius Hermawan, MAPPI (Cert), independent appraiser registered in OJK.

Valuation method used is Market Data Approach and Cost Approach Method. Comparative data to determine fair value asset is obtained from data of sale and purchase transactions from comparable assets by adjusting differences between assets valued and comparable data. This comparison is also concerns factors such as location, size, shape, characteristics and function based on its time and intended used.

The revaluation surplus on 2020 of Rp56,128,951 was credited to other comprehensive income and presented as "Gain on revaluation of fixed assets" in equity.

As of December 31, 2021, Bank has additional of revaluation surplus of fixed assets amounted Rp7,083,877 from reversal of tax reserve provided in 2020 for revaluation surplus of fixed assets in 2020.

As of December 31, 2023 and 2022, gain on revaluation of fixed assets amounted to Rp382,456,152 and Rp382,456,152, respectively.

15. FORECLOSED ASSETS

Foreclosed assets in settlement of loans are included in Foreclosed assets ("AYDA") account. The details in the account are as follows:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

15. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", khususnya agunan yang diambil alih, Bank diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih yang dimiliki.

Mutasi nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Saldo awal	1.237.844.890	1.436.697.691
Penambahan selama tahun berjalan	-	193.324.072
Pengurangan selama tahun berjalan	(435.358.208)	(279.521.470)
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(112.655.403)
Saldo akhir	802.486.682	1.237.844.890

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Saldo awal	306.834.651	282.641.086
Penambahan selama tahun berjalan	48.469.233	47.616.890
Pengurangan selama tahun berjalan	(103.433.395)	-
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(23.423.325)
Saldo akhir	251.870.489	306.834.651

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas agunan yang diambil alih.

15. FORECLOSED ASSETS (continued)

Based on Financial Service Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" and particularly on the foreclosed assets, the Bank is required to have an action plan for settlement of its foreclosed assets.

The changes in foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Saldo awal	1.237.844.890	1.436.697.691	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	-	193.324.072	Addition during the year
Pengurangan selama tahun berjalan	(435.358.208)	(279.521.470)	Deduction during the year
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(112.655.403)	Loss of control on subsidiary
Saldo akhir	802.486.682	1.237.844.890	Ending balance

The changes in allowance for impairment losses of foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Saldo awal	306.834.651	282.641.086	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	48.469.233	47.616.890	Addition during the year
Pengurangan selama tahun berjalan	(103.433.395)	-	Deduction during the year
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(23.423.325)	Loss of control on subsidiary
Saldo akhir	251.870.489	306.834.651	Ending balance

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from foreclosed assets.

16. ASET TAK BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2023					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Kapitalisasi/ Capitalisation	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan	16.530.098	7.289.250	-	-	-	23.819.348	Acquisition Cost
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(13.998.914)	(1.627.621)	-	-	-	(15.626.535)	Less: Accumulated amortisation
Nilai buku	2.531.184					8.192.813	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2022					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions*)	Kapitalisasi/ Capitalisation	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan	22.680.126	1.879.808	(8.029.836)	-	-	16.530.098	Acquisition Cost
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(19.485.950)	(1.538.595)	7.025.631	-	-	(13.998.914)	Less: Accumulated amortisation
Nilai buku	3.194.176					2.531.184	Net book value

*) Termasuk dalam pengurangan adalah dampak kehilangan pengendalian atas entitas anak

Include in deductions is the impact of loss of control (* on subsidiary

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa lisensi aplikasi yang dibeli oleh Bank.

Amortisasi yang dicatat oleh Bank masing-masing sebesar Rp1.627.621 dan Rp1.538.595 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 33).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Intangible assets held by the Bank is application license purchased by the Bank.

Amortisation recorded by the Bank amounted to Rp1,627,621 and Rp1,538,595 the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 33).

Based on the management assessment, there are no events or changes in circumstances indicating an impairment of intangible assets as of December 31, 2023 and 2022.

17. ASET LAIN-LAIN

17. OTHER ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Uang muka pada pihak ketiga	43.213.258	26.570.414	Advance payment to third parties
Properti terbengkalai	33.794.570	36.158.934	Abandoned property
Uang jaminan	7.941.619	6.359.307	Security deposits
Tagihan pihak ketiga	4.853.701	13.893.797	Receivables from third parties
Lain-lain	14.016.665	19.296.564	Others
	103.819.813	102.279.016	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.356.770)	(14.323.476)	Allowance for impairment losses
Jumlah	91.463.043	87.955.540	Total

Uang jaminan merupakan uang yang disetor sebagai jaminan untuk sewa gedung kantor.

Lain-lain terutama terdiri dari tagihan transaksi valuta asing, tagihan biaya administrasi dan persediaan barang promosi.

Seluruh aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah transaksi dengan pihak ketiga.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Saldo awal	14.323.476	13.017.686	Beginning balance
Pembalikan selama tahun berjalan	(1.966.706)	-	Reversal during the year
Penambahan selama tahun berjalan	-	1.305.790	Addition during the year
Saldo akhir	12.356.770	14.323.476	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset lain-lain.

Security deposits represent deposit pledged as guarantee for building rental.

Others mainly consists of foreign exchange transaction, administrative expense transaction and promotion inventories.

All other assets as of December 31, 2023 and 2022 are transactions with third parties.

The changes in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from other assets.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH

Semua simpanan nasabah dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing, terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Rupiah		
Negotiable Certificate Deposits	440.000.000	220.000.000
Dikurangi:		
Diskonto	(42.800.790)	(7.978.260)
Beban emisi yang belum diamortisasi	(2.890.637)	(1.180.843)
Deposito berjangka	16.044.264.144	13.158.803.446
Tabungan	2.881.781.337	3.148.224.256
Giro	2.417.884.361	2.318.053.678
Sub jumlah	21.738.238.415	18.835.922.277
Mata uang asing		
Deposito berjangka	624.320.546	470.087.691
Giro	66.621.531	65.827.669
Sub jumlah	690.942.077	535.915.360
Jumlah	22.429.180.492	19.371.837.637

Simpanan nasabah dalam mata uang asing adalah Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Euro Eropa, dan Yen Jepang.

a. Giro

i. Berdasarkan pihak lawan

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Pihak berelasi	652.841.415	246.769.560
Pihak ketiga	1.831.664.477	2.137.111.787
Jumlah	2.484.505.892	2.383.881.347

ii. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Rupiah	2.417.884.361	2.318.053.678
Dolar Amerika	60.590.713	60.167.684
Yen Jepang	2.576.994	2.391.190
Dolar Singapura	1.902.282	398.745
Euro Eropa	1.551.542	2.870.050
Jumlah	2.484.505.892	2.383.881.347

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

All deposits from customers in Rupiah and foreign currency, consist of:

Rupiah
Negotiable Certificate Deposit
Less:
Discount
Unamortized issuance cost
Time deposits
Savings deposits
Demand deposits
Sub total
Foreign currency
Time deposits
Demand deposits
Sub total
Total

All deposits from customers in foreign currency are denominated in United States Dollar, Singapore Dollar, European Euro, and Japanese Yen.

a. Demand Deposits

i. By counterparties

Related parties
Third parties

ii. By currency

Rupiah
United States Dollar
Japanese Yen
Singapore Dollar
European Euro

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Giro (lanjutan)

Giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp320.546.300 dan Rp118.115.313 (Catatan 11).

a. Demand Deposits (continued)

Demand deposits amounting to Rp320,546,300 and Rp118,115,313 pledged as collateral or blocked as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 11).

b. Tabungan

Berdasarkan pihak lawan

b. Savings deposits

By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Pihak ketiga	2.853.784.424	3.093.821.476	Third parties
Pihak berelasi	27.996.913	54.402.780	Related parties
Jumlah	2.881.781.337	3.148.224.256	Total

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp149.150.000 dan RpNihil (Catatan 11).

Saving deposits amounting to Rp149,000,000 and RpNil pledged as collateral or blocked as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 11).

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

(i) Berdasarkan pihak lawan

(i) By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak ketiga	16.049.699.818	13.544.452.999	Third parties
Pihak berelasi	618.884.872	84.438.138	Related parties
Jumlah	16.668.584.690	13.628.891.137	Total

(ii) Berdasarkan mata uang

(ii) By currency

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah	16.044.264.144	13.158.803.446	Rupiah
Dolar Amerika	624.320.546	470.087.691	United States Dollar
Jumlah	16.668.584.690	13.628.891.137	Total

(iii) Berdasarkan periode

(iii) By period

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
1 bulan	7.144.058.086	6.310.057.619	1 month
3 bulan	4.512.705.040	3.237.056.658	3 months
6 bulan	3.608.059.929	2.885.771.283	6 months
12 bulan	1.403.761.635	1.196.005.577	12 months
Jumlah	16.668.584.690	13.628.891.137	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

(iv) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

(iv) By remaining period until maturity

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 bulan	8.757.247.243	7.383.867.327	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	4.371.648.337	3.515.512.381	1 up to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	2.680.083.163	1.793.418.376	3 up to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	859.605.947	936.093.053	6 up to 12 months
Jumlah	16.668.584.690	13.628.891.137	Total

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.719.715.512 dan Rp707.564.744 (Catatan 11).

Time deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,719,715,512 and Rp707,564,744, respectively (Note 11).

Informasi mengenai tingkat suku bunga diungkapkan pada Catatan 45.

Informations respect to interest rate are disclosed in Note 45.

d. Negotiable Certificate Deposits

d. Negotiable Certificate Deposits

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	329.600.000	218.200.000	<i>Negotiable Certificate Deposit</i>
Dikurangi :			Less:
Diskonto	(31.372.904)	(7.904.752)	Discount
Beban emisi yang belum diamortisasi	(2.165.350)	(1.171.182)	Unamortized issuance cost
Sub jumlah	296.061.746	209.124.066	Sub total
Pihak berelasi			Related parties
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	110.400.000	1.800.000	<i>Negotiable Certificate Deposit</i>
Dikurangi :			Less:
Diskonto	(11.427.886)	(73.508)	Discount
Beban emisi yang belum diamortisasi	(725.287)	(9.661)	Unamortized issuance cost
Sub jumlah	98.246.827	1.716.831	Sub total
Jumlah	394.308.573	210.840.897	Total

Bank melakukan penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) pada tanggal 5 September 2023 sebesar Rp440.000.000 yang terbagi dua seri, yaitu seri A dengan nilai sebesar Rp50.000.000 dengan suku bunga 6,5% dan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2024 dan seri B dengan nilai sebesar Rp390.000.000 dengan suku bunga 7% dan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2025.

The bank issues a *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) on September 5, 2023, amounting to Rp440,000,000 which is divided into two series, namely series A with a value of Rp50,000,000 with an interest rate of 6.5% and due on September 5, 2024, and series B with a value of Rp390,000,000 with an interest rate of 7% and due on September 5, 2025.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

d. Negotiable Certificate Deposits (lanjutan)

Bank melakukan penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) pada tanggal 1 September 2022 sebesar Rp220.000.000 yang terbagi dua seri, yaitu seri A dengan nilai sebesar Rp60.000.000 dengan suku bunga 6% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2023 dan seri B dengan nilai sebesar Rp160.000.000 dengan suku bunga 6,5% dan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023.

Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp116.900.000 dan RpNihil (Catatan 11).

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Negotiable Certificate Deposits (continued)

Bank has issued a *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) on September 1, 2022 amounting to Rp220,000,000 which was divided into two series, namely series A with an interest value of Rp60,000,000 with an interest rate of 6% and due on June 1, 2023 and series B with a value of amounting to Rp160,000,000 with an interest rate of 6.5% and due on August 30, 2023.

Negotiable Certificate of Deposit (NCD) which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp116,900,000 and RpNil, respectively (Note 11).

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Semua simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan terdiri dari:

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

All deposits from other banks are denominated in Rupiah and consist of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
<i>Call money</i>	792.000.000	1.030.000.000	<i>Call money</i>
Giro	219.401.707	224.055.952	<i>Demand deposits</i>
Deposito berjangka	49.531.350	46.454.518	<i>Time deposits</i>
Tabungan	41.963.642	31.442.150	<i>Savings deposits</i>
<i>Deposito on call</i>	1.906.660	3.000.000	<i>Deposits on call</i>
Jumlah	1.104.803.359	1.334.952.620	Total

a. Call money

(i) Berdasarkan pihak lawan

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	220.000.000	285.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	200.000.000	95.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	150.000.000	100.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	100.000.000	-
PT Bank Ina Perdana Tbk	100.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	22.000.000	-
PT Bank Panin Tbk	-	200.000.000
PT Bank Jtrust Tbk	-	100.000.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	-	100.000.000
PT Bank Sinarmas	-	50.000.000
PT Bank Seabank Indonesia	-	50.000.000
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	50.000.000
Jumlah	792.000.000	1.030.000.000

a. Call money

(i) By counterparties

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Third parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah		
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara		
PT Bank Ina Perdana Tbk		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		
PT Bank Panin Tbk		
PT Bank Jtrust Tbk		
PT Bank IBK Indonesia Tbk		
PT Bank Sinarmas		
PT Bank Seabank Indonesia		
PT Bank Capital Indonesia Tbk		
Total		

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

a. Call money (lanjutan)

a. Call money (continued)

(ii) Berdasarkan periode

(ii) By period

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 bulan	792.000.000	1.030.000.000	Less than 1 month
Jumlah	792.000.000	1.030.000.000	Total

b. Deposito berjangka

b. Time deposits

(i) Berdasarkan pihak lawan

(i) By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak ketiga	49.531.350	46.454.518	Third parties

(ii) Berdasarkan periode

(ii) By period

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
1 bulan	22.031.350	24.454.518	1 month
3 bulan	24.500.000	19.000.000	3 months
6 bulan	-	-	6 months
12 bulan	3.000.000	3.000.000	12 months
Jumlah	49.531.350	46.454.518	Total

(iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

(iii) By remaining period until maturity

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 bulan	22.031.350	24.454.518	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	24.500.000	21.000.000	1 up to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	2.000.000	-	3 up to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	1.000.000	1.000.000	6 up to 12 months
Jumlah	49.531.350	46.454.518	Total

c. Giro

c. Demand deposits

Berdasarkan pihak lawan

By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak berelasi	478.732	167.870	Related party
Pihak ketiga	218.922.975	223.888.082	Third party
Jumlah	219.401.707	224.055.952	Total

Informasi mengenai tingkat suku bunga diungkapkan pada Catatan 45.

Informations in respect to interest rates are disclosed in Note 45.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

d. Tabungan

d. Saving deposits

Berdasarkan pihak lawan

By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak ketiga	41.963.642	31.442.150	Third parties

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo tabungan dari pihak berelasi.

As of December 31, 2023 and 2022 there are no saving deposits from related parties.

Informasi mengenai tingkat suku bunga diungkapkan pada Catatan 45.

Informations in respect to interest rates are disclosed in Note 45.

20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASED AGREEMENTS

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The securities sold under repurchased agreements as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember / December 31, 2023						
Pihak lawan/ Counterparty	Jenis efek/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Notional amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Tanggal dimulai/ Commencement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai tercatat/ Carrying amount
Bank Mega	FR0070	250.000.000	6,35%	20 Desember/ December 2023	3 Januari/ January 2024	251.618.623
Bank Mega	FR0077	250.000.000	6,35%	20 Desember/ December 2023	3 Januari/ January 2024	248.598.483
Ina Perdana	FR0081	100.000.000	6,25%	29 Desember/ December 2023	3 Januari/ January 2024	95.366.417
Ina Perdana	FR0081	<u>50.000.000</u>	6,25%	29 Desember/ December 2023	3 Januari/ January 2024	<u>47.683.207</u>
		<u>650.000.000</u>				<u>643.266.730</u>
31 Desember / December 31, 2022						
Pihak lawan/ Counterparty	Jenis efek/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Notional amount	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Tanggal dimulai/ Commencement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai tercatat/ Carrying amount
Ina Perdana	FR0082	90.000.000	5,80%	27 Desember/ December 2022	3 Januari/ January 2023	86.066.513
Ina Perdana	FR0059	80.000.000	5,80%	27 Desember/ December 2022	3 Januari/ January 2023	76.506.026
Ina Perdana	FR0084	<u>80.000.000</u>	5,80%	27 Desember/ December 2022	3 Januari/ January 2023	<u>78.292.621</u>
		<u>250.000.000</u>				<u>240.865.160</u>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

21. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	350.000.000	350.000.000	Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A	300.000.000	-	Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 Series A
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	250.000.000	250.000.000	Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase I Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B	200.000.000	-	Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 Series B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	150.000.000	150.000.000	Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020	60.000.000	60.000.000	Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	50.000.000	50.000.000	Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B	-	200.000.000	Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 Series B
Jumlah	1.360.000.000	1.060.000.000	Total
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi	(12.360.472)	(8.096.448)	Less: Unamortised issuance cost
Jumlah - bersih	1.347.639.528	1.051.903.552	Total - net

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I
Tahun 2023

Pada tanggal 10 Maret 2023, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000.

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp300.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp200.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B.

Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023

On March 10, 2023, the Bank issued Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 amounting to Rp500,000,000.

Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 consists of 2 (two) series of Bonds:

- Series A amounted to Rp300,000,000 with fixed rate of 9.25% per annum, tenor 3 (three) years since Emission Date.
- Series B amounted to Rp200,000,000 with fixed rate of 10.25% per annum, tenor 5 (five) years since Emission Date.

Interest of the bond paid every 3 (three) months starting from June 9, 2023 for the first payment whereas the last payment will be at the maturity date of each Bonds, which on March 9, 2026 for Bonds Series A and on March 9, 2028 for Bonds Series B.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 (lanjutan)

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No.RC-1230/PEF-DIR/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahun 2023 periode 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2023, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 menurut Pefindo adalah idA-.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwalianan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 13 Maret 2020 Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.000.000.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 1 April 2027.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 (continued)

Based on the ranking carried out by Pefindo in accordance with Letter No.RC-1230/PEF-DIR/XII/2022 dated December 26, 2022, regarding the Rating Certificate for the third phase of Bank Victoria Continuing Bonds Year 2023, for the period of December 26, 2022, to December 1, 2023, the result of the ranking for the first phase of Bank Victoria Continuing Bonds III for 2023 is idA-.

As of December 31, 2023, the rating of the Bank Victoria Continuing Bonds III Phase I Year 2023 based on Pefindo was idA-.

The above bonds and subordinated bonds are unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

There was no violation to the covenant of bonds and subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020

On March 13, 2020, the Bank issued Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020 with a principal amount up to Rp60,000,000.

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020 has fixed rate of 11.25% per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months starting from July 1, 2020 for the first payment whereas the last payment will be on April 1, 2027, at the maturity date of the Bond.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II dari PT Bank Victoria International Tbk sejak 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020, serta konfirmasi sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-020/PEF-DIR/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan PUB, hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 8 November 2019, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp150.000.000.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 November 2026.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020 (continued)

Based on the results of the rating for long-term debt securities in accordance with PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) letter No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 dated April 4, 2019 regarding a Rating Certificate for Continuous Subordinated Bond II of PT Bank Victoria International Tbk from April 4, 2019 to April 1, 2020, as well as the confirmation according to Pefindo letter No. RTG-020/PEF-DIR/II/2020 dated February 4, 2020 regarding the Rating Certificate for Continuous Subordinated Bonds II Phase III issued through the PUB Continuous Public Offering plan, the rating results of the Subordinated Bonds are idBBB.

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase III Year 2020 based on Pefindo was idBBB.

The subordinated bonds is unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bond issuance is PT Bank Mega Tbk. There was no violation to the covenant of bonds and subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019

On November 8, 2019, the Bank issued Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019 amounting Rp150,000,000.

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019 has fixed rate of 11.25% per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months starting from February 8, 2020 for the first payment whereas the last payment will be on November 8, 2026, at the maturity date of the Bond.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keterangan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") No. RTG-129/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 26 September 2019 berlaku peringkat sebagaimana tercantum pada Sertifikat Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yaitu peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwalianan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 28 September 2019, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp250.000.000.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi yaitu pada tanggal 28 September 2021.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019 (continued)

Based on the letter issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") No. RTG-129/PEF-DIR/IX/2019 dated September 26, 2019 apply rating as stated on Rating Certificate PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 dated April 4, 2019 which was idBBB on Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019.

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase II Year 2019 based on Pefindo was idBBB.

The above bond is unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bond issuance is PT Bank Mega Tbk. There was no violation to the covenant of the subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 and Subordinated Bonds II Phase I Year 2019

On September 28, 2019, the Bank issued Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 and Subordinated Bonds II Phase I Year 2019 amounting to Rp100,000,000 and Rp250,000,000, respectively.

Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 issued with fixed rate of 9.75% per annum, with tenor 2 (two) years since Emission Date.

Interest on the bonds will be paid every 3 (three) months starting from Emission Date. The first payment was on September 28, 2019 whereas the last payment will be on September 28, 2021, at the maturity date of the Bond.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 28 Juni 2026.

Berdasarkan Sertifikat Pemeringkatan Pefindo No. RC-328/PEF-DIR/IV/2019 dan No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019, memutuskan memberikan peringkat idA- terhadap Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 serta memberikan peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwalianamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 5 September 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp350.000.000.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 and Subordinated Bonds II Phase I Year 2019 (continued)

Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase I Year 2019 has fixed rate of 11.75% per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months. The first payment was on September 28, 2019, whereas the last payment will be on June 28, 2026, at the maturity date of the Bond.

Based on the report issued by Pefindo No. RC-328/PEF-DIR/IV/2019 and No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 dated April 4, 2019, the rating of Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 is idA-, and the rating of Subordinated Bonds II Phase I Year 2019 is idBBB.

As of December 31, 2021, the rating of the Bank Victoria Continuing Bonds II Phase I Year 2019 based on Pefindo was idA-.

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Subordinated Bonds II Phase I Year 2019 based on Pefindo was idBBB.

The above bonds and subordinated bonds are unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bonds and subordinated bonds issuance is PT Bank Mega Tbk.

There was no violation to the covenant of the bonds and subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

On September 5, 2018, the Bank issued Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 and Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 amounting to Rp300,000,000 and Rp350,000,000, respectively.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,70% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp200.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal

5 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 5 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 5 Juni 2025.

Berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh Pefindo No. 031/PEWF-DIR/IV/2018 pada 2 April 2018, keterangan terkait pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terdapat pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 369/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas penetapan kembali peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 (berdasarkan pemantauan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2017) yakni idA- dan pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 370/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 yakni idBBB.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 and Subordinated Bonds I Phase II Year 2018

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 consists of 2 (two) series of Bonds:

- Series A amounted to Rp100,000,000 with fixed rate of 9.70% per annum, tenor 3 (three) years since Emission Date.
- Series B amounted to Rp200,000,000 with fixed rate of 10.30% per annum, tenor 5 (five) years since Emission Date.

Interest of the bond paid every 3 (three) months starting from September 5, 2018 for the first payment whereas the last payment will be at the maturity date of each Bonds, which on September 5, 2021 for Bonds Series A and on September 5, 2023 for Bonds Series B.

Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 has fixed rate of 11.00% per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months. The first payment was on September 5, 2018 whereas the last payment will be on June 5, 2025, at the maturity date of the Bonds and Subordinated Bonds.

Based on the letter issued by Pefindo No. 031/PEWF-DIR/IV/2018 dated April 2, 2018, the details related to the rating of Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 and Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 which was issued through Share Registration Public Offering (PUB) were available in the Rating Certificate No. 369/PEF-DIR/IV/2018 dated April 2, 2018 regarding the reassessment of Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 rating, including the assessment of Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 rating which was idA- and in the Rating Certificate No. 370/PEF-DIR/IV/2018 dated April 2, 2018 regarding the reassessment of Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017, including the assessment of Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 which was idBBB.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 11 Juli 2017, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp50.000.000.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,30% sebesar Rp300.000.000 per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus telah jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 and Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Continuing Bonds I Phase II Year 2018 based on Pefindo was idA-.

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase II Year 2018 based Pefindo was idBBB.

The above bonds and subordinated bonds are unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

There was no violation to the covenant of bonds and subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 and Subordinated Bonds I Phase I Year 2017

On July 11, 2017, the Bank issued Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 and Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017 amounting to Rp300,000,000 and Rp50,000,000, respectively.

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 has fixed rate of 10.30% amounted Rp300.000.000 per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months. The first payment was on from October 11, 2017 whereas the last payment matured on July 11, 2022, at the maturity date of the Bond.

Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017 has fixed rate of 11.00% per annum, and the interest will be paid every 3 (three) months. The first payment was on October 11, 2017 whereas the last payment will be on July 11, 2024, at the maturity date of the Bond.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No. 369/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idA- dan Surat No. 370/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2021, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 and Subordinated Bonds I Phase I Year 2017 (continued)

Based on the report issued by Pefindo as stated in its Letter No. 369/PEF-Dir/IV/2018 dated April 2, 2018, the rating of Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 is idA- and Letter No. 370/PEF-Dir/IV/2018 dated April 2, 2018, the rating of Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017 is idBBB.

As of December 31, 2021, the rating of the Bank Victoria Continuing Bonds I Phase I Year 2017 based on Pefindo was idA-.

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the Bank Victoria Subordinated Bonds I Phase I Year 2017 based on Pefindo was idBBB.

The above bonds and subordinated bonds are unsecured by a specific collateral and by third parties and are excluded from the Government Guarantee to Certain Liabilities of Commercial Banks Program.

The Trustee of the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

There was no violation to the covenant of bonds and subordinated bonds trusteeship agreement as of December 31, 2023 and 2022.

22. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Entitas Induk		
Pajak penghasilan badan		
Pasal 25	-	-
Pasal 29	-	16.049.378
	-	16.049.378
Pajak lainnya		
Pasal 4 ayat 2	20.806.149	13.598.722
Pajak Pertambahan Nilai	5.842.973	104.721
Pasal 21	2.591.590	971.083
Pasal 23	18.381	75.642
Pasal 26	51.349	41.927
	29.310.442	14.792.095
Jumlah utang pajak - Entitas Induk	29.310.442	30.841.473

22. TAXATION

a. Taxes payable

Parent Company
Corporate income tax
Article 25
Article 29
Other taxes
Article 4 (2)
Value Added Tax
Article 21
Article 23
Article 26
Total taxes payable - Parent Company

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

a. Utang pajak (lanjutan)

a. Taxes payable (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Entitas Anak			Subsidiary
Pajak lainnya			Other taxes
Pasal 4 ayat 2	-	-	Article 4 (2)
Pasal 21	-	-	Article 21
Pasal 23	-	-	Article 23
	-	-	
Jumlah utang pajak - Entitas Anak	-	-	Total taxes payable - Subsidiary
Konsolidasian			Consolidated
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
Pasal 25	-	-	Article 25
Pasal 29	-	16.049.378	Article 29
	-	16.049.378	
Pajak lainnya			Other taxes
Pasal 4 ayat 2	20.806.149	13.598.722	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai	5.842.973	104.721	Value Added Tax
Pasal 21	2.591.590	971.083	Article 21
Pasal 23	18.381	75.642	Article 23
Pasal 26	51.349	41.927	Article 26
	29.310.442	14.792.095	
Jumlah utang pajak - Konsolidasian	29.310.442	30.841.473	Total taxes payables - Consolidated

b. Beban Pajak Penghasilan

b. Deferred Tax Expense

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

Deferred tax expense consist of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Entitas Induk			Parent Company
Pajak kini	-	16.049.378	Current tax
Pajak tangguhan	27.719.887	113.573.037	Deferred tax
Jumlah Entitas Induk	27.719.887	129.622.415	Total Parent Company
Entitas Anak			Subsidiary
Pajak kini	-	289.074	Current tax
Pajak tangguhan	-	845.885	Deferred tax
Jumlah Entitas Anak	-	1.134.959	Total Subsidiary
Konsolidasi			Consolidation
Pajak kini	-	16.338.452	Current tax
Pajak tangguhan	27.719.887	114.418.922	Deferred tax
Jumlah	27.719.887	130.757.374	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Deferred Tax Expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba dengan (rugi) laba kena pajak yang dihitung oleh Bank adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in the statement of (loss) profit with taxable loss of the Bank is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	129.536.228	356.930.827	<i>Profit before income tax expense per consolidated statement of profit or loss</i>
Bagian laba bersih			<i>Equity in net income of</i>
Entitas Anak	-	3.606.389	<i>Subsidiary</i>
Eliminasi dan penyesuaian	-	(4.741.348)	<i>Elimination and adjustments</i>
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Induk (Bank)	129.536.228	355.795.868	<i>Profit before income tax - Parent Company (Bank)</i>
Beda waktu:			<i>Timing differences:</i>
Imbalan pasca kerja	3.035.528	(1.162.859)	<i>Post-employment benefits</i>
Cadangan bonus, jasa profesional dan promosi	(28.443.185)	7.943.507	<i>Accrue bonuses, professional fees and promotion expenses</i>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(64.356.877)	(72.817.804)	<i>Provision for impairment losses on financial and non-financial assets</i>
Kerugian yang belum direalisasi dari penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(137.029.607)	2.980.457	<i>Unrealised loss - on investment shares measured at fair value through profit or loss</i>
Jumlah beda waktu	(226.794.141)	(63.056.699)	<i>Total timing differences</i>
Beda tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Biaya pemasaran	5.875.975	1.925.057	<i>Marketing expenses</i>
Biaya pajak	5.208.828	-	<i>Tax expenses</i>
Tunjangan karyawan	2.332.300	2.418.187	<i>Employee's allowances</i>
Sumbangan	77.050	42.237	<i>Donation</i>
Pendapatan dari reksadana yang dikenakan pajak final	(10.976.160)	(7.831.141)	<i>Income from mutual funds subject to final tax</i>
Pendapatan operasional lainnya	(6.950.040)	(14.437.989)	<i>Other operating income</i>
Jumlah beda tetap	(4.432.047)	(17.883.649)	<i>Total permanent differences</i>
Taksiran (rugi)/laba fiskal	(101.689.960)	274.855.520	<i>Estimated tax (loss)/profit</i>
Kompensasi rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya:			<i>Tax losses carried forward from prior year:</i>
Rugi fiskal tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi	-	(201.903.800)	<i>Tax losses from prior years that can be compensated</i>
Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi	-	(201.903.800)	<i>Accumulated tax losses carried forward</i>
(Rugi fiskal)/penghasilan kena pajak	(101.689.960)	72.951.720	<i>(Fiscal Loss)/taxable income</i>
Beban pajak penghasilan kini:			<i>Current tax expense</i>
Bank	-	16.049.378	<i>Bank</i>
Entitas anak	-	289.074	<i>Subsidiary</i>
Beban pajak kini	-	16.338.452	<i>Current tax expense</i>
Utang pajak kini:			<i>Income tax payables:</i>
Bank	-	16.049.378	<i>Bank</i>
Entitas anak	-	-	<i>Subsidiary</i>
Utang pajak kini	-	16.049.378	<i>Income tax payables</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Deferred Tax Expense (continued)

Rincian rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The details of fiscal losses are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Tahun 2023	(101.689.960)	-	Year 2023
Tahun 2021	-	(12.984.010)	Year 2021
Tahun 2020	-	(188.919.790)	Year 2020
Total akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi	(101.689.960)	(201.903.800)	Total accumulated tax losses carried forward
Rugi fiskal yang dikompensasi	-	201.903.800	Compensated tax losses
Sisa akumulasi rugi fiskal	(101.689.960)	-	Remaining accumulated tax losses

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi merupakan dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Perseroan.

Taxable income results from reconciliation are the basis in preparing the Company's Annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perhitungan pajak penghasilan dan Manfaat Pajak untuk Bank Victoria dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before tax as shown in the statements of comprehensive income and income tax calculation and the related estimate of the current tax benefit for Bank Victoria and its Subsidiaries are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	129.536.228	356.930.827	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	28.497.970	78.524.782	Tax calculated at applicable tax rates
Dampak pajak penghasilan pada:			Tax effects of:
- Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(975.050)	(3.934.403)	Expenses not deductible - for tax purposes
- Entitas Anak	-	1.134.958	Subsidiary -
Dampak rugi fiskal	-	-	Tax losses
Penyesuaian atas aset pajak tangguhan	196.967	55.032.037	Adjustment for for deferred tax
Beban pajak penghasilan - bersih	27.719.887	130.757.374	Deferred tax expenses - net

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Bank yang disampaikan kepada Otoritas Perpajakan.

Taxable income results from reconciliation in 2023 and 2022 used as basis for preparation of the Bank's Annual Tax Return (SPT) submitted to Tax Authority.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, antara lain mengatur bahwa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif pajak baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan sejak berlakunya peraturan tersebut yaitu 29 Oktober 2021.

c. Pajak tanggungan

22. TAXATION (continued)

b. Deferred Tax Expense (continued)

On October 29, 2021, based on law No. 7 year 2021 harmonization of taxation regulation, among others regulates that income tax rate on corporate taxpayer and permanent establishment's corporate taxable income 22% which will be effective for fiscal year 2022 onwards.

The new tax rates are used as references to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on October 29, 2021.

c. Deferred tax

	31 Desember/ December 31, 2023				
	1 Januari/ January	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ Credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain / (Charged)/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December	
Cadangan bonus, jasa profesional dan promosi	2.669.950	319.400	(746.820)	2.242.530	Accrued bonuses, professional fee and promotion
Cadangan kerugian penurunan nilai	144.943.198	(20.932.380)	-	124.010.818	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca kerja	8.963.403	667.816	-	9.631.219	Post-employment benefits
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar penyertaan saham	30.146.514	(30.146.514)	-	-	Unrealised losses on changes in fair value on investment in shares measures at FVTPL
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada FVOCI	10.884.268	-	(6.136.700)	4.747.568	Unrealised gains/(losses) on changes in fair value of securities measured at FVOCI
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	-	22.371.791	-	22.371.791	Tax loss carry forward
Jumlah aset pajak tanggungan - bersih	197.607.333	(27.719.887)	(6.883.520)	163.003.926	Total deferred tax assets - net

	31 Desember/ December 31, 2022				
	1 Januari/ January	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ Credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain / (Charged)/ Credited to other comprehensive income	Dampak kehilangan pengendalian entitas anak/ Loss on control on subsidiary	31 Desember/ December
Entitas Induk					Parent Company
Cadangan bonus, jasa profesional dan promosi	552.169	1.810.532	307.249	-	Accrued bonuses, professional fee and promotion
Cadangan kerugian penurunan nilai	216.307.793	(71.364.595)	-	-	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca kerja	9.219.232	(255.829)	-	-	Post-employment benefits
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar penyertaan saham	29.490.813	655.701	-	-	Unrealised losses on changes in fair value on investment in shares measures at FVTPL
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada FVOCI	(5.074.568)	-	15.958.836	-	Unrealised gains/(losses) on changes in fair value of securities measured at FVOCI
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	44.418.846	(44.418.846)	-	-	Tax loss carry forward
Aset/(liabilitas) pajak tanggungan Bank - bersih	294.914.285	(113.573.037)	16.266.085	-	Deferred tax asset/(liability) Bank - net
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	7.474.317	-	-	(7.474.317)	Loss on control on Subsidiary
Jumlah aset pajak tanggungan - bersih	302.388.602	(113.573.037)	16.266.085	(7.474.317)	Total deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tanggungan yang timbul dari perbedaan temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that total deferred tax assets arising from temporary differences are probable to be realised in the future years.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan tahun pajak 2019

Pada 27 Juni 2022 Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2019. Pada tanggal 4 Maret 2024, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/206/19/054/24 untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2019 sebesar Rp3.450.623.190
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00002/201/19/054/24 untuk pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp353.807.230
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00002/203/19/054/24 untuk pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp892.274.206
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/19/054/24 untuk pajak penghasilan final pasal 4(2) sebesar Rp352.832.346
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/207/19/054/24 untuk pajak pertambahan nilai sebesar Rp148.925.852.
- 6) Surat Tagihan Pajak No. 00003/107/19/054/24 untuk PPN tahun fiskal 2019 sebesar Rp10.365.107.

Pihak Bank menerima atas hasil pemeriksaan tersebut yang tertuang pada Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas dan telah membayar kekurangan pajak tersebut pada bulan Maret 2024.

22. TAXATION (continued)

d. Tax Assessments

Assessment for fiscal year 2019

On June 27, 2022 Tax Office (“KPP”) issued tax assessment notification letter for the fiscal year 2019. On March 4, 2024, KPP issued the following Tax Assessment Letter:

- 1) Tax Underpayment Assessment Letter No. 00001/206/19/054/24 for corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp3,450,623,190
- 2) Tax Underpayment Assessment Letter No. 00002/201/19/054/24 for the income tax article 21 amounting to Rp353,807,230
- 3) Tax Underpayment Assessment Letter No. 00002/203/19/054/24 for the income tax article 23 amounting to Rp892,274,206
- 4) Tax Underpayment Assessment Letter No. 00001/240/19/054/24 for the final income tax article 4(2) amounting to Rp352,832,346
- 5) Tax Underpayment Assessment Letter No. 00001/207/19/054/24 for the value added tax amounting to Rp148,925,852.
- 6) Tax Collection Notice No. 00003/107/19/054/24 for VAT for fiscal year 2019 amounting to Rp10,365,107.

The Bank accepts the assessments results as stated in the above-mentioned Tax Assessment Letter and paid the assessed taxes in March 2024.

23. AKRUAL DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

23. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES

31 Desember/December 31,

	2023	2022	
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	74.152.843	58.180.650	Interest and profit sharing payable
Liabilitas sewa	47.309.526	33.100.288	Lease liabilities
Beban akrual	19.003.791	18.200.019	Accrued expenses
Kewajiban Transaksi ATM, Internet Banking dan Mobile Banking	14.463.254	12.300.903	ATM Transaction, Internet Banking and Mobile Banking liabilities
Cadangan THR dan bonus	13.104.974	20.706.772	THR and bonus reserves
Hutang kepada supplier	10.521.933	13.845.357	Payable to third parties
Cadangan kerugian Bank Garansi	1.178.357	241.681	Allowance for impairment losses Bank Guarantee
Cadangan personalia dan biaya pendidikan karyawan	1.119.075	2.047.573	Personnel reserve and employee education expenses
Kewajiban derivatif	74.058	1.164.980	Derivatives receivables
Pendapatan diterima di muka	362.721	11.581	Unearned revenues
Lainnya	12.167.006	1.140.776	Others
Jumlah	193.457.538	160.940.580	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

23. AKRUAL DAN LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Beban akrual lainnya meliputi biaya administrasi dan operasional.

Saldo lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terutama terdiri dari hutang kepada pihak ketiga.

Seluruh akrual dan liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah transaksi dengan pihak ketiga.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Liabilitas imbalan pasca kerja	39.837.511	40.196.622

Imbalan kerja jangka panjang

Informasi di bawah ini mengikhtisarkan komponen beban imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dan PT Ricky Leonard Jasatama, menggunakan metode "Projected Unit Credit".

a. Beban/(pendapatan) imbalan pasca kerja

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa kini	5.293.469	4.891.029
Biaya jasa lalu	-	170.968
Biaya jasa lalu (penyesuaian IFRIC)	-	(1.265.016)
Biaya bunga	2.894.157	2.359.788
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-
Jumlah	8.187.626	6.156.769

b. Liabilitas imbalan pasca kerja

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	39.837.511	40.196.622

23. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES (continued)

Accrued expenses consist of administration and operational expenses.

The balance of others as of December 31, 2023 and 2022 mainly consist of liabilities to third parties.

All accruals and other liabilities as of December 31, 2023 and 2022 are transactions with third parties.

24. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Liabilitas imbalan pasca kerja	39.837.511	40.196.622

Long term employee benefit

The following informations summarise the components of post-employment benefits expense recognised in the profit or loss and other comprehensive income and post-employment benefits liability recognised in the statement of financial position on December 31, 2023 and 2022, based on the independent actuarial calculation carried out by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan and PT Ricky Leonard Jasatama, applied the "Projected Unit Credit" method.

a. Post-employment benefits expenses/(income)

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa kini	5.293.469	4.891.029
Biaya jasa lalu	-	170.968
Biaya jasa lalu (penyesuaian IFRIC)	-	(1.265.016)
Biaya bunga	2.894.157	2.359.788
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-
Jumlah	8.187.626	6.156.769

b. Post-employment benefits liability

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	39.837.511	40.196.622

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Long term employee benefit (continued)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits liability (continued)

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligation are as follow:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pada awal tahun	40.196.622	43.884.161	At the beginning of the year
Biaya jasa kini	5.293.469	4.891.029	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	(1.094.048)	Past service cost
Imbalan yang dibayar	(5.152.098)	(7.319.628)	Benefits paid
Beban bunga	2.894.157	2.359.788	Interest cost
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(3.394.639)	2.466.010	Actuarial loss/(gain)
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	(4.990.690)	Loss of control on subsidiary
Pada akhir tahun	39.837.511	40.196.622	At the end of the year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used to determine the post-employment benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalita	TM IV	TM IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5,00% dari tingkat mortalita/ of mortality rate	5,00% dari tingkat mortalita/ of mortality rate	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5,00% per tahun/ per annum	5,00% per tahun/ per annum	Resignation rate
Tingkat kenaikan gaji	7,32% per tahun/ per annum	7,32% per tahun/ per annum	Salary increase rate
Tingkat suku bunga	6,76% per tahun/ per annum	7,20% per tahun/ per annum	Interest rate

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti, dengan risiko paling signifikan pada tingkat diskonto obligasi dan kenaikan gaji.

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plan, with the most significant risk on bond's discount rates and salary increase.

Tabel di bawah menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan pasca kerja Bank (tidak diaudit):

The following table represent the sensitivity analysis of a reasonably possible change in salary increase and discount rate of obligation to Bank's post-employment benefit liability (unaudited):

	31 Desember/December 31, 2023		
	Peningkatan/ Increase by 100 bps	Penurunan/ Decrease by 100 bps	
Tingkat diskonto	(2.379.169)	2.666.818	Discount rates
Kenaikan gaji	2.627.178	(2.389.227)	Salary increases

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Long term employee benefit (continued)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits liability (continued)

	31 Desember/December 31, 2022		
	Peningkatan/ Increase by 100 bps	Penurunan/ Decrease by 100 bps	
Tingkat diskonto	(2.456.823)	2.734.195	<i>Discount rates</i>
Kenaikan gaji	2.705.134	(2.476.013)	<i>Salary increases</i>

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas asumsi tunggal dengan asumsi lainnya konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, dan perubahan-perubahan dalam beberapa dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung menggunakan *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan.

The above sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumption constant. In practice, this is unlikely to occur, and the changes in some of the assumption may be correlated. When calculation the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value if the defined benefit obligation calculation with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

Harapan umur hidup

Life expectancy

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

The majority of the plan's obligations are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in plan's liabilities.

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

The majority of the plan's obligations are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in plan's liabilities.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasti adalah 14,5 dan 16 tahun (tidak diaudit).

In December 31, 2023 and 2022, the weighted average duration of the defined benefit obligation are 14.5 and 16 years (unaudited).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Expected maturity analysis of employee benefits are as follows (unaudited):

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	2.989.627	2.216.198	<i>Less than 1 year</i>
2 - 5 tahun	15.166.437	13.435.221	<i>2 - 5 years</i>
5 - 10 tahun	9.475.613	15.339.015	<i>5 - 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun	12.205.834	9.206.188	<i>Over 10 years</i>
Jumlah	39.837.511	40.196.622	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders as of December 31, 2023 and 2022 based on the report of PT Adimitra Jasa Korpora, the Shares Registration Bureau, are as follows:

31 Desember/December 31, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal yang disetor/ Total capital (Rp)	Shareholders
PT Victoria Investama Tbk	7.010.537.747	44,24	701.053.775	PT Victoria Investama Tbk
Suzanna Tanojo	3.066.411.303	19,35	306.641.130	Suzanna Tanojo
PT Nata Patindo	48.823.665	0,31	4.882.367	PT Nata Patindo
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	<u>5.722.463.063</u>	<u>36,10</u>	<u>572.246.306</u>	Public (individually less than 5%)
Jumlah	<u>15.848.235.778</u>	<u>100,00</u>	<u>1.584.823.578</u>	Total

31 Desember/December 31, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal yang disetor/ Total capital (Rp)	Shareholders
PT Victoria Investama Tbk	6.880.162.747	43,41	688.016.275	PT Victoria Investama Tbk
Suzanna Tanojo	3.066.411.303	19,35	306.641.130	Suzanna Tanojo
Chemical Asia Corporation Pte Ltd	871.275.600	5,50	87.127.560	Chemical Asia Corporation Pte Ltd
PT Nata Patindo	48.823.665	0,31	4.882.366	PT Nata Patindo
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	<u>4.981.561.399</u>	<u>31,43</u>	<u>498.156.140</u>	Public (individually less than 5%)
Jumlah	<u>15.848.234.714</u>	<u>100,00</u>	<u>1.584.823.471</u>	Total

Mutasi jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

The movement in the number of shares issued and fully paid are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	
Saldo 1 Januari 2023	15.848.234.714	Balance as of January 1, 2023
Penambahan modal saham dari pelaksanaan waran Seri VII tahun 2023	<u>1.064</u>	Additional in shares capital from the execution of Series VII warrants in 2023
Saldo 31 Desember 2023	<u>15.848.235.778</u>	Balance as of December 31, 2023

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juni 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 05 tanggal 3 Juni 2022, pemegang saham menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Bank melakukan penerbitan saham atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.553.461.919 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150 (sembilan lima puluh rupiah) per saham atau seluruhnya sejumlah Rp383.019.288 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah masuk dalam rekening bank pada tanggal 31 Agustus 2022.

Peningkatan modal disetor ini telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 2 September 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0287195 tanggal 3 September 2022.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2022 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 31 tanggal 19 Oktober 2022, pemegang saham menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri VII (Catatan 26).

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank melakukan penerbitan saham atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.807.640.227 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150 (seratus lima puluh rupiah) per saham atau seluruhnya sejumlah Rp421.146.034 (empat ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang telah masuk dalam rekening bank pada tanggal 28 Desember 2022 disertai dengan penerbitan Waran Seri VII sebanyak 2.573.670.117 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per waran.

Peningkatan modal disetor ini telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 29 Desember 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0497387 tanggal 29 Desember 2022. Sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada 31 Desember 2022 adalah 15.848.234.714 saham.

25. SHARE CAPITAL (continued)

According to the results of the Annual General Meeting of Shareholders on June 3, 2022 which has been stated in Notary Deed No. 05 dated June 3, 2022, the shareholders approved the plan to execute increase Share Issuance with Pre-emptive Rights.

On August 31, 2022, the Bank issued shares for Share Issuance with Pre-emptive Rights of 2,553,461,919 shares with an exercise price of Rp150 (one hundred fifty Rupiah) per share or a total of Rp383,019,288 (three hundred eighty three billion nineteen million two hundred and eighty-eight thousand Rupiah) which has been entered into a Bank's account on August 31, 2022.

This increase in paid-in capital has been stated in Notarial Deed No. 1 dated September 2, 2022 and has been reported and accepted by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.03-0287195 dated September 3, 2022.

Based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 19, 2022 which has been stated in Notary Deed No. 31 dated October 19, 2022, the shareholders approved the plan to increase capital by granting pre-emptive rights accompanied by the issuance of Series VII Warrants (Note 26).

On December 29, 2022, the Bank issued shares for Share Issuance with Pre-emptive Rights of 2,807,640,227 shares with an exercise price of Rp150 (one hundred fifty Rupiah) per share or a total of Rp421,146,034 (four hundred twenty one billion one hundred forty-six million thirty-four thousand Rupiah) which was entered into a Bank's account on December 28, 2022 in conjunction with the issuance of Series VII Warrants of 2,573,670,117 warrants with an exercise price of Rp100 (one hundred Rupiah) per warrant.

This increase in paid-in capital has been stated in Notarial Deed No. 7 dated December 29, 2022 and has been reported and accepted by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.03.0497387 dated December 29, 2022. Therefore, the number of issued and fully paid shares on December 31, 2022 is 15,848,234,714 shares.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tahun 2023, Bank menerbitkan 1.064 lembar saham yang berasal dari hasil pelaksanaan Waran Seri VII pada tahun 2023 sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada 31 Desember 2023 adalah 15.848.235.778 saham.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SETORAN MODAL DITERIMA DIMUKA

Tambahan modal disetor merupakan selisih antara jumlah yang diterima dari penerbitan saham dengan nilai nominal yang dicatat sebagai setoran modal.

Pada 4 Juni 2022, Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat No. AHU-0103473.AH.01.11 Tahun 2022, telah mencatatkan peningkatan modal disetor Bank menjadi Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) (nilai penuh) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) (nilai penuh). Peningkatan modal disetor ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 3 Juni 2022.

Pada 22 Juni 2022, Bank menerima tambahan dana setoran modal diterima dimuka dari PT Victoria Investama Tbk, PT Bhujanatala Indah Permai Tbk, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Victoria Alife Indonesia, dan PT Emperor Finance Indonesia dengan total seluruhnya sebesar Rp254.500.000.000 (nilai penuh) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum tanggal 29 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Agustus 2022 Bank melakukan penerbitan 2.553.461.919 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp150 (nilai penuh) per lembar saham. Total penerimaan dana dari penerbitan saham tersebut adalah sebesar Rp383.019.288 dimana nilai nominal saham adalah sebesar Rp255.346.192 sehingga atas penerbitan saham tersebut Bank mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp127.673.096.

25. SHARE CAPITAL (continued)

In 2023, the Bank issued 1,064 shares originating from the execution of Series VII Warrants in 2023, so the total shares placed and fully paid as of December 31, 2023 were 15,848,235,778 shares.

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND CAPITAL RECEIVED IN ADVANCE

The additional paid-in capital represent the excess of proceeds from issuance of shares with the par value recorded as paid-in capital

On June 4, 2022, Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights based on letter No. AHU-0103473.AH.01.11 Year 2022, the Bank's paid-up capital increased to Rp4,100,000,000,000,- (four trillion one hundred billion Rupiah) (full amount) shares each with nominal of Rp100 (one hundred Rupiah) (full amount). This increase of paid-in capital is based on the results of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed No. 7 on June 3, 2022.

On June 22, 2022, the Bank received fund of capital received in advance from PT Victoria Investama Tbk, PT Bhujanatala Indah Permai Tbk, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Victoria Alife Indonesia and PT Emperor Finance Indonesia amounted to Rp254,500,000,000 (full amount) to fulfill the minimum core capital requirement in accordance with POJK No 12/POJK.03/2020 regarding Commercial Bank Consolidation in accordance with POJK No.11/POJK.03/2016 regarding Liability for Fulfillment of Minimum Capital of Commercial Bank dated January 29, 2016.

On August 31, 2022 the Bank issued 2,553,461,919 shares with an exercise price of Rp150 (full amount) per share. The total proceeds received from the issuance of these shares amounted to Rp383,019,288 where the nominal value of the shares was Rp255,346,192 therefore for the issuance of these shares the Bank recorded additional paid-in capital of Rp127,673,096.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SETORAN MODAL DITERIMA DIMUKA (lanjutan)

Penerbitan saham ini mencakup konversi dana setoran modal diterima dimuka yang telah diterima dari PT Victoria Investama Tbk, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Victoria Alife Indonesia dan PT Emperor Finance menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp150 (nilai penuh) per saham dengan total seluruhnya Rp312.450.000 sehingga jumlah saham yang diterbitkan atas konversi setoran modal diterima dimuka adalah sebanyak 2.083.333.332 lembar. Konversi setoran modal diterima dimuka telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-69/PB.33/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Bank menerima tambahan dana setoran modal diterima dimuka dari Suzanna Tanojo sebesar Rp200.000.000 dalam rangka pemenuhan modal inti minimum berdasarkan pemenuhan modal inti minimum berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum tanggal 29 Januari 2016.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Oktober 2022 yang telah dituang dalam Akta Notaris No. 32 tanggal 19 Oktober 2022 pemegang saham menyetujui keputusan berikut:

1. Menyetujui Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 4.955.425.905 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, yang disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 4.542.473.746 Waran Seri VII.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Bank untuk:
 - Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD serta jumlah Waran Seri VII;
 - Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dan harga pelaksanaan Waran Seri VII;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dan penerbitan Waran Seri VII dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri VII dan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Bank Victoria.

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND CAPITAL RECEIVED IN ADVANCE (continued)

The issuance of these shares includes the conversion of capital received in advance from PT Victoria Investama Tbk, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Victoria Alife Indonesia and PT Emperor Finance into shares with an exercise price of Rp150 (full amount) per share for a total of Rp312,450,000 so that the number of shares issued upon the conversion capital received in advance are 2,083,333,332 shares. The conversion of capital received in advance has been approved by Financial Services Authority through letter No. S-69/PB.33/2022 dated July 4, 2022.

On October 14, 2022, the Bank received additional capital received in advance from Suzanna Tanojo in the amount of Rp200,000,000 in order to fulfill the minimum core capital based on meeting the minimum core capital based on POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks, the implementation of which is carried out in accordance with POJK provisions No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks dated January 29, 2016.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 19, 2022 which has been legalised through Notarial Deed No. 32 dated October 19, 2022, the shareholders agreed the following decisions:

1. *Approved additional capital with Pre-emptive Rights (PMHMETD) of maximum of 4,955,425,905 shares with nominal value of Rp100 per share along with issuance of for a maximum of 4,542,473,746 Warrant Series VII.*
2. *Approved to grant power and authority to the Board of Directors of Bank Victoria to:*
 - *Determine the number of shares offered in the PMHMETD and the number of Warrant Series VII;*
 - *Determine the exercise price of PMHMETD and exercise price for Warrants Series VII;*
 - *implementation of PMHMETD and issuance of Series VII Warrants with due observance of the applicable laws and regulations; and*
 - *Increase the issued and paid-up capital after the implementation of the PMHMETD and Series VII Warrants and amending Article 4 paragraphs 2 and 3 of Bank Victoria's Articles of Association.*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SETORAN MODAL DITERIMA DIMUKA (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank melakukan penerbitan 2.807.640.227 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp150 (nilai penuh). Total penerimaan dana dari penerbitan saham tersebut adalah sebesar Rp421.146.034 dimana nilai nominal saham adalah sebesar Rp280.764.022 sehingga atas penerbitan saham tersebut Bank mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp140.382.012.

Penerbitan saham ini mencakup konversi atas dana setoran modal diterima dimuka yang telah diterima dari PT Victoria Investama Tbk dan Suzanna Tanojo menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp150 (nilai penuh) per saham dengan total seluruhnya Rp420.000.000 sehingga jumlah saham yang diterbitkan atas konversi setoran modal diterima dimuka adalah sebanyak 2.799.999.999 lembar saham. Konversi setoran modal diterima dimuka telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat persetujuan No. S-120/PB.33/2022 tanggal 25 November 2022.

Mutasi tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Saldo awal	670.584.856	407.785.927
Dana setoran modal	-	268.055.108
Biaya emisi efek	(1.900.128)	(4.287.797)
Transaksi kombinasi bisnis entitas sependangali	-	(968.382)
Saldo akhir	668.684.728	670.584.856

Mutasi setoran modal diterima dimuka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Saldo awal	-	278.000.000
Dana setoran modal	-	(278.000.000)
Saldo akhir	-	-

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND CAPITAL RECEIVED IN ADVANCE (continued)

On December 29, 2022 the Bank issued 2,807,640,227 shares with an exercise price of Rp150 (full amount). The total receipt of funds from the issuance of these shares amounted to Rp421,146,034 where the nominal value of the shares was Rp280,764,022 so that for the issuance of these shares the Bank recorded additional paid-in capital of Rp140,382,012.

The issuance of these shares includes the conversion of capital received in advance from PT Victoria Investama Tbk and Suzanna Tanojo into shares with an exercise price of Rp150 (full amount) per share for a total of Rp420,000,000 therefore the number of shares issued on the conversion of capital received in advance is 2,799,999,999 shares. The conversion of capital received in advance has been approved by Financial Services Authority based on approval letter No. S-120/PB.33/2022 dated November 25, 2022.

The changes in additional paid-in capital are as follows:

31 Desember/December 31,	
2023	2022
Beginning balance	
Capital deposit fund	
Issuance cost	
Business combination transaction with under common control	
Ending balance	

The changes capital received in advance are as follows:

31 Desember/December 31,	
2023	2022
Beginning balance	
Capital deposit fund	
Ending balance	

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2023

Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 26 Mei 2023 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. tanggal yang sama, Bank membukukan laba bersih pada tahun 2022, dan dipergunakan untuk dana cadangan umum dan laba ditahan. Dengan demikian Bank tidak melakukan pembagian dividen untuk para pemegang saham.

28. CADANGAN UMUM

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan umum dan wajib sebesar Rp202.200.000 dan Rp177.200.000. Kenaikan sebesar Rp25.000.000 merupakan penambahan cadangan umum yang disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 26 Mei 2023. Penambahan cadangan umum tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dinyatakan dalam Akta Notaris Fatiah Helmi S.H. pada tanggal yang sama.

Cadangan umum dan wajib ini dibentuk sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

29. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2023	2022
Pendapatan bunga		
Pinjaman yang diberikan	1.477.526.055	1.328.667.150
Efek-efek	333.248.344	294.174.567
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	25.616.731	12.681.009
Sub jumlah	1.836.391.130	1.635.522.726

27. APPROPRIATION OF INCOME 2023

Appropriation of 2023 Net Income

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 26, 2023, as stated in the Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H. on the same date, the Bank posted a net profit in 2022, and this was used for general reserve funds and retained earnings. Thus, the Bank does not distribute dividends to shareholders.

28. GENERAL RESERVES

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank had set up mandatory and general reserves amounting to Rp202,200,000 and Rp177,200,000. The increase of Rp25,000,000 is an addition to the general reserve agreed upon at the Annual General Meeting of Shareholders on May 26, 2023. The addition to the general reserve is outlined in the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Fatiah Helmi S.H. on the same date.

These general and legal reserve were provided in relation with the Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which has been replaced with the Law No. 40/2007 effective on August 16, 2007 regarding the Limited Liability Company which requires the companies to set up a general reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. There is no timeline over which this amount should be provided.

29. INTEREST AND SHARIA INCOME

Interest income
Loans
Marketable securities
Placements with Bank Indonesia and other banks
Sub total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

29. INTEREST AND SHARIA INCOME (continued)

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan syariah			Sharia income
Pendapatan bagi hasil	-	21.416.012	Profit sharing
Pendapatan margin	-	10.943.114	Margin income
Pendapatan <i>ijarah</i> - bersih	-	155.606	Net income from <i>ijarah</i>
Pendapatan usaha utama lainnya	-	36.980.953	Income from other main operational
Sub jumlah	-	69.495.685	Sub total
Jumlah	1.836.391.130	1.705.018.411	Total

Berdasarkan pihak lawan

By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak berelasi	26.236.406	34.329.918	Related party
Pihak ketiga	1.810.154.724	1.670.688.493	Third party
Jumlah	1.836.391.130	1.705.018.411	Total

30. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

30. INTEREST AND SHARIA EXPENSES

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Simpanan dana pihak ketiga			Third party deposits
Deposito	831.833.370	641.002.657	Time deposits
Tabungan	135.286.864	116.774.716	Savings deposits
Giro	97.105.785	53.650.627	Demand deposits
<i>Negotiable Certificate Deposits</i>	18.551.748	5.132.618	<i>Negotiable Certificate Deposits</i>
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
<i>Call money</i>	24.553.240	16.525.592	<i>Call money</i>
Efek-efek yang diterbitkan	144.948.333	133.908.333	Securities issued
Amortisasi emisi obligasi	5.382.435	4.643.199	Amortisation of bonds issuance cost
Jumlah	1.257.661.775	971.637.742	Total

Berdasarkan pihak lawan

By counterparties

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pihak berelasi	33.127.025	23.911.683	Related party
Pihak ketiga	1.224.534.750	947.726.059	Third party
Jumlah	1.257.661.775	971.637.742	Total

Jumlah beban bunga dan syariah dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal Desember 31, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp33.127.025 dan Rp23.911.683 (Catatan 39).

Total interest and sharia expenses from related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp33,127,025 and Rp23,911,683 respectively (Note 39).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN - BERSIH

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2023	2022
Pendapatan biaya administrasi jasa perbankan	63.414.450	35.322.529
Penerimaan kredit yang telah dihapus buku	47.297.306	267.074.723
Keuntungan transaksi <i>spot</i>	35.422.092	20.546.247
Keuntungan transaksi <i>forward</i>	11.313.000	3.637.200
Pendapatan rekening tidak aktif, denda saldo minimum, dan penggantian buku	8.807.499	2.846.819
Denda keterlambatan	8.322.473	8.350.456
Komisi atas <i>Internet</i> dan <i>Mobile Banking</i>	5.719.435	6.022.481
Laba transaksi <i>swap</i>	1.559.855	858.950
Pendapatan dari transaksi ATM	709.523	1.028.828
Pendapatan transaksi <i>letter of credit</i>	282.474	106.950
(Kerugian)/keuntungan yang belum terealisasi transaksi derivatif	202.833	(1.557.424)
Pendapatan transaksi BIFAST	3.364	-
Penerimaan atas penjualan pembiayaan	-	5.897.780
(Beban)/pendapatan administrasi operasional lainnya	5.907.880	(1.482.453)
Jumlah	188.962.184	348.653.086

31. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS - NET

<i>Receipt of administrative charges for banking services</i>
<i>Gain on written-off loan</i>
<i>Gain from Spot transaction</i>
<i>Gain from Forward transaction</i>
<i>Income from inactive accounts, minimum deposit penalty, saving account replacement</i>
<i>Penalty income</i>
<i>Commission on Internet and Mobile Banking</i>
<i>Swap transaction profits</i>
<i>Income from ATM transaction</i>
<i>Income from letter of credit transactions</i>
<i>Unrealized (loss)/gain from derivatives transactions</i>
<i>Income from BIFAST transactions</i>
<i>Receipt from sales of financing</i>
<i>Other administrative operational (expense)/income</i>
Total

32. BEBAN/(PENDAPATAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Beban/(pendapatan) penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan:

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2023	2022
Pinjaman yang diberikan	245.414.162	183.850.936
Pendapatan bunga dan syariah masih akan diterima	(3.814.474)	45.266.724
Bank Garansi	306.126	(5.102.318)
Efek-efek	396.514	(3.718.845)
Aset lain-lain	206.792	3.662.834
Jumlah	242.509.120	223.959.331

32. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES EXPENSES/(INCOME) ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

Provision for impairment losses expenses/(income) on financial assets are as follows:

<i>Loans</i>
<i>Interest and sharia income receivables</i>
<i>Bank Guarantee</i>
<i>Marketable securities</i>
<i>Other assets</i>
Total

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan:

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2023	2022
Agunan yang diambil alih	(54.964.162)	47.616.890

Provision of for impairment losses of non-financial assets:

Foreclosed assets

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Premi penjaminan	41.124.423	38.811.438	<i>Insurance premium</i>
Penyusutan	21.974.327	26.022.323	<i>Depreciation</i>
Pungutan OJK Tahunan	12.691.827	10.750.852	<i>Annual fee OJK</i>
Sewa gedung dan kendaraan	12.237.699	8.930.140	<i>Building and vehicle rental</i>
Biaya <i>Internet</i> dan <i>Mobile Banking</i>	10.819.246	11.814.993	<i>Internet and Mobile Banking expenses</i>
Jasa profesional	8.834.519	8.240.755	<i>Professional fees</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	7.521.077	11.560.916	<i>Repairs and maintenance</i>
Iklan dan promosi	6.633.047	2.541.663	<i>Advertising and promotion</i>
Asuransi	6.485.461	3.607.373	<i>Insurance</i>
Pengembangan teknologi	5.968.971	5.047.177	<i>Technology development</i>
Telepon, telex dan faksimili	5.780.067	4.728.931	<i>Telephone, telex and faximile</i>
Pendidikan dan pengembangan	4.955.120	3.491.307	<i>Study and development</i>
Beban bunga atas liabilitas sewa	2.854.679	1.002.883	<i>Interest expense of lease liabilities</i>
Pemakaian listrik, gas dan air minum	2.266.453	2.356.214	<i>Electricity, gases and waters</i>
Biaya jasa pihak ketiga	2.181.896	2.083.580	<i>Third party fee</i>
Barang cetakan dan alat tulis	1.970.579	1.748.441	<i>Printing items and stationery</i>
Amortisasi aset tak berwujud	1.627.621	1.971.323	<i>Amortisation of intangible assets</i>
Transportasi	1.174.517	851.550	<i>Transportation</i>
Biaya iuran lainnya	1.005.878	950.289	<i>Other contribution fees</i>
Biaya tanggung jawab sosial perusahaan	179.611	238.216	<i>Corporate Social Responsibility expenses</i>
Pemasaran	141.150	220.679	<i>Marketing</i>
Biaya kurir	84.565	78.629	<i>Courier expenses</i>
Surat kabar dan majalah	44.294	39.262	<i>Newspaper and magazines</i>
Benda pos dan materai	16.241	56.343	<i>Postage and stamp</i>
Kerugian operasional	-	73.460	<i>Operational losses</i>
Biaya umum lainnya	326.578	1.344.831	<i>Other general expenses</i>
Jumlah	158.899.846	148.563.568	Total

Biaya umum lainnya terutama terdiri dari biaya keamanan dan kebersihan, biaya fotokopi, biaya alat kebersihan, biaya makelar dan administrasi bank yang secara individual nilainya tidak signifikan.

Other general expenses mainly consist of security and cleaning expenses, cleaning equipment expenses, broker, and bank charges with insignificant individual balances.

34. BEBAN TENAGA KERJA

34. PERSONNEL EXPENSES

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Gaji dan tunjangan	116.870.901	115.719.729	<i>Salaries and allowance</i>
Tunjangan Hari Raya dan bonus	16.022.794	24.228.796	<i>Holiday entitlements and bonuses</i>
Biaya jasa tenaga kerja	10.130.122	11.376.916	<i>Outsourcing service expenses</i>
Imbalan pasca kerja	8.187.626	7.170.426	<i>Post-employment benefits</i>
Biaya jaminan kesehatan dan pensiun	3.174.692	3.416.290	<i>Health and pension insurance</i>
Lembur	549.835	746.072	<i>Overtime</i>
Pesangon dan biaya apresiasi lainnya	2.219.540	372.760	<i>Severance pay and other appreciation expense</i>
Jumlah	157.155.510	163.030.989	Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan)

Termasuk dalam beban tenaga kerja adalah kompensasi yang diberikan kepada manajemen dan karyawan kunci (Catatan 39).

34. PERSONNEL EXPENSES (continued)

Included in the personnel expenses are compensation to key management and employees (Note 39).

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

35. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Rugi atas modifikasi pinjaman yang diberikan	48.938.923	53.525.163	Loss on loan modification
Rugi transaksi valuta asing	53.724.747	35.541.580	Loss on foreign exchange transaction
Beban administrasi dan kliring	7.182.754	5.191.778	Administration and clearing expenses
Beban pajak	6.486.145	1.780.159	Tax expenses
Beban <i>membership</i> ATM dan iuran tahunan ATM	4.147.620	4.726.576	ATM membership and annual fee ATM expenses
Biaya penghapus-bukuan tagihan asuransi kredit	2.547.631	2.689.950	Loan insurance receivables write-off expenses
Biaya provisi dan komisi dana	1.280.393	933.194	Provision and commission funds
Beban parkir dan tol	1.096.489	1.287.350	Parking and toll expenses
Beban pemasaran	324.360	300.543	Marketing expenses
Beban representasi dan jamuan	246.227	131.771	Representation and entertainment expenses
Beban keperluan kantor	138.104	145.377	Office supplies expenses
Kerugian belum direalisasi atas Transaksi derivatif	74.058	1.145.144	Unrealized loss from derivatives transactions
Beban sumbangan	77.050	42.238	Donation expenses
Biaya operasional lainnya	212.049	4.661.453	Other operational expenses
Jumlah	126.476.550	112.102.276	Total

36. BEBAN (PENDAPATAN) NON-OPERASIONAL - BERSIH

36. NON-OPERATING EXPENSES (INCOME) - NET

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan non-operasional:			Non-operating income:
Laba revaluasi valuta asing	(17.561.150)	(20.023.007)	Gain on foreign exchange revaluation
Laba penjualan AYDA	(14.338.270)	(4.851.065)	Gain on sale of foreclosed assets
Hasil sewa	(156.735)	(85.320)	Rent income
Pendapatan dari Ta'widh	-	(37.100)	Gain from Ta'widh
Pendapatan lainnya	(2.527.327)	(846.453)	Others
Beban non-operasional:			Non-operating expense:
Rugi penjualan AYDA	64.258.318	76.921.474	Loss on sale of foreclosed assets
Laba/(rugi) penjualan aset tetap (Catatan 14)	3.636.801	(217.726)	Gain/(loss) on sale of fixed assets (Note 14)
Rugi penjualan properti terbengkalai	2.318.310	-	Loss on sale of abandoned property
Rugi penurunan nilai aset tetap	1.450.000	-	Loss on impairment of fixed assets
Beban non-operasional lainnya	7.454.960	6.274.809	Other non-operational expenses
Beban non-operasional - bersih	44.534.907	57.135.612	Non-operating expense - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – BERSIH (lanjutan)

Pendapatan lainnya terutama terdiri dari diskon pembelian kupon belanja, dan selisih lebih *cash count*.

Beban non operasional lainnya terutama terdiri dari biaya hadiah hari raya, denda-denda, sumbangan dan sanksi yang secara individual nilainya tidak signifikan.

37. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

36. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET (continued)

Other income mainly consist of discount on voucher purchase, and difference in cash count.

Other non-operational expenses mainly consist of holiday gift, fines, donation, and penalty with insignificant individual balances.

37. INCOME PER SHARE

Basic income per share is calculated by dividing the income for the year attributable to the Bank's shareholders with the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted income per share is calculated by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2023	2022	
<u>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</u>			<u>Income for the year attributable to equity holders of the Parent Company</u>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk perhitungan laba per saham dasar dan dilusian	101.816.341	226.173.453	Income for the year attributable to equity holders of the Parent Company to be accounted for basic and diluted earnings per share
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	15.848.235	11.795.945	Weighted-average common stock for computation of basic earnings per share
Jumlah waran yang beredar untuk perhitungan laba per saham	2.573.669	2.573.670	Outstanding warrants for computation of basic earnings per share
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dilusian	15.848.235	11.795.945	Weighted-average common stock for computation of diluted earnings per share
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	6,42	19,17	Basic income per share (in Rupiah full amount)
Laba per saham dasar dilusian (dalam Rupiah penuh)	6,42	19,17	Diluted income per share (in Rupiah full amount)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

38. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah perolehan agunan yang diambil alih sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Catatan 15.

Transaksi non-kas dari rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31, 2023				
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Arus kas/ <i>Cash flow</i>	Perubahan non-kas/ <i>Non-cash activity</i>	Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Efek-efek yang diterbitkan	1.051.903.552	300.000.000	(4.264.024)	1.347.639.528	Securities Issued	
Liabilitas sewa	33.100.288	(10.757.017)	24.966.255	47.309.526	Lease liabilities	
Jumlah	1.085.003.840	289.242.983	20.702.231	1.394.949.054	Total	

		31 Desember/December 31, 2022				
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Arus kas/ <i>Cash flow</i>	Perubahan non-kas/ <i>Non-cash activity</i>	Dampak kehilangan pengendalian entitas anak/ <i>Loss of control on Subsidiary</i>	Saldo akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Efek-efek yang diterbitkan	1.348.520.029	(300.000.000)	3.383.523	-	1.051.903.552	Securities Issued
Pinjaman dari bank lain	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	Borrowings
Liabilitas sewa	15.631.796	(10.958.755)	32.199.554	(3.772.307)	33.100.288	Lease liabilities
Jumlah	1.414.151.825	(360.958.755)	35.583.077	(3.772.307)	1.085.003.840	Total

38. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transaction is acquisition of foreclosed assets, as discussed in Note 15.

Non-cash transaction from net debt reconciliation affected from financing activities as it follows:

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2af.

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES

Nature of Relationship

Related parties are companies and individuals who have ownership or management relationship directly or indirectly with the Bank as stated in Note 2af.

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat dari transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Victoria Investama Tbk	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>
PT Bank Victoria Syariah	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>under common control</i>	Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>
PT Victoria Sekuritas Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>
PT Victoria Insurance	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang Diberikan, asuransi aset tetap dan asuransi kas/ <i>Deposits from customers, loans, fixed assets insurance and cash insurance</i>
PT Victoria Alife	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Victoria Manajemen Investasi	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Merak Energi Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>
PT Tridaya Investindo (d/h PT BIP Tridaya Propertindo)	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, Loans</i>
PT Grha Swahita	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>
PT Padi Unggul Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposit from customers</i>
PT BIP Loka Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT BIP Sentosa	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Studio One	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Asri Kencana Gemilang	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Artoda Karya Gemilang	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Bhuwanatala Indah Permai	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Frogurt Sari Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Emperor Finance Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Grata Mulia Pratama	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Putra Asih Laksana	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Suryayudha Investindo Cipta	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT GMT Investama Mandiri Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Dwimagna Kapital	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Jaya Bhakti Mandiri	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Magna Investa Mandiri	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Bintang Jaya Bara Sentosa	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT BIP Boga Entertainment	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT BIP Boga Permai	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Bumi Semesta Lestari	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Cahaya Medika Health Care	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>
PT Prolestari Mega Persada	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Regis Pratama Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Surya Cakra Multi Sarana	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Verena Kapital	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT Sulfindo Adiusaha	Dimiliki oleh pemegang saham utama/ <i>Under common control</i>	Simpanan nasabah, Bank Garansi/ <i>Deposits from customers, Bank Guarantee</i>
PT Nata Patindo	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Suzanna Tanojo	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling Shareholder</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Christine Tanojo	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Luciana Tanoyo	Hubungan keluarga dengan Suzanna Tanojo/ <i>Relative of Suzanna Tanojo</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Bank/ <i>Board of Commissioners, Directors and executive officers of the Bank</i>	Manajemen dan karyawan kunci/ <i>Key management and employees</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Eksekutif Entitas Asosiasi/ <i>Board of Commissioners, Directors and executive officers of Associated Entity</i>	Manajemen dan karyawan kunci/ <i>Key management and employees</i>	Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan/ <i>Deposits from customers, loans</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Transactions with related parties

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with related parties are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Aset			Assets
Pinjaman yang diberikan - bruto (Catatan 11)			<i>Loans - gross (Note 11)</i>
PT Sulfindo Adiusaha	91.067.628	-	<i>PT Sulfindo Adiusaha</i>
PT Victoria Investama Tbk	24.301.030	24.997.847	<i>PT Victoria Investama Tbk</i>
PT Grha Swahita	20.031.085	16.428.215	<i>PT Grha Swahita</i>
PT Victoria Insurance Indonesia Tbk	286.816	847.601	<i>PT Victoria Insurance Indonesia Tbk</i>
PT Cahaya Medika Health Care	21.130	11.549	<i>PT Cahaya Medika Health Care</i>
PT Jaya Bhakti Mandiri	12.568	6.228	<i>PT Jaya Bhakti Mandiri</i>
PT Tri Daya Investindo (d/h PT BIP Tridaya Propertindo)	-	-	<i>PT Tri Daya Investindo (formerly PT BIP Tridaya Propertindo)</i>
PT Victoria Sekuritas Indonesia	-	14.959.723	<i>PT Victoria Sekuritas Indonesia</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Entitas Asosiasi	5.358.779	4.556.086	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of Associated Entity</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Bank	2.817.405	11.458.434	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of the Bank</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan - bruto	143.896.441	73.265.683	<i>Total loans - gross</i>
Persentase terhadap jumlah aset	0,49%	0,29%	Percentage from total assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan nasabah (Catatan 18)			<i>Deposits from customers (Note 18)</i>
Giro	652.841.415	246.769.560	<i>Demand deposits</i>
Tabungan	27.996.913	54.402.780	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka <i>Negotiable Certificate Deposits</i>	618.884.872	84.438.138	<i>Time deposits</i>
	98.246.827	1.716.831	<i>Negotiable Certificate Deposits</i>
Jumlah	1.397.970.027	387.327.309	<i>Total</i>
Simpanan dari Bank Lain (Catatan 19)			<i>Deposits from other banks (Note 19)</i>
Giro	478.732	167.870	<i>Demand deposits</i>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5,42%	1,74%	Percentage from total liabilities
Pendapatan bunga dan syariah (Catatan 29)			<i>Interest and sharia income (Note 29)</i>
PT Grha Swahita	17.470.235	18.938.025	<i>PT Grha Swahita</i>
PT Sulfindo Adiusaha	5.781.638	-	<i>PT Sulfindo Adiusaha</i>
PT Victoria Investama Tbk	2.419.518	1.496.748	<i>PT Victoria Investama Tbk</i>
PT Victoria Sekuritas Indonesia	43.450	152.279	<i>PT Victoria Sekuritas Indonesia</i>
PT Victoria Insurance Indonesia Tbk	19.520	194.261	<i>PT Victoria Insurance Indonesia Tbk</i>
PT Cahaya Medika Health Care	1.802	613	<i>PT Cahaya Medika Health Care</i>
PT Jaya Bhakti Mandiri	1.046	312	<i>PT Jaya Bhakti Mandiri</i>
PT Merak Energi Indonesia	-	7.340.468	<i>PT Merak Energi Indonesia</i>
PT Tri Daya Investindo (d/h PT BIP Tridaya Propertindo)	-	4.094.020	<i>PT Tri Daya Investindo (formerly PT BIP Tridaya Propertindo)</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Entitas Asosiasi	284.719	1.000.391	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of Associated Entity</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Bank	214.478	1.112.801	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of the Bank</i>
Jumlah	26.236.406	34.329.918	<i>Total</i>

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	1,42%	2,01%	Percentage from total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah (Catatan 30)			<i>Interest and sharia expenses (Note 30)</i>
Giro	9.156.511	4.842.944	<i>Demand deposits</i>
Tabungan	1.556.192	5.863.913	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka	22.414.322	13.204.826	<i>Time deposits</i>
Jumlah	33.127.025	23.911.683	<i>Total</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	2,63%	2,46%	Percentage from total interest and sharia expenses
Beban tenaga kerja (Catatan 34)			Personnel expenses (Note 34)
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	4.955.125	2.916.015	<i>Salaries and allowances of the Boards of Commissioners</i>
Gaji dan tunjangan Dewan Direksi	16.956.764	10.660.313	<i>Salaries and allowances of the Boards of Directors</i>
Gaji dan tunjangan Pejabat Eksekutif	23.410.812	19.774.335	<i>Salaries and allowances of the Executive Officers</i>
Jumlah	45.322.701	33.350.663	<i>Total</i>
Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja	28,84%	20,46%	Percentage from total personnel expenses
Liabilitas komitmen dan kontinjensi (Catatan 40)			Liabilities commitments and contingencies (Note 40)
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan			<i>Unused loans facilities</i>
PT Grha Swahita	(5.730.535)	(9.953.763)	<i>PT Grha Swahita</i>
PT Cahaya Medika Health Care	(978.870)	(988.451)	<i>PT Cahaya Medika Health Care</i>
PT Jaya Bhakti Mandiri	(737.431)	(743.772)	<i>PT Jaya Bhakti Mandiri</i>
PT Victoria Investama Tbk	(698.970)	(2.153)	<i>PT Victoria Investama Tbk</i>
PT Victoria Sekuritas Indonesia	-	(40.277)	<i>PT Victoria Sekuritas Indonesia</i>
PT Tri Daya Investindo	-	(2.000.000)	<i>PT Tri Daya Investindo</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif Bank	(7.000.000)	(42.670)	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of the Bank</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Entitas Asosiasi	(1.891.323)	(3.525.076)	<i>Boards of Commissioners, Directors and executive officers of Associated Entity</i>
Garansi yang diterbitkan - Pihak berelasi			<i>Guarantees issued – related parties</i>
PT Victoria Alife Indonesia	(271.300)	-	<i>PT Victoria Alife Indonesia</i>
PT Sulfindo Adiusaha	-	(2.497.607)	<i>PT Sulfindo Adiusaha</i>
Jumlah	(17.308.430)	(19.793.769)	<i>Total</i>
Persentase terhadap jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih	0,28%	0,49%	Percentage from total commitments and contingencies liabilities – net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

	Tingkat suku bunga per 31 Desember/ Interest rate as of December 31,	
	2023	2022
Aset		
Pinjaman yang diberikan – bersih (Catatan 11)	5,00% - 13,00%	5,00% - 12,00%
Liabilitas		
Simpanan nasabah (Catatan 18)		
Giro	0,00% - 5,75%	0,00% - 3,75%
Tabungan	0,00% - 5,00%	0,00% - 5,00%
Deposito berjangka	2,25% - 7,00%	1,50% - 6,00%
Negotiable Certificated Deposits	6,50% - 7,00%	6,50%
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)		
Giro	0,50% 1,50%	0,50% - 1,50%

Bank memberikan kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Dewan Komisaris :		
Gaji	3.772.363	2.703.232
Tunjangan akhir tahun	321.336	-
Tunjangan Hari Raya	327.191	212.783
Bonus	534.235	-
Direksi:		
Gaji	12.454.018	9.893.241
Tunjangan akhir tahun	1.011.571	-
Tunjangan Hari Raya	991.175	767.072
Bonus	2.500.000	-
Pejabat eksekutif:		
Gaji	19.159.386	18.353.077
Tunjangan akhir tahun	1.754.592	-
Tunjangan Hari Raya	1.646.336	1.421.258
Bonus	850.498	-
Jumlah	45.322.701	33.350.663

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are as follows: (continued)

The following table summarises the range of contractual interest rates per annum for transactions with related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022:

Assets
Loans – net (Note 11)
Liabilities
Deposits from customers (Note 18)
Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Negotiable Certificate of Deposits
Deposits from other bank (Note 19)
Demand deposits

The Bank provided compensation to Board of Commissioners, Directors and executive officers for the years ended December 31, 2023 and 2022 as follows:

Board of Commissioners :
Salaries
Year End Allowances
Holiday Entitlements
Bonuses
Directors:
Salaries
Year End Allowances
Holiday Entitlements
Bonuses
Executive officers:
Salaries
Year End Allowances
Holiday Entitlements
Bonuses

Total

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
<u>Komitmen</u>		
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan:		
Pihak ketiga	(5.280.610.008)	(4.016.397.640)
Pihak berelasi	(17.037.130)	(17.296.162)
Liabilitas komitmen - bersih	(5.297.647.138)	(4.033.693.802)
<u>Kontinjensi</u>		
Tagihan kontinjensi:		
Pendapatan bunga atas pinjaman bermasalah - pihak ketiga	311.523.645	364.247.996
Liabilitas kontinjensi:		
Garansi yang diterbitkan - pihak berelasi	(271.300)	(2.497.607)
Garansi yang diterbitkan - pihak ketiga	(982.531.650)	(345.129.999)
Letter of Credit	(60.563.964)	(18.705.728)
Kontinjensi - bersih	(731.843.269)	(2.085.338)
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih	(6.029.490.407)	(4.035.779.140)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat komitmen dan kontinjensi signifikan lainnya selain komitmen dan kontinjensi yang telah diungkapkan di atas.

41. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Sigma Cipta Caraka

Pada tanggal 26 Agustus 2014, Bank dan PT Sigma Cipta Caraka telah menandatangani Perjanjian Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen, dimana PT Sigma Cipta Caraka setuju untuk memberikan layanan jasa untuk membuat sistem untuk operasi bisnis Bank.

39. INFORMATION OF RELATED PARTIES
(continued)

Transactions with related parties (continued)

There are no compensation of post-employment benefits, other long-term benefits, termination benefits and share-based payment to the Boards of Commissioners and Directors.

40. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The following is the summary of the Bank's commitments and contingencies at contractual amounts:

<u>Commitments</u>
Commitment liabilities:
Unused loan facilities:
Third parties
Related parties
Commitment liabilities - net
<u>Contingencies</u>
Contingent receivables:
Interest receivables on non-performing loans - third parties
Contingent liabilities:
Guarantees issued - related parties
Guarantees issued - third parties
Letter of Credit
Contingent - net
Total commitment and contingencies liabilities - net

As of December 31, 2023 and 2022, there are no significant commitments and contingencies other than the aforementioned commitments and contingencies.

41. SIGNIFICANT AGREEMENT

Implementation of Application Integrated Transaction Management - PT Sigma Cipta Caraka

On August 26, 2014, Bank and PT Sigma Cipta Caraka have signed Application Integrated Transaction Management, in which PT Sigma Cipta Caraka agrees to distribute Integrated Transaction Management Application for Bank's business operation.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Sigma Cipta Caraka (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PT Sigma Cipta Caraka berhak mendapatkan pembayaran dari Bank;
2. PT Sigma Cipta Caraka wajib memberikan lisensi aplikasi kepada Bank;
3. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat aplikasi sesuai dengan keinginan Bank;
4. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat laporan kemajuan proses implementasi; dan
5. PT Sigma Cipta Caraka wajib memastikan program telah benar untuk mencegah kesalahan.

Berdasarkan Addendum VI No.461/SCC/BVIC/B/19 tanggal 24 Juli 2019, jangka waktu perjanjian diubah menjadi tanpa jangka waktu hingga salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian.

Biaya jasa yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah	1.623.875	4.219.893	Rupiah

Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Panen Berkah Solusi

Pada tanggal 21 Juni 2022, Bank dan PT Panen Berkah Solusi telah menandatangani Perjanjian Pemeliharaan Server AS400, dimana PT Panen Berkah Solusi setuju untuk memberikan layanan jasa pemeliharaan server AS400 untuk operasi Bank.

41. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

Implementation of Application Integrated Transaction Management - PT Sigma Cipta Caraka (continued)

Based on this agreement, PT Sigma Cipta Caraka have right and obligation as follows:

1. PT Sigma Cipta Caraka is entitled to receive payment from the Bank;
2. PT Sigma Cipta Caraka is obligated to give the license of the application to the Bank;
3. PT Sigma Cipta Caraka is obligated to customize the application according to Bank's request;
4. PT Sigma Cipta Caraka is obligated to make official report for implementation process progress; and
5. PT Sigma Cipta Caraka is obligated to ensure the programs to prevent errors.

According to Addendum VI No.461/SCC/BVIC/B/19 dated July 24, 2019, the term of the agreement was changed to no time period until one of the party terminates the agreement.

Service fees paid as of December 31, 2023 and 2022 are amounted:

Implementation of Application Integrated Transaction Management - PT Panen Berkah Solusi

On June 21, 2022, the Bank and PT Panen Berkah Solusi has signed an AS400 Server Maintenance Agreement, whereby PT Panen Berkah Solusi agreed to provide AS400 server maintenance services for the Bank's operations.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Panen Berkah Solusi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian ini, PT Panen Berkah Solusi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PT Panen Berkah Solusi berhak mendapatkan pembayaran dari Bank;
2. PT Panen Berkah Solusi, wajib menyediakan jasa tenaga kerja sesuai kemampuan teknis;
3. PT Panen Berkah Solusi, wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank yang diperlukan dalam penyelesaian tugas;
4. PT Panen Berkah Solusi, wajib mengirimkan suku cadang kepada Bank;
5. PT Panen Berkah Solusi, wajib melakukan kunjungan setiap dua bulan untuk melakukan pengecekan pada semua perangkat.
6. PT Panen Berkah Solusi, berhak melakukan penagihan atas jasa penyediaan suku cadang;
7. PT Panen Berkah Solusi, wajib menyediakan semua kebutuhan suku cadang yang diperlukan dalam rangka perbaikan mesin;
8. PT Panen Berkah Solusi bersedia di audit oleh auditor internal Bank atau Otoritas Jasa Keuangan atau pihak eksternal yang ditunjuk oleh Bank; dan
9. PT Panen Berkah Solusi, wajib melaporkan kepada Bank setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian/mengganggu kelancaran operasional Bank.

Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2022 pada terhadap perjanjian kerja sama antara Bank dan PT Panen Berkah Solusi pada No.016/SPK/PBS/VI/2022 bahwa jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2023, sebagaimana telah diubah pada Adendum perjanjian No.027/SPK/PBS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2024.

Biaya jasa yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 yang termasuk dalam perjanjian ini adalah sebesar:

41. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

Implementation of Application Integrated Transaction Management - PT Panen Berkah Solusi (continued)

Based on this agreement, PT Panen Berkah Solusi has the following rights and obligations:

1. PT Panen Berkah Solusi is entitled to receive payment from the Bank;
2. PT Panen Berkah Solusi, is required to provide labor services according to technical capabilities;
3. PT Panen Berkah Solusi, is required to provide written information to the Bank that is needed in completing the task;
4. PT Panen Berkah Solusi, must send spare parts to the Bank;
5. PT Panen Berkah Solusi, must visit every two months to check all devices;
6. PT Panen Berkah Solusi, has the right to bill for spare parts supply services;
7. PT Panen Berkah Solusi, must provide all the spare parts needed for machine repair;
8. PT Panen Berkah Solusi is willing to be audited by the Bank's internal auditor or the Financial Services Authority or an external party appointed by the Bank; and
9. PT Panen Berkah Solusi, is required to report to the Bank every critical incident that may result in losses/disturb the smooth operation of the Bank.

The agreement dated June 21, 2022 on the agreement between the Bank and PT Panen Berkah Solusi under No.016/SPK/PBS/VI/2022 states that the term of the agreement is from June 21, 2022 until June 20, 2023, as amended in the Agreement Addendum No.027/SPK/PBS/VII/2023 dated July 12, 2023, the term of the agreement is from June 20, 2023 until June 19, 2024.

Service fees paid as of December 31, 2023 and 2022 included in this agreement are amounted:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rupiah	226.440	222.360	Rupiah

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

42. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Perubahan kepentingan nonpengendali atas kekayaan bersih Bank adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir Pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2023	2022
Saldo awal tahun	-	17.327
Bagian kepentingan nonpengendali atas laba/(rugi) tahun berjalan	-	-
Bagian kepentingan nonpengendali atas laba komprehensif lainnya	-	-
Bagian kepentingan nonpengendali atas keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada FVOCI di dalam ekuitas Entitas Anak	-	-
Divestasi entitas anak (Catatan 48)	-	(17.327)
Saldo akhir tahun	-	-

42. NON-CONTROLLING INTEREST

The changes in the non-controlling interest in the net assets of the Bank is as follows:

Balance at beginning of the year
Profit/(loss) for the attributable year to non-controlling interest
Other comprehensive income attributable to non-controlling interest
Unrealised gains/(losses) on changes in fair value of marketable securities measured at FVOCI in Subsidiary's equity to non-controlling interest
Divestment of subsidiary (Note 48)
Balance at the end of the year

43. SEGMENT OPERASI

a. Bidang usaha

Nama Perusahaan/Company

PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Victoria Syariah

43. OPERATING SEGMENT

a. Business activities

Bidang Usaha/Business Activities

Perbankan Konvensional/Conventional banking
Perbankan Syariah/Banking activities based on Sharia Principles

b. Segmen Usaha

Segmen Operasi

Berikut adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

b. Business Segment

Operating Segment

The following is the segment information of the Bank based on operating segments:

	31 Desember/December 31, 2023			Jumlah/ Total	
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination		
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	578.729.355	-	-	578.729.355	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya	253.365.261	-	-	253.365.261	Other operating income
Beban operasional lainnya	(626.226.499)	-	-	(626.226.499)	Other operating expense
Laba/(rugi) operasional	205.868.117	-	-	205.868.117	Income/(loss) from operations
Jumlah aset	29.624.240.421	-	-	29.624.240.421	Total assets
Jumlah liabilitas	25.799.455.411	-	-	25.799.455.411	Total liabilities

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (continued)

b. Segmen Usaha (lanjutan)

b. Business Segment (continued)

Segmen Operasi (lanjutan)

Operating Segment (continued)

Berikut adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi: (lanjutan)

The following is the segment information of the Bank based on operating segments: (continued)

	31 Desember/December 31, 2022				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	699.306.521	34.074.148	-	733.380.669	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya	377.771.952	6.037.660	(3.606.389)	380.203.223	Other operating income
Beban operasional lainnya	(663.475.220)	(36.042.233)	-	(699.517.453)	Other operating expense
Laba/(rugi) operasional	413.603.253	4.069.575	(3.606.389)	414.066.439	Income/(loss) from operations
Jumlah aset	25.932.001.125	-	-	25.932.001.125	Total assets
Jumlah liabilitas	22.231.537.644	-	-	22.231.537.644	Total liabilities

Segmen Geografis

Geographic Segment

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan daerah geografis:

The following is the business segment information of the Bank based on geographical area:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Jadetekab/ Jadetekab	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah & Jawa Timur /Central & East Java	Luar Jawa/ Non Java		Jumlah/ Total
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	605.904.033	7.712.804	(5.953.084)	(28.934.398)	578.729.355	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya	244.424.786	2.810.354	3.731.919	2.398.202	253.365.261	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(153.988.492)	(1.238.620)	(25.868.360)	(6.449.486)	(187.544.958)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Beban umum dan administrasi, tenaga kerja, kerugian atas perubahan nilai wajar dan lain-lain	(410.010.772)	(6.792.939)	(11.014.661)	(10.863.169)	(438.681.541)	General and administrative expenses, personnel expenses, unrealized loss changes of fair value and others
Laba (rugi) operasional	286.329.555	2.491.599	(39.104.186)	(43.848.851)	205.868.117	Profit (loss) from operations
Beban non operasional - bersih	(76.444.394)	(910)	54.764	58.651	(76.331.889)	Non-operating expense - net
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	209.885.161	2.490.689	(39.049.422)	(43.790.200)	129.536.228	Profit (loss) before income tax expense
Beban pajak penghasilan	(27.719.887)	-	-	-	(27.719.887)	Income tax expense
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	182.165.274	2.490.689	(39.049.422)	(43.790.200)	101.816.341	Gain/(loss) for the year
Jumlah aset	28.781.506.754	245.131.599	398.882.726	198.719.342	29.624.240.421	Total assets
Jumlah liabilitas	23.861.710.649	260.086.342	756.951.352	920.707.068	25.799.455.411	Total liabilities

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

b. Segmen Usaha (lanjutan)

Segmen Geografis (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan daerah geografis: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2022					
	Jadetekab/ Jadetekab	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah & Jawa Timur /Central & East Java	Luar Jawa/ Non Java	Jumlah/ Total	
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	739.975.235	(410.451)	7.587.788	(13.771.903)	733.380.669	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya	372.687.153	901.405	4.884.713	1.729.952	380.203.223	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(259.895.321)	(600.942)	(8.898.918)	(2.181.040)	(271.576.221)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Beban umum dan administrasi, tenaga kerja, kerugian atas perubahan nilai wajar dan lain-lain	(383.932.825)	(9.193.029)	(24.089.876)	(10.725.502)	(427.941.232)	General and administrative expenses, personnel expenses, unrealized loss changes of fair value and others
Laba (rugi) operasional	468.834.242	(9.303.017)	(20.516.293)	(24.948.493)	414.066.439	Profit (loss) from operations
Beban non operasional - bersih	(57.197.432)	-	61.820	-	(57.135.612)	Non-operating expense - net
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	411.636.810	(9.303.017)	(20.454.473)	(24.948.493)	356.930.827	Profit (loss) before income tax expense
Beban pajak penghasilan	(130.757.374)	-	-	-	(130.757.374)	Income tax expense
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	<u>280.879.436</u>	<u>(9.303.017)</u>	<u>(20.454.473)</u>	<u>(24.948.493)</u>	<u>226.173.453</u>	Gain/(loss) for the year
Jumlah aset	<u>25.223.756.524</u>	<u>133.706.836</u>	<u>342.256.649</u>	<u>232.281.116</u>	<u>25.932.001.125</u>	Total assets
Jumlah liabilitas	<u>20.720.713.354</u>	<u>244.546.970</u>	<u>588.098.157</u>	<u>678.179.163</u>	<u>22.231.537.644</u>	Total liabilities

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sejak tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000 untuk nasabah per bank.

43. OPERATING SEGMENT (continued)

b. Business Segment (continued)

Geographic Segment (continued)

The following is the business segment information of the Bank based on geographical area: (continued)

44. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective September 22, 2005, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was established to provide guarantee on certain deposits from customers based on prevailing guarantee schemes. The law was changed with the Government Regulation as at the Replacement of Law No. 3 Year 2008, which was stipulated as a law since January 13, 2009 based on the Republic of Indonesia Law No. 7 Year 2009.

Based on Government of Republic of Indonesia Regulation No. 66/2008 dated October 13, 2008 regarding the deposit amount guaranteed by LPS, as of December 31, 2023 and 2022, the deposit amount guaranteed by LPS for every customer in a bank was a maximum of Rp2,000,000.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut dan beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp41.124.423 dan Rp37.140.883.

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu, kegiatan operasional Bank dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan kerugian. Di dalam melaksanakan strategi bisnis Bank, maka manajemen berupaya untuk dapat menyelaraskan antara:

- Pertumbuhan bisnis dan peningkatan pangsa pasar kredit dan portofolio pendanaan.
- Peningkatkan efisiensi operasional perbankan.
- Menjaga tingkat kebutuhan modal minimum sesuai ketentuan otoritas.
- Implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank menyadari bahwa semakin kompleksnya kegiatan usaha yang diikuti dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal sehingga meningkatkan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menyadari akan risiko yang dihadapi, Bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan meningkatkan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*) pada keseluruhan lingkup aktivitas usaha.

Penerapan manajemen risiko yang efektif dengan mempertimbangkan segala aspek dan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dimonitor akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan *stakeholder*.

44. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS (continued)

The Bank is a participant of this government guarantee program and the premium paid for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp41,124,423 and Rp37,140,883, respectively.

45. RISK MANAGEMENT

The Bank has implemented independent risk management and in accordance with standards that refer to POJK No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Bank's business activities always faced with risks that are closely related to its function as a financial intermediary. Therefore, the Bank's operations are properly managed so it could prevent any harm. In the performance of the Bank's business strategy, management seeks to harmonise between:

- Business growth and increased market share of credit and financing portfolios.
- Increasing the efficiency of banking operations.
- Maintain the level of minimum capital requirements pursuant to the authority.
- Implementation of business-oriented risk management.

As a financial intermediary institution, the Bank realises that the business activity is more complex and also depends with development of internal and external conditions that increase the Bank 's risk in conducting its business activities. Realising the risk it faces, the Bank must apply good risk management policy that can adapt with the changes and also enhance the Good Corporate Governance Practice in the whole activities of the Bank.

The effective application of risk management by considering all aspects and prudential principles which has objective to ensure that potential arises in conducting its business activities can be identified, measured, reviewed and monitored will give a benefit to increase stakeholder trust to the Bank.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam menunjang penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa berupaya meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain melalui unit kerja dan komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) di bawah wadah Komite Manajemen Risiko yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana kontinjensi apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD), *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), Komite Teknologi Sistem Informasi, sedangkan pada level Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Semua Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) merupakan salah satu industri yang memiliki sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko. Menghadapi kondisi tersebut, penerapan manajemen risiko akan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan seluruh risiko, baik yang berasal dari perusahaan anak dan perusahaan terelasi (*sister company*), maupun entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

Manajemen Risiko Terintegrasi telah diterapkan secara komprehensif dan efektif sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam hal Pengawasan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

In supporting the implementation of risk management, the Bank continuously improve the active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors, including establishing several permanent working units and committee to support risks control process. This is implemented by establishing Risk Management Working Unit (SKMR) under Risk Management Committee who authorise and responsible to prepare and decide risk management policy and its changes including risk management strategy and contingency plan if an abnormal condition happens.

Besides the above matters, there are other committee to handle more specific risks, such as Credit Committee at Board of Directors level (KKD), Assets and Liabilities Committee (ALCO), Information System Technology Committee, whereas at the Board of Commissioners level, there are Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee and Integrated Corporate Governance Committee.

All of the Boards of Commissioners and Directors passed the examination of Risk Management Certification that was held by the Board of Risk the Management Certification and Banking Professional Certification Institute.

As a response with the development of globalisation and information technology, Financial Services Institution (LJK) is one of industry which has a complex, dynamic and inter-related between each financial sector, both in product and organisation, and ownership which can increase the risk exposure. Facing this circumstances, the implementation of risk management will be performed integratedly by concerning all the risks, including from subsidiary and sister companies, and other financial entities included in one financial conglomeration.

Integrated Risk Management has been implemented comprehensively and effectively in accordance with POJK No. 17/POJK.03/2014 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 about Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration. The Bank has been appointed as the main entity in the Integrated Monitoring of Financial Conglomeration is Victoria Group.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam menunjang penerapan manajemen risiko terintegrasi, maka Bank berupaya meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) di bawah wadah Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, sedangkan pada level Dewan Komisaris terdapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban mereka. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah untuk mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam parameter yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *return on risk*.

Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan eksternal lainnya dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian efek-efek, dan penyertaan, yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas nasabah;
- ii. Riwayat hubungan kredit;
- iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
- iv. Sektor industri nasabah;
- v. Kualitas agunan debitur, baik berupa aset berwujud maupun agunan setara kas;
- vi. Posisi nasabah dalam persaingan industri sejenis; serta
- vii. Kondisi ekonomi secara umum.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

In supporting the implementation of integrated risk management, Bank encourage the active monitoring by Board of Directors and Board of Commissioners, such as through SKMRT under supervision of Integrated Risk Monitoring Committee, whereas at the Board of Commissioners level through the Integrated Corporate Governance Committee.

Credit risk

Credit risk is the risk by debtors and/or counterparty's failure to fulfill their obligations. The objective of credit risk management is to control and manage credit risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.

In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operations, that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on OJK regulations and other external regulatory and risk management policies related to credit. Management of credit risk include lending activities and other credit risk exposures such as placement, purchase of securities and investments, which are managed comprehensively at both portfolio and transaction.

The Bank evaluates the credit risk level related to financing the customers or projects by considering various factors, which include the following:

- i. Historical and projected financial condition, including statement of financial position, profit or loss, and statement of cash flows of the customers;*
- ii. Credit history;*
- iii. Quality, performance and experience of the customer's management;*
- iv. Customer's industry sector;*
- v. Debtor's collateral quality, both in form of tangible assets or cash equivalents;*
- vi. Customer's competitive position in the industry; and*
- vii. General economic conditions.*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Terhadap eksposur risiko kredit yang lebih khusus seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang mungkin berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas dan eksposur risiko kredit harus diproses melalui komite kredit dan/atau komite lainnya.

Selain itu, pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio pinjaman yang bermasalah maupun eksposur risiko kredit lain. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah restrukturisasi fasilitas pinjaman yang bermasalah, pengambilalihan agunan, dan pembentukan cadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara komprehensif. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit.

Manajemen risiko kredit diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan pinjaman yang berprinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari risiko penurunan kualitas kredit atau menjadi *Non Performing Loan* (NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

i. Pengukuran risiko kredit

Dalam mengukur risiko kredit untuk pinjaman yang diberikan, Bank mempertimbangkan estimasi kerugian saat debitur kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya dan estimasi kerugian atas kewajiban debitur yang telah wanprestasi. Untuk mengelola dan memantau risiko atas penyaluran pinjaman, secara rutin Bank melakukan analisis terhadap portofolio pinjaman dan segmentasi bisnis berdasarkan kualitas kredit dari debitur.

ii. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Untuk menghindari risiko konsentrasi kredit, Bank menetapkan limit eksposur untuk setiap nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga dalam kebijakan batas maksimum pemberian pinjaman.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

In relation to the specific credit risk exposure such as individual credit, inter-bank facility and others, the Bank separately evaluates based on other factors that may be different, according to the specific characteristics of each exposure. The approval process of facility with credit risk exposure are executed based on a principal that each facility and credit risk exposure approval must be processed through the credit committee and/or other committee.

Furthermore, specific credit risk management is performed on non-performing loan portfolio and other credit risk exposures. Such efforts, among others, are restructuring on non-performing loans, foreclosing assets and providing allowances to cover potential losses, and write-off. The Bank has identified, measured, monitored, and controlled risks which covers credit risk profile in a comprehensive risk management. In order to control credit risk in a comprehensive manner, the Bank continues to review and accomplish the implementation of credit risk control function.

Credit risk management is mainly to improve the balance of credit expansion and the prudent credit management that could mitigate the risk of the deterioration of loan quality or loans from becoming Non Performing Loan, and to optimise the use of capital allocated for the credit risk.

i. Credit risk measurement

In measuring credit risk for loans, the Bank considers the estimated losses when debtor may be unable to meet its obligations and estimated losses on defaulting debtor's liabilities. To manage and monitor the credit risk, the Bank conducts a regular analysis of the loan portfolio and business segmentation based on the credit quality of debtor.

ii. Risk limit control and mitigation policies

To minimise the credit concentration risk, the Bank sets an exposure limit to each related and third parties as mentioned in the maximum lending limit policy.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Bank mengelola, membatasi, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit, secara khusus terhadap debitur individu maupun kelompok, dan industri maupun geografis.

Batas pemberian pinjaman ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi dan evaluasi kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi.

Dalam proses pengajuan pinjaman, pembelian efek-efek maupun penempatan pada bank lain, Bank menetapkan *dual control* dalam rangka *four eyes principles* yang melibatkan petugas pemasaran, petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang.

Beberapa pengendalian spesifik lainnya dan pengukuran mitigasi dijelaskan di bawah ini:

Agunan

Pengelolaan risiko kredit terhadap pinjaman yang diberikan tidak hanya menjaga kualitas pinjaman namun juga memitigasi risiko dengan tambahan aset sebagai jaminan atas kewajiban kontraktual debitur. Beberapa jenis agunan yang diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit antara lain:

- Kas (Deposito)
- Tanah dan/atau bangunan
- Mesin dan peralatan
- Kendaraan bermotor
- Piutang
- Persediaan
- Garansi perorangan/Perusahaan/Bank

iii. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi terjadi. Untuk fasilitas pinjaman kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Risk limit control and mitigation policies (continued)

The Bank manages, limits, and controls the credit concentration risk, in particular, to individual counterparties and groups, and to industries and geographies.

Lending limits are reviewed in the light of changing market and economic conditions and periodic credit reviews and assessments of probability of default.

In the loan application process, purchase of securities and placement with other banks, the Bank sets dual control as part of four eyes principles which involve marketing officers, supervisors and authorised approvers.

Some other specific controls and the mitigation measurement are explained as follows:

Collateral

Risk management of loans, not only maintain loans quality but also to mitigate the risk with additional assets as collateral to cover financial contractual obligation of debtors. Some of acceptable collateral to mitigate the credit risk such as:

- Cash (Deposits)
- Land and/or building
- Machinery and equipment
- Vehicle
- Trade receivables
- Inventory
- Personal/Corporate/Bank Guarantee

iii. Maximum credit risk

For financial assets recognised on the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For bank guarantees, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations of the bank guarantees issued are called upon. For the unused loan facilities, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

iii. Risiko kredit maksimum (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<u>Laporan posisi keuangan</u>			<u>Statement of financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.506.565.848	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	296.298.919	228.384.427	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	916.367.530	858.340.530	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6.285.563.736	4.818.553.397	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	636.732.554	839.432.375	Securities purchased under resale agreement
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	386.167.151	416.231.152	Interest receivable
Pinjaman yang diberikan pembiayaan dan piutang syariah	18.628.743.177	15.824.611.091	Loans, sharia financing and receivables
Penyertaan saham	215.930.505	242.104.323	Investment in shares
Tagihan Akseptasi	12.474.839	7.754.446	Acceptance receivables
Aset lain-lain	23.076.537	29.246.923	Other assets
Jumlah	28.894.431.798	24.771.224.512	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(614.260.677)	(585.869.064)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	28.280.171.121	24.185.355.448	Total - net

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The maximum credit risk exposures relating to administrative accounts as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rekening administratif			Administrative accounts
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	5.297.647.138	4.033.693.802	Unused loan facilities
Letter of credit	60.563.964	18.705.728	Letter of credit
Garansi yang diterbitkan	982.802.950	347.627.606	Guarantees issued
Jumlah	6.341.014.052	4.400.027.136	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.178.357)	(241.681)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	6.339.835.695	4.399.785.455	Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

iii. Risiko kredit maksimum (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebelum memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai kredit dan agunan. Untuk aset keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bruto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 64,47% dan 63,88% dari jumlah eksposur maksimum adalah berasal dari pinjaman yang diberikan (sebelum memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai).

iv. Evaluasi penurunan nilai

Untuk tujuan akuntansi, Bank menggunakan model kerugian kredit ekspektasian untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai pinjaman yang diberikan termasuk adanya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal yang diketahui. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dalam 2 (dua) area yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan evaluasi penurunan nilai secara kolektif.

a. Evaluasi penurunan nilai secara individual

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing pinjaman signifikan yang diberikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai.

b. Evaluasi penurunan nilai secara kolektif

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas pinjaman yang diberikan yang tidak signifikan secara individual dan juga untuk pinjaman signifikan yang diberikan yang tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

iii. Maximum credit risk (continued)

The table above shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2023 and 2022, gross of allowance for impairment losses and collateral. For financial assets, the exposures set out above are based on the gross carrying value as disclosed in the statements of financial position.

As mentioned above, as of December 31, 2023 and 2022, amounted to 64.47% and 63.88% of the total maximum exposure, respectively, is derived from loans (gross of allowance for impairment losses).

iv. Impairment assessment

For accounting purposes, the Bank uses an expected credit loss model for the recognition of losses on impaired financial assets.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 30 (thirty) days and 90 (ninety) days or there are any known difficulties, or infringement of the original terms of the contract. The Bank addresses impairment assessment in 2 (two) areas: individually assessed allowances and collectively assessed allowances.

a. Individually assessed allowances

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loans on an individual basis and have objective evidence of impairment.

b. Collectively assessed allowances

Allowances for impairment losses are assessed collectively for losses on loans that are not individually significant and for individually significant loans with no objective evidence of impairment.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

v. Kualitas aset keuangan

v. Quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As of December 31, 2023 and 2022, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

31 Desember/ December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	-	-	1.493.076.850	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	296.298.919	-	-	296.298.919	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	916.367.530	-	-	916.367.530	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6.285.563.736	-	-	6.285.563.736	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	636.732.554	-	-	636.732.554	Securities purchased under resale agreement
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah	16.834.895.372	1.050.384.426	743.463.379	18.628.743.177	Loans, sharia financing and receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	286.842.088	99.325.063	-	386.167.151	Interest receivables
Tagihan akseptasi	12.474.839	-	-	12.474.839	Acceptance Receivable
Penyertaan saham	215.930.505	-	-	215.930.505	Investment in shares
Aset lain-lain	23.076.537	-	-	23.076.537	Other assets
Jumlah	27.001.258.930	1.149.709.489	743.463.379	28.894.431.798	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(614.260.677)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih				28.280.171.121	Total - net

31 Desember/ December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.506.565.848	-	-	1.506.565.848	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	228.384.427	-	-	228.384.427	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	858.340.530	-	-	858.340.530	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.818.553.397	-	-	4.818.553.397	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	839.432.375	-	-	839.432.375	Securities purchased under resale agreement
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah	13.749.721.837	1.406.262.727	668.626.527	15.824.611.091	Loans, sharia financing and receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	271.739.068	144.492.084	-	416.231.152	Interest receivables
Tagihan akseptasi	7.754.446	-	-	7.754.446	Acceptance Receivable
Penyertaan saham	242.104.323	-	-	242.104.323	Investment in shares
Aset lain-lain	29.246.923	-	-	29.246.923	Other assets
Jumlah	22.551.843.174	1.550.754.811	668.626.527	24.771.224.512	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(585.869.064)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih				24.185.355.448	Total - net

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

v. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan kualitas kredit berdasarkan segmen klien dipantau dan dianalisis berdasarkan hari tunggakan (*days past due*) dan kriteria kualitatif sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2g.

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan debitur.

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Bank. Manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank sebagai berikut:

- Mempersiapkan skema restrukturisasi/relaksasi kredit sementara untuk debitur yang terdampak COVID-19.
- Melakukan penyaluran pinjaman yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.

Manajemen juga melakukan analisa berdasarkan risiko atas sektor-sektor yang paling terkena dampak penurunan akibat COVID-19, dan melakukan review kualitatif atas perhitungan ECL terhadap sektor-sektor tersebut untuk meyakinkan bahwa ECL mencukupi.

Untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha serta kemampuan membayar kewajiban, Bank dapat memberikan relaksasi kredit antara lain dalam bentuk perpanjangan tenor disesuaikan dengan siklus usaha debitur saat ini (pada umumnya untuk masa hingga 1 tahun). Sementara untuk debitur yang membutuhkan waktu pemulihan relatif lebih lama, dapat diberikan restrukturisasi kredit, antara lain dalam bentuk pemberian masa tenggang/ penundaan pembayaran dan/atau penurunan suku bunga.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

v. Quality of financial assets (continued)

In determining credit quality by client segment are monitored and analysed based on days past due and qualitative criteria as explained in Note 2g.

Where there is doubt on the ability of the debtors to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the debtors.

Direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak are impacting the global economy, markets, and the counterparties and debtor of the Bank. Management has taking actions to mitigate the impacts on the Bank's business as follow:

- *Establish various temporary credit restructuring/relaxation scheme for customers affected by COVID-19.*
- *Provide loans to customers selectively with prudent principles.*
- *Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.*
- *Manage operational expenses efficiently.*
- *Implement liquidity risk management optimally to secure the Bank's liquidity position.*

Management also performs a risk-based assessment of those sectors most impacted by the COVID-19 downturn, and performs a qualitative review of the ECL calculation associated with those sectors to ensure that overall ECL is sufficient.

For debtors who still have good business prospects and the ability to pay, the Bank can provide loan relaxation, among others through tenor extension in accordance with the debtor's current business cycle (generally for period up to 1 year). Meanwhile, for debtors who need relatively longer recovery time, its can be given loan restructuring, among others in the form of grace period/payment holiday and/or a reduction in interest rates.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

v. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat 235 dan 326 debitur dengan total pinjaman sebesar Rp2.868.304.020 dan Rp4.527.782.755 yang telah direstrukturisasi.

Manajemen telah berupaya untuk memperbaiki kualitas kredit Bank dan menjaga rasio NPL dibawah ketentuan maksimal yang dipersyaratkan oleh OJK dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan *cessie* pinjaman untuk debitur yang masuk ke dalam kategori pinjaman yang bermasalah;
- Mentransfer pinjaman untuk debitur yang masuk ke dalam kategori pinjaman yang bermasalah menjadi Aset Yang Diambil Alih ("AYDA") dengan mengambil alih agunan yang dijaminkan oleh debitur;
- Membuat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tambahan untuk pinjaman; dan
- Melakukan restrukturisasi pinjaman sesuai dengan ketentuan dari OJK.

Mengingat model perhitungan kerugian kredit ekspektasian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi yang abnormal, maka Manajemen juga sudah memperhitungkan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar. Dalam menilai kondisi masa depan, manajemen telah mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia, termasuk kebijakan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung dan mengurangi dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, dan mendorong Bank untuk menunda atau merestrukturisasi pinjaman.

Dalam kondisi normal, penjadwalan ulang atau restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke *Stage 2*. Namun, dalam kondisi saat ini, manajemen telah mempertimbangkan bahwa restrukturisasi atau peristiwa tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan jika debitur diharapkan untuk memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode restrukturisasi atau relaksasi.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

v. Quality of financial assets (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, there are 235 and 326 debtors with total outstanding loans of Rp2,868,304,020 and Rp4,527,782,755 respectively which have been restructured.

Management has made efforts to improve the quality of the Bank's credit and maintain the NPL ratio below the maximum stipulated by the OJK by doing the following:

- Conduct a loan *cessie* for debtors who fall into the non-performing loan category;
- Transferring loans for debtors that are categorised as non-performing loans into Foreclosed Assets ("AYDA") by taking over the collateral guaranteed by the debtor;
- Create an additional allowance for impairment losses for loans; and
- Performed loan restructuring in accordance with the provisions of the OJK.

Considering that the expected credit loss calculation model cannot produce an accurate estimation of losses in abnormal economic conditions, Management has also taken into account several adjustment factors to ensure the expected value of the expected credit loss recognised in the financial statements is stated fairly. In assessing future conditions, management has considered various relevant information available, including COVID-19 policies issued by the government to support and mitigate the impact of the spread of COVID-19 on the economy, and encouragement for banks to defer or restructure loans.

Under normal conditions, a rescheduling or restructuring of a loan would indicate a significant increase in credit risk and a move to *Stage 2*. However, in the current condition, management has considered that such a restructuring or event was not automatically trigger a significant increase in credit risk if the debtor would be expected to recover and fulfill their contractual obligations after the end of the restructuring or relaxation period.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

v. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian

Lifetime

Kerugian kredit ekspektasian diestimasikan berdasarkan periode dimana Bank terpapar pada risiko kredit. Bank memiliki proses review dari setiap model bisnis/produknya. Baik kredit *revolving* maupun *non-revolving*, untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian menggunakan jangka waktu kontraktual sesuai dengan jangka waktu kontraknya. Penetapan periode tersebut khususnya untuk kredit revolving dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dimana proses perpanjangan kredit revolving yang diberikan oleh Bank dilakukan melalui kajian yang *robust* yaitu melalui evaluasi yang substantif dibandingkan administratif.

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi *forward looking* dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali nasabah Bank.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Diantaranya adalah indeks barang konsumtif, inflasi, dan GDP Nasional.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

v. Quality of financial assets (continued)

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Lifetime

Expected credit loss is estimated based on the period over which the Bank is exposed to credit risk. The Bank has a review process for each of its business models/products. Both revolving and non-revolving loans, to calculate expected credit losses using the contractual term in accordance with the contract period. Determination of this period, especially for revolving credit, is carried out by taking into account the conditions in which the Bank carries out the process of extending revolving credit through a robust study, namely through a substantive compared to administrative evaluation.

The developing economic environment is the key determinant of the ability of a Bank's customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of SFAS 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Bank was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Bank should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the Bank's customer.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are consumer goods index, inflation and National GDP.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

v. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Sensitivitas MEV terhadap ECL

Perhitungan ECL bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, alih-alih variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

Analisis sensitivitas ECL dilakukan untuk mengeksplorasi efek dari pandemi global COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. *Assets & Liabilities Committee (ALCO)* merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar.

Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana dan pinjaman, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Untuk itu, Bank harus dan selalu melakukan identifikasi dan pemantauan dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi adanya risiko pasar. LFR (*Loan to Funding Ratio*) Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 81,93% dan 81,08%.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

v. Quality of financial assets (continued)

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss (continued)

Sensitivity of MEV to ECL

The ECL calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Bank believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

A sensitivity analysis of ECL was undertaken to explore the effect of the global COVID-19 pandemic that leads to Indonesia economy slowdown.

Market risk

Market risk is the risk on the statements of financial position and administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of change of option price. Market risk include, among others, interest rate risk, foreign exchange risk, equity risk and commodity risk. Interest rate risk, foreign exchange risk and commodity risk can come from trading book and banking book, whereas equity risk come from trading book. *Assets & Liabilities Committee (ALCO)* is a committee assisting Directors in monitoring and maintaining market risk.

Market risk is adhered on functional activities of the Bank such as treasury activity and investment in securities and money market or investment in other financing institution, funding and lending, funding activity and issued obligation and financing trading activity. The Bank must and always identify and monitor from time to time to anticipate the market risk. The Loan to Funding Ratio (LFR) of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 are 81.93% and 81.08% respectively.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan Metode Standar untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk risiko pasar.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.

Dalam rangka meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Bank melakukan upaya-upaya sebagai berikut, antara lain:

- Meningkatkan fungsi dan peran *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) dalam rangka identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar.
- Penerapan Kebijakan *Assets & Liabilities Management* (ALMA) untuk pihak berelasi dalam penerapan manajemen risiko Bank dan merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja *Treasury* dalam melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti:
 - i. Melakukan identifikasi risiko tingkat suku bunga yang berasal dari transaksi dan portofolio Bank pada Efek-efek;
 - ii. Penetapan sistem pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan menggunakan *gap analysis* atau *duration analysis*; dan
 - iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

The objective of market risk management is to identify, measure, control, and manage market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the returns. This is done through a comprehensive policy and limit framework to identify, measure, and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank.

In measuring market risk, the Bank uses the Standardised Method in calculating Capital Adequacy Ratio (CAR) for market risk.

Interest rate risk

Interest rate risk arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial instruments.

To minimise interest rate risk, the Bank makes the following efforts, among others:

- *Increasing function and role of Assets & Liabilities Committee (ALCO) in identifying and determining interest rate and third party funds to anticipate fluctuations in market interest rate.*
- *Application of Assets & Liabilities Management's (ALMA) policy to related parties in application of risk management of the Bank and it is one of a guidance for Treasury working unit in money market and capital market transactions such as:*
 - i. Identifying interest rate risk from transaction and Bank's portfolio of securities;*
 - ii. Determining measuring system of interest rate risk using gap analysis or duration analysis; and*
 - iii. Strategies of investment and collection of funds.*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember/December 31,	
	2023	2022
Aset		
Giro pada bank lain	0,00% - 0,25%	0,00% - 1,30%
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain	5,20% - 6,45%	4,75% - 5,10%
Efek-efek	4,95% - 11,00%	4,20% - 10,25%
Efek-efek yang dibeli dengan		
janji dijual kembali	6,25% - 6,35%	5,50% - 5,80%
Pinjaman yang diberikan,		
pembiayaan dan piutang syariah	1,00% - 20,00%	1,00% - 21,55%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	0,00% - 8,20%	0,00% - 7,00%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 6,50%	0,00% - 6,00%
Efek-efek yang diterbitkan	9,25% - 11,75%	10,30%
Efek-efek yang dijual dengan janji		
dibeli kembali	6,25% - 6,35%	5,80%

Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas perubahan tingkat suku bunga (tidak diaudit):

	31 Desember/December 31, 2023	
	Peningkatan dalam 100 basis poin/ Increase by 100 basis point	Penurunan dalam 100 basis poin/ Decrease by 100 basis point
Pengaruh terhadap laba bersih	5.841.118	(5.841.118)
	31 Desember/December 31, 2022	
	Peningkatan dalam 100 basis poin/ Increase by 100 basis point	Penurunan dalam 100 basis poin/ Decrease by 100 basis point
Pengaruh terhadap laba bersih	7.380.239	(7.380.239)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

The following table summarises the range of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities for the years ended December 31, 2023 and 2022:

	Assets
Giro pada bank lain	Current accounts with other banks
Penempatan pada	Placements with Bank
Bank Indonesia dan bank lain	Indonesia and other banks
Efek-efek	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan	Securities purchased under
janji dijual kembali	resale agreements
Pinjaman yang diberikan,	Loans, sharia
pembiayaan dan piutang syariah	financing and receivables
Liabilitas	Liabilities
Simpanan nasabah	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	Deposits from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji	Securities sold
dibeli kembali	under repurchase agreements

Sensitivity to net income

The following table summarises the sensitivity of Bank's net income to movement of interest rates on December 31, 2023 and 2022 (unaudited):

Impact to net income

Impact to net income

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada jumlah yang sama, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba atas perubahan beberapa tingkat suku bunga sementara yang lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi hingga jatuh tempo.

Risiko mata uang

Bank memiliki eksposur risiko mata uang akibat adanya transaksi dalam valuta asing. Bank memonitor risiko konsentrasi yang terjadi untuk setiap valuta sehubungan dengan penjabaran transaksi dalam valuta asing ke dalam aset dan liabilitas moneter dalam Rupiah.

Pengelolaan posisi valuta asing Bank dilakukan dengan cara mengendalikan Posisi Devisa Neto ("PDN") Bank secara keseluruhan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

The projection above assumes that interest rates of all maturities move by the same amount and, therefore, do not reflect the profit potential impact on the changes of some interest rates while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

Currency risk

The Bank is exposed to currency risk through transaction in foreign currencies. The Bank monitors any concentration risk in relation to any individual currency in regard to the translation of foreign currency transactions into monetary assets and liabilities in Rupiah.

The Bank's foreign currency position management is conducted by managing the Bank's overall Net Open Position ("NOP").

31 Desember/December 31, 2023

Valuta	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto (nilai absolut) Net Open Position (absolute amount)	Currencies
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				Aggregate (statements of financial position and administrative accounts)
Dolar Amerika Serikat	697.540.237	710.115.633	12.575.396	United States Dollar
Yen Jepang	2.678.392	2.576.994	101.398	Japanese Yen
Dolar Singapura	1.759.234	1.903.038	143.804	Singapore Dollar
Yuan China	1.464.889	-	1.464.889	Chinese Yuan
Euro Eropa	1.084.572	1.551.542	466.970	European Euro
Dolar Australia	171.699	-	171.699	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	26.300	-	26.300	Great Britain Poundsterling
Dolar New Zealand	22.851	-	22.851	New Zealand Dollar
Dolar Taiwan	7.704	-	7.704	New Taiwan Dollar
Swiss Franc	7.869	-	7.869	Swiss Franc
Dolar Hongkong	5.892	-	5.892	Hongkong Dollar
Won Korea	1.497	-	1.497	Korean Won
Riyal Saudi	1.437	-	1.437	Riyal Saudi
Dolar Kanada	581	-	581	Canadian Dollar
Baht Thailand	571	-	571	Thailand Baht
Ringgit Malaysia	436	-	436	Malaysian Ringgit
Total			14.999.294	Total
Jumlah ekuitas			3.839.922.636	Total equity
Rasio PDN			0,39%	NOP Ratio

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana dan transaksi antar Bank.

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap deposan, investor atau kreditor yang diantaranya disebabkan dari keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan Bank untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko likuiditas.

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed by:

- a. *Inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or*
- b. *Inability to generate cash flows from funding and interbank transactions.*

Liquidity risk related with the possibility of Bank's inability to meet the maturing obligations to its customers, investors or creditors in which due to the limitation of funding line or inability of the Bank to liquidate its assets with the fair value. Assets and Liabilities Committee (ALCO) is a committee under Director who monitor and manage liquidity risk.

In general, the main purpose of liquidity risk management is to minimise the possibility of the Bank's inability to obtain sources of financing. Thus the Bank can fulfill any financial obligations as they fall due in a timely manner, and in order to maintain an adequate and optimal level of liquidity.

Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, which basically set the implementation of the Bank's Liquidity Risk Management, Liquidity Risk Management Policy which generally include liquidity risk management strategy, the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) and Information Systems Risk Management and Internal Control System by implementing internal control and review of appropriate independent of the implementation of Risk Management for liquidity risk is carried out by the Internal Audit (SKAI) and Risk Management Unit (SKMR).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk dengan arus kas keluar pada waktu tertentu. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank market*, *wholesale* dan *professional market* lainnya, dalam upaya membantu aktivitas utama bisnis Bank seperti pengumpulan dana dan pemberian pinjaman.

Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan perbedaan antara aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan, adalah meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan, memantau perpanjangan simpanan, mencari nasabah baru serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan dari nasabah. Di samping itu, Bank juga mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Bank membutuhkan dana.

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The objective of liquidity risk management is to ensure that current and future fund requirements can be met both in normal or stress condition.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows against cash outflows on any given day. This is centrally managed within Treasury which has direct and authorised access to interbank, wholesale and other professional markets, to supplement core Bank activities such as deposit taking and lending.

The steps taken by the Bank in connection with the maturity gap mismatch between its financial assets and liabilities due in 1 (one) to 3 (three) months such as improving its services to customers, monitor the extension of deposit, search for new customers and offering services including attractive products and interest rates in order to maintain stability and continuity of deposits from customers. In addition, the Bank also intensify collection efforts from non-performing debtors and placing excess funds on marketable securities so they can be withdrawn at any time as the Bank needs a fund.

The maturity tables below provide information about maturities on contractual undiscounted cash flows of liabilities on December 31, 2023 and 2022:

		31 Desember/ December 31, 2023						
		Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ Dibayarkan sesuai permintaan/ No contractual maturity/ Repayable on demand	≤ 1 bulan/ < 1 month	> 1 bulan- 3 bulan/ > 1 month - 3 months	> 3 bulan- 1 tahun/ > 3 months - 1 year	> 1 - 5 tahun/ > 1 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Liabilitas		Jumlah/ Total						Liabilities
Simpanan nasabah	22.688.095.000	5.366.287.229	8.801.219.060	4.427.579.482	3.703.009.229	390.000.000	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.105.227.338	261.365.349	816.024.281	24.768.125	3.069.583	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	1.717.750.004	-	-	-	52.750.000	1.665.000.004	-	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	644.675.834	-	644.675.834	-	-	-	-	Securities sold under repurchase agreements
Liabilitas lain-lain	160.229.698	-	102.398.239	-	10.521.933	47.309.526	-	Other liabilities
	26.315.977.874	5.627.652.578	10.364.317.414	4.452.347.607	3.769.350.745	2.102.309.530	-	

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

		31 Desember/ December 31, 2022							
		Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ Dibayarkan sesuai permintaan/ No contractual maturity/ Repayable on demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 bulan- 3 bulan/ > 1 month 3 months	> 3 bulan- 1 tahun/ > 3 months 1 year	> 1 - 5 tahun/ > 1 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Jumlah/ Total									
Liabilitas									
Simpanan nasabah	19.371.837.637	5.532.105.602	7.383.867.327	3.515.512.381	2.940.352.327	-	-	Deposits from customers	
Simpanan dari bank lain	1.334.952.620	255.498.102	1.033.000.000	46.454.518	-	-	-	Deposits from other banks	
Efek-efek yang diterbitkan	1.051.903.552	-	-	-	199.720.232	852.183.320	-	Securities issued	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	240.865.160	-	240.865.160	-	-	-	-	Securities sold under repurchase agreements	
Liabilitas lain-lain	127.766.009	-	73.958.949	-	20.706.772	33.100.288	-	Other liabilities	
	22.127.324.978	5.787.603.704	8.731.691.436	3.561.966.899	3.160.779.331	885.283.608	-		

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan cash outflow dari rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The tables below provide information about estimated cash outflow of off-balance sheet as of December 31, 2023 and 2022:

		31 Desember/ December 31, 2023							
		Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ Dibayarkan sesuai permintaan/ No contractual maturity/ Repayable on demand	Kurang dari/ Less than 1 bulan/month	1 – 3 bulan/ months	3 – 12 bulan/ months	1 – 5 tahun/ years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Jumlah/ Total									
Fasilitas pinjaman yang									
belum digunakan	5.297.647.138	-	1.020.187.729	955.965.602	2.403.674.105	561.174.934	356.644.768	Unused loan facilities	
Letter of credit	60.563.964	-	37.759.837	-	22.804.127	-	-	Letter of credits	
Garansi yang diterbitkan	982.802.950	-	3.362.103	115.034.847	855.733.903	8.672.097	-	Guarantees issued	
Jumlah	6.341.014.052	-	1.061.309.669	1.071.000.449	3.282.212.135	569.847.031	356.644.768	Total	

		31 Desember/ December 31, 2022							
		Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ Dibayarkan sesuai permintaan/ No contractual maturity/ Repayable on demand	Kurang dari/ Less than 1 bulan/month	1 – 3 bulan/ months	3 – 12 bulan/ months	1 – 5 tahun/ years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Jumlah/ Total									
Fasilitas pinjaman yang									
belum digunakan	4.033.693.802	-	644.368.921	339.019.681	3.041.353.700	8.951.500	-	Unused loan facilities	
Letter of credit	18.705.728	-	-	-	-	18.705.728	-	Letter of credits	
Garansi yang diterbitkan	347.627.606	-	40.022.563	25.496.815	281.160.828	947.400	-	Guarantees issued	
Jumlah	4.400.027.136	-	684.391.484	364.516.496	3.322.514.528	28.604.628	-	Total	

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failure in internal processes, people and systems and/or from external problems that affect the Bank's operations.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi Bank hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal Bank. Tujuan Bank dalam mengelola risiko operasional adalah meminimalisasi dampak kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempunyai dampak kerugian.

Bank menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Bank telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengkajian, mitigasi risiko serta dilakukan pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan *benefit* dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi atas risiko operasional yang telah diperhitungkan.

Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Bank. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat aspek keamanan dan kehandalan operasi dari teknologi informasi sehingga kesalahan manusia, *fraud*, kesalahan proses dan potensi kegagalan sistem yang dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan bisnis dapat ditekan dan diantisipasi lebih dini.

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melaksanakan penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank atas profil risiko Bank dan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui rapat yang dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

This type of risk is inherent in all business processes, operational activities, systems and products of the Bank, from Head Office to Cash Office. Failure to manage operational risks properly could lead to financial losses, loss of employee safety, and reputation of the Bank until affected capital adequacy of the Bank. The Bank's objective in managing operational risk is to minimise the impact of the failure or inadequate internal process, people, system or from external events, which could have financial loss impact.

The Bank applies the operational risk management with the main target to ensure that the Bank has conducted a risk management process that includes risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation and conducted monitoring and reporting on implementation. This is done with the ultimate target to maximise the benefits of a product/service or process transactions/activities with potential operational risks that have been taken into account.

A risk assessment process is carried out to evaluate the adequacy of internal control and risk identification and assessment in every process and product in each working unit to ensure compliance with the policies, rules and limits set down by the Bank's management. Operational risk management is also performed by strengthening security and operational aspects of information technology so that human error, fraud, processing errors and system failure that can affect business continuity can be anticipated and reduced.

In monitoring operational risk, the Internal Audit (SKAI) conducted an assessment of the implementation of risk management policies and procedures in each functional activity, new products or services and Risk Management Unit (SKMR) function ensures the identification, measurement, monitoring and risk control work effectively on any functional activity, new products or services.

Monitoring by the Bank's Boards of Commissioners and Director actively monitor of the Bank's risk profile and its risk management implementation through meeting that are conducted regularly.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Selain kebijakan dan metode tersebut di atas, Bank juga telah menerapkan upaya yang terus menerus dikembangkan untuk membangun lingkungan budaya yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan pada tiga lini pertahanan (*three line of defense*) yaitu pemberdayaan unit bisnis sebagai lini pertahanan pertama, pembentukan fungsi manajemen risiko operasional sebagai lini pertahanan kedua dan koordinasi kerja dengan Internal Audit (SKAI) sebagai lini pertahanan ketiga.

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Bank harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh regulator industri perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan Bank dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Bank. Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan kepada Bank memiliki nilai yang material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Bank.

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan beberapa faktor-faktor yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Pengendalian risiko hukum dilakukan Bank dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hubungan kerja dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan maupun persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum termasuk antisipasi terhadap potensi tuntutan dari pihak eksternal.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Other than policy and the above mentioned method, the Bank has continued developing its culture and support the implementation for operational risk. The three line of defense implementation, which consist of unit business as the first line of defense, establishment of operational risk management as second line of defense and coordination with Internal Audit (SKAI) as third line of defense.

Legal risk

Legal risk is the risk related to legal claims and/or weaknesses in the juridical aspect. Such weaknesses in legal aspect is caused, among others, by the lack of the supporting legislation or the weaknesses of contracts such as incomplete requirements for a valid contract and imperfect document contract.

As an entity which is governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank should always comply with all such laws and regulations issued by the regulator in the banking industry in Indonesia. In addition, the Bank should also follow all prevailing rules and regulations in the society whether directly or indirectly related with the business activities conducted by the Bank. Failure by the Bank to comply with such prevailing laws and regulations may give rise to legal claims against the Bank. If legal claims against the Bank are material in amounts, then it may directly affect the Bank's financial performance.

Bank implements legal risk identification based on several factors include lawsuits, lack of rule or law that supports the regulation and the weakness of the agreement. The Bank performed legal risk control to ensure that all activities and working relationships with third parties have been based on the rules and requirements that can protect the Bank's interests from legal terms including the anticipation of potential demands from external parties.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko hukum (lanjutan)

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan dari aspek hukum, Bank memiliki Biro Hukum. Biro tersebut memiliki peranan:

- 1) melakukan analisis hukum atas produk dan aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan aktivitas baru tersebut;
- 2) memberikan analisis/pendapat hukum;
- 3) memberikan pendapat atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan;
- 4) memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga; dan
- 5) melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat.

Dengan adanya biro tersebut, maka kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek hukum dari Bank.

Selain itu, Biro Hukum juga memiliki bagian Litigasi untuk menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir seminimum mungkin.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Bank senantiasa memperhitungkan potensi kerugian.

Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan Bank dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Bank. Apabila risiko ini dihadapi oleh Bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Bank.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal risk (continued)

To mitigate the possible legal risk caused by legal claims or weaknesses in legal aspects, the Bank has a General Legal Counsel Bureau. Such division has the following functions:

- 1) *to provide legal analysis on new product and activity and prepare standard legal document related with such new product and activity;*
- 2) *to provide legal analysis/advice;*
- 3) *to provide advice on legal exposure due to change of laws or regulations;*
- 4) *to review any contracts between the Bank and third party; and*
- 5) *to conduct a periodical review on contracts which have been executed.*

Based on the bureau above, legal policy and legal document standards related to the product or banking facilities offered by the Bank to public, whereby the legal policy and legal document standards are intentionally made in accordance with the prevailing laws and regulations also considering the interests in the legal aspect of the Bank.

In addition, the General Legal Counsel Bureau also has a Litigation division to handle every legal case related to litigation so that the possible legal risk can be minimised as minimum as possible.

The legal risk is also conducted by monitoring the development of legal cases and take lesson learnt principle from those cases. The management of legal cases conducted by the Bank is calculating potential loss at all time.

Reputation risk

Reputation risk is the risk related to the decreasing level of stakeholder's confidence arising from the negative perception on the Bank. Reputation risk is inherent in every activity conducted by the Bank. The Bank's failure to protect its reputation in the public's eye may result in negative view as well as perception by the public towards the Bank. If the Bank faces this risk, then in the short run, the Bank may lose the customer's trust that will ultimately result in a negative impact to the Bank's income and volume of activities.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko reputasi (lanjutan)

Risiko reputasi dapat berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan nasabah sehingga jumlah nasabah ataupun pendapatan Bank menurun. Dalam mengelola risiko reputasi, Bank berupaya untuk menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan terbaik dalam menangani keluhan dan memberikan kepuasan kepada nasabah untuk menghindari munculnya keluhan tersebut di media.

Corporate Secretary setiap hari melakukan pengawasan atas pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Sedangkan pengawasan atas keluhan nasabah yang disampaikan langsung ke Bank dilakukan oleh *Group Quality Service* untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang akan ditempuh Bank. Upaya mitigasi risiko reputasi juga dilakukan saat Bank meluncurkan produk/layanan/program baru dengan menganalisis risiko reputasi yang mungkin timbul dan bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Demikian pula, untuk informasi yang material atau yang penting untuk diketahui oleh nasabah, *Corporate Secretary* juga menyiapkan panduan untuk para *frontliner* dan *spokespersons* agar mereka bisa menjelaskan informasi tersebut secara benar dan proporsional kepada nasabah.

Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau penerapan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank di masa yang akan datang.

Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif Bank di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan Bank dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu akan mengakibatkan kegagalan bagi Bank untuk mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputation risk (continued)

Reputational risks can have a direct impact on the decreasing of customer confidence as a result the number of customers or the Bank's income decreased. In managing reputation risk, the Bank seeks to maintain a reputation for providing the best service to handle complaints and provide satisfaction to customers to avoid the appearance of such complaints in media.

The Corporate Secretary performs a daily media monitoring of the news to observe negative publications or customer's complaints which appear in the media. The monitoring of customer's complaints which are submitted directly to the Bank is performed by the Group Quality Service for follow up action to resolve.

For negative news publication and customer's complaints which appear in the media, a clarification and appropriate response will be conducted in accordance with the steps undertaken by the Bank. Efforts to mitigate the reputation risk are also undertaken everytime when the Bank launches a new product/service/program by analysing the possibility of reputation risk that may arise and how to anticipate such risk. Moreover, for material or important information to be known by the customer, the Corporate Secretary also prepares guidelines for frontliners and spokespersons so that they are able to explain the information correctly and proportionately to customers.

Strategic risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in deciding and/or implementing a strategic decision as well as the failure in anticipating the changes in the business environment. Failure in formulating the right strategy may deteriorate the Bank's business in the future.

This risk also includes the Bank's ability to develop its competitiveness and create a Bank's competitiveness edge amidst the stiff competition in the banking industry. The inability of Bank to cope with such business challenges which are constantly changing from time to time will lead Bank to failure to accomplished determined vision.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko strategis (lanjutan)

Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara komprehensif dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan oleh Bank.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Penilaian Kualitas Aset; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu termasuk peraturan OJK dan Bank Indonesia yang relevan. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan serta perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Wujud penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain dengan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi, menilai dan mengevaluasi kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, memantau atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic risk (continued)

The Bank manages strategic risks through a comprehensive and collective consideration and decision-making processes encompassing areas of the supervisory and executive committee that influence and impact business decisions on policies and directions that the Bank will embark on.

Compliance risk

Compliance risk is the risks resulting from the failure of the Bank in fulfilling and/or implementing the prevailing laws and regulations. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Government, Central Bank and Financial Services Authority (OJK).

In general, the compliance risk is embedded in the Bank as a banking institution, such as: credit risks related to Capital Adequacy Ratio (CAR) regulations; Assessment of Assets Quality; Allowance for Impairment Losses (CKPN); Legal Lending Limit (LLL); Good Corporate Governance (GCG) and other risks related to certain regulations including OJK and Central Bank relevant regulations. The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to the Bank's business activities may affect the continuity of the Bank's operation.

Compliance risk may arise from legal behavior, which is the Bank's behavior or activity that deviates from or violates the provisions and/or laws and regulations, as well as organizational behavior, which is the Bank's behavior or activity that deviates from or in contrary to the generally accepted standards.

The implementation of compliance risk management, among others, is by achieving the implementation of compliance culture at all of the Bank's business activities at every organizational level, assessing and evaluating the adequacy and conformity of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures against the applicable provisions and regulations, monitoring the implementation of the Bank's prudential principles.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kepatuhan (lanjutan)

Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. Tingkat 1: input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik yang dapat diakses Bank pada tanggal pengukuran.
- ii. Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam kategori ini termasuk instrumen yang dinilai dengan menggunakan: harga kuotasian untuk instrumen yang serupa di pasar aktif; harga kuotasian untuk instrumen yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.
- iii. Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi. Dalam kategori ini termasuk semua instrumen dimana teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi ini memberikan dampak signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasian untuk instrumen serupa yang memerlukan penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance risk (continued)

The Bank implements early detection and management of compliance risks by providing assistance to business and operational units and new product and new activity and also evaluated the Bank's Guidelines and Procedures to ensure that all external regulations have been accommodated and implemented correctly.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy:

- i. Level 1: inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the Bank can access at the measurement date.
- ii. Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable either directly or indirectly. This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are not active; or other valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.
- iii. Level 3: inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan Bank yang diukur sebesar nilai wajar:

	31 Desember/ December 31, 2023				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek	1.328.291.579	1.097.502.547	-	2.425.794.126	Marketable securities
Penyertaan saham	-	-	0 ⁾	0 ⁾	Investment in shares
Jumlah	1.328.291.579	1.097.502.547	-	2.425.794.126	Total

⁾ nilai wajar saham PT Bima Multi Finance adalah sebesar Rp1 (dalam nilai penuh)

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The following table presents the Bank's financial instruments that are measured at fair value:

	31 Desember/ December 31, 2023				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek	1.328.291.579	1.097.502.547	-	2.425.794.126	Marketable securities
Penyertaan saham	-	-	0 ⁾	0 ⁾	Investment in shares
Jumlah	1.328.291.579	1.097.502.547	-	2.425.794.126	Total

⁾ fair value of shares in PT Bima Multi Finance are Rp1 (in full amount)

	31 Desember/ December 31, 2022				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek	593.209.954	1.565.738.441	-	2.158.948.395	Marketable securities
Penyertaan saham	-	-	31.877.279	31.877.279	Investment in shares
Jumlah	593.209.954	1.565.738.441	31.877.279	2.190.825.674	Total

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hierarki nilai wajar.

There is no transfer between level 1 and level 2 of fair value hierarchy.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan pada instrumen keuangan Bank yang diukur dengan tingkat 3 - hierarki nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

The following table presents the changes in Bank's financial instruments measured at level 3 - fair value hierarchy for the year ended December 31, 2023 and 2022.

	31 Desember/December 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Kerugian yang diakui pada laba rugi/ Loss recognised in profit or loss	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Penyertaan saham	31.877.279	-	(31.877.279)	-	Investment in shares

	31 Desember/December 31, 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Kerugian yang diakui pada laba rugi/ Loss recognised in profit or loss	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Penyertaan saham	34.886.943	-	(3.009.664)	31.877.279	Investment in shares

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank melakukan penilaian kembali atas nilai pasar 100% Ekuitas PT Bima Multi Finance. Berdasarkan laporan dari penilai Independen KJPP Tri, Santi dan Rekan yang ditandatangani oleh Santi Dewiyani, MAPPI (Cert.) pada tanggal 8 Desember 2023. Nilai wajar dari penyertaan saham sementara ditentukan menggunakan laporan keuangan per 30 September 2023 dengan pendekatan aset metode *Adjusted Book Value* (ABV) dan asumsi tingkat diskon likuiditas pasar sebesar 30%.

As of December 31, 2023, the Bank reassessed the market value of 100% Equity of PT Bima Multi Finance. Based on Independent Appraisal report from the independent appraiser KJPP Tri, Santi and Associates signed by Santi Dewiyani, MAPPI (Cert.) on December 8, 2023. The fair value of the temporary share investment was determined using the financial statements as of September 30, 2023 with an asset approach using the *Adjusted Book Value* (ABV) method and assumption the discount for lack of marketability of 30%.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 nilai wajar dari penyertaan saham sementara di PT Bima Multi Finance ditentukan dengan menggunakan model arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 11,15% dan 7,65% yang dihasilkan melalui analisa atas kinerja historis pada periode tahun 2014 - 2021 serta proyeksi kinerja yang dibuat oleh Manajemen PT Bima Multi Finance untuk periode tahun 2022 - 2027 berdasarkan rencana bisnis untuk masa yang akan datang yang telah disesuaikan untuk menghasilkan arus kas bersih untuk periode tahun 2022 - 2027.

Tabel berikut merangkum informasi kuantitatif mengenai asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar penyertaan saham sementara pada PT Bima Multi Finance.

	Rentang Input/Range of Input 31 Desember/December 31, 2022	
Tingkat diskonto	11,15%	<i>Discount rate</i>
Tingkat diskon likuiditas pasar	0,00%	<i>Discount for lack of marketability</i>
Suku bunga kontraktual	40,00%	<i>Contractual interest rate</i>
Rata-rata pembiayaan per unit	Rp10.443	<i>Average financing per unit</i>
Rata-rata tertimbang kenaikan Penjualan per tahun	17,70%	<i>Weighted average of increment in sales per year</i>
Tingkat kolektibilitas angsuran	72,00%-91,00%	<i>Collection rate for installment</i>

Input utama tingkat 3 yang digunakan oleh Bank didapatkan dan dievaluasi sebagai berikut:

- Tingkat diskonto ditentukan menggunakan biaya ekuitas. Semakin tinggi nilai diskonto, semakin rendah nilai wajar.
- Tingkat diskon likuiditas pasar adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek penilaian. Semakin tinggi nilai diskon likuiditas pasar, semakin rendah nilai wajar.
- Suku bunga kontraktual adalah suku bunga yang tercatat pada kontrak pembiayaan PT Bima Multi Finance. Semakin tinggi nilai suku bunga kontraktual, semakin tinggi nilai wajar.
- Rata-rata pembiayaan per unit adalah rata-rata nilai kontrak pembiayaan di PT Bima Multi Finance. Semakin tinggi nilai rata-rata pembiayaan per unit, semakin tinggi nilai wajar.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

As of December 31, 2022 the fair value of of temporary investment in shares in PT Bima Multi Finance is determined using a discounted cash flow model with a discount rate of 11.15% and 7.65% generated through analysis of historical performance in the period of 2014 - 2021 and the performance projections made by the Management of PT Bima Multi Finance for the period 2022 - 2027 based on adjusted future business plans to generate net cash flow for the period 2022 - 2027.

The following table summarises the quantitative information about the significant unobservable assumptions (level 3) used in the fair value measurements of temporary investment in shares in PT Bima Multi Finance.

The main level 3 inputs used by the Bank are derived and evaluated as follows:

- *Discount rate is determined using cost of equity. The higher the discount rate, the lower the fair value.*
- *The discount for lack of marketability is a certain amount or percentage which is a deduction from the value of an equity as a reflection of the lack of liquidity of the valued bbject. The higher the discount for lack of marketability, the lower the fair value.*
- *Contractual interest rate is the interest rate recorded in the financing contract of PT Bima Multi Finance. The higher the contractual interest rate, the higher the fair value.*
- *Average financing per unit is the average value of the financing contract at PT Bima Multi Finance. The higher the average value of financing per unit, the higher the fair value.*

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Input utama tingkat 3 yang digunakan oleh Bank didapatkan dan dievaluasi sebagai berikut: (lanjutan)

- Rata-rata tertimbang kenaikan penjualan per tahun ditentukan berdasarkan kinerja historis pada periode tahun 2014 - 2021 serta proyeksi kinerja yang dibuat oleh Manajemen PT Bima Multi Finance untuk periode tahun 2022 - 2027 berdasarkan rencana bisnis untuk masa yang akan datang. Semakin tinggi nilai rata-rata tertimbang kenaikan penjualan per tahun, semakin tinggi nilai wajar.
- Tingkat kolektibilitas angsuran ditentukan berdasarkan kinerja historis pada periode tahun 2014 - 2021 serta proyeksi kinerja yang dibuat oleh Manajemen PT Bima Multi Finance untuk periode tahun 2022 - 2027 berdasarkan rencana bisnis untuk masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas angsuran, semakin tinggi nilai wajar.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The main level 3 inputs used by the Bank are derived and evaluated as follows: (continued)

- The weighted average sales increase per year is determined based on historical performance in the period 2014 - 2021 and the performance projections made by the Management of PT Bima Multi Finance for the period 2022 - 2027 based on future business plans. The higher the weighted average value of sales increases per year, the higher the fair value.
- The installment collectibility level is determined based on historical performance in the period 2014 - 2021 and performance projections made by the Management of PT Bima Multi Finance for the period 2022 - 2027 based on future business plans. The higher the installment rate, the higher the fair value.

The table below summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities except those measured at fair value. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2023 and 2022, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/December 31, 2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas	92.820.864	92.820.864	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.493.076.850	1.493.076.850	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	296.297.193	296.297.193	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	915.368.748	915.368.748	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	3.851.497.641	3.856.960.471	Marketable securities - net
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	636.732.554	633.930.554	Securities purchased under resale agreements
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	368.407.923	368.407.923	Interest and sharia income receivables
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang kembali - bersih	18.053.870.975	18.043.073.004	Loans, sharia financing and receivables - net
Tagihan akseptasi	12.474.839	12.474.839	Acceptance receivables
Aset lain-lain	<u>23.076.537</u>	<u>23.076.537</u>	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>25.743.624.124</u>	<u>25.735.486.983</u>	Total financial assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Simpanan nasabah	22.429.180.492	22.429.180.492	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.104.803.359	1.104.803.359	Deposits from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	1.347.639.528	1.382.811.890	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	643.266.730	643.266.730	Securities sold under repurchase agreement
Utang akseptasi	11.959.811	11.959.811	Acceptance payables
Akrual dan liabilitas lain-lain	<u>160.229.698</u>	<u>160.229.698</u>	Accruals and other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>25.697.079.618</u>	<u>25.732.251.980</u>	Total financial liabilities

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)	31 Desember/December 31, 2022		46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas	51.897.124	51.897.124	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.506.565.848	1.506.565.848	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	228.384.427	228.384.427	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	858.327.515	858.327.515	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	2.650.742.054	2.349.677.241	Marketable securities - net
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	839.432.375	831.423.125	Securities purchased under resale agreements
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	391.679.779	391.679.779	Interest and sharia income receivables
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang kembali - bersih	15.286.492.840	15.241.740.231	Loans, sharia financing and receivables - net
Tagihan akseptasi	7.754.446	7.754.446	Acceptance receivables
Aset lain-lain	29.246.923	29.246.923	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>21.850.523.331</u>	<u>21.496.696.659</u>	Total financial assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Simpanan nasabah	19.371.837.637	19.371.837.637	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.334.952.620	1.334.952.620	Deposits from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	1.051.903.552	1.072.026.260	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	240.865.160	240.865.160	Securities sold under repurchase agreement
Akrual dan liabilitas lain-lain	127.766.009	127.766.009	Accruals and other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>22.127.324.978</u>	<u>22.147.447.686</u>	Total financial liabilities

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

a. Efek-efek

Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuota perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*) (tingkat 1 - hierarki nilai wajar). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuota efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (tingkat 2 - hierarki nilai wajar).

b. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (tingkat 3 - hierarki nilai wajar).

The methods and assumptions used to estimate fair value are as follows:

a. Marketable securities

The fair value for securities measured at amortised cost is based on market prices or broker/dealer price quotations (level 1 - fair value hierarchy). Where this information is not available, fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics (level 2 - fair value hierarchy).

b. Loans

Loans are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Efek-efek yang diterbitkan

Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*) (tingkat 1 - hierarki nilai wajar). Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya (tingkat 2 - hierarki nilai wajar).

d. Sebagian besar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar, diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Berikut daftar instrumen keuangan yang nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya, contohnya, instrumen keuangan jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Aset Keuangan:

- Kas
- Giro pada Bank Indonesia
- Giro pada bank lain
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
- Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima
- Tagihan akseptasi
- Aset lain-lain

Liabilitas Keuangan:

- Simpanan nasabah
- Simpanan dari bank lain
- Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali
- Utang akseptasi
- Akrua dan liabilitas lain-lain

47. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang, dan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The methods and assumptions used to estimate fair value are as follows: (continued)

c. Securities issued

The fair value for securities issued measured at amortised cost based on market prices or broker/dealer price quotations (level 1 - fair value hierarchy). The aggregate fair values are calculated based on quoted market prices. For those notes where quoted market prices are not available, a discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term to maturity (level 2 - fair value hierarchy).

d. Majority of the financial instrument not measured at fair value are measured at amortised cost. The following are financial instruments for which their carrying amount are reasonable approximation of fair value because, for example, they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Financial Assets:

- Cash
- Current accounts with Bank Indonesia
- Current accounts with other banks
- Placement with Bank Indonesia and other banks
- Interest and sharia income receivables
- Acceptance receivables
- Other assets

Financial Liabilities:

- Deposits from customers
- Deposits from other banks
- Securities sold under repurchase agreements
- Acceptance payable
- Accrued and other liabilities

47. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dari penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data analisis.

Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang optimal untuk mendukung strategi Bank.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier I dan Modal Tier II.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Modal inti (Tier I)	3.287.238.228	3.201.440.267	Core Capital (Tier I)
Modal pelengkap (Tier II)	532.853.302	674.675.196	Supplementary Capital (Tier II)
Jumlah Modal	3.820.091.530	3.876.115.463	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit	16.999.048.864	16.177.645.218	Risk Weighted Assets for Credit Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional	1.466.732.341	984.238.535	Risk Weighted Assets for Operational Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar	685.118.902	478.131.085	Risk Weighted Assets for Market Risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	20,69%	22,59%	Capital Adequacy Ratio (CAR) with credit and operational risks
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	19,95%	21,97%	Capital Adequacy Ratio (CAR) with credit, operational and market risks
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%	Minimum Capital Adequacy Ratio required

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. The Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk appetite through the capital planning process as well as assess the businesses based on the Bank's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis as supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by Directors as part of the Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and an optimum mix of the different components of capital are maintained to support the Bank's strategy.

The Bank calculated its capital adequacy requirements using the prevailing Bank Indonesia regulation, where the regulatory capital is classified into 2 Tiers, mainly Tier I Capital and Tier II Capital.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The Bank's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

48. DIVESTASI ANAK PERUSAHAAN

Di bulan Desember 2022, Bank telah melakukan divestasi atas 80% kepemilikan di entitas anak, PT Bank Victoria Syariah atau sebanyak 288.000.000 lembar saham kepada PT Victoria Investama Tbk (pemegang saham utama) dengan harga jual sebesar nilai nominal saham dari entitas anak tersebut yaitu sebesar Rp288.000.000.

Nilai tercatat investasi pada entitas anak adalah sebesar Rp288.968.382 dan rugi dari divestasi sebesar Rp968.382 dicatat di akun tambahan modal disetor. Transaksi divestasi ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, oleh karena itu dicatat sesuai dengan PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Setelah divestasi, kepemilikan Bank di PT Bank Victoria Syariah adalah 19,81% dan Bank memiliki pengaruh signifikan, oleh karena itu investasi di PT Bank Victoria Syariah dicatat dengan metode ekuitas.

Pada tanggal 22 Desember 2022, Bank telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas divestasi tersebut melalui surat No. S-301/PB.101/2022 tertanggal 22 Desember 2022. Sejak tanggal 23 Desember 2022, PT Bank Victoria Syariah tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank.

49. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Bank namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini.
Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

48. DIVESTMENT OF SUBSIDIARY

In December 2022, Bank has divested 80% ownership in subsidiary, PT Bank Victoria Syariah which was equivalent to 288,000,000 shares to PT Victoria Investama Tbk (majority shareholder) with selling price equivalent to the nominal value of investment in the subsidiary amounted to Rp288,000,000.

Carrying amount of investment in subsidiary amounted to Rp288,968,382 and loss from divestment of Rp968,382 was recorded in additional paid-in capital account. This divestment was business combination transaction between entities under common control, therefore it was recorded in accordance with SFAS 38 "Business Combination Under Common Control Entities". After divestment, Bank's ownership in PT Bank Victoria Syariah is 19.81% and Bank has significant influence, therefore the investment in PT Bank Victoria Syariah is recognized using equity method.

On December 22, 2022, the Bank has received approval from Financial Service Authority (OJK) for the divestment through letter No. S-301/PB.101/2022 dated December 22, 2022. Since December 23, 2022, PT Bank Victoria Syariah is no longer consolidated into Bank's Financial Statements.

49. NEW ACCOUNTING STANDARD

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Bank's financial statements, but not yet effective are disclosed below.
Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (SFAS),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

49. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari International Financial Reporting Standards ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hak nya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

49. NEW ACCOUNTING STANDARD (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of SFAS 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

Amendment of SFAS 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to SFAS 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022 and
for the years then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

49. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Dampak dari penerapan standar, amandemen/penyesuaian, dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan masih dalam proses evaluasi dan belum dapat ditentukan oleh manajemen.

Dampak dari penerapan standar, amandemen/penyesuaian, dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan masih dalam proses evaluasi dan belum dapat ditentukan oleh manajemen.

50. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Bank di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum").

51. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan 6, 10, 17, 22, 26, 29, 30, 32, 39, 50 dan 51 atas laporan keuangan ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Bank.

49. NEW ACCOUNTING STANDARD (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of SFAS 2 and SFAS 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to SFAS 2 and SFAS 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The Company's management is currently evaluating and has not determined the effect of these SFAS amendments and improvements and ISAK to the financial statement.

The Company's management is currently evaluating and has not determined the effect of these SFAS amendments and improvements and ISAK to the financial statement.

50. PURPOSES OF THE PREPARATION AND ISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been prepared and issue solely for inclusion in the offering of the debt securities of the Bank in Indonesia in reliance in rules and regulations of the Indonesia Financial Service Authority (the "Public Offering").

51. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank has reissued these financial statements, with several changes and additional disclosures in notes 6, 10, 17, 22, 26, 29, 30, 32, 39, 50 and 51 to the financial statements in connection with the proposed Public Offering of the Bank.